KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan TuntunanNya, kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2016, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur patut mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur atas kesediaan untuk mengevaluasi serta memberikan usul/saran dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Manggarai Timur Tahun Anggaran berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila laporan yang kami sajikan ini kurang sesuai atau belum memenuhi harapan, baik menyangkut penyajian data dan penjelasan maupun teknik penyusunannya.

Semoga Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup dan karya kita selanjutnya.

Borong, 27 Maret 2017

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Drs. YOSEPH TOTE, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Dasar Hukum 1
B. Gambaran Umum Daerah 3
1. Kondisi Geografis Daerah 3
2. Gambaran Umum Demografis 4
3. Kondisi Ekonomi 7
a. Potensi Unggulan Daerah 7
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Manggarai Timur 35

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 39
A. Visi dan Misi 39
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 41
C. Prioritas Pembangunan Daerah 42

BAB III URUSAN DESENTRALISASI 43
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 43
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 52
1. Urusan Pendidikan 52
2. Urusan Kesehatan 62
3. Urusan Lingkungan Hidup 76
4. Urusan Pekerjaan Umum 81
5. Urusan Penataan Ruang 91
6. Urusan Perencanaan Pembangunan 93
7. Urusan Perumahan 99
8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 101
9. Urusan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu 102
10. Urusan Koperasi dan UKM 108
11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 113
12. Urusan Ketenagakerjaan 117
13. Urusan Ketahanan Pangan 118
14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 124
15. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128
16. Urusan Perhubungan 131
17. Urusan Komunikasi dan Informatika 135
18. Urusan Pertanahan 139
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 141

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 148
- Bagian Administrasi Pemerintahan 148
- Bagian Administrasi Pembangunan 152
- Bagian Hukum 156
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 159
- Bagian Umum 163
- Bagian Administrasi Perekonomian 168
- Bagian Organisasi 172
- Bagian Humas dan Protokol 176
- Urusan Sekretariat Korpri.....180
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....183
- Inspektorat Daerah.....188
- Urusan Administrasi Keuangan Daerah 193
- Urusan Kepegawaian dan Persandian.....199
- Urusan Penanggulangan Bencana Daerah 203
- Urusan Narkotika.....207
- Urusan Kepamongprajaan 211
- Kecamatan Borong 215
- Kecamatan Kota Komba 220
- Kecamatan Lamba Leda 224
- Kecamatan Poco Ranaka 228
- Kecamatam Elar 233
- Kecamatan Sambi Rampas 237
- Kecamatan Poco Ranaka Timur 241
- Kecamatan Rana Mese 245
- Kecamatan Elar Selatan 250

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 254
22. Urusan Sosial 259
23. Urusan Kebudayaan 264
24. Urusan Statistik 268
25. Urusan Perpustakaan 270
26. Urusan Kearsipan 273

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 274
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 274
2. Urusan Pertanian dan Peternakan 278
3. Urusan Kehutanan 286
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 291

5. Urusan Pariwisata 295
6. Urusan Perdagangan 297
7. Urusan Perindustrian 299
8. Urusan Perkebunan 300
9. Urusan Transmigrasi 306
D. Indikator Kinerja Kunci 308
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 314
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 314
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 325
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 326
A. Kerjasama Antar Daerah.....326
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....326
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 329
D. Pembinaan Batas Wilayah 330
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 330
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 331
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 331
BAB VI PENUTUP 340
LAMPIRAN I : DATA PELAYANAN VAKSINASI ANTRAX DAN SE TAHUN 2016
LAMPIRAN II : LUAS TANAM, PANEN, PRODUKTIFITAS DAN PRODUKSI KOMODITI HORTIKULTURA SAYUR-SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN
LAMPIRAN III : INDIKATOR KINERJA KUNCI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 104);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 126);
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120.04/10174/OTDA, tanggal 23 Desember 2016, tentang : Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Letak Wilayah

Secara astronomis Kabupaten Manggarai Timur terletak antara : 8°,14 – 9°,00 Lintang Selatan dan 120°,20 BT – 120°,55 Bujur Timur.

b. Batas Administrasi Pemerintahan

Timur : Kabupaten Ngada
Barat : Kabupaten Manggarai;
Utara : Laut Flores;
Selatan : Laut Sawu.

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan keadaan 31 Desember 2016 terdiri dari 9 Kecamatan, 159 Desa dan 17 Kelurahan, dengan rincian per Kecamatan seperti pada tabel berikut :

Data Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan
di Kabupaten Manggarai Timur Keadaan 31 Desember 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1.	Lamba Leda	24	0	24
2.	Elar	14	1	15`
3.	Poco Ranaka	21	3	24
4.	Kota Komba	19	3	22
5.	Sambi Rampas	14	6	20
6.	Borong	15	3	18
7.	Rana Mese	21	0	21
8.	Poco Ranaka Timur	18	0	18
9.	Elar Selatan	13	1	14
J u m l a h		159	17	176

c. Topografis dan Luas Wilayah

Bentang alam wilayah Kabupaten Manggarai Timur didominasi oleh lereng-lereng dengan kemiringan di atas 40° sebesar 81,60 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

Luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2.642,93 KM².

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur keadaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 293.031 orang, terdiri dari : Laki-laki: 144.910 jiwa dan Perempuan : 148.121 jiwa, dengan sebaran penduduk per Kecamatan seperti pada tabel berikut.

Tabel : Data Sebaran Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Keadaan 31 Desember 2016 :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Borong	19.994	21.534	41.528
2.	Poco Ranaka	17.315	17.768	35.083
3.	Lamba Leda	17.692	18.241	35.933
4.	Sambi Rampas	14.878	14.918	29.796
5.	Elar	8.551	8.637	17.188
6.	Kota Komba	26.503	27.626	54.129
7.	Rana Mese	15.797	15.576	31.373
8.	Poco Ranaka Timur	14.528	14.550	29.078
9.	Elar Selatan	9.652	9.271	18.923
Jumlah		144.910	148.121	293.031

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Timur

b. Komposisi Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Keadaan per 31 Desember 2016 Menurut Struktur Usia per Jenis Kelamin seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel : Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia per Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Penduduk	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0 – 4	13.173	13.482	26.655	
2.	5 – 9	13.730	14.312	28.042	
3.	10 – 14	14.472	14.320	28.792	
4.	15 – 19	15.126	15.514	30.640	
5.	20 – 24	12.485	13.535	26.020	
6.	25 – 29	11.631	12.010	23.641	
7.	30 – 34	10.636	11.267	21.903	
8.	35 – 39	11.465	10.358	21.823	

9.	40 – 44	8.491	8.726	17.217	
10.	45 – 49	8.313	8.340	16.653	
11.	50 – 54	6.742	6.612	13.354	
12.	55 – 59	5.567	5.557	11.124	
13.	60 – 64	4.480	5.107	9.587	
14.	65-69	3.691	3.956	7.647	
15.	70-74	2.841	2.951	5.792	
16.	>75	2.067	2.074	4.141	
Total		144.910	148.121	293.031	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Timur 2016

c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel : Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Keadaan 31 Desember 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket.
1.	Belum/Tidak Bekerja	71.893	
2.	Mengurus Rumah Tangga	16,582	
3.	Pelajar/Mahasiswa	66,253	
4.	Pensiunan	403	
5.	Pegawai Negeri Sipil	3,095	
6.	Tentara Nasional Indonesia	38	
7.	Kepolisian RI	74	
8.	Perdagangan	95	
9.	Petani/Pekebun	117,920	
10.	Peternak	39	
11.	Nelayan/Perikanan	1,310	
12.	Industri	4	
13.	Konstruksi	7	
14.	Transportasi	35	
15.	Karyawan Swasta	112	
16.	Karyawan BUMN	78	
17.	Karyawan BUMD	48	
18.	Karyawan Honorer	2,261	
19.	Buruh Harian Lepas	1,462	
20.	Buruh Tani/Perkebunan	1,025	
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	119	
22.	Buruh Peternakan	1	
23.	Pembantu Rumah Tangga	223	
24.	Tukang Listrik	2	
25.	Tukang Batu	143	
26.	Tukang Kayu	197	
27.	Tukang Sol Sepatu	1	
28.	Tukang Las/Pandai Besi	27	
29.	Tukang Jahit	59	
30.	Tukang Gigi	0	
31.	Penata Rias	6	
32.	Penata Busana	8	
33.	Mekanik	7	
34.	Perancang Busana	0	

35.	Penterjemah	1	
36.	Imam Mesjid	50	
37.	Pendeta	6	
38.	Pastor	42	
39.	Wartawan	14	
40.	Duta Besar	0	
41.	Bupati	1	
42.	Wakil Bupati	1	
43.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	30	
44.	Dosen	0	
45.	Guru	3,286	
46.	Pilot	0	
47.	Pengacara	0	
48.	Notaris	1	
49.	Konsultan	13	
50.	Dokter	11	
51.	Bidan	317	
52.	Perawat	653	
53.	Apoteker	7	
54.	Pelaut	0	
55.	Sopir	847	
56.	Pedagang	126	
57.	Perangkat Desa	156	
58.	Kepala Desa	159	
59.	Biarawati	83	
60.	Wiraswasta	3,594	
61.	Lainnya	106	
Total		293,031	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Timur

d. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Kabupaten Manggarai Timur menurut tingkat pendidikan per 31 Desember 2016 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Penduduk	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Belum/tidak sekolah	28.565	34.063	62.628	
2.	Belum/tidak tamat SD	25.759	25,077	50.836	
3.	SD	56.245	61.079	117.324	
4.	SLTP	13.328	11.458	24.786	
5.	SLTA	15.471	12.028	27.499	
6.	Diploma I/D II	779	792	1.571	
7.	Diploma III	1.005	1.262	2.267	
8.	S1	3.674	2.343	6.017	
9.	S2	84	19	103	
10.	S3	–	–	–	
Total		144.910	148.121	293.031	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Timur

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Manggarai Timur memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan dan tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

1) Potensi Pertanian

a) Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Luas Lahan pertanian di Kabupaten Manggarai Timur keadaan 31 Desember 2016 adalah 232.125 HA, terdiri dari :
  - ✓ Lahan sawah (Fungsional) : 14.085 Ha;
  - ✓ Lahan pertanian bukan sawah : 218.040 Ha, dengan rincian seperti tergambar pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel : Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/non PU	Tadah Hujan	Jumlah
1.	Borong	100	320	1.400	100	30	1.950
2.	Kot Komba	-	156	2.029	27	349	2.561
3.	Elar	33	342	365	73	211	1.024
4.	S. Rampas	340	181	247	-	438	1.206
5.	Poco Ranaka	-	-	747	-	794	1.541
6.	Lamba Leda	-	283	357	309	470	1.419
7.	Elar Selatan	-	188	-	-	1.064	1.252
8.	P.Ranaka Timur	-	147	1.831	-	-	1.978
9.	Rana Mese	145	954	40	-	15	1.154
Jumlah		618	2.571	7.016	509	3.371	14.085

Tabel : Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Penggunaannya per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Lahan/ Tegalan Kebun (Ha)	Lahan/ Ladang/ Huma (Ha)	Perke bunan (Ha)	Lahan Tani/ Hutan Rakyat (Ha)	Lahan/ Padang Penggem balaan (Ha)	Lahan sementara tidak diusahakan (Ha)	Lain Nya	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Borong	2.550	1.848	2.657	1.630	-	5.614	1.526	15.825
2.	Kota Komba	350	2.475	10.235	2.100	4.500	5.300	17.214	42.174
3.	Elar	3.573	2.349	4.637	1.941	332	8.207	3.247	24.286
4.	Sambi Rampas	4.360	7.394	1.030	2.572	2.361	9.349	11.376	38.442
5.	Lamba Leda	3.932	1.424	-	430	-	5.456	9.425	20.667
6.	Poco Ranaka	2.365	-	10.386	385	-	3.115	1.017	17.268
7.	Elar Selatan	5.701	1.579	9.250	2.390	2.250	2.150	2.036	25.356

8.	Poco Ranaka Timur	2.595	62	5.235	767	-	170	1.683	10.512
9.	Rana Mese	12.004	3.570	3.096	311	-	2.162	2.367	23.510
Jumlah		37.430	20.701	46.526	12.526	9.443	41.523	49.891	218.040

❖ Keadaan Areal Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2016 seperti pada tabel berikut :

- Komoditi Padi Sawah

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	3.428	2.881	3,60	10.372
2.	Kota Komba	5.231	4.664	4,10	19.122
3.	Elar	1.519	1.013	3,90	3.951
4.	Sambi Rampas	1.594	1.406	5,40	7.592
5.	Lamba Leda	2.227	1.957	3,70	7.241
6.	Poco Ranaka	2.675	2.240	3,80	8.512
7.	Elar Selatan	1.665	1.317	4,00	5.268
8.	Rana Mese	2.558	2.212	3,80	8.406
9.	P. Ranaka Timur	2.898	3.011	3,80	11.442
Jumlah		23.795	20.701	3,96	81,905

- Komoditi padi lahan kering

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	93	93	1,60	148,80
2.	Kota Komba	1.026	406	1,10	446,60
3.	Elar	0	124	1,50	186,00
4.	Sambi Rampas	129	122	2,60	317.20
5.	Lamba Leda	566	474	1,10	521,40
6.	Poco Ranaka	3	3	0,70	2,10
7.	Elar Selatan	39	130	1,20	156,00
8.	Rana Mese	47	37	1,50	55,50
9.	P.Ranaka Timur	6	6	1,00	6,00
Jumlah		1.909	1.395	1,32	1,840

- Komoditi Jagung

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	412	662	3,13	2.072,06
2.	Kota Komba	2.583	1.193	2,30	2.743,90
3.	Elar	450	397	1,33	528
4.	Sambi Rampas	691	223	6,00	1.338
5.	Lamba Leda	1.061	102	2,80	285,60
6.	Poco Ranaka	32	137	3,00	411

7.	Elar Selatan	211	92	2,50	230
8.	Rana Mese	869	410	4,80	1.968
9.	P. Ranaka Timur	478	2016	2,60	535,6
Jumlah		6.787	3.422	2.96	10.112,16

- Komoditi Kacang Kedelai

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	–	–	–	–
2.	Kota Komba	15	–	–	–
3.	Elar	53	73	0.60	43,8
4.	Sambi Rampas	–	–	–	–
5.	Lamba Leda	3	–	–	–
6.	Poco Ranaka	–	–	–	–
7.	Elar Selatan	–	–	–	–
8.	Rana Mese	7	0	–	0
9.	P. Ranaka Timur	5	0	–	0
Jumlah		83,00	73,00	0,60	43,80

- Komoditi Kacang Hijau

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	21,00	10,00	*0,70*	7.00
2.	Kota Komba	33,00	17,00	0,90	15,30
3.	Elar	85,00	119,00	0,80	95,20
4.	Sambi Rampas	64,00	12,00	0,80	9,60
5.	Lamba Leda	96,00	–	–	–
6.	Poco Ranaka	–	–	–	–
7.	Elar Selatan	–	–	–	–
8.	Rana Mese	–	–	–	–
9.	P. Ranaka Timur	–	–	–	–
Jumlah		299,00	158,00	0,80	127,10

- Kacang Tanah

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	21	10	1,06	10,6
2.	Kota Komba	23	–	–	–
3.	Elar	–	–	–	–
4.	Sambi Rampas	2	–	–	–
5.	Lamba Leda	–	–	–	–
6.	Poco Ranaka	–	–	–	–
7.	Elar Selatan	–	2	–	0,2
8.	Rana Mese	–	–	–	–
9.	P. Ranaka Timur	–	–	–	–
Jumlah		46,00	12,00	0,90	10,80

- Komoditi Ubi Kayu

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	130	130	6,34	824,20
2.	Kota Komba	642	403	5,00	2.015,00
3.	Elar	110	261	2,53	660,33
4.	Sambi Rampas	104	73	8,00	584,00
5.	Lamba Leda	101	81	5,00	405,00
6.	Poco Ranaka	78	62	6,50	403,00
7.	Elar Selatan	0	42	8,00	336,00
8.	Rana Mese	37	100	6,00	600,00
9.	P. Ranaka Timur	87	125	6,00	750,00
Jumlah		1,289	1.277	5,15	6.577,53

- Ubi Jalar

No	Kecamatan	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produkti vitas (Ton/HA)	Produksi (Ton)
1.	Borong	180	90	4,12	370,80
2.	Kota Komba	227	164	4,00	656,00
3.	Elar	6	97	5,80	562,60
4.	Sambi Rampas	63	44	7,00	308,00
5.	Lamba Leda	75	31	4,67	144,70
6.	Poco Ranaka	43	44	5,20	228,80
7.	Elar Selatan	7	4	7,00	28,00
8.	Rana Mese	3	18	3,80	68,40
9.	P. Ranaka Timur	50	65	6,00	390,00
Jumlah		654	557	4,95	2.757,30

b) Perkebunan

Sampai dengan keadaan per 31 Desember 2016 komoditi perkebunan masih merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Manggarai Timur karena sebagian besar wilayahnya memiliki potensi untuk pengembangan tanaman perkebunan serta luasnya lahan tidur yang dapat dikembangkan untuk tanaman perkebunan.

Komoditi yang paling diunggulkan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah kopi (arabika dan robusta), kakao, cengkeh, kelapa, kemiri, jambu mente, pinang, vanili, tembakau, casiviera, lontar/aren, kapuk, lada/merica, asam dan jarak pagar dan pala yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan. Menurut data statistik perkebunan

oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016, luas areal pengembangan dan budidaya komoditi perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 42.456,48 Ha yang terbagi atas 16 (enam belas) komoditi, dengan total produktivitas sebesar 488,01 Kg/Ha dan jumlah petani perkebunan sebanyak 83.932 KK.

Kesuksesan perkebunan Kabupaten Manggarai Timur :

1. Suatu prestasi yang patut kita banggakan telah dicapai masyarakat perkopian Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 yang lalu, dimana kopi arabika dan robusta yang berasal dari daerah kita yang tercinta ini meraih predikat juara 1 pada kontes/festival kopi nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Indutri Kopi Indonesia (AEKI) pada tanggal 19 Oktober 2015 di Banyuwangi Jawa Timur.
2. Atas prestasi ini selanjutnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Spanyol melalui Kantor Atase Perdagangan Madrid bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI mengundang dan memfasilitasi Asosiasi Petani Kopi dari Kabupaten Manggarai Timur yakni Asnikom yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur bersama seorang petani kopi mengikuti Expo produk makanan (Foot Expo) di Ifema Madrid Spanyol pada tanggal 10 – 11 November 2016.
3. Langkah strategis pada sektor perkopian Manggarai juga telah ditempuh secara bersama oleh tiga pemerintah Kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat yaitu upaya perlindungan hukum terhadap kekhasan dan keunggulan kopi Manggarai melalui perjuangan penerbitan sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai. Usaha ini sudah separuh jalan, dimana proses pendaftaran buku persyaratan Indikasi Geografis telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual ke lapangan di tiga wilayah Manggarai Raya oleh Tim Ahli dari pusat yang sudah pasti akan dilaksanakan dalam tahun 2017 ini.

- Data Luas pengembangan dan budidaya komoditi perkebunan pada tahun 2016 menurut jenis komoditi, luas areal, produksi, produktivitas dan jumlah petani dapat disimak pada tabel berikut ini :

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	1,141.80	901.28	39.08	2,082.16	621.00	689.02	4,279
2.	JAMBU MENTE	224.27	1,427.11	469.54	3,345.92	648.32	454.29	4,980
3.	KOPI	4,039.39	14,168.85	882.45	19,221.46	5,401.89	727.78	33,150
	A. ARABIKA	1,134.99	4,743.82	220.00	6,229.58	1,476.95	311.34	8,687
	B. ROBUSTA	2,904.40	9,425.03	662.45	12,991.88	3,924.94	416.44	24,463
4.	KAKAO	1,408.55	1,438.29	68.65	2,915.49	906.78	630.46	6,355
5.	KEMIRI	2,333.50	7,592.50	328.00	10,254.00	4,395.43	578.92	26,210
6.	KAPUK	58.65	233.00	9.00	300.65	109.02	467.90	926
7.	CENGKEH	1,991.00	1,683.00	92.50	3,766.50	882.66	524.46	5,888
8.	PINANG	87.80	178.11	19.32	285.23	94.00	527.74	719
9.	VANILI	42.02	11.46	1.00	54.48	4.60	401.40	303
10.	LADA/MERICA	9.55	13.45	0.20	23.20	3.11	231.04	186
11.	ASAM	2.00	19.72	3.00	24.72	11.35	575.56	133
12.	JARAK PAGAR	1.75	5.25	-	7.00	0.14	25.71	33
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 60	(Panen) 60	-	60.00	26.78	446.33	359
14.	AREN/LONTAR	13.75	36.96	3.40	54.11		369,530(Liter)	149
15.	CASSIVERA	3.50	29.76	7.00	40.26	18.60	625.00	122
16.	PALA	21.00	0.30	-	21.30	-	-	140
T O T A L		11,438.53	27,799.04	1,923.14	42,456.48		488.01	83,932

- Jenis komoditi perkebunan unggulan berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2016 per kecamatan dapat dilihat pada tabel–tabel berikut ini :
  - ✓ Kecamatan Lamba Leda

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	287.00	157.00	13.00	457.00	36.53	232.7	968
2.	JAMBU MENTE	104.70	432.00	59.62	596.32	174.00	403	1,412
3.	KOPI	86.00	276.00	12.00	374.00	280.27	584.15	903
	A. ARABIKA	28.00	112.000	5.00	145.00	53.760	480	524
	B. ROBUSTA	58.00	164.00	7.00	229.000	226.51	1,381	379
4.	KAKAO	265.40	81.54	2.40	349.34	64.00	785	864
5.	KEMIRI	464.75	2,675.00	22.00	3,161.75	1,132	423	7,920
6.	KAPUK	0.85	7.00	–	7.85	3.75	536	25
7.	CENGKEH	55.00	67.00	–	122.00	12.60	188	104
8.	VANILI	6.70	–	–	6.70	–	–	100
9.	PINANG	9.00	18.55	–	27.55	11.76	634	58
10.	LADA/MERICA	2.65	2.85	–	5.50	0.46	161	156
11.	ASAM	2.00	8.62	–	10.62	5.80	672.85	13
12.	JARAK PAGAR	1.75	1.25	–	3.00	0.14	108	9
13.	TEMBAKAU	10 (Tanam)	10 (Tanam)	–	10.00	3.20	320	30
14.	AREN/LONTAR	4.00	17.00	1.40	22.40		360.000 Liter	35
15.	CASSIVERA	–	–	–	–	–	–	–
16.	PALA	2.00	–	–	2.00	–	–	24
T O T A L		1,301.80	3,753.81	110.42	5,156.03		698.08	12,621

✓ Kecamatan Poco Ranaka

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JLH			
1.	KELAPA	9	15		24	8	501.3	74
2.	JAMBU MENTE	-	-	-	-	-	-	-
3.	KOPI	1,351	4,980	107.00	6,438	1,931	709.63	12,552
	A. ARABIKA	198	698	15.00	911	215.8	309.11	1,040
	B. ROBUSTA	1,153	4,282	92.00	5,527	1,715.0	400.51	11,512
4.	KAKAO	116	34.8	-	151	18.00	517.99	423
5.	KEMIRI	84	59	12.00	155	47.00	796.61	816
6.	KAPUK	-	-	-	-	-	-	-
7.	CENGKEH	312	377	-	689	196	519.18	1,064
8.	VANILI	-	-	-	-	-	-	-
9.	PINANG	-	-	-	-	-	-	-
10.	LADA/MERICA	2.5	3.5	-	6	1	243	12
11.	ASAM	-	-	-	-	-	-	-
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	4 (Tanam)	4 (Panen)	-	4	2.83	708	27
14.	AREN/LONTAR	1.8	3.5	-	5.3	3	750 (Liter)	13
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
16.	PALA	3.00			3.00			23
T O T A L		1,883	5,476.75	119.00	7,474.95		593.14	15,004

✓ Kecamatan Poco Ranaka Timur

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	1.00	4.50		5.50	-	-	144
2.	JAMBU MENTE	8.00	32.00	25.00	65.00	17.00	531.25	123
3.	KOPI	587.00	2,117.80	130.00	2,834.80	1,149.48	381.32	3,257
	a. ARABIKA	190.00	765.00	47.00	1,002.00	392.58	513.18	1,153
	b. ROBUSTA	397.00	1,352.80	83.00	1,832.80	756.90	559.51	2,104
4.	KAKAO	76.40	37.00	34.75	148.15	11.62	314.11	423
5.	KEMIRI	109.00	235.00	41.00	385.00	65.38	278.21	1,022
6.	KAPUK	-	-	-	-	-	-	-
7.	CENGKEH	170.00	85.00	3.00	258.00	18.85	221.76	336
8.	VANILI	-	-	-	-	-	-	-
9.	PINANG	5.00	10.86	1.32	17.18	2.56	235.73	32
10.	LADA/MERICA	-	-	-	-	-	-	-
11.	ASAM	-	-	-	-	-	-	-
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	10 (Tanam)	10 (Panen)	-	10.00	3.65	365.00	55
14.	AREN/LONTAR	-	-	-	-	-		-
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
16.	PALA	-	-	-	-			-
T O T A L		966.40	2,532.16	235.07	3,723.63		431.25	5,392

✓ Kecamatan Borong

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	183.00	72.68	0.50	256.18	17.14	235.79	427
2.	JAMBU MENTE	-	161.69	35.25	196.94	91.82	567.87	295
3.	KOPI	309.25	1,365.24	154.67	1,829.16	452.15	291.11	2,690
	A. ARABIKA	158.25	563.40	1.00	722.65	148.85	264	1,675
	B. ROBUSTA	151.00	801.84	153.67	1,106.51	303.30	378	1,015
4.	KAKAO	145.75	243.00	3.50	392.25	59.82	246	1,269
5.	KEMIRI	30.00	113.50	5.00	148.50	178.1	1,568.72	322
6.	KAPUK	-	10.00	9.00	19.00	4.40	440	56
7.	CENGKEH	320.00	92.00	8.00	420.00	16.73	182	895
8.	PINANG	34.00	31.75	6.00	71.75	20.63	650	154
9.	VANILI	13.00	5.00	1.00	19.00	1.60	320	91
10.	LADA/MERICA	-	-	-	-	-	-	-
11.	ASAM	-	2.10	-	2.10	1.00	476	21
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 5	(Panen) 5	-	5.00	2.50	500	68
14.	AREN/LONTAR	-	-	-	-	-	-	-
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
16.	PALA	6.00			6.00			38
T O T A L		1,046.00	2,101.96	222.92	3,365.88		5,828.66	6,326

✓ Kecamatan Rana Mese

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	178.00	19.00	7.00	204.00	10.65	560.53	294
2.	JAMBU MENTE	20.57	152.42	4.67	1,402.66	79.00	518.30	201
3.	KOPI	301.00	746.00	178.00	1,225.00	107.00	189.78	1,945
	a. ARABIKA	205.00	98.76	52.00	355.76	27.00	273	824
	b. ROBUSTA	206.65	547.66	122.78	877.09	95.23	174	1,026
4.	KAKAO	156.00	110.00	10.00	276.00	47.00	427	648
5.	KEMIRI	81.00	489.00	27.00	597.00	221.00	452	1,412
6.	KAPUK	54.00	153.00	-	207.00	56.00	366	751
7.	CENGKEH	201.00	98.00	1.00	300.00	24.00	245	673
8.	PINANG	10.00	26.00	2.00	38.00	6.00	231	92
9.	VANILI	14.65	1.00	-	15.65	1.00	-	64
10.	LADA/MERICA	-	-	-	-	-	-	-
11.	ASAM	-	4.00	2.00	6.00	1.00	250	50
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 10	(Panen) 10	-	10.00	8.00	800	36
14.	AREN/LONTAR	-	-	-	-	-	-	-
15.	CASSIVERA	3.50	28.00	7.00	38.50	18.60	664	114
16.	PALA	4.00	0.30		4.00			18
T O T A L		1,144.37	1,736.84	235.45	4,331.66		451.03	6,203

✓ Kecamatan Kota Komba

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	252.00	448.00	6.00	706.00	456.00	1,017.86	1,587
2.	JAMBU MENTE	35.00	362.00	277.00	674.00	188.00	519.34	1,675
3.	KOPI	588.00	2,035.00	126.00	2,749.00	699.00	328.14	6,135
	A. ARABIKA	301.00	736.00	42.00	1,079.00	276.00	375.00	1,860
	B. ROBUSTA	287.00	1,299.00	84.00	1,670.00	423.00	325.64	4,275
4.	KAKAO	457.00	631.00	4.00	1,092.00	568.34	900.70	1,605
5.	KEMIRI	393.00	1,546.00	-	1,939.00	1,476.00	954.72	5,120
6.	KAPUK	2.00	28.00	-	30.00	13.87	495.36	18
7.	CENGKEH	572.50	780.00		1,352.50	561.55	719.94	2,176
8.	PINANG	22.00	41.25	-	63.25	24.00	581.82	184
9.	VANILI	2.67	5.46	-	8.13	2.00	366	10
10.	LADA/MERICA	1.50	2.50	-	4.00	-	-	7
11.	ASAM	-	4.00	-	4.00	3.00	750.00	42
12.	JARAK PAGAR	-	4.00	-	4.00	-	-	24
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 5	(Panen) 5	-	5.00	3.80	475.00	45
14.	AREN/LONTAR	1.00	2.46	-	3.46	-	2500 (Liter)	24
15.	CASSIVERA		1.76	-	1.76	-	-	8
16.	PALA	6.00			6.00			37
T O T A L		2,335.00	5,896.43	130.00	8,642.10		680	18,697

✓ Kecamatan Elar

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	121.00	117.80	3.78	242.58	81.10	688.5	587
2.	JAMBU MENTE	56.00	212.00	68.00	336.00	49.00	231.1	1,142
3.	KOPI	572.00	1,384.00	119.00	2,075.00	291.00	212.5	2,647
	A. ARABIKA	46.00	886.00	48.00	980.00	184.00	207.7	432
	B. ROBUSTA	526.00	498.00	71.00	1,095.00	107.00	214.9	2,215
4.	KAKAO	83.00	51.00	5.00	139.00	43.00	843.1	317
5.	KEMIRI	104.00	342.00	185.00	631.00	312.00	912.3	1,494
6.	KAPUK	1.80	14.00	-	15.80	4.00	285.7	48
7.	CENGKEH	150.50	78.00	79.50	308.00	17.20	220.5	248
8.	PINANG	3.00	24.00	5.00	32.00	17.20	716.7	138
9.	VANILI	5.00	-	-	5.00	-	-	38
10.	LADA/MERICA	-	-	-	-	-	-	-
11.	ASAM	-	1.00	1.00	2.00	0.55	550	7
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 5	(Tanam) 5	-	5.00	3.80	253	25
14.	AREN/LONTAR	2.00	4.00	2.00	8.00		1880 (Liter)	24
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
16.	PALA							
T O T A L		1,103.30	2,232.80	468.28	3,799.38		636.7	6,715

✓ Kecamatan Elar Selatan

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	1.80	3.30	0.80	5.90	0.60	182	14
2.	JAMBU MENTE	-	13.00	-	13.00	6.50	500	26
3.	KOPI	188.92	975.00	58.00	1,221.92	311.00	240.18	2,355
	A. ARABIKA	96.17	664.00	9.00	769.17	115.00	173.19	743
	B. ROBUSTA	92.75	311.00	49.00	452.75	196.00	630.23	1,612
4.	KAKAO	80.00	94.00	7.00	181.00	37.00	393.62	385
5.	KEMIRI	1,064.00	1,748.00	24.00	2,836.00	748.00	427.92	7,116
6.	KAPUK	-	-	-	-	-	-	-
7.	CENGKEH	150.00	38.00	-	188.00	9.00	236.84	227
8.	PINANG	4.80	11.70	3.00	19.50	4.00	341.88	41
9.	VANILI	-	-	-	-	-	-	-
10.	LADA/MERICA	2.95	4.60	0.20	7.75	1.80	391.30	11
11.	ASAM	-	-	-	-	-	-	-
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	-	-	-	-	-	-	-
14.	AREN/LONTAR	-	-	-	-	-	-	-
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
16.	PALA							
T O T A L		1,492.47	2,887.60	93.00	4,473.07		409.60	10,175

✓ Kecamatan Sambi Rampas

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	69.00	53.00	4.00	126.00	79.50	1,500	408
2.	JAMBU MENTE	-	71.00	-	71.00	56.80	800	223
3.	KOPI	133.00	331.25	-	488.00	161.96	487.96	2,325
	A. ARABIKA	99.00	164.00	-	263.00	63.75	389	1,119
	B. ROBUSTA	34.00	167.25	-	225.00	98.21	587.20	1,206
4.	KAKAO	28.00	194.00	-	222.00	194.00	1,000	1,337
5.	KEMIRI	44.00	366.00	-	4.00	219.60	600	1,487
6.	KAPUK	-	23.00	-	23.00	8.05	350	458
7.	CENGKEH	30.70	44.50	-	75.20	26.70	600	382
8.	PINANG	-	16.00	-	16.00	25.60	1,600	722
9.	VANILI	-	-	-	-	-	-	-
10.	LADA/MERICA	-	-	-	-	-	-	-
11.	ASAM	-	-	-	-	-	-	-
12.	JARAK PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 7	(Panen) 7	-	7.00	4.90	700	24
14.	AREN/LONTAR	-	-	-	-	-	-	-
15.	CASSIVERA	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L		311.70	1,105.75	4.00	1,032.20		892.80	7,366

- Data Perkembangan : Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah KK tahun 2014 sampai dengan 2016, seperti tampak pada tabel-tabel di bawah ini.

❖ **Tahun 2014**

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KOPI							
	A. ARABIKA	1,442	5,361	267.32	7,071	2,421.93	452	16,005
	B. ROBUSTA	2,562.93	11,966.99	1,072.25	15,602.17	3,727.57	311	24,670
2.	JAMBU MENTE	734	2,810	325	3,868.73	738.82	263	3,544
3.	KELAPA	762	1,615	212	2,590	1,420.29	879	5,567
4.	CENGKEH	1,257	1,437	19	2,713	615.03	428	9,983
5.	KAKAO	2,549	3,351.05	168.32	6,069	2,189.73	653	16,402
6.	FANILI	34.65	62.22	7.23	104.1	5.96	96	488
7.	KEMIRI	2,451.26	7,286.71	486.05	10,224.02	7,104.15	975	17,271
8.	PINANG	237.12	323.31	79.78	640.61	220.06	681	2,620
9.	KAPUK	124.05	461.9	111.6	697.55	176.87	383	2,234
10.	ASAM	9.75	21.4	4.2	35.35	12.25	572	223
11.	AREN	56	131.6	5.1	192.7	74.23(Barel)	564 (Liter)	470
12.	JARAK PAGAR	3	10	-	13	-	-	82
13.	CASSIVERA	13.6	6.85	-	20.45	-	-	77
14.	TEMBAKAU	-	236	-	236	119.5	506	1,422
15.	LADA/MERICA	2.6	2		4.6	0.77	385	19
T O T A L		12,239	35,083	2,757.85	50,082			101,077

❖ **Tahun 2015**

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	1,041.70	860.35	39.20	1,941.25	631.28	733.75	4,108
2.	JAMBU MENTE	245.20	1,844.94	435.00	2,525.14	670.83	363.61	5,623
3.	KOPI							
	A. ARABIKA	1,271.32	3,536.33	203.00	5,010.65	1,192.95	337.34	13,133
	B. ROBUSTA	2,908.97	9,339.23	855.65	13,103.85	2,477.46	265.27	25,450
4.	KAKAO	1,961.35	2,671.44	40.95	4,673.74	1,477.23	552.97	14,404
5.	KEMIRI	1,044.15	6,234.48	241.05	7,519.68	4,030.92	646.55	16,302
6.	KAPUK	73.80	272.75	2.45	349.00	101.34	371.55	1,740
7.	CENGKEH	1,646.27	1,363.73	5.75	3,015.75	748.27	548.69	9,349
8.	PINANG	95.30	209.65	19.00	323.95	132.19	630.53	2,602
9.	VANILI	9.30	16.12	_	25.42	3.70	229.53	235
10.	LADA/MERICA	8.70	11.95	0.20	20.85	2.74	229.29	367
11.	ASAM	3.40	16.52	3.20	23.12	7.57	458.23	370
12.	JARAK PAGAR	0.80	4.75	_	5.55	1.85	389.47	86
13.	TEMBAKAU	81.50	81.50	_	81.50	24.78	304.05	257
14.	AREN/LONTAR	10.80	26.70	0.50	38.00	10.70	400.75	394
15.	CASSIVERA	22.50	33.00	7.00	62.50	19.00	575.76	151
T O T A L		10,425.06	26,523.44	1,852.95	38,719.95		488.01	94,571

❖ **Tahun 2016**

NO	JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)				PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH (KK)
		TBM	TM	TT/TR	JUMLAH			
1.	KELAPA	1,141.80	901.28	39.08	2,082.16	621.00	689.02	4,279
2.	JAMBU MENTE	224.27	1,427.11	469.54	3,345.92	648.32	454.29	4,980
3.	KOPI	4,039.39	14,168.85	882.45	19,221.46	5,401.89	727.78	33,150
	A. ARABIKA	1,134.99	4,743.82	220.00	6,229.58	1,476.95	311.34	8,687
	B. ROBUSTA	2,904.40	9,425.03	662.45	12,991.88	3,924.94	416.44	24,463
4.	KAKAO	1,408.55	1,438.29	68.65	2,915.49	906.78	630.46	6,355
5.	KEMIRI	2,333.50	7,592.50	328.00	10,254.00	4,395.43	578.92	26,210
6.	KAPUK	58.65	233.00	9.00	300.65	109.02	467.90	926
7.	CENGKEH	1,991.00	1,683.00	92.50	3,766.50	882.66	524.46	5,888
8.	PINANG	87.80	178.11	19.32	285.23	94.00	527.74	719
9.	VANILI	42.02	11.46	1.00	54.48	4.60	401.40	303
10.	LADA/MERICA	9.55	13.45	0.20	23.20	3.11	231.04	186
11.	ASAM	2.00	19.72	3.00	24.72	11.35	575.56	133
12.	JARAK PAGAR	1.75	5.25	-	7.00	0.14	25.71	33
13.	TEMBAKAU	(Tanam) 60	(Panen) 60	-	60.00	26.78	446.33	359
14.	AREN/LONTAR	13.75	36.96	3.40	54.11		369,530(Liter)	149
15.	CASSIVERA	3.50	29.76	7.00	40.26	18.60	625.00	122
16.	PALA	21.00	0.30	-	21.30	-	-	140
	T O T A L	11,438.53	27,799.04	1,923.14	42,456.48		488.01	83,932

Dari hasil perbandingan pada tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, tingkat produksi tanaman perkebunan yang relatif tinggi (panen raya) adalah pada tahun 2014.

- Perkembangan Harga Komoditi di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014 s/d 2016, sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

  Khusus komoditi Kopi Arabika, mutu produk komoditi perkebunan yang diolah secara asalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga tawar di tingkat petani terhadap pelaku usaha serta panjangnya rantai pemasaran oleh petani. Akan tetapi, sudah ada kelompok tani yang telah melakukan pengolahan produk komoditi perkebunan (Kopi Arabika) dengan standar ekspor telah merasakan harga yang jauh lebih tinggi. Perkembangan harga ini diharapkan mendorong petani atau kelompok tani untuk mengolah produk komoditi dengan standar ekspor agar memperoleh harga yang lebih baik. Perbedaan harga dimaksud tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel : Perkembangan Harga Komoditi tahun 2014 s/d 2016

No.	Jenis Komoditi	Harga Asalan (Rp/kg)			Harga Eksport Rp (Kg)	Ket.
		Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016		
1.	Kopi Arabika	26.000	28.000	28.000	68.000	Khusus
2.	Kopi Robusta	22.000	25.000	27.500	HS Basah	Kopi
3.	Kemiri Isi	16.000	16.000	16.000		Arabika
4.	Jambu Mente	6.000	12.000	12.000		
5.	Kakao	26.000	33.000	38.00		
6.	Cengkeh	135.000	140.000	83.000		
7.	Kelapa Buah	2.000	2.000	2.000		
8.	Kelapa Kopra	4.500	8.000	8.000		
9.	Vanili Kering	170.000	200.000	3.000.000		
10.	Vanili Basah	15.000	20.000	15.00		
11.	Pinang Iris	18.000	15.000	18.000		
12.	Pinang Kulit	–	–	–		
13.	Kapuk	2.500	2.200	2.500		
14.	Asam	6.000	7.400	6.000		
15.	Tembakau	80.000	85.000	100.000		
16.	Merica	60.000	75.000	200.000		

c) Peternakan

Wilayah Kabupaten Manggarai Timur cukup potensial bagi pengembangan usaha ternak, baik ternak besar (Sapi dan Kerbau) maupun ternak kecil.

- Populasi Ternak

  - Jumlah Populasi Ternak besar menurut jenis ternak (ekor) yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2016 sebagai berikut :

Data Jumlah Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak per Kecamatan Keadaan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak Besar		
		Sapi	Kerbau	Kuda
1.	Borong	1.501	334	172
2.	Rana Mese	2.316	1.231	84
3.	Kota Komba	5.718	3.736	1.295
4.	Elar	219	669	795
5.	Elar Selatan	453	1.088	683
6.	Sambi Rampas	749	857	678
7.	Poco Ranaka	123	851	130
8.	Poco Ranaka Timur	309	559	274
9.	Lamba Leda	2.404	902	479
Total		13.792	10.227	4.590

- Jumlah Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak (ekor) yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2016 sebagai berikut :

Data Jumlah Populasi Ternak Kecil Menurut Jenis Ternak
per Kecamatan Keadaan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak Kecil		
		Babi	Kambing	Domba
1.	Borong	7.989	2.183	0
2.	Rana Mese	5.038	1.524	0
3.	Kota Komba	20.057	4.513	5
4.	Elar	4.631	3.158	0
5.	Elar Selatan	4.787	891	0
6.	Sambi Rampas	5.351	7.593	0
7.	Poco Ranaka	3.923	3.515	0
8.	Poco Ranaka Timur	3.231	3.047	0
9.	Lamba Leda	6.108	4.329	9
Total		61.115	30.753	14

- Jumlah Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (ekor) yang tersebar pada 9 Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2016 sebagai berikut :

Jumlah Populasi Ternak unggas menurut jenis ternak
Per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak Unggas		
		Ayam kampung	Ayam Ras	Itik/Bebek
1.	Borong	35.037	3.123	818
2.	Rana Mese	30.917	760	852
3.	Kota Komba	85.297	1.000	335
4.	Elar	20.342	50	456
5.	Elar Selatan	12.323	100	279
6.	Sambi Rampas	36.269	797	2.908
7.	Poco Ranaka	16.451	700	539
8.	Poco Ranaka Timur	15.787	100	48
9.	Lamba Leda	26.782	111	293
Total		279.205	6.741	6.528

- Data Pelayanan Vaksinasi Antrax dan SE Tahun 2016. *(Lampiran I)*
- Luas Tanam, Panen, Produktifitas dan Produksi Komoditi Hortikultura Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan . *(Lampiran II)*

d) Perikanan

Data Perikanan keadaan tahun 2016, seperti pada tabel-tabel di bawah ini

- Data Armada Penangkapan Ikan Tahun 2016

No	Kecamatan	Perahu Tanpa Motor		Motor Tempel	Kapal Motor		Jumlah
		Jukung	Perahu Papan		0-5 Gt	5 GT Keatas	
1.	Borong	31	10	4	87	1	132
2.	Kota Komba	2	26	18	16	0	62
3.	E l a r	45	0	5	1	0	51
4.	Sambi Rampas	69	0	76	20	0	165
5.	Lamba Leda	36	31	76	125	0	267
6.	Poco Ranaka	0	0	0	0	0	0
7.	Rana Mese	19	0	0	0	0	19
8.	Elar Selatan	0	0	0	0	0	0
9.	Poco Ranaka Timur	0	0	0	0	0	0
Jumlah		202	67	178	248	1	696

- Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Budi Daya menurut Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 tampak pada tabel di bawah ini :

Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Budidaya menurut Sub Sektor Perikanan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya					
		Tambak	Kolam	Budidaya Laut/ Rumput Laut	Sawah	KJA	Jmlh
1.	Borong	5	242	0	305	0	552
2.	Ranamese	0	151	0	255	0	406
3.	Kota Komba	0	403	0	410	0	813
4.	Elar	5	102	0	208	20	335
5.	Elar Selatan	0	121	0	152	0	273
6.	Sambi Rampas	20	151	0	135	0	306
7.	Poco Ranaka	0	331	0	120	0	451
8.	P. Ranaka Timur	0	315	0	256	0	571
9.	Lamba Leda	30	120	100	120	20	390
Jumlah		60	1.936	100	1.961	40	4.097

- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Perikanan Budidaya					
		Tambak	Kolam	Budidaya Laut/ Rumput Laut	Sawah	Laut	Jlh
1.	Borong	0,5	10,23	0	10,8	0	21,53
2.	Rana Mese	0	20,98	0	18,4	0	39,38
3.	Kota Komba	0	15,31	0	10,87	0	26,18
4.	Elar	1,75	2,42	0	3,62	0,1	7,89
5.	Elar Selatan	0	2,67	0	3,5	0	6,17
6.	S. Rampas	0,5	2,98	0	9,1	0	12,58
7.	Poco Ranaka	0	29,21	0	23,7	0	52,91
8.	P. Ranaka Timur	0	32,4	0	19,85	0	52,25
9.	Lamba Leda	0,2	2,8	922,0	9,12	0,05	935,17
Jumlah		3,0	120	922,0	109,0	0,15	1154,1

- Produksi Perikanan Laut/Tangkap menurut Jenis Ikan

No	Jenis Ikan	Borong	Kota Komba	Rana Mese	Lamba Leda	Sambi Rampas	Elar	Jumlah
1.	Tembang	240,87	84,63	6,51	208,32	97,65	13,02	651
2.	Lemuru	46,102	16,198	1,246	39,872	18,69	2,492	124,6
3.	Ikan Terbang	79,18	27,82	2,14	68,48	32,1	4,28	214
4.	Julung-Julung	41,366	14,534	1,118	35,776	16,77	2,236	111,8
5.	Kembung	104,192	36,608	2,816	90,112	42,24	5,632	281,6
6.	Selar	2,516	0,884	0,068	2,176	1,02	0,136	6,8
7.	Tongkol	476,56	167,44	12,88	412,16	193,2	25,76	1288
8.	Layur	3,848	1,352	0,104	3,328	1,56	0,208	10,4
9.	Kakap Merah	35,446	12,454	0,958	30,656	14,37	1,916	95,8
10.	Kerapu Karang	15,392	5,408	0,416	13,312	6,24	0,832	41,6
11.	Cakalang	95,682	33,618	2,586	82,752	38,79	5,172	258,6
12.	Cendro	10,138	3,562	0,274	8,768	4,11	0,548	27,4
13.	Layang Anggur	92,093	32,357	2,489	79,648	37,335	4,978	248,9
14.	Kurisi	0,222	0,078	0,006	0,192	0,09	0,012	0,6
15.	Peperek	4,81	1,69	0,13	4,16	1,95	0,26	13
16.	Biji Nangka Karang	1,036	0,364	0,028	0,896	0,42	0,056	2,8
17.	Pinjalo	0,333	0,117	0,009	0,288	0,135	0,018	0,9
18.	Lolosi Biru	0,888	0,312	0,024	0,768	0,36	0,048	2,4
19.	Tuna Mata Besar	68,709	24,141	1,857	59,424	27,855	3,714	185,7

20.	Kuwe	5,365	1,885	0,145	4,64	2,175	0,29	14,5
21.	Tengiri	6,179	2,171	0,167	5,344	2,505	0,334	16,7
22.	Lencam	5,143	1,807	0,139	4,448	2,085	0,278	13,9
23.	Teri	145,484	51,116	3,932	125,824	58,98	7,864	393,2
24.	Ikan Lainnya	5,069	1,781	0,137	4,384	2,005	0,274	13,7
Jumlah		1.486,62	522.327	40.179	1.285,73	602.685	80.358	4017,9

- Data Nelayan menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Status Nelayan			Buruh	Petani Rumput Laut
		Penuh	Sambilan	Musiman		
1.	Borong	757	18	14	0	0
2.	Kota Komba	199	51	8	0	20
3.	E l a r	64	10	0	0	0
4.	Sambi Rampas	291	49	13	0	40
5.	Lamba Leda	751	68	34	0	195
6.	Poco Ranaka	0	0	0	0	0
7.	P. Ranaka Timur	0	0	0	0	0
8.	Rana Mese	19	37	0	0	0
9.	Elar Selatan	0	0	0	0	0
Jumlah		2.081	233	69	0	255

- Kelompok Nelayan, Petani Ikan, Petani Rumput Laut dan Wanita Nelayan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 :

No	Kecamatan	Jenis Kelompok				Jmlh
		Nelayan	Petani Ikan	Petani Rumput Laut	Wanita Nelayan	
1.	Borong	96	181	0	0	277
2.	Ranamese	4	119	0	0	123
3.	Kota Komba	25	283	2	0	308
4.	E l a r	11	36	0	0	47
5.	Elar Selatan	0	36	0	0	36
6.	Sambi Rampas	48	56	2	0	104
7.	Poco Ranaka	0	89	0	0	89
8.	Poco Ranaka Timur	0	149	0	0	149
9.	Lamba Leda	153	37	20	0	210
Jumlah		337	986	22	0	1.345

2) Potensi Pariwisata

a) Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Manggarai Timur baik wisata alam maupun budaya berjumlah 111 Destiminasi Pariwisata, terbagi dalam 4 klaster :

- Klaster I : Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba dan sekitarnya;
- Klaster II : Kecamatan Rana Mese, Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Poco Ranaka Timur dan sekitarnya;
- Klaster III : Kecamatan Lamba Leda, Kecamatan Sambi Rampas dan sekitarnya;
- Klaster IV : Kecamatan Elar, Kecamatan Elar Selatan dan sekitarnya.

Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Manggarai Timur :

No.	Kecamatan	Potensi ODTW	
		Alam	Budaya
1.	Borong	a. Pantai Cepi Watu b. Pantai Liang Bala c. Pantai Purang Mese d. Mata Air Panas Rana Roko e. Mata Air Panas Rana Masak f. Air Terjun Cunca Rede g. Air Terjun Cunca Ncuar h. Air Terjun Cunca Ngkuang i. Persawahan Wae Laku	Situs Compang Riwu, Tengku Manuk Desa Benteng Raja, Situs Pemukiman Tenda (Bekas Kampung Tenda Lama), Caci, Danding, Mbata Raga Sae dan Penti
2.	Lamba Leda	a. Gua Cincoleng di Ketang Desa Tengku Leda b. Gua Wer Witu di Desa Tengku Leda c. Pantai Laing Lewe	Situs Pemukiman Kuno Kampung Ninge, Caci, Danding, Mbata Raga Sae, Penti / Upacara Adat, Tenun Ikat, Compang Deru, Torong Ninge.
3.	Kota Komba	a. Taman Laut Wae Wole b. Pantai Nanga Rawa c. Pantai Bondei d. Pantai Mbalata e. Poco Ndeki (Mengamati Burung Lawelujang, Batu Kelamin Laki-Laki (Embu Kode Haki) dan Batu Kelamin Perempuan (Embu Kode Fai) di Puncak Gunung Poco Ndeki	Caci, Danding, Mbata, Vera, Raga Sae, Penti / Upacara Adat, Situs Watu Nggene, Situs Sambi Lewa dan Batu Susu Rongga, Anyaman Topi Khas Rongga
4.	Elar	a. Danau Rana Kulan Desa Rana Kulan b. Gua Liang Toge Kel. Lempang Paji c. Danau Rana Gapang d. Likang Telu e. Taman Laut Labuan Kelambu f. Taman Laut Leko Lembo g. Compang Biting	Compang Biting, Situs Kampung Wanger, Caci, Danding, Mbata, Raga Sae Penti / Upacara Adat dan Tenun Ikat

5.	Sambi Rampas	a. Teluk Nanga Lok b. Danau Rana Tonjong c. Pantai Watu Pajung d. Pantai Pasir Putih e. Rugu	Caci, Danding, Mbata Raga Sae, Penti / Upacara Adat dan Gereja Tua Lengko Ajang, Tenun Ikat
6.	Poco Ranaka	a. Pong Dode di Kelurahan Mandosawu b. Cunca Pik c. Gua Leong d. Peke Tana	Compang Mano, Compang Kuleng, Compang Bangka Pau, Caci, Danding, Mbata, Raga Sae, Penti / Upacara Adat.
7.	Poco Ranaka Timur	a. Danau Rana Dara b. Cunca Radi Ntangis c. Cunca Wek d. Cunca Nenteng Anggo e. Rana Laco	Beo Leda, Watu Tokol, Watu Lanur, Caci, Danding, Mbata, Raga Sae, Penti / Upacara Adat.
8.	Elar Selatan	a. Tetes Tanah	Benteng Sipi, Compang Tuwit, Batu Manusia, Watu Rombeng, Gong Legur Lai, Watu Pia/belah, Woko Rajong, Watu Kowang, Watu Langgasai, Watu Banggang, Watu Poso, Benga Ndiwal, Botol Tanah, Deru Pirong, Watu Ulu Wawi, Watu Ndalo Dea, Watu Dopo Wing, Watu Seken/Cekeng, Repa Ndiwal, Caci, Danding, Mbata, Raga Sae, Penti / Upacara Adat, Anyaman Topi Rajong dan Tenun Ikat
9.	Rana Mese	a. Danau Rana Mese b. Cunca Rede c. Cunca Ncuar	Kampung Teber, Caci, Danding, Mbata, Raga Sae, Penti / Upacara Adat.

b) Data Perkembangan Pembangunan Kepariwisataan

- Data Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Data Kunjungan Wisatawan 2009 s/d 2016

No.	Tahun	Wisatawan		Total
		Wisman	Wisnus	
1.	2009	112	7.186	7.298
2.	2010	100	5.440	5.540
3.	2011	158	3.500	3.658
4.	2012	101	7267	7.368
5.	2013	-	6166	6.166
6.	2014	-	5905	5905
7.	2015	-	10.844	10.844
8.	2016	-	12.839	12.839
Jumlah		471	59.147	59.618

- Usaha Jasa Pariwisata

  Usaha jasa pariwisata seperti : jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, jasa konservasi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata sampai saat ini belum tersedia di Kabupaten Manggarai Timur.

- Usaha Sarana Pariwisata
  - ✓ Hotel : 15 Buah (21 room dan 42 bed)
  - ✓ Rumah Makan : 25 Buah
  - ✓ Salon Kecantikan : 9 unit
  - ✓ Billiard : 32 unit
  - ✓ Karaoke : 6 unit
  - ✓ Pemondokan : 5 buah
- Kelembagaan Pariwisata
  - ✓ Sanggar seni : 37 Sanggar Seni
  - ✓ Kelompok Sadar Wisata :13 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak : 494 orang, terdiri dari : laki-laki : 350 orang dan perempuan : 144 orang.

3) Potensi Bidang Pertambangan

Kontribusi sektor pertambahan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur memang relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun sektor ini cukup potensial untuk dikembangkan agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sub sektor ini yang rata-rata bertumbuh 14,33 % per tahun. Data Potensi Pertambangan dan Galian, dapat disimak pada tabel berikut :

Data Potensi Pertambangan dan Galian di Kabupaten Manggarai Timur :

No.	Jenis	Satuan	Potensi	Eksploitasi
1.	Mangan	Ton	545.000	-
2.	Pasir besi	Ton	671.000	-
3.	Tembaga	Ton	200.000	-
4.	Dolmit	Ton	1.000.000	-
5.	Batu Gamping	Ton	1.500.000	-
6.	Sirtu	M3	2.006.634,3	-
7.	Batu Silika	Ha	–	-
8.	Tras	Ha	50	-
9.	Andesit	Ha	25	-
10.	Oker	Ha	50	-
11.	Zeolit	Ha	65	-
12.	Basalt	M^2	200	-
13.	Kaolin	M^2	150.000	-

14.	Toseki	M ²	100.000	-

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015

Kegiatan pertambangan khususnya bahan galian C (pasir dan batu) telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur, namun masih banyak juga lokasi penambangan yang belum memiliki izin, di antaranya seperti pada tabel berikut :

No	Lokasi	Desa/Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Wae Togong	Desa Lencur, Kecamatan Lamba Leda	2
2.	Wae Pesi	Desa Golo Munga, Kecamatan Lamba Leda	2
3.	Wae Mas	Desa Wae Satar Padut, Kec. Lamba Leda	1.5
4.	Wae Ara	Kel. Nanga Baras, Kec. Sambi Rampas	1.5
5.	Wae Mbaling	Desa Nanga Mbaur, Kec. Sambi Rampas	1.5
6.	Wae Togong	Kelurahan Nanga Baras, Kec. Sambi Rampas	1.5
7.	Wae Reno	Desa Rana Mese, Kec. Sambi Rampas	1.5
8.	Bondo	Desa Watu Mori, Kec. Rana Mese	5
9.	Wae laku	Desa Nanga Labang, Kec. Borong	1
10.	Golo Mongkok	Desa Watu Mori, Kec.Rana Mese	1
11.	Wae Wole	Kelurahan Watu Nggene, Kec. Kota Komba	2
12.	Wae Pake	Kelurahan Tanah Rata, Kec. Kota Komba	1,5
13.	Wae Labang	Desa Rana Gapang, Kec. Elar	1
14.	Wae Tetes	Desa Golo Linus, Kec. Elar	1
15.	Wae Rana	Desa Sipi, Kec. Elar	2
16.	Wae Buntal	Desa Golo Lijun, Kec. Elar	2
17.	Wae Mepar	Desa Sangan Kalo, Kec. Elar	2
18.	Wae Reno	Desa Golo Lobos, Kec. Poco Ranaka	1,5
19.	Longka Kunci	Desa Compang Mekar, Kec. Lamba Leda	1

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015

- Data jumlah pemegang izin pertambangan (UIP) bahan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Manggarai Timur, seperti tampak pada tabel berikut :

Data jumlah pemegang izin pertambangan (UIP) bahan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Manggarai Timur

No	Pemegang Izin	Lokasi Penambangan Kec/Desa/Kel	Jenis Bahan Galian	No/ Tanggal IUP	Luas (Ha)	Ket.
1.	PT.Aditya Bumi Pertambangan	Waso, Satar Teu, Lengko Lolok, Tumbak Kec. Lamba Leda	Mangan	HK/81/2009 27 -08 2009	2.222 Ha	
2.		Serise, Desa Satar Punda,Kec. Lamba Leda	Mangan	HK/95/2009 12–10 -2009	736.30 Ha	
3.		Satar Punda, Kec. Lamba Leda	Mangan	HK/96/2009 12-10-2009	515,8 Ha	
4.		Rokat,Ds.Golo Nimbung. Kec. Lamba Leda	Mangan	HK/98/2009 13-10-2009	2.000 Ha	

5.		Tengku Lawar, Ds. Tengku Lawar Kec. Lamba Leda	Mangan	HK/97/2009 13-10-2009	623,5 Ha	
6.		Golo Lebo, Kel. Nanga Baras. Ds. Legur Lai. Ds. Golo Lijun	Mangan	HK/109/2009 07-12-2009	23.005 Ha	
7.		Tompong Ds. Nanga Mbaur. Kec. Sambi Rampas	Mangan	HK/111.A/2009 17-12-2009	2.000 Ha	
8.		Kampung Tengah Ds. Nanga Mbaur. Kec. Sambi Rampas	Mangan	HK/112.A/2009 17-12-2009	2.000 Ha	

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015

4) Bidang Energi

Energi akan menjadi topik yang hangat sepanjang peradaban umat manusia. Upaya mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

a) Energi Alternatif

Ada beberapa energi alam sebagai energi alternatif yang dapat dikembangkan di Kabupaten Manggarai Timur yang bersih, tidak berpolusi, aman dan tidak terbatas jumlahnya yang dikenal dengan nama Energi Baru Terbarukan (EBT), antara lain : energi surya termal, angin, air, arus gelombang, biogas, biodisel, perbedaan suhu air laut dan panas bumi.

b) Keberadaan Listrik

Beberapa energi yang telah diarahkan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi jaringan listrik pedesaan melalui pembangunan sarana dan prasarana listrik tenaga mikrohidro pada daerah pedesaan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

No	Nama PLTMH	Lokasi	Daya (KWh)	Jlh SSR s/d Thn 2015	Jlh SSR Tambahan TA 2016
1.	Wangkar Weli	Ds Wangkar Weli	60	227	0
2.	Wae Wau	Ds Compang Lawi	56	380	0
3.	Wae Mokel	Ds Golo Meni	80	575	0
4.	Wae Mowol	Ds Balus Permai	65	198	102
5.	Wae Cebu	Ds Lento	35	231	0
6.	Wae Musur	Ds Sano Lokom	200+500	464	226
7.	Wae Cacor	Ds Goreng Meni	62	318	0
8.	Wae Laeng	Desa Rondo Woing	60	140	0
9.	Wae Nampe	Ds Compang Tenda	50	103	0
10.	Wae Woja	Ds Golo Nderu	39	175	0

11.	Wae Rana	Ds Watu Pari	68	268	0
12.	Wae Lampang	Ds Rana Kulan	53	200	0
13.	Wae Reming	Ds Golo Rutuk	25	200	0
14.	Wae Pekas	Ds Benteng Pau	35	268	0

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015

- Sistem ketenagalistrikan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur saat ini masih didominasi oleh PT. PLN (persero) sebagai BUMN yang operasionalnya dilakukan oleh PT.PLN (persero) Cabang Flores Bagian Barat yang mengelolah pemasaran dan pelayanan kelistrikan pada pelanggan dan calon pelanggan di daerah Borong dan sekitarnya.

- Kapasitas Produksi Pembangkit Tenaga Listrik per Sistem dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Kapasitas daya efektif PLTD keadaan Bulan Juli tahun 2015 :

Lokasi	Merek	Daya KW	RPM	Th Pembu atan	Thn operasi	Tenaga (volt)	Arus (Amp)	Daya (KVA)	Daya Mampu (KW)	Beban Puncak
Borong	Komatsu	100	1500	11002	11003	380	190	1100	60	
	Bisma	120	1500	11004	11006	380	216.5	150	50	
	Volvo P	280	1500		2004	380		350	220	
		500							330	320
Pota	Deutz	20	1500	11002	11004	380	38	100	15	
	Deutz	20	1500	11002	11004	380	38	100	15	
	Perkins	20	1500	11002	11003	380	38	100	15	
	Deutz	100	1500	2004	2004	400	189	1100	75	
	Deutz	20	1500	11002	11003	380	38	100	15	
									135	70
		180						850	465	390

Sumber : PT. PLN (Persero) wilayah NTT, Cabang Flores Bagian Barat

Data Komulatif Tenaga Listrik yang dibangkitkan oleh PLN dan Penggunaanya Menurut Unit s/d Bulan Mei 2015

No	Unit	Dibangkitkan	Terjual
1.	SR Mando Sawu	78,300	343,505
2.	SR Borong (PLTD)	606,460	543,968
3.	SR Benteng Jawa(PLTD)	56,519	58,785
4.	SR Pota (PLTD)	106,179	103,930
Jumlah		847,458	1.050,180

Sumber : PT.PLN (Persero) wilayah NTT, Cabang Flores Bagian Barat

Data Pelanggan PLN Manggarai Timur Tahun 2015

No	Kecamatan	Prabayar	Pascabayar	SEHEN
1.	Borong (SR Borong)	4.962	19	1.506
2.	Kota Komba (KJ Lembur)	2.053	5	1.922
3.	Poco Ranaka (KJ Mando Sawu)	973	2	562
4.	Lamba Leda (SR Benteng Jawa)	317	0	416
5.	Sambi Rampas (SR Pota)	807	3	966
Jumlah		9.112	29	5.372

Sumber : PT. PLN (Persero) wilayah NTT, Cabang Flores Bagian Barat

5) Kehutanan

a) Kawasan Hutan

Kabupaten Manggarai Timur memiliki 10 kawasan hutan dengan luas 90.020.19 Ha. Satu kawasan hutan dikelola oleh BKSDA NTT II, yaitu Hutan TWA Ruteng (RTK.118) dengan luas 32.248,60 Ha, yang mempunyai fungsi konservasi, sedangkan sembilan kawasan hutan lainnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur dengan luas 57.771.59 Ha. Rincian seperti pada tabel di bawah ini :

No	Nama Kawasan Hutan	RTK	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Ket.
1.	Wae Rana	26	HP	253.81	
2.	Manus Mbengan	110	HP	3688,28	
3.	Puntu II	19	HP/HL	15.567,46	
4.	Pota	101	HL/HPT	16.715,07	
5.	Riwu	23	HP	1.011,47	
6.	Ndeki Komba	115	HL/HP	5.281,70	
7.	Wae Laku	114	HPK	5.705	
8.	Sawe Sange	141	HL	4.650	
9.	Ngada Wolo Merah	142	HL	4.898,80	
				57.771.59	
10.	TWA Ruteng	118	HL	32.248,60	
Total Luas Kawasan Hutan				90.020.19	

b) Produksi Hasil Hutan

Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi kayu maupun non kayu yang cukup banyak. Sampai dengan akhir tahun 2016, Kawasan Hutan di Kabupaten Manggarai Timur tetap berpotensi dan

mendapatkan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu. Hal ini dapat tergambar melalui tabel di bawah ini.

Tabel : Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2016

No	Jenis Kayu	Produksi per Triwulan (M2)				Total Tahun 2016
		I	II	III	IV	
1.	Ampupu	43,6387	19,8064	12,1121	32,0408	107,5980
2.	Jati	34,5003	11,4922	71,5140	52,5593	170,0658
3.	Mahoni	52,4173	89,5903	36,4749	64,0433	242,5258
4.	Bulangan	13,9335	34,6967	60,9829	138,7197	248,3328
5.	Waek	43,3116	38,9340	28,6269	78,1448	189,0173
6.	Waek Tuang	122,0213	110,0571	67,8663	65,7898	365,7345
7.	Ndueng	32,7382	32,1670	29,8549	48,4623	143,2224
8.	Luwu	52,0825	47,3887	84,6482	160,3746	344,4940
9.	Lale	29,9905	9.7706	23,7833	51,4556	115,0000
10.	Rimba Campuran	674,4304	226,3336	210,3355	276,8421	1387,9416

Tabel : Produksi Hasil Hutan Non Kayu Tahun 2016

No.	Jenis	Satuan	Jumlah
1.	Bambu Aur	Batang	1.090
2.	Bambu Betong	Batang	1.809
3.	Bambu Pering	Batang	4.536
4.	Cangkang Kemiri	Kg	107,500
5.	Cendana Teras	Kg	2.080
6.	Dolken	Batang	33.980
7.	Gaharu	Kg	100
8.	Gedek	Lembar	460
9.	Gula Aren	Ikat	280
10.	Kayu Api	Ikat	55.615
11.	Kayu Bakar	Ikat	18.770
12.	Kemiri	Kg	17.550
13.	Kemiri Gelondongan	Kg	109,400
14.	Kemiri Isi	Kg	216,066
15.	Kemiri Kulit	Kg	5.000
16.	Kulit Kayu Manis	Kg	1.715
17.	Madu	Liter	410
18.	Pinang Basah	Kg	2.000
19.	Pinang Gelondongan	Kg	12.000

20.	Pinang Iris	Kg	53.625
21.	Pinang Kulit	Kg	36.500
22.	Werek	Kg	1.210

c) Lahan Kritis

Adanya Lahan kritis menjadi ancaman bagi potensi kehutanan.Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi untuk menangani lahan kritis agar perkembangannya dapat ditekan, baik lahan kritis di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan.

Luas lahan Kritis di Kabupaten Manggarai Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

- Luar Kawasan Hutan seluas 13.991,02 Ha
- Dalam Kawasan Hutan seluas 6.509,25 Ha

Rincian perkembangan data luas lahan kritis keadaan tiga tahun terakhir tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel : Luas Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan

No	Kelompok Hutan	Luas Lahan Kritis (Ha)		
		2014	2015	2016
1.	Wae Rana	380	380	380
2.	Manus Mbengan	1.240	1.228	1.224,5
3.	Puntu II	1.115	1.115	1.115
4.	Pota	1.100	1.100	1.100
5.	Riwu	600	600	600
6.	Ndeki Komba	470	455	440
7.	Wae Laku	–	–	–
8.	Sawe Sange	320	320	320
9.	Ngada Wolo Merah	330	330	330
10.	TWA	1000	999.75	999.75
Total		6.555	6.527,75	6.509,25

Tabel : Luas Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan

No	Kecamatan	Luas Lahan Kritis (Ha)		
		2014	2015	2016
1.	Borong	1.888,76	1.847,71	1.816,94
2.	Kota Komba	1.166,76	1.097,51	911,51
3.	Elar	3.335,5	3.335,50	3.314
4.	Sambi Rampas	2.148,5	2.067,70	2.063,8
5.	Lamba Leda	3.839,02	3.809,02	3.753,72
6.	Poco Ranaka	2.198	2.197	2.131,05
7.	Rana Mese	–	–	–
8.	P.Ranaka Timur	–	–	–
9.	Elar Selatan	–	–	–
Total		14.576,54	14.354,44	13.991,02

6) Perhubungan

a) Perhubungan Darat

- Jumlah Kendaraan di Kabupaten Manggarai Timur keadaan Tahun 2016

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Mini Bus	87 Unit	
2.	Light Truck	96 Unit	
3.	Damp Truck	62 Unit	
4.	Pick Up	77 Unit	
5.	Tangkie	3 Unit	
6.	Micro Bus	6 Unit	
7.	Mobil penumpang	15 unit	
Jumlah		346 Unit	

- Data Trayek

✓ Trayek PA (Pengangkutan Barang)

No	Trayek	Jumlah	Keterangan
1.	Terminal Borong – Paan Leleng	3	
2.	Terminal Borong – Wae Lengga	3	
3.	Terminal Borong – Ntaur	1	
4.	Terminal Borong - Teber	1	
5.	Terminal Borong - Nunur	2	
6.	Terminal Borong – Elar	1	
7.	Terminal Borong- Mukun	2	
8.	Terminal Borong - Lalang	2	
Jumlah		15	

✓ Trayek PO (pengangkutan orang)

No	Trayek	Jumlah	Keterangan
1.	Terminal Borong – Aimere	-	
2.	Terminal Borong – Pa'an Leleng	1	
3.	Terminal Borong – Mukun	2	
4.	Terminal Borong – Sita	2	
5.	Terminal Borong – Mano	3	
6.	Terminal Borong – Wae Lengga	13	
8.	Terminal Borong – Bea Laing	2	
9.	Reo – Pota – Mbay	1	
10.	Terminal Borong – Kakang	1	
11.	Terminal Borong - Ketang	4	
12.	Terminal Borong-Satar Lahing	1	
Jumlah		30	

b) Perhubungan Laut dan Udara

✓ Pelabuhan Laut

- Tanah Pelabuhan Barang Wae Wole
- Tanah Pelabuhan Borong
- Tanah Tambatan Perahu Dampek
- Tambatan Perahu Dampek
- Tambatan Perahu Pota
- Tambatan Perahu Borong

✓ Perhubungan Udara

Kabupaten Manggarai Timur memiliki lahan yang berpotensi untuk dapat dibangun Bandar Udara, yaitu lahan di Tanjung Bendera (Kecamatan Kota Komba). Lokasi Tanjung Bendera telah direkomendasikan layak untuk pembangunan Bandara Udara. Langkah-langkah persiapan ke arah itu sudah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Pembebasan lahan sudah dilakukan tahun 2015 seluas 100 Ha. Proses selanjutnya adalah penetapan status kepemilikan berupa sertifikat tanah;
- Dokumen Master Plan tahun 2013;
- Dokumen Studi Studi Kelayakan tahun 2013 dan 2015 dan review Studi Kelayakan tahun 2016;
- Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) tahun 2016.

7) Industri dan perdagangan

a) Jumlah Unit Usaha Industri

Jumlah unit usaha industri di Kabupaten Manggarai Timur keadaan 31 Desember 2016 sebanyak 206 unit, dengan rincian :

- Industri Formal : 174 unit
- Industri Non Formal : 32 unit

b) Jumlah Unit Usaha Perdagangan Formal

Jumlah unit usaha perdagangan formal di Kabupaten Manggarai Timur keadaan tahun 2016 sebanyak 447 unit, dengan rincian :

- Pedagang Besar : - unit usaha
- Pedagang Menengah : 1 unit usaha
- Pedagang Kecil : 202 unit usaha
- Pedagang Mikro : 244 unit usaha.

8) Koperasi dan UKM

a) Jumlah Koperasi dan Pra Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur keadaan 2016 sebanyak 231 Unit, yakni :

- Jumlah Koperasi berbadan hukum : 86 Unit, dengan rincian :
  - ✓ Koperasi Unit Desa (KUD) : 6 unit
  - ✓ KPRI : 2 unit
  - ✓ Koperasi Perkebunan : 1 unit
  - ✓ Koperasi KSP/Kopdit : 71 unit
  - ✓ Koperasi Serba Usaha : 5 unit
  - ✓ Koperasi Konsumen : 1 unit
- Jumlah Pra Koperasi : 145 Unit

b). Jumlah Unit Usaha di Kabupaten Manggarai Timur keadaan tahun 2016 sebanyak 1.467 Unit Usaha Mikro Kecil UMKM, terdiri dari :

- Usaha Mikro : 1.092 unit
- Usaha Kecil : 288 unit
- Usaha menengah : 87 unit

.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Manggarai Timur

1) Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Timur

Pertumbuhan PDRB Manggarai Timur tahun 2015 mencapai 5,27 persen Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas sebesar 10,52 persen.

Lapangan usaha yang memiliki trend pertumbuhan positif di antaranya adalah : lapangan usaha Konstruksi tercatat sebesar 6,48 persen, lapangan usaha Industri dan Pengolahan tercatat sebesar 2,26 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,48 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,62 persen, Real Estate sebesar 5,88 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,66 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,09 persen. Laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Manggarai Timur menurut lapangan usaha Tahun 2013–2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laju pertumbuhan Riil PDRB Manggarai Timur menurut lapangan usaha Tahun 2013–2015

Nomor	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,04	3,67	2,83
B	Pertambangan & Penggalian	9,25	7,21	8,33
C	Industri Pengolahan	6,88	2,80	1,26
D	Listrik dan Gas	7,32	6,05	13,04
E	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	5,61	4,46	4,15
F	Konstruksi /Bangunan	8,90	5,93	5,34
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9,10	8,85	7,89
H	Transportasi dan pergudangan	4,08	3,11	4,58
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,71	7,76	5,63
J	Informasi dan komunikasi	9,51	7,61	6,75
K	Jasa Kuangan dan asuransi	10,01	7,50	5,96
L	Real Estate	6,07	4,37	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	–	–	–
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	9,49	8,46	8,15
P	Jasa Pendidikan	5,00	7,21	5,59
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan social	8,66	6,59	6,29
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,51	1,04	3,83
PDRB		6,00	5,70	5,04

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016

*Keterangan : * = Angka sementara*
*** = Angka sanggat sementara*

2) Struktur Ekonomi Manggarai Timur

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Manggarai Timur masih didominasi oleh sektor primer yaitu : Pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Manggarai Timur. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Konstruksi.

Peranan PDRB Manggarai Timur menurut lapangan usaha tahun 2013–2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,87	48,79	48,41
B	Pertambangan & Penggalian	4,97	5,17	5,33
C	Industri Pengolahan	0,58	0,57	0,57
D	Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	5,15	5,20	5,30
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	10,41	10,78	11,24
H	Transportasi dan pergudangan	0,70	0,67	0,64
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,10	0,10	0,11
J	Informasi dan komunikasi	9,99	9,37	8,97
K	Jasa Kuangan dan asuransi	0,43	0,44	0,45
L	Real Estat	1,42	1,42	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	12,41	12,55	12,64
P	Jasa Pendidikan	2,37	2,36	2,39
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	2,24	2,24	2,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,34	0,32	0,31
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014

*Keterangan : * = Angka sementara*
*** = Angka sangat sementara*

3) Perkembangan PDRB Per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per Kapita yang dapat didekati dengan PDRB per Kapita. Secara sederhana PDRB per Kapita terbagi atas harga berlaku dan harga konstan.

PDRB per Kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan harga berlaku, PDRB per Kapita Manggarai Timur pada tahun 2015 sebesar Rp.8.351.593,57 dengan pertumbuhan tiga tahun berturut-turut (2013 s/d 2015) masing-masing sebesar : 9,87 persen (tahun 2013), 10,09 persen (tahun 2014) dan 9,60 persen (tahun 2015).

PDRB Per Kapita Manggarai Timur menurut Lapangan Usaha Manggarai Timur tahun 2013 – 2015 dapat disimak pada tabel berikut.

Perkembangan PDRB Per Kapita menurut Lapangan Usaha
Manggarai Timur, Tahun 2013 – 2015

Nomor	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,34	3,62	3,93
B	Pertambangan & Penggalian	0,36	0,41	0,47
C	Industri Pengolahan	0,04	0,04	0,05
D	Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,37	0,42	0,47
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,74	0,84	0,94
H	Transportasi dan pergudangan	0,05	0,05	0,06
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,01	0,01	0,01
J	Informasi dan komunikasi	0,67	0,71	0,73
K	Jasa Keuangan dan asuransi	0,03	0,03	0,04
L	Real Estat	0,10	0,11	0,12
M,N	Jasa Perusahaan	-	-	-
O	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan social	0,87	0,98	1,09
P	Jasa Pendidikan	0,17	0,19	0,21
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	0,16	0,18	0,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,02	0,02	0,03
PDRB		6,92	7,62	8,35

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016

*Keterangan : * = Angka sementara*
*** = Angka sangat sementara*

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, yaitu : "Terwujudnya Manggarai Timur yang Lebih Sejahtera, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Sehat, Ramah Lingkungan, Demokratis, Bermartabat dengan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia Menuju Masyarakat yang Lebih Mandiri".

Asumsi Dasar visi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur dimaknai sebagai berikut :

a. ***Lebih sejahtera***, adalah kondisi suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, serta secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
b. ***Kreatif dan inovatif,*** adalah suatu kondisi masyarakat yang mampu mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.
c. ***Ramah lingkungan***, adalah sikap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
d. ***Demokratis,*** mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan.
e. ***Bermartabat,*** adalah sikap dan kondisi masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma hukum, adat dan budaya lokal, demokratis dan ramah lingkungan.
f. ***Menjunjung Hukum dan Hak Asasi Manusia***, adalah suatu kondisi masyarakat yang taat terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
g. ***Mandiri***, adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosila masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

b. **Misi**

Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, yaitu :

1) ***Membangun sumber daya manusia Kabupaten Manggarai Timur yang produktif dan berdaya saing***.

Kemandirian sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui 3 pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan peningkatan derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia Manggarai Timur memiliki daya saing yang dapat memajukan daerahnya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

2) ***Membuka isolasi daerah dan membangun infrastruktur secara merata***

Jaringan infrastruktur wilayah yang handal sangat penting dalam meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktifitas produksi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Manggarai Timur. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya juga merupakan sarat mutlak yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur. Meratanya pembangunan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan di seluruh Manggarai Timur akan mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3) ***Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat melalui optimalisasi keunggulan lokal***

Misi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan unsur penting menuju kemandirian daerah melalui pengembangan keunggulan lokal berbasis desa. Usaha ekonomi mikro dapat dimulai pada lapisan masyarakat diakar rumput melalui skala rumah tangga yang kemudian akan didorong untuk mengembangkan daya saing yang sehat dalam dunia usaha. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana

pembangunan yang berkualitas secara merata ke seluruh pelosok daerah serta menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

4) ***Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang berkarakter melayani***.

Manajemen pemerintahan akan sangat menentukan kemajuan sebuah daerah dalam berkompetisi di otonomi daerah. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional adalah merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan kepercayaan masyarakat dan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa sehingga pada gilirannya akan memperoleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tersebut di atas pemerintah daerah menempuh 4 (empat) strategi pokok, yaitu :

a. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
b. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan;
c. Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan ekonomi lokal;
d. Tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur menitik-beratkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan Pembangunan diperlukan adanya strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2014-2019 adalah :

a. Peningkatan mutu pendidikan;
b. Pengentasan kemiskinan;

c. Pelayanan kesehatan;
d. Peningkatan kesempatan berusaha/iklim usaha;
e. Peningkatan mutu infrastruktur dan membuka akses ke daerah yang terisolasi;
f. Penataan lingkungan;
g. Pelayanan publik.

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2014 - 2019, maka prioritas Pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016 (RKPD Tahun 2016) adalah :

1) Peningkatan infrastruktur;
2) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian;
4) Peningkatan pengelolaan pasca panen;
5) Peningkatan investasi;
6) Peningkatan sektor perkebunan;
7) Peningkatan kualitas kesehatan;
8) Peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib

No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	SKPD Pelaksana
1.	**Pendidikan**				Dinas PPO
	Belanja Tidak Langsung	**221.296.343.375**	**195.955.420.908**	**88,55**	
	Belanja Pegawai	221.296.343.375	195.955.420.908	88,94	
	Belanja Langsung	**52.580.495.934**	**50.231.600.334**	**95,53**	
	Belanja Pegawai	30.470.510.000	29.617.840.000	97,20	
	Belanja Barang dan Jasa	8.085.469.503	4.854.085.409	60,03	
	Belanja Modal	14.634.340.431	13.803.240.352	94,32	
	Jumlah	**273.876.839.309**	**246.187.021242**	**89,89**	
2.	**Kesehatan**				Dinas Kesehatan
	Belanja Tidak Langsung	**33.163.269.854**	**32.677.096.597**	**98,83**	
	Belanja Pegawai	33.163.269.854	32.677.096.597	98,83	
	Belanja Langsung	**63.645.349.294**	**52.090.926.417**	**81,85**	
	Belanja Pegawai	10.900.833.919	10.715.943.919	98,30	
	Belanja Barang dan Jasa	29.980.732.134	22.106.991.453	73,74	
	Belanja Modal	22.763.783.241	19.267.993.045	84,64	
	Jumlah	**96.808.619.148**	**84.768.023.014**	**87,56**	
3.	**Lingkungan Hidup**				BLHD
	Belanja Tidak Langsung	**1.391.585.665**	**1.347.602.059**	**96,83**	
	Belanja Pegawai	1.391.585.665	1.347.602.059	96,83	
	Belanja Langsung	**4.999.081.109**	**4.990.949.200**	**99,84**	
	Belanja Pegawai	1.283.770.000	1.283.770.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	2.811.131.000	2.805.680.000	99,81	
	Belanja Modal	904.180.109	901.499.200	99,70	
	Jumlah	**6.390.666.774**	**6.332.032.511**	**99,08**	
4.	**Pekerjaan Umum**				Dinas PU
	Belanja Tidak Langsung	**2.912.050.750**	**2.704.597.075**	**92,88**	
	Belanja Pegawai	2.912.050.750	2.704.597.075	92,88	
	Belanja Langsung	**151.204.269.408**	**147.707.737.417**	**97,69**	
	Belanja Pegawai	3.978.630.000	3.703.100.000	93,14	
	Belanja Barang dan Jasa	6.724.597.026	4.226.009.867	62,85	
	Belanja Modal	140.501.042.382	139.775.627.550	99,48	
	Jumlah	**154.116.320.158**	**150.412.334.492**	**97,60**	
5.	**Penataan Ruang**				Bappeda
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**1.012.650.000**	**816.683.200**	**80,65**	
	Belanja Pegawai	94.600.000	90.100.000	95,24	
	Belanja Barang dan Jasa	918.050.000	726.583.200	79,14	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**1.012.650.000**	**816.683.200**	**80,65**	
6.	**Perencanaan Pembangunan**				Bappeda
	Belanja Tidak Langsung	**1.432.234.633**	**1.378.644.370**	**96,26**	
	Belanja Pegawai	1.432.234.633	1.378.644.370	96.26	
	Belanja Langsung	**3.385.125.474**	**3.128.940.617**	**95,51**	
	Belanja Pegawai	851.800.000	756.325.000	88,79	
	Belanja Barang dan Jasa	2.429.255.474	2.293.215.617	94,40	
	Belanja Modal	104.100.000	79.400.000	76,27	
	Jumlah	**4.817.360.107**	**4.507.584.987**	**93,57**	

7.	**Perumahan**				Dinas PU
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**299.100.000**	**200.569.500**	**67,06**	
	Belanja Pegawai	46.600.000	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	252.500.000	200.569.500	79,43	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**299.100.000**	**200.569.500**	**67,06**	
8.	**Kepemudaan dan Olah Raga**				Dinas PPO
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**806.240.805**	**317.055.795**	**39,33**	
	Belanja Pegawai	43.600.000	31.450.000	72,13	
	Belanja Barang dan Jasa	454.210.805	283.845.795	62,49	
	Belanja Modal	308.430.000	1.760.000	0,57	
	Jumlah	**806.240.805**	**317.055.795**	**39,33**	
9.	**Penanaman Modal**				BPMDP2T
	Belanja Tidak Langsung	**1.257.561.579**	**1.215.632.129**	**96,67**	
	Belanja Pegawai	1.257.561.579	1.215.632.129	96,67	
	Belanja Langsung	**1.395.000.000**	**1.384.564.952**	**99,25**	
	Belanja Pegawai	308.350.000	308.350.000	100.	
	Belanja Barang dan Jasa	867.210.000	857.307.752	98,86	
	Belanja Modal	219.440.000	218.907.200	99,76	
	Jumlah	**2.652.561.579**	**2.600.197.081**	**98,03**	
10.	**Koperasi dan UKM**				Dinas Koperindag
	Belanja Tidak Langsung	**2.011.038.250**	**1.940.064.865**	**96,47**	
	Belanja Pegawai	2.011.038.250	1.940.064.865	96,47	
	Belanja Langsung	**1.940.959.000**	**1.903.502.800**	**98,07**	
	Belanja Pegawai	833.700.000	832.000.000	99,80	
	Belanja Barang dan Jasa	767.548.000	734.527.300	95,70	
	Belanja Modal	339.711.000	336.975.500	99,19	
	Jumlah	**3.951.997.250**	**3.843.567.665**	**97,26**	
11.	**Kependudukan & Capil**				Dinas Kependudukan dan Capil
	Belanja Tidak Langsung	**1.603.170.956**	**1.551.362.449**	**96,76**	
	Belanja Pegawai	1.603.170.956	1.551.362.449	96,76	
	Belanja Langsung	**1.795.000.000**	**1.717.865.481**	**95,70**	
	Belanja Pegawai	710.400.000	676.400.000	95,21	
	Belanja Barang dan Jasa	950.550.000	908.127.494	95,53	
	Belanja Modal	134.050.000	133.337.897	99,46	
	Jumlah	**3.398.170.956**	**3.269.227.930**	**96,20**	
12.	**Ketenagakerjaan**				Dinas Sosial dan Nakertrans
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**720.951.175**	**691.892.175**	**95,97**	
	Belanja Pegawai	14.850.000	9.250.000	62,29	
	Belanja Barang dan Jasa	706.101.175	682.642.175	96,68	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**720.951.175**	**691.892.175**	**95,97**	
13.	**Ketahanan Pangan**				BP2KP
	Belanja Tidak Langsung	**5.744.905.259**	**5.303.165.748**	**92,31**	
	Belanja Pegawai	5.744.905.259	5.181.348.283	92,31	
	Belanja Langsung	**6.305.995.500**	**6.208.820.427**	**98,45**	
	Belanja Pegawai	2.045.170.000	2.045.170.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	3.041.658.250	2.944.993.177	96,82	
	Belanja Modal	1.219.167.250	1.218.657.250	99,95	
	Jumlah	**12.050.900.759**	**11.044.694.197**	**91,65**	
14.	**Pemberdayaan Perempuan dan PA**				BP2KB
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**337.828.900**	**306.027.650**	**90,58**	
	Belanja Pegawai	33.100.000	22.600.000	68,27	
	Belanja Barang dan Jasa	304.728.900	283.427.650	93,01	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**337.828.900**	**306.027.650**	**90,58**	

15.	**KB & KS**				BP2KB
	Belanja Tidak Langsung	**2.788.049.152**	**2.652.568.059**	**95,14**	
	Belanja Pegawai	2.788.049.152	2.652.568.059	95,14	
	Belanja Langsung	**5.736.724.317**	**5.647.655.000**	**98,44**	
	Belanja Pegawai	2.880.440.000	2.880.340.000	99,99	
	Belanja Barang dan Jasa	2.106.971.100	2.027.379.000	96,22	
	Belanja Modal	749.313.217	741.936.000	99,01	
	Jumlah	**8.524.774.469**	**8.300.223.059**	**97,36**	
16.	**Perhubungan**				Dinas Perhubungan
	Belanja Tidak Langsung	**1.393.818.545**	**1.304.335.494**	**93,58**	
	Belanja Pegawai	1.393.818.545	1.304.335.494	93,58	
	Belanja Langsung	**5.137.033.300**	**4.859.144.784**	**94,59**	
	Belanja Pegawai	836.710.000	819.450.000	97,94	
	Belanja Barang dan Jasa	2.328.483.300	2.085.728.984	89,57	
	Belanja Modal	1.971.840.000	1.953.965.800	99,09	
	Jumlah	**6.530.851.845**	**6.163.480.278**	**94,37**	
17.	**Komunikasi dan Informatika**				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Belanja Tidak Langsung	**1.421.064.760**	**1.385.416.709**	**97,49**	
	Belanja Pegawai	1.421.064.760	1.385.416.709	97,49	
	Belanja Langsung	**2.188.080.000**	**1.991.291.957**	**91,01**	
	Belanja Pegawai	935.520.000	841.500.000	89,95	
	Belanja Barang dan Jasa	1.252.560.000	1.149.791.957	91,80	
	Belanja Modal	441.620.000	439.620.000	99,95	
	Jumlah	**3.609.144.760**	**3.376.708.666**	**93,55**	
18.	**Pertanahan**				Bagian Administrasi Pemerintahan
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**282.340.260**	**277.042.060**	**98,12**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	282.340.260	277.042.060	98,12	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**282.340.260**	**277.042.060**	**98,12**	
19.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**				Badan Kesbang Pol dan Linmas
	Belanja Tidak Langsung	**1.025.038.507**	**996.147.340**	**97,18**	
	Belanja Pegawai	1.025.038.507	996.147.340	97,18	
	Belanja Langsung	**1.980.000.000**	**1.976.379.867**	**99,82**	
	Belanja Pegawai	448.185.000	448.094.750	99,98	
	Belanja Barang dan Jasa	1.490.585.000	1.488.155.117	99,84	
	Belanja Modal	41.230.000	40.130.000	97,30	
	Jumlah	**3.005.038.507**	**2.972.527.207**	**98,91**	
20.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**				
	a) Adm. Pemerintahan				Bagian Adm. Pemerintahan
	Belanja Tidak Langsung	**-**	-	-	
	Belanja Pegawai	**-**	-	-	
	Belanja Langsung	**1.657.909.740**	**1.551.095.025**	**93,56**	
	Belanja Pegawai	221.410.000	221.410.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	741.010.000	643.025.285	86,78	
	Belanja Modal	695.489.740	686.659.740	98,73	
	Jumlah	**1.657.909.740**	**1.551.095.025**	**93,56**	
	b) Adm.Kesejahteraan Rakyat				Bagian Adm. Kesra
	Belanja Tidak Langsung	**-**	-	-	
	Belanja Pegawai	**-**	-	-	
	Belanja Langsung	**1.020.000.000**	**1.010.042.378**	**99,02**	
	Belanja Pegawai	101.700.000	101.700.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	912.500.000	902.542.378	98,91	
	Belanja Modal	5.800.000	5.800.000	100	
	Jumlah	**1.020.000.000**	**1.010.042.378**	**99,02**	

	c) Hukum				Bagian Hukum
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**1.046.220.000**	**1.028.531.900**	**98,30**	
	Belanja Pegawai	157.100.000	157.100.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	845.748.000	828.059.900	79,90	
	Belanja Modal	43.372.000	43.372.000	100	
	Jumlah	**1.046.220.000**	**1.028.851.900**	**98,30**	
	d) Adm. Pembangunan				Bagian Adm. Pembangunan
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**1.032.400.000**	**759.517.511**	**73,57**	
	Belanja Pegawai	228.990.000	210.065.000	91,73	
	Belanja Barang dan Jasa	791.910.000	538.852.511	68,04	
	Belanja Modal	11.500.000	10.600.000	92,17	
	Jumlah	**1.032.400.000**	**759.517.511**	**73,57**	
	e) Adm. Perekonomian				Bagian Adm. Perekonomian
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**880.000.000**	**879.318.957**	**99,92**	
	Belanja Pegawai	249.650.000	249.650.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	617.850.000	617.168.957	99,89	
	Belanja Modal	12.500.000	12.500.000	100	
	Jumlah	**880.000.000**	**879.318957**	**99,92**	
	f) Umum dan Perlengkapan				Bagian Umum
	Belanja Tidak Langsung	**5.309.336.927**	**5.170.590.481**	**97,38**	
	Belanja Pegawai	5.309.336.927	5.170.590.481	97,38	
	Belanja Langsung	**6.850.000.000**	**6.629.979.872**	**96,79**	
	Belanja Pegawai	1.108.860.000	1.100.860.000	99,27	
	Belanja Barang dan Jasa	5.363.909.470	5.158.253.872	96,16	
	Belanja Modal	377.230.530	370.866.000	98,31	
	Jumlah	**12.159.336.927**	11.800.570.353	**97,04**	
	g) Humas & Protokol				Bagian Humas dan Protokol
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**697.725.000**	**697.393.500**	**99,95**	
	Belanja Pegawai	186.150.000	186.150.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	511.575.000	511.243.500	99,94	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**697.725.000**	**697.393.500**	**99,95**	
	h) Organisasi				Bagian Organisasi
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**1.060.000.000**	**923.346.950**	**87,10**	
	Belanja Pegawai	185.450.000	179.600.000	84,66	
	Belanja Barang dan Jasa	852.550.000	721.746.950	96,85	
	Belanja Modal	22.000.000	22.000.000	100	
	Jumlah	**1.060.000.000**	**923.346.950**	**87,10**	
	i) Sekretariat KORPRI				Sekretariat KORPRI
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**533.061.258**	**522.074.000**	**97,94**	
	Belanja Pegawai	91.400.000	83.800.000	91,68	
	Belanja Barang dan Jasa	365.340.000	364.540.000	99,78	
	Belanja Modal	76.321.258	73.734.000	96,67	
	Jumlah	**533.061.258**	**522.074.000**	**97,94**	
	j) Sekretariat DPRD				Sekretariat DPRD
	Belanja Tidak Langsung	**5.731.413.136**	**5.692.365.365**	**99,31**	
	Belanja Pegawai	5.731.413.136	5.692.365.365	99,31	
	Belanja Langsung	**10.802.118.000**	**10.357.803.831**	**95,88**	
	Belanja Pegawai	826.092.000	819.287.000	99,17	
	Belanja Barang dan Jasa	9.644.026.000	9.206.958.831	95,46	
	Belanja Modal	332.000.000	331.558.000	99,86	
	Jumlah	**16.533.531.136**	**16.050.169.196**	**97,07**	

	k) Inspektorat				Inspektorat
	Belanja Tidak Langsung	**2.019.935.607**	**1.906.004.113**	**94,36**	
	Belanja Pegawai	2.019.935.607	1.906.004.113	94,36	
	Belanja Langsung	**2.750.000.000**	**2.709.466.181**	**98,53**	
	Belanja Pegawai	364.200.000	362.200.000	99,45	
	Belanja Barang dan Jasa	2.312.360.000	2.278.886.181	98,55	
	Belanja Modal	73.440.000	68.380.000	93,00	
	Jumlah	**4.769.935.607**	**4.615.470.294**	**96,76**	
	l) Adm. Keuangan Daerah				DPPKAD
	Belanja Tidak Langsung	**4.540.381.610**	**3.482.421.560**	**76,70**	
	Belanja Pegawai	4.540.381.610	3.482.421.560	76,70	
	Belanja Langsung	**6.734.700.000**	**6.217.465.513**	**92,30**	
	Belanja Pegawai	1.073.500.000	957.597.500	89,20	
	Belanja Barang dan Jasa	1.136.226.500	1.106.015.459	97,30	
	Belanja Modal	150.780.000	147.015.000	97,50	
	Jumlah	**11.275.081.610**	**9.699.887.073**	**86,02**	
	m) Adm. Kepegawaian dan Persandian				BKD
	Belanja Tidak Langsung	**1.735.619.744**	**1.674.182.224**	**96,46**	
	Belanja Pegawai	1.735.619.744	1.674.182.224	96,46	
	Belanja Langsung	**6.584.012.050**	**5.661.108.557**	**85,98**	
	Belanja Pegawai	674.029.250	642.229.250	95,28	
	Belanja Barang dan Jasa	5.671.382.200	4.780.423.307	84,29	
	Belanja Modal	238.600.000	238.456.000	97,92	
	Jumlah	**8.319.631.794**	**7.335.290.781**	**88,16**	
	n) Penanggulangan Bencana				BPBD
	Belanja Tidak Langsung	**1.109.428.421**	**911.266.700**	**82,14**	
	Belanja Pegawai	1.109.428.421	911.266.700	82,14	
	Belanja Langsung	**9.593.922.500**	**9.532.687.717**	**99,36**	
	Belanja Pegawai	972.670.000	972.670.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	8.591.252.500	8.530.012.717	99,29	
	Belanja Modal	30.000.000	30.000.000	100	
	Jumlah	**10.703.350.921**	**10.602.988.910**	**99,06**	
	o) Narkotika				Badan Narkotika
	Belanja Tidak Langsung	**703.560.122**	**675.991.221**	**96,10**	
	Belanja Pegawai	703.560.122	675.991.221	96,10	
	Belanja Langsung	**800.000.000**	**767,918,900**	**96,10**	
	Belanja Pegawai	171.080.000	167.329.700	97,8	
	Belanja Barang dan Jasa	568.552.000	540.221.200	95,1	
	Belanja Modal	60.368.000	60.368.000	100	
	Jumlah	**1.503.560.122**	**1.443,910,121**	**96,10**	-
	p) Kepamongprajaan				Sat. Pol PP
	Belanja Tidak Langsung	**627.967.094**	**591.683.194**	**94,22**	
	Belanja Pegawai	627.967.094	591.683.194	94,22	
	Belanja Langsung	**2.055.000.000**	**2.048.452.900**	**99,98**	
	Belanja Pegawai	1.578.650.000	1.578.350.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	468.550.000	462.602.900	98,73	
	Belanja Modal	7.800.000	7.500.000	96,15	
	Jumlah	**2.682.967.094**	**2.640.136.094**	**98,40**	
	q) Kecamatan Borong				Kecamatan Borong
	Belanja Tidak Langsung	**2.582.465.084**	**2.303.758.328**	**89,20**	
	Belanja Pegawai	2.582.465.084	2.303.758.328	89,20	
	Belanja Langsung	**1.025.000.000**	**1.018.884.500**	**99,00**	
	Belanja Pegawai	313.610.000	313.160.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	510.680.000	505.014.500	98,99	
	Belanja Modal	200.710.000	200.710.000	95,37	
	Jumlah	**3.607.465.084**	**3.322.642.828**	**92,10**	
	r) Kecamatan Rana Mese				Kecamatan Rana Mese
	Belanja Tidak Langsung	**1.321.974.320**	**1.276.943.805**	**96,59**	
	Belanja Pegawai	1.321.974.320	1.276.943.805	96,59	
	Belanja Langsung	**605.000.000**	**578.667.500**	**98,27**	
	Belanja Pegawai	165.150.000	163.800.000	99,18	

	Belanja Barang dan Jasa	388.350.000	363.607.500	93,62	
	Belanja Modal	51.500.500	51.260.000	99,53	
	Jumlah	**1.926.974.320**	**1.855.611.305**	**96,30**	
	s) Kecamatan Poco Ranaka				
	Belanja Tidak Langsung	**2.926.755.428**	**2.820.132.127**	**96,00**	Kecamatan Poco Ranaka
	Belanja Pegawai	2.926.755.428	2.820.132.127	96,00	
	Belanja Langsung	**940.000.000**	**940.000.000**	**97,00**	
	Belanja Pegawai	191.045.000	191.045.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	633.208.000	612.842.900	97,00	
	Belanja Modal	115.747.000	112.402.000	97,00	
	Jumlah	**3.866.755.428**	**3.736.422.027**	**97,62**	
	t) Kecamatan Poco Ranaka Timur				
	Belanja Tidak Langsung	**1.140.615.679**	**1.113.106.536**	**97,58**	Kecamatan Poco Rana Timur
	Belanja Pegawai	1.140.615.679	1.113.106.536	97,58	
	Belanja Langsung	**525.000.000**	**520.362.500**	**99,11**	
	Belanja Pegawai	170.450.000	170.450.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	300.050.000	298.092.500	99,34	
	Belanja Modal	54.500.000	51.820.000	95,08	
	Jumlah	**1.665.615.679**	**1.633.469.036**	**98,06**	
	u) Kecamatan Kota Komba				
	Belanja Tidak Langsung	**2.605.938.610**	**2.506.729.449**	**96,19**	Kecamatan Kota Komba
	Belanja Pegawai	2.605.938.610	2.506.729.449	96,19	
	Belanja Langsung	**935.000.000**	**910.714.000**	**97,40**	
	Belanja Pegawai	227.980.000	227.980.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	575.320.000	551.034.000	95,77	
	Belanja Modal	131.700.000	131.700.000	100	
	Jumlah	**3.540.938.610**	**3.417.443.449**	**96,51**	
	v) Kecamatan Lamba Leda				
	Belanja Tidak Langsung	**1.440.924.355**	**1.412.905.883**	**98,06**	Kecamatan Lamba Leda
	Belanja Pegawai	1.440.924.355	1.412.905.883	98,06	
	Belanja Langsung	**595.000.000**	**585.904.700**	**98,47**	
	Belanja Pegawai	210.420.000	209.330.000	99,48	
	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000	20.570.000	97,95	
	Belanja Modal	363.580.000	356.004.700	97,92	
	Jumlah	**2.035.924.355**	**1.998.810.583**	**98,18**	
	w) Kecamatan Elar				Kecamatan Elar
	Belanja Tidak Langsung	**1.637.214.107**	**1.599.396.407**	**97,69**	
	Belanja Pegawai	1.637.214.107	1.599.396.407	97,69	
	Belanja Langsung	**660.000.000**	**632.200.000**	**95,78**	
	Belanja Pegawai	157.350.000	156.400.000	99,39	
	Belanja Barang dan Jasa	426.650.000	399.800.000	93,70	
	Belanja Modal	76.000.000	76.000.000	100	
	Jumlah	**2.297.214.107**	**2.231.596.407**	**97,14**	
	x) Kecamatan Elar Selatan				Kecamatan Elar Selatan
	Belanja Tidak Langsung	**1.006.430.284**	**957.840.681**	**95,89**	
	Belanja Pegawai	1.006.430.284	957.840.681	95,89	
	Belanja Langsung	**630.000.000**	**577.686.400**	**92,00**	
	Belanja Pegawai	176.250.000	176.250.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	382.000.000	331.366.400	86,75	
	Belanja Modal	71.750.000	70.070.000	97,65	
	Jumlah	**1.636.430.284**	**1.535.527.081**	**93,83**	
	y) Kecamatan Sambi Rampas				Kecamatan Sambi Rampas
	Belanja Tidak Langsung	**2.400.794.770**	**2.346.150.433**	**97,96**	
	Belanja Pegawai	2.400.794.770	2.346.150.433	97,96	
	Belanja Langsung	**1.180.000.000**	**1.090.570.000**	**92,42**	
	Belanja Pegawai	229.600.000	223.600.000	97,38	
	Belanja Barang dan Jasa	675.400.000	610.400.000	90,37	
	Belanja Modal	275.000.000	256.570.000	93,29	
	Jumlah	**3.580.794.770**	**3.436.720.433**	**95,97**	

21.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**				BPMPD
	Belanja Tidak Langsung	**1.549.897.724**	**1.506.252.323**	**97,18**	
	Belanja Pegawai	1.549.897.724	1.506.252.323	97,18	
	Belanja Langsung	**3.116.050.000**	**2.880.623.982**	**92,44**	
	Belanja Pegawai	1.307.300.000	1.283.250.000	98,16	
	Belanja Barang dan Jasa	1.761.407.000	1.564.030.982	88,79	
	Belanja Modal	47.343.000	33.343.000	70,43	
	Jumlah	**4.665.947.724**	**4.386.876.305**	**94,02**	
22.	**Sosial**				Dinas Sosial dan Nakertrans
	Belanja Tidak Langsung	**2.071.924.109**	**2.002.313.344**	**96,64**	
	Belanja Pegawai	2.071.924.109	2.002.313.344	96,64	
	Belanja Langsung	**2.174.074.412**	**2.091.119.887**	**96,18**	
	Belanja Pegawai	469.930.000	469.930.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	1.615.085.412	1.535.298.437	95,06	
	Belanja Modal	89.059.000	87.644.000	98,41	
	Jumlah	**4.245.998.521**	**4.093.433.231**	**96,41**	
23.	**Kebudayaan**				Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Belanja Tidak Langsung	**1.920.153.941**	**1.863.383.319**	**97,04**	
	Belanja Pegawai	1.920.153.941	1.863.383.319	97,04	
	Belanja Langsung	**1.338.166.150**	**1.333.505.600**	**99,65**	
	Belanja Pegawai	166.250.000	165.800.000	99,73	
	Belanja Barang dan Jasa	980.316.150	976.105.000	99,57	
	Belanja Modal	191.600.000	191.600.000	100	
	Jumlah	**3.258.320.091**	**3.196.888.919**	**98,11**	
24.	**Statistik**				Bappeda
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**451.812.050**	**438.494.307**	**97,05**	
	Belanja Pegawai	13.550.000	12.800.000	97,13	
	Belanja Barang dan Jasa	438.262.050	425.934.307	97,19	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**451.812.050**	**438.734.307**	**97,11**	
25.	**Kearsipan**				Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**94.991.000**	**94.966.000**	**99,97**	
	Belanja Pegawai	12.600.000	12.600.000	100%	
	Belanja Barang dan Jasa	82.391.000	82.366.000	99,97	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**94.991.000**	**94.966.000**	**99,97**	
26.	**Perpustakaan**				Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Belanja Tidak Langsung	**626.752.071**	**606.976.707**	**96,84**	
	Belanja Pegawai	626.752.071	606.976.707	97,08	
	Belanja Langsung	**793.461.500**	**789.683.400**	**99,52**	
	Belanja Pegawai	469.550.000	468.125.000	99,70	
	Belanja Barang dan Jasa	323.911.500	321.558.400	99,27	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**1.420.213.571**	**1.396.660.107**	**98,34**	

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan

No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	SKPD Pelaksana
1.	**Kelautan dan Perikanan**				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Belanja Tidak Langsung	**1.632.419.257**	**1.532.677.154**	**93,89**	
	Belanja Pegawai	1.632.419.257	1.532.677.154	93,89	
	Belanja Langsung	**8.404.097.000**	**8.249.304.100**	**98,15**	
	Belanja Pegawai	817.600.000	817.600.000	100	
	Belanja Barang dan Jasa	7.486.997.000	7.332.374.100	97,93	
	Belanja Modal	99.500.000	99.330.000	99,82	
	Jumlah	**10.036.516.257**	**9.781.981.254**	**97,47**	

2.	**Pertanian**				Dinas Pertanian dan Peternakan
	Belanja Tidak Langsung	**3.591.391.561**	**3.377.676.645**	**94,05**	
	Belanja Pegawai	3.591.391.561	3.377.676.645	94,05	
	Belanja Langsung	**15.661.522.446**	**15.091.220.348**	**96,36**	
	Belanja Pegawai	1.706.460.000	1.577.183.000	92,42	
	Belanja Barang dan Jasa	4.899.475.000	4.469.302.348	91,22	
	Belanja Modal	9.055.587.446	9.044.735.000	99,88	
	Jumlah	**19.252.914.007**	**18.468.896.993**	**95,92**	
3.	**Kehutanan**				Dinas Kehutanan
	Belanja Tidak Langsung	**1.919.149.939**	**1.841.831.666**	**95,97**	
	Belanja Pegawai	1.919.149.939	1.841.831.666	95,97	
	Belanja Langsung	**4.376.354.500**	**4.326.963.275**	**98,87**	
	Belanja Pegawai	1.927.100.000	1.920.850.000	99,67	
	Belanja Barang dan Jasa	1.964.419.810	1.921.558.545	97,81	
	Belanja Modal	484.834.690	484.554.730	99,94	
	Jumlah	**6.295.504.439**	**6.168.794.941**	**97,98**	
4.	**Perkebunan**				Dinas Perkebunan
	Belanja Tidak Langsung	**1.444.576.793**	**1.394.370.320**	**96,53**	
	Belanja Pegawai	1.444.576.793	1.394.370.320	96,53	
	Belanja Langsung	**3.897.157.016**	**3.597.400.086**	**92,31**	
	Belanja Pegawai	488.770.000	463.370.000	94,80	
	Belanja Barang dan Jasa	3.334.479.516	3.061.446.589	91,81	
	Belanja Modal	73.907.500	72.583.500	98,21	
	Jumlah	**5.341.733.809**	**4.991.770.406**	**93,44**	
5.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				Dinas Energi dan SDM
	Belanja Tidak Langsung	**1.401.692.909**	**1.334.447.250**	**95,20**	
	Belanja Pegawai	1.401.692.909	1.334.447.250	95,20	
	Belanja Langsung	**4.068.800.000**	**3.877.923.955**	**95,31**	
	Belanja Pegawai	684.970.000	671.370.000	98,01	
	Belanja Barang dan Jasa	1.012.673.000	872.382.955	86,15	
	Belanja Modal	2.371.157.000	2.333.671.000	98,42	
	Jumlah	**5.470.492.909**	**5.212.371.205**	**95,28**	
6.	**Pariwisata**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**2.727.978.850**	**2.417.978.600**	**88,63**	
	Belanja Pegawai	522.880.000	522.855.000	99,98	
	Belanja Barang dan Jasa	456.295.850	452.709.600	99,21	
	Belanja Modal	1.748.803.000	1.442.414.000	82,91	
	Jumlah	**2.727.978.850**	**2.417.978.600**	**88,63**	
7.	**Perdagangan**				Dinas Koperindag
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	-	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**4.587.459.900**	**4.444.801.700**	**96,89**	
	Belanja Pegawai	147.650.000	141.650.000	95,94	
	Belanja Barang dan Jasa	704.185.000	700.136.900	99,43	
	Belanja Modal	3.735.624.900	3.603.014.800	96,45	
	Jumlah	**4.587.459.900**	**4.444.801.700**	**96,89**	
8.	**Perindustrian**				Dinas Koperindag
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**2.090.463.000**	**2.074.207.000**	**99,22**	
	Belanja Pegawai	29.650.000	28.650.000	96,63	
	Belanja Barang dan Jasa	859.300.000	853.262.000	99,29	
	Belanja Modal	1.201.513.000	1.192.295.000	99,23	
	Jumlah	**2.090.463.000**	**2.074.207.000**	**99,22**	
9	**Tranmigrasi**				Dinas Sosial & Nakertrans
	Belanja Tidak Langsung	**-**	**-**	**-**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Langsung	**46.885.975**	**46.885.975**	**100**	
	Belanja Pegawai	-	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	46.885.975	46.885.975	100	
	Belanja Modal	-	-	-	
	Jumlah	**46.885.975**	**46.885.975**	**100**	

Sumber : Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Manggarai Timur

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	SKPD	Nama	Jumlah Personil
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	1 Orang
2.	Asisten	1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum	1 Orang 1 Orang 1 Orang
3.	Staf Ahli Bupati	1. Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Staf Ahli Bupati Bid. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1 Orang 1 Orang 1 Orang
4.	Sekretariat Daerah	1. Bagian Adm. Pemerintahan 2. Bagian Adm. Kesejahtraan Rakyat 3. Bagian Adm. Pembangunan 4. Bagian Adm. Perekonomian 5. Bagian Humas dan Protokol 6. Bagian Organisasi 7. Bagian Hukum 8. Bagian Umum	11 Orang 7 Orang 5 Orang 4 Orang 5 Orang 7 Orang 6 Orang 15 Orang
5.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	13 Orang
6.	Sekretariat KPUD	Sekretariat KPUD	5 Orang
7.	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI	4 Orang
8.	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	31 Orang
9.	Dinas	1. Dinas PPO	2.543 Orang
		2. Dinas Kesehatan	662 Orang
		3. Dinas Pekerjaan Umum	51 Orang
		4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrsi	29 Orang
		5. Dinas Koperasi, UKM & Perindag	34 Orang
		6. Dinas Perhubungan	21 Orang
		7. Dinas Komunikasi & Informatika	23 Orang
		8. Dinas Kebudayaan & Pariwisata	32 Orang
		9. Dinas Kependudukan & Capil	28 Orang
		10. Dinas Kehutanan	32 Orang
		11. Dinas Pertanian & Peternakan	60 Orang
		12. Dinas Perkebunan	23 Orang
		13. Dinas Kelautan & Perikanan	26 Orang
		14. Dinas ESDM	21 Orang
		15. Dinas PPKAD	44 Orang
10.	Badan	1. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	22 Orang
		2. Badan Kepegawaian Daerah	28 Orang
		3. Badan Kesbangpol dan Linmas	15 Orang
		4. BPMPD	24 Orang
		5. BP2KB	44 Orang
		6. BPBD	20 Orang
		7. Badan Narkotika	11 Orang

		8. BLHD	20 Orang
		9. BP2KP	87 Orang
		10. Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum	1 Orang
		11. Badan Penanaman Modal Daerah, Pelayanan dan Perizinan Terpadu	20 Orang
11.	Kantor	1. Kantor Satuan Polisi PP	8 Orang
		2. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah	10 Orang
12,	Kecamatan	1. Kec. Borong 2. Kec. Poco Ranaka 3. Kec. Kota Komba 4. Kec. Elar 5. Kec. Lamba Leda 6. Kec. Sambi Rampas 7. Kec. Rana Mese 8. Kec. Poco Ranaka Timur 9. Kec. Elar Selatan	43 Orang 54 Orang 43 Orang 29 Orang 25 Orang 44 Orang 25 Orang 22 Orang 19 Orang
13.	**Jumlah**		**4.363 Orang**

Sumber : BKD Kabupaten Manggarai Timur

Catatan : - Jumlah PNS Kabupaten Manggarai Timur adalah **4.363** orang PNS SKPD ditambah Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus PNS.

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Urusan Pendidikan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.3.079.091.508,- dan realisasi Rp.2.400.148.622,- atau 77,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j) Penyediaan makan dan minum kantor
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l) Monitoring dan evaluasi

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.1.180.574.600,- dan realisasi Rp.1.006.144.588,- atau 85,22%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan gedung kantor
   b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.321.000,- atau 94,89%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program pendidikan anak usia dini, dialokasikan dana Rp.1.037.785.000,- dan realisasi Rp.946.635.740,- atau 91,22%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan gedung sekolah
   b) Penambahan ruang guru sekolah
   c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
   d) Pengembangan pendidikan anak usia dini
   e) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
5) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan (9) tahun, dialokasikan dana Rp.10.239.919.426,- dan realisasi Rp.8.502.343.521,- atau 83,03%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa
   b) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
   c) Pengadaan meubelair sekolah
   d) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
   e) Penyelenggaraan paket A setara SD
   f) Penyelenggaraan paket B setara SMP
   g) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
   h) Pengembangan Comprehesive Teaching and Learning (CTL)
   i) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
   j) Pengembangan kapasitas standar pelayanan minimum
   k) Kampanye publik tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
   l) Bimbingan teknis Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
   m) Pengadaan media pendidikan
   n) Penambahan ruang kelas sekolah

o) Penambahan ruang guru sekolah
p) Penambahan gedung serba guna/aula

6) Program pendidikan menengah, dialokasikan dana Rp.6.261.744.500,- dan realisasi Rp.5.926.939.650,- atau 94,65%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan gedung sekolah
   b) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
   c) Pengadaan meubelair sekolah
   d) Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah
   e) Pelatihan penyusunan kurikulum
   f) Penyelenggaraan paket C setara SMA
   g) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
   h) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMA/SMK
   i) Kampanye publik tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

7) Program pendidikan non formal, dialokasikan dana Rp.675.584.000,- dan realisasi Rp.483.344.500,- atau 73,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan pendidikan keaksaraan
   b) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
   c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8) Program pendidikan luar biasa, dialokasikan dana Rp.130.500.000,- dan realisasi Rp.99.000.000,- atau 75,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan ruang locker siswa
   b) Pengadaan alat rumah tangga sekolah
   c) Pelatihan penyusunan kurikulum

9) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, dialokasikan dana Rp.28.016.443.900,- dan realisasi Rp.27.852.868.240,- atau 99,42%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
   b) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
   c) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
   d) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
   e) Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)
   f) Kegiatan literasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian angka kredit

10) Program manajemen pelayanan pendidikan, dialokasikan dana Rp.1.973.317.000,- dan realisasi Rp.1.153.419.900,- atau 58,45%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
b) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
c) Pembinaan dewan pendidikan
d) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang isu pendidikan.

b. Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai, perangko dan terlaksananya pengiriman jasa surat-surat dinas guna mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung operasional perkantoran.
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpelihara dan terwujudnya ketersediaan administrasi kendaraan dinas roda empat dan roda dua guna mendukung mobilitas perkantoran.
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelola keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat pembersih dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor yang siap pakai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor yang digunakan untuk kepentingan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, UPTD, SKB, SDLBN dan SMA/SMK Negeri guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen penggandaan guna mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket meubelair berupa kursi, meja dan lemari guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

j) Penyediaan makan minum rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor guna memperlancar aktivitas perkantoran dan jalannya rapat.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

l) Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan guna mengukur capaian kinerja SKPD.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan :

a) Pembangunan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit gedung kantor UPT Dinas PPO Kecamatan Kota Komba guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas guna mendukung operasional perkantoran.

c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laptop, printer, AC dan kain gorden.

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor guna memperlancar kegiatan pemerintahan.

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk 1(satu) unit kendaraan roda empat dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan dinas roda dua guna mendukung operasional perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur kinerja dan mengetahui kondisi keuangan SKPD.

4) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

a) Pembangunan gedung sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit gedung TK Negeri Satap Kisol untuk mendukung kegiatan peningkatakan mutu pendidikan.

b) Penambahan ruang guru sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) ruang Guru TK Negeri guna mendukung kegiatan belajar mengajar.

c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten.

d) Pengembangan PAUD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pertemuan Bunda PAUD dan para pendidik guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

e) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya seminar kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD guna mengetahui perkembangan model kurikulum terbaru.

5) Program pendidikan wajib belajar 9 tahun :

a) Pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya buku – buku dan alat tulis siswa guna mendukung proses belajar para siswa.

b) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya alat praktik dan peraga siswa guna meningkatkan ketrampilan siswa.

c) Pengadaan meubelair sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meubelair sekolah guna mendukung kegiatan wajib belajar 9 tahun untuk SD di Kabupaten Manggarai Timur.

d) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 16 (enam belas) unit ruang kelas SD dan 1 (satu) unit ruang kelas SMP guna mendukung pelaksanaan kegiatan wajib belajar sembilan tahun.

e) Penyelenggaraan paket A setara SD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 4 kelompok belajar guna menyetarakan paket A dengan SD.

f) Penyelenggaraan paket B setara SMP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 3 kelompok belajar guna menyetarakan paket B dengan SMP.

g) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya OSN, lomba seni budaya, pertandingan olah raga dan pop singger guna meningkatkan minat, bakat dan kreativitas siswa.

h) Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pengembangan otak tengah bagi 50 orang siswa guna meningkatkan kemampuan siswa.

i) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pemahaman seluruh satuan pendidik dan masyarakat di 9 kecamatan guna menambah wawasan pendidik dan masyarakat.

j) Pengembangan kapasitas standar pelayanan minimum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tim teknis SPM Kabupaten Manggarai Timur guna menjaga kapasitas SPM.

k) Kampanye/penyadaran publik tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), telah dilaksankan dengan hasil/manfaat : meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat dari masa anak-anak guna menjaga kesehatan anak-anak.

l) Bimbingan teknis sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan bagi guru – guru SD dan SMP guna meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan STBM di sekolah.

m) Pengadaan media pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya media pendidikan guna mendukung kegiatan pendidikan wajib belajar 9 tahun.

n) Penambahan ruang kelas sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 13 (tiga belas) unit ruang kelas baru untuk SD guna mendukung kegiatan belajar mengajar siswa/siswi SD.

o) Penambahan ruang guru sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya ruang guru sekolah yang layak dan mendukung kinerja guru.

p) Pembangunan ruang serba guna/aula, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya ruang serba guna/aula yang berlokasi di SMPN 1 Borong.

6) Program pendidikan menengah :

a) Pembangunan gedung sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung sekolah guna meningkatkan SDM.

b) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sanitary yang memadai di 2 SMA Negeri.

c) Pengadaan meubelair sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 64 set/pasang untuk SMA Swasta St. Arnoldus Mukun guna mendukung kegiatan belajar mengajar.

d) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehabilitasi 4 ruang kelas pada 2 sekolah guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

e) Pelatihan penyusunan kurikulum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan kurikulum guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pendidik.

f) Penyelenggaraan paket C setara SMA, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyelenggaraan paket C setara SMA sehingga terwujudnya ketersediaan SDM yang memadai.

g) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan persiapan, monitoring bimbingan serta monitoring pelaksanaan dan verifikasi berkas dalam proses akreditasi sekolah menengah.

h) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya lomba cerdas cermat, lomba olimpiade sains dan lomba seni budaya guna meningkatkan kreativitas siswa untuk SMA dan SMK.

i) Kampanye/penyadaran publik tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan guna meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat sejak dari masa sekolah.

7) Program pendidikan non formal :

a) Pembangunan pendidikan keaksaraan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan.

b) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan dalam bidang perbengkelan kayu guna meningkatkan SDM yang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup.

c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal guna memenuhi kebutuhan pendidikan non formal.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan monitoring pendataan kelembagaan PAUD guna memenuhi kebutuhan data/dokumen sebagai pedoman membuat kebijakan program/kegiatan.

8) Program pendidikan luar biasa :

a) Pembangunan ruang locker siswa, tidak dilaksanakan karena tidak dibutuhkan penggunaannya dalam ruang kelas.

b) Pengadaan alat rumah tangga sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya biaya kehidupan rumah tangga SLBN Borong diantaranya biaya pengobatan untuk 50 siswa/i dan tersedianya makan dan minum asrama SLB.

c) Pelatihan penyusunan kurikulum, tidak dilaksanakan karena bidang terkait tidak melakukan persiapan terkait dokumen KAK.

9) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan :

a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya ujian sertifikasi guru/tenaga pendidik guna meningkatkan kesejahteraan pendidik.

b) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya guru yang siap mengikuti PLPG guna meningkatkan kompetensi guru.

c) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksanaanya kegiatan pembinaan kelompok kerja guru guna memngarahkan guru dalam melakukan pembelajaran.

d) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya honorarium bagi Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang dibiayai dari dana BOSDA.

e) Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi kegiatan MGMP.

f) Kegiatan literasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian angka kredit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya penilaian kinerja guru guna meningkatkan mutu guru.

10) Program manajemen pelayanan pendidikan :

a) Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya UN/US pada tahun anggaran 2016 (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK).

b) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, tidak dilaksanakan karena bidang terkait tidak mengajukan rancangan atau KAK.

c) Pembinaan dewan pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi pembentukan pengurus dan pelatihan pembinaan dewan pendidikan.

d) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang isu pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya seminar sehari para guru kepala sekolah tentang berbagai isu penting bidang pendidikan.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 2.538 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a)	Sarjana (S2)	: 5 orang
b)	Sarjana (S1)	: 1060 orang
c)	Sarjana Muda	: 611 orang
d)	SLTA	: 838 orang
e)	SLTP	: 14 orang
f)	SD	: 10 orang

2) Menurut Pangkat/Golongan

a)	Golongan IV	: 770 orang
b)	Golongan III	: 998 orang
c)	Golongan II	: 763 orang
d)	Golongan I	: 7 orang

3) Jabatan Struktural

a)	Eselon II	: 1 orang
b)	Eselon III	: 6 orang
c)	Eselon IV	: 17 orang

4) Jabatan Fungsional : 107 orang

5) Staf : 2.407 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.273.876.839.309,- dan realisasi Rp.246.187.021.242,- atau 89,89%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

1) Setiap tahun SKPD menyusun rencana kebutuhan dalam rencana kerja berdasarkan Renstra SKPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang dan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
2) Selanjutnya SKPD menyusun Renja mengacu kepada RKPD dan Renstra SKPD.
3) Pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS.
4) SKPD menyusun RKA mengacu kepada KUA PPAS.
5) Pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran berjalan.
6) Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
7) Berdasarkan APBD dan Penjabarannya, SKPD membuat DPA sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan SKPD.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Kurangnya pemahaman terhadap inti kegiatan sehingga ada kegiatan yang tidak terlaksana

b) Sering terjadi keterlambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan

c) Tidak tertib administrasi, khususnya berkaitan dengan jadwal kegiatan sesuai dengan anggaran kas dan SPJ atau laporan kegiatan yang selalu terlambat masuk ke meja bendahara.

2) Solusi

a) Penataan managerial kepegawaian melalui analisis jabatan dan beban kerja bidang atau subbidang

b) Review TUPOKSI pada bidang dan seksi sehingga tidak terjadinya kebingungan dan lempar tanggung jawab

c) Penekanan pada kedisplinan mentaati jadwal kegiatan sebagaimana tertera pada anggaran kas DPA.

2. Urusan Kesehatan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.985.378.656,- dan realisasi Rp.739.869.418,- atau 75,08%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l) Penyediaan jasa tim penilai angka kredit dan sekretariat angka kredit

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.1.374.686.725,- dan realisasi Rp.1.088.326.563,- atau 79,17%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c) Pengadaan meubelair
d) Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor
e) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.323.500.000,- dan realisasi Rp.277.750.000,- atau 85,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.13.750.000,- dan realisasi Rp.13.750.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
5) Program obat dan perbekalan kesehatan, dialokasikan dana Rp.2.664.280.000,- dan realisasi Rp.985.749.425,- atau 37,00 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
   b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
   c) Peningkatan mutu penggunaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6) Program upaya kesehatan masyarakat, dialokasikan dana Rp.24.820.707.635,- dan realisasi Rp.12.358.069.519,- atau 49,79%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan, termasuk obat generik esensial
   b) Peningkatan kesehatan masyarakat
   c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
   d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
   e) Monitoring standar pelayanan kesehatan dasar
   f) Pelayanan perizinan sarana kesehatan
7) Program pengawasan obat dan makanan, dialokasikan dana Rp.60.565.000,- dan realisasi Rp.50.878.119,- atau 84,01%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
   b) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
   c) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
8) Program pengembangan obat asli Indonesia, dialokasikan dana Rp.40.220.000,- dan realisasi Rp.40.220.000,- atau 100 %, guna mendukung kegiatan pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

9) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dialokasikan dana Rp.8.831.842.750,- dan realisasi Rp.7.174.292.750,- atau 81,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
   b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
   c) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
   d) Penyelenggaraan kegiatan Desa siaga
10) Program perbaikan gizi masyarakat, dialokasikan dana Rp.332.434.000,- dan realisasi Rp.248.595.800,- atau 74,78%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
   b) Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
   c) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
11) Program pengembangan lingkungan sehat, dialokasikan dana Rp.323.370.000,- dan realisasi Rp.319.390.000,-atau 98,77%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
   b) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   d) Pegadaan kartu rumah
12) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dialokasikan dana Rp.1.139.683.637,- dan realisasi Rp.671.834.250,- atau 58,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
   b) Pengadaan alat dan bahan fogging
   c) Pengadaan vaksin penyakit menular
   d) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
   e) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic
   f) Peningkatan imunisasi
   g) Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah
   h) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
   i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   j) Pelatihan manajemen imunisasi tingkat puskesmas

13) Program standarisasi pelayanan kesehatan, dialokasikan dana Rp.370.942.000,- dan realisasi Rp.306.495.000,- atau 82,63%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
   b) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
   c) Penyusunan standar analisis pelayanan kesehatan
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   e) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan tingkat kabupaten dan puskesmas
14) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya, dialokasikan dana Rp.11.606.608.991,- dan realisasi Rp.10.219.201.020,- atau 88,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan puskesmas keliling
   b) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
   c) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
   d) Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
   e) Rahabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
   f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   g) Pembangunan rumah Dokter
   h) Rehabilitasi Puskesmas
   i) Pembangunan poskesdes
   j) Rehabilitasi Rumah Para Medis
   k) Rehabilitasi rumah dokter
   l) Pembangunan instalasi farmasi kabupaten
   m) Pengadaan sarana prasarana IFK
   n) Penambahan ruang puskesmas
15) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dialokasikan dana Rp.9.209.311.000,- dan realisasi Rp.8.201.672.000,- atau 89,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sakit.
16) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dialokasikan dana Rp.984.596.500,- dan realisasi Rp.953.636.550,- atau 96,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
   b) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   d) Kemitraan program AIPMNH AUSAID

17) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, dialokasikan dana Rp.79.000.000,- dan realisasi Rp.54.450.000,- atau 68,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyuluhan kesehatan anak balita
   b) Pelatihan dan pendidikan anak balita
18) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dialokasikan dana Rp.115.038.400,- dan realisasi Rp.72.688.400,- atau 63,19%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
   b) Pengadaan KMS lansia
   c) Penyuluhan penyakit degeneratif bagi lansia
19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dialokasikan dana Rp.329.434.000,- dan realisasi Rp.266.947.000,- atau 81,03%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Supervisi fasilitatif dalam mendukung revolusi KIA.
   b) Komunikasi 7H2.
   c) Pelatihan PONED
   d) Pertemuan AMP, bidan coordinator, dukun dan kader kesehatan
   e) Sosialisasi kelas ibu hamil
20) Program peningkatan pelayanan kesehatan remaja, dialokasikan dana Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.31.000.000,- atau 77,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi remaja di sekolah
   b) Pelatihan kelompok peduli kesehatan remaja (PKPR)

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai, buku cek dan giro serta jasa pengiriman sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa air dan listrik bagi Puskesmas dan Kantor Dinas Kesehatan sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelola keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedinya paket pembersih kantor guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan asri.
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor berupa komputer PC, laptop dan printer guna mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor bagi dinas kesehatan sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayanan perkantoran.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan cetakan dan penggadaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen listrik dan jasa penerangan kantor sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas perkantoran.
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan berupa koran sehingga dapat mendukung peningkatan wawasan aparatur Dinas Kesehatan.
j) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan di Pusat dan Provinsi.
l) Penyediaan jasa tim penilai angka kredit dan sekretariat angka kredit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data angka kredit Lingkup Dinas Kesehatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laptop dan audio visual guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

c) Pengadaan meubelair telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meubelair dan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan guna mendukung kenyamanan bekerja.

d) Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor dinas kesehatan dan gedung farmasi.

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua sehingga dapat memperlancar mobilitas perkantoran

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya bantuan pendidikan S1 Keperawatan 1 orang, S2 sebanyak 2 orang dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa izin belajar 1 orang guna meningkatkan kualitas SDM aparatur.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna mengukur capaian kinerja.

5) Program obat dan perbekalan kesehatan :

a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan obat-obatan sehingga terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tenaga farmasi kesehatan yang berkompeten di setiap Puskesmas guna meningkatkan kualitas dalam memberikan obat kepada pasien.

c) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya distribusi obat dan perbekalan kesehatan guna pemerataan penyebaran dan persediaan.

d) Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan obat kesehatan di setiap Puskesmas guna mengetahui situasi dan kondisi kesehatan masyarakat.

6) Program upaya kesehatan masyarakat :

a) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial guna mendukung pelayanan kesehatan.

b) Peningkatan kesehatan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa lembur pegawai dan Para Medis ruang rawat inap.

c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa honorarium bagi Dokter PTT, Tenaga Kontrak, Tenaga Harian Lepas, Perawat, dan Tenaga Bidan sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tabung oksigen dan regulator puskesmas dan biaya operasional GFK guna memenuhi kebutuhan pasien.

e) Monitoring standar pelayanan kesehatan dasar, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya ATK kegiatan, tersedianya makan dan minum, biaya cetak dan penggandaan serta transportasi dan dokumentasi sehingga proses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

f) Pelayanan perijinan sarana kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perijinan sarana kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.

7) Program pengawasan obat dan makanan :

a) Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorer nara sumber, panitia, makan/minum kegiatan, biaya akomodasi dan sewa gedung guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang sesuai stadard kesehatan.

b) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengawasan persebaran obat dan makanan di apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan guna mencegah peredaran makanan dan obat yang membahayakan kesehatan.

c) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya biaya pemeriksaan sampel makanan di BPOM Kupang guna mengetahui kualitas obat dan makanan.

8) Program pengembangan obat asli Indonesia, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alami Indonesia dengan hasil/manfaat : meningkatnya pemahaman masyarakat terkait tanaman obat keluarga yang muda dijangkau masyarakat sesuai standarisasi kesehatan guna menangani kesehatan pada tahap pertama.

9) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat :
   a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya warles dan megafon guna mendukung pelaksanaan penyebaran informasi bagi masyarakat.
   b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan prilaku pola hidup sehat pada masyarakat.
   c) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium tenaga penyuluh guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan.
   d) Penyelenggaraan kegiatan desa siaga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya bimbingan teknis desa siaga guna meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya menjaga kesehatan.
10) Program perbaikan gizi masyarakat :
   a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya PMT bagi balita KEP dan Bumil KEK guna meningkatkan kesehatan balita dan bumil.
   b) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemantauan garam yodium tingkat rumah tangga, serta pengangkutan logistik gizi dari provinsi ke kabupaten.
   c) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya konseling, pemantauan garam yodium tingkat rumah tangga dan pelatihan kadarsi.
11) Program pengembangan lingkungan sehat :
   a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sampel air yang sesuai dengan stadarisasi kesehatan guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
   b) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan STBM tingkat kecamatan guna meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya hasil evaluasi terhadap lingkungan sehat dan dampak lingkungan yang kurang sehat.
   d) Pengadaan kartu rumah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kartu rumah guna memperlancar proses pelayanan kesehatan.

12) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular :

a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk guna menekan jumlah populasi Nyamuk Malaria.

b) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foging, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket bahan dan peralatan fogging sehingga terwujudnya upaya pencegahan penyakit menular.

c) Pengadaan vaksin penyakit menular, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) guna mencegah penyebaran penyakit rabies.

d) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e) Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan belkaga, malaria dan HIV.

f) Peningkatan imunisasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : telaksananya kegiatan pengepakan vaksin, pengambilan vaksin di Kupang, dan pelaksanaan program PIN (Pekan Imunisasi Nasional).

g) Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan penanggulangan wabah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya investigasi dalam rangka penanggulangan KLB.

h) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi kawasan tanpa rokok (KTR) guna mencegah resiko bagi perokok pasif dan menjaga kebersihan lingkungan kantor.

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring evaluasi bimbingan teknis P2M.

j) Pelatihan manajemen imunisasi tingkat puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan program imunisasi guna meningkatkan kompetensi pelaku imunisasi.

13) Program standarisasi pelayanan kesehatan :

a) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat evaluasi tahunan sehingga dapat teridentifikasinya kelebihan dan kekurangan proses pelaksanaan program/kegiatan.

b) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data profil

kesehatan sehingga terpenuhinya informasi dasar pelayanan bidang kesehatan.

c) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen perencanaan tingkat Puskesmas sebagai pedoman belanja pelayanan kesehatan.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi di Puskesmas guna mengetahui perkembangan program/kegiatan.

e) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan tingkat kabupaten dan puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya RUK tingkat puskesmas.

14) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana/prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya :

a) Pengadaan puskesmas keliling, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas puskesmas keliling guna memperlancar mobilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

b) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bangunan rabat beton dan pagar IFK, terbayarnya honor PPTK fisik, staf pengelola proyek 2 orang, PPK, perjalanan dinas tim PHO dan ATK pokja.

c) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kegiatan peningkatan status puskesmas Dampek, Mano Beamuring dan Mamba menjadi puskesmas rawat inap guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

d) Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kegiatan peningkatan status Pustu Mombok dan Lebi menjadi puskesmas non rawat inap.

e) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Bea Waek guna menjaga kenyamanan bekerja petugas kesehatan.

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring pelaksanaan proyek pembangunan sarana kesehatan tahun 2016 guna mengetahui perkembangan jalannya proyek.

g) Pembangunan rumah Dokter, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah Dokter untuk Puskesmas Mombok dan Lebi.

h) Rehabilitasi puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rehabilitasi Puskesmas Pota, Wukir, Lawir dan Lengko Ajang.

i) Pembangunan poskesdes, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya poskesdes Watu Mori dan rehap poskesdes Lawi dan Golo Rentung.

j) Rehabilitasi rumah para medis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehap rumah paramedic puskesmas Dampek, puskesmas Waelengga dan puskesmas Pota guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

k) Rehabilitasi rumah dokter, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehap rumah dokter Pota dan rumah dokter Mukun guna menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para dokter.

l) Pembangunan instalasi farmasi kabupaten (IFK) baru, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembangunan gedung IFK baru.

m) Pengadaan sarana dan prasarana IFK, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana gedung IFK baru.

n) Penambahan ruang puskesmas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya penambahan ruang puskesmas Weleng.

15) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, melalui pembangunan rumah sakit, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pembangunan RSUD guna menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat.

16) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan :

a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya premi jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

b) Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor Sikda dan biaya pengadaan ATK sehingga dapat mengetahui informasi kesehatan masyarakat.

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev bimtek JKN sebagai pedoman pelayanan JKN kepada masyarakat.

d) Kemitraan AIPMNH AUSAID, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan kemitraan AIPMNH AUSAID guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

17) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita :

a) Penyuluhan kesehatan anak balita, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi kelas bayi balita di 23 puskesmas guna menjaga kesehatan anak balita.

b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan orientasi penatalaksanaan bayi balita yang bermasalah di 23 puskesmas.

18) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia :

a) Pendidikan dan perawatan kesehatan lansia, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan orientasi pada lansia guna menjaga kesehatan dan kebugaran bagi lansia.

b) Pengadaan KMS lansia, tidak dilaksanakan karena keterlambatan dalam proses pengadaan.

c) Penyuluhan penyakit degenerati bagi lansia, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan lansia pada 23 puskesmas guna meningkatkan pemahaman lansia pentingnya menjaga kesehatan.

19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak :

a) Supervisi fasilitatif dalam mendukung revolusi KIA/manfaat : terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah guna mendukung revolusi KIA.

b) Komunikasi 7H2, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya pulsa komunikasi 7H2 untuk 23 puskesmas guna memperlancar komunikasi terkait kesehatan masyarakat.

c) Pelatihan PONED, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan PONED dan terbayarnya biaya pengadaan alat peraga kegiatan.

d) Pertemuan AMP, Bidan Koordinator, Dukun dan Kader Kesehatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pertemuan AMP, bidan koordinator, dukun dan kader kesehatan.

e) Sosialisasi kelas ibu hamil, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi kelas ibu hamil guna meningkatkan pemahaman ibu hamil akan kehamilan.

20) Program peningkatan pelayanan kesehatan remaja :

a) Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi remaja di sekolah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan anak usia remaja pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi.

b) Pelatihan kelompok peduli kesehatan remaja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan pada kelompok peduli kesehatan remaja guna meningkatkan kepedulian kaum remaja akan kesehatan dan mencegah pergaulan bebas.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 662 orang,yaitu :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 2 orang
   b) Sarjana (S1) : 95 orang
   c) Sarjana Muda : 390 orang
   d) SLTA : 174 orang
   e) SLTP : 1 orang
2) Menurut Pangkat/Golongan/Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 7 orang
   b) Golongan III : 480 orang
   c) Golongan II : 174 orang
   d) Golongan I : 1 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon II : 1 orang
   b) Eselon III : 5 orang
   c) Eselon IV : 35 orang
4) Staf : 621 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.96.808.619.148,- dan realisasi Rp.84.768.023.014,- atau 87,56%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Terbatasnya jumlah personil.
   b) Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2) Solusi :
   a) Pengadaan tenaga harian lepas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan baik untuk di Dinas Kesehatan maupun di UPTD.
   b) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai di lingkup Dinas Kesehatan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa.

3. **Urusan Lingkungan Hidup**

a. **Program dan Kegiatan**

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.549.660.000,- dan realisasi Rp.546.486.500,- atau 99,44%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j) Penyediaan makanan dan minuman rapat
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.224.520.000,- dan realisasi Rp.223.082.500,- atau 99,36%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.21.056.000,- dan realisasi Rp.18.823.900,- atau 96,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.3.549.000,- dan realisasi Rp. 3.549.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

5) Program pengembangan kinerja persampahan, dialokasikan dana Rp.1.363.013.000,- dan realisasi Rp.1.022.225.500,- atau 75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
c) Bimbingan teknis persampahan
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dialokasikan dana Rp.147.809.000,- dan realisasi Rp.147.759.000,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemantauan kualitas lingkungan
   b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.1.761.106.000,- dan realisasi Rp. 1.760.736.000,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber daya air
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, dialokasikan dana Rp.221.249.000,- dan realisasi Rp.221.249.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
9) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.40.000.000,- dan realisasi Rp.40.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan hidup.
10. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dialokasikan dana Rp.667.119.109,- dan realisasi Rp.667.118.200,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan ruang terbuka hijau.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembelian perangko, meterai dan pengiriman surat dinas kilat dan biasa sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik sehingga dapat memperlancar aktivitas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelolah keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya alat pembersih ruangan kantor sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perkantoran.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor yang dapat membantu kelancaran penyelesaian tugas perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penjilidan dan foto kopi guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa penerangan kantor guna kelancaran kegiatan kantor.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.

j) Penyediaan makanan dan minuman rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman guna kelancaran kegiatan kantor.

k) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna mewujudkan sinkronisasi program/kegiatan.

l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil : terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga terukurnya kinerja SKPD.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda dua untuk kelancaran aktivitas perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat sehingga dapat mempercepat mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan diklat teknis lingkungan hidup guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan dan penanggulangan dampak lingkungan hidup.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur kinerja SKPD.
5) Program pengembangan kinerja persampahan :
   a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tong sampah sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, bak sampah permanen 2 (dua) unit dan pengadaan tanah dalam rangka perluasan TPA.
   b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya Petugas Kebersihan Lapangan (PKL) sebanyak 30 orang guna membantu mewujudkan pelayanan kebersihan lingkungan.
   c) Bimbingan teknis persampahan, tidak dilaksanakan karena kegiatan bimbingan teknis pengelolaan sampah diselenggarakan oleh provinsi dan pusat.
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey lokasi pembangunan bak sampah, survey lokasi TPA dan pendataan wajib retribusi sampah.
6) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup :
   a) Pemantauan kualitas lingkungan hidup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honor panitia penyusunan dokumen pengujian kualitas air guna menjaga persediaan air bersih untuk masyarakat.
   b) Peningkatan peran serta masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksankan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan sosialisasi bidang lingkungan hidup.
7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam :
   a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : telah ditanamnya 150.000 anakan (mahoni, jatih putih, ara dan beringin) guna melestarikan lingkungan hidup.
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey lokasi penanaman anakan dan pembangunan embung.

8) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan hasil/manfaat : tersedianya bibit tanam mahoni sebanyak 48.333 anakan, jati putih 10.000 anakan dan sengon sebanyak 5.000 anakan.

9) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam telah dilaksanakan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dengan hasil/manfaat : tersedianya buku laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD) sebanyak 1 dokumen guna mengetahui kondisi lingkungan hidup daerah.

10) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan penataan ruang terbuka hijau, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya ruang terbuka hijau sehingga terwujudnya upaya mengurangi efek rumah kaca dan penyerapan karbon.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a)	Sarjana (S2)	:	1 orang
b)	Sarjana (S1)	:	12 orang
c)	Sarjana Muda	:	6 orang
d)	SLTA	:	1 orang

2) Menurut Pangkat/Golongan/Ruang Gaji

a)	Golongan IV	:	3 orang
a)	Golongan III	:	15 orang
b)	Golongan II	:	2 orang

3) Jabatan Struktural

a)	Eselon IV	:	8 orang
b)	Eselon III	:	4 orang
c)	Eselon II	:	1 orang

4) Staf : 7 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.390.666.774,- dan realisasi Rp.6.332.032.511,- atau 99,08%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Sarana dan prasarana persampahan banyak yang rusak seperti tong sampah dan bak sampah

b) Masyarakat masih mencampuradukan sampah organik dan unorganik

c) Lokasi TPA tidak layak secara teknis

2) Solusi

a) Memperbaiki tong sampah dan bak sampah yang rusak.

b) Sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep pengolahan sampah dengan konsep 3R yaitu Recovery-Reuse-Recyle (pemilahan-pemanfaatan kembali dan daur ulang).

c) Penentuan lokasi pembangunan TPA yang memenuhi syarat.

4. Urusan Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.310.650.000,- dan realisasi Rp.1.161.414.190,- atau 88,61%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.714.884.200,- dan realisasi Rp.616.046.600,- atau 86,17%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

c) Pengadaan meubelair

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.34.500.000,- dan realisasi Rp.16.536.400,- atau 47,93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.7.000.000,- dan realisasi Rp.7.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
5) Program pembangunan jalan dan jembatan, dialokasikan dana Rp.105.152.001.200,- dan realisasi Rp.104.939.469.366,- atau 99,80%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Perencanaan pembangunan jalan
   b) Pembangunan jalan (DAU)
   c) Pembangunan jembatan
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   e) Pembangunan jalan (DAK)
   f) Penyusunan database jalan dan jembatan
   g) Pembangunan jembatan
6) Program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong, dialokasikan dana Rp.892.065.000,- dan realisasi Rp.879.652.000,- atau 98,61%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan saluran drainase /gorong – gorong
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dialokasikan dana Rp.2.800.851.000,- dan realisasi Rp.2.780.267.000,- atau 99,27%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
   b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dialokasikan dana Rp.285.000.000,- dan realisasi Rp.284.990.000,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.
9) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dialokasikan dana Rp.19.258.988.100,- dan realisasi Rp.19.177.729.550,- atau 99,58%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
   b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi secara partisipatif (pendamping WISMP)
e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)
f) Pemutakhiran database sumber daya air dan irigasi

10) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dialokasikan dana Rp.16.620.638.517,- dan realisasi Rp.13.979.446.120,- atau 84,11%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
b) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
c) Pengembangan system distribusi air minum
d) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAU)
e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
f) Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SANIMAS/pendamping)
g) Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS/pendamping)
h) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAK)

11) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dialokasikan dana Rp.1.522.800.000,- dan realisasi Rp.1.516.800.000,- atau 99,61%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur
b) Pembangunan jalan lingkungan
c) Pengawasan pembangunan jalan lingkungan
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12) Program pembangunan infrastruktur pedesaan, dialokasikan dana Rp.96.000.000,- dan realisasi Rp.8.050.000,- atau 8,39%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP).

13) Program pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi, dialokasikan dana Rp.729.400.000,- dan realisasi Rp.619.584.800,- atau 84,94%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Pembinaan jasa konstruksi sistem informasi
b) Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi
c) Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14) Program perencanaan tata ruang, dialokasikan dana Rp.1.137.640.000,- dan realisasi Rp.1.079.070.000,- atau 94,85%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

b) Penyusunan database bangunan gedung
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

15) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dialokasikan dana Rp.641.851.391,- dan realisasi Rp.641.681.391,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai, perangko dan terlaksananya jasa pengiriman surat sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa air dan listrik guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhnya perizinan kendaraan dinas guna mendukung operasional perkantoran.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayaranya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman.
   f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna memperlancar aktivitas administrasi perkantoran.
   g) Penyediaan barag cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang ketersediaan dokumen perkantoran.
   h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik guna mewujudkan kelancaran aktivitas perkantoran.
   i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna pemenuhan kebutuhan informasi aktual aparatur.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman rapat guna mendukung kelancaran tugas perkantoran.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi demi terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

l) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring dan evaluasi guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 6 (enam) unit kendaraan dinas roda dua.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor.

c) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meubelair guna mendukung kegiatan perkantoran.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat guna mendukung mobilitas perkantoran.

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan gedung kantor sehingga pelaksanaan aktivitas perkantoran dapat berjalan lancar.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal guna meningkatkan kemampaun aparatur dalam melaksanakan tugas perkantoran.

4) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya laporan keuangan dan laporan capaian kinerja SKPD guna mengukur capaian kinerja dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

5) Program pembangunan jalan dan jembatan :

a) Perencanaan pembangunan jalan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 10 paket pekerjaan perencanaan pembangunan jalan sehingga terpenuhinya kebutuhan produk perencanaan jalan.

b) Pembangunan jalan (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 29 paket pekerjaan pembangunan jalan, 8 paket pekerjaan pengawasan pembangunan jalan dan 2 paket pekerjaan pembangunan jalan (lanjutan TA.2015) guna menciptakan kenyamanan pengguna jalan.

c) Pembangunan jembatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 paket pekerjaan perencanaan pembangunan jembatan, 2 paket pekerjaan pembangunan jembatan dan 2 paket pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan guna menciptakan akses bagi pengguna jalan.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan data hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan

e) Pembangunan jalan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 12 paket pekerjaan perencanaan pembangunan jalan (DAK Infrastruktur), 3 paket pekerjaan pembangunan jalan (DAK Transportasi Perdesaan), 12 paket pekerjaan pembangunan jalan (DAK infrastruktur publik daerah), 3 paket pekerjaan pengawasan pembangunan jalan (DAK transportasi perdesaan), 12 paket pekerjaan pengawasan pembangunan jalan (DAK infrastruktur public daerah), 2 paket pekerjaan pembangunan jalan (DAK afirmasi), dan 5 paket pekerjaan perencanaan jalan (proyek pemerintah daerah dan desentralisasi/P2D2) guna menciptakan kenyamanan pengguna jalan.

f) Penyusunan database jalan dan jembatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen guna memenuhi kebutuhan database jalan dan jembatan.

g) Pembangunan jembatan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 paket pekerjaan pembangunan jembatan (DAK infrastruktur public daerah), 1 paket pengawasan pembangunan jembatan (DAK infrastruktur public daerah), 3 paket pekerjaan perencanaan jembatan (proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2).

6) Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Pembangunan saluran drainase/gorong – gorong, dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 paket pekerjaan perencanaan pembangunan drainase/gorong-gorong, 1 paket pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, 1 paket pekerjaan pengawasan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong guna memenuhi kebutuhan drainase dalam kota.

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan ini tidak dilaksanakan dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.

7) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan :
   a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 paket pekerjaan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan guna memenuhi kebutuhan produk perencanaan pemeliharaan jalan.
   b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, telah dilaksankaan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 paket rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 2 paket pengawasan rehabilitasi/pemeliharaan jalan guna meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan.
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, kegiatan ini tidak dilaksanakan dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.
8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan hasil/manfaat: terpeliharanya peralatan berat yang siap pakai guna memenuhi kebutuhan alat berat.
9) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya :
   a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 8 paket pekerjaan perencanaan teknik irigasi (DAU) guna terpenuhinya kebutuhan produk perencanaan pembangunan jaringan irigasi.
   b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 6 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU paket I), 5 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket II), 5 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket III), 6 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket IV), 7 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket V), 5 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket VI), 8 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket VII), 7 paket pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (DAU Paket VIII) dan 8 paket pekerjaan pengawasan teknik irigasi (DAU) guna terpenuhinya persediaan air untuk irigasi.
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan data hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

d) Pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi secara partisipatif (pendamping WISMP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi guna melaksanakan program irigasi secara partisipatif.

e) Rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 10 jenis paket peningkatan jaringan irigasi (DAK AFIRMASI) dan 1 DAK paket perubahan, 10 paket pengawasan jaringan irigasi (DAK AFIRMASI) dan 3 paket perencanaan teknik jaringan irigasi 2017 (proyek pemerintah daerah dan desentralisasi/P2D2) guna memenuhi kebutuhan irigasi.

f) Pemutakhiran database sumber daya air dan irigasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan database SDA dan irigasi.

10) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah :

a) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 4 paket pekerjaan pembangunan prasarana sanitasi (DAK Reguler), 6 paket pekerjaan pembangunan prasarana sanitasi (DAK Afirmasi), 1 paket pekerjaan pengawasan pembangunan prasarana sanitasi (DAK Reguler), 1 paket pekerjaan pengawasan pembangunan prasarana sanitasi (DAK Afirmasi) dan 1 paket pekerjaan perencanaan pembangunan prasarana sanitasi DAK untuk fisik T.A 2017.

b) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola air minum terlatih.

c) Pengembangan system distribusi air minum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan air minum bersih.

d) Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAU), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 11 paket pekerjaan perencanaan pembangunan air minum bersih (DAU), 1 paket pekerjaan pembangunan air minum bersih (DAU) yang terdiri dari DAU Paket I – V dan 5 paket pekerjaan pengawasan pembangunan air minum bersih (DAU) guna terpenuhinya kebutuhan air minum.

e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tidak dilaksanakan dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.

f) Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SANIMAS)/Pendamping, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya sosialisasi pentingnya sanitasi lingkungan berbasis masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

g) Pengelolaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS)/Pendamping, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana air minum guna memenuhi kebutuhan air minum bersih.

h) Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasaran air minum bersih guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tersedianya 2 paket pekerjaan perencanaan untuk TA.2017.

11) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh :

a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 8 paket perencanaan pembangunan jalan lingkungan guna memenuhi kebutuhan perencanaan.

b) Pembangunan jalan lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 9 paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan guna terpenuhinya jalan lingkungan.

c) Pengawasan pembangunan jalan lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 8 paket pekerjaan pengawasan pembangunan jalan lingkungan guna memenuhi kebutuhan pembangunan jalan lingkungan.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tidak dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.

12) Program pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui kegiatan pendampingan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya pendamping percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.

13) Program pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi :

a) Pembinaan jasa konstruksi sistem informasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya layanan jasa konstruksi dan sistem informasi.

b) Penyelenggaran izin usaha jasa konstruksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terkendalinya penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi.

c) Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pemahaman pelaku usaha jasa konstruksi.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tidak dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.

14) Program perencanaan tata ruang :

a) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen guna memenuhi kebutuhan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

b) Penyusunan database bangunan gedung, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan database bangunan dan gedung.

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tidak dilaksanakan karena staf pada bidang menjadi pengawas swakelola di lapangan.

d) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, telah dilaksankan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL.

15) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya prasarana dan sarana persampahan guna menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas di dukung SDM sebanyak 44 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	1 orang
b) Sarjana (S1)	:	17 orang
c) Sarjana Muda	:	5 orang
d) SLTA	:	17 orang
e) SD	:	4 orang

2) Pangkat/Golongan/Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	2 orang
b) Golongan III	:	18 orang
c) Golongan II	:	20 orang
d) Golongan I	:	4 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	- orang
b) Eselon III	:	4 orang
c) Eselon IV	:	11 orang

4) Staf : 29 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.154.116.320.158,- dan realisasi Rp.150.412.334.492,- atau 97,60%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Keterbatasan anggaran yang menyebabkan infrastruktur jalan dn jembatan, air minum, irigasi dan infrastruktur lainnya belum dibangun.

b) Terbatasnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa.

c) Kondisi topografi yang mempunyai kemiringan tajam dan curah hujan cukup tinggi menyebabkan sering terjadinya longsor tebing dan badan jalan sehingga umur konstruksi relatif singkat.

d) Adanya penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

e) Belum tersedianya sarana dan prasarana laboratorium penguji dan pengendali mutu bangunan.

2) Solusi

a) Infrastruktur dibangun secara bertahap sesuai kondisi lapangan

b) Perlu adanya diklat pengadaan barang/jasa pemerintah 2(dua) kali dalam setahun sehingga tenaga PPK dan panitia memadai.

c) Perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan.

d) Perlu adanya diklat-diklat teknis bidang ke PU-an.

e) Perlu pengadaan peralatan laboratorium penguji dan pengendali mutu bangunan.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Program dan Kegiatan

1) Program perencanaan tata ruang, dialokasikan dana Rp.273.850.000,- realisasi Rp.267.958.200,- atau 97,85%, digunakan untuk mendukung kegiatan:

a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

b) Penyusunan detail tata ruang kota

c) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2) Program pemanfaatan ruang, dialokasikan dana Rp.340.000.000,- realisasi Rp.338.900.000,- atau 99,68%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan survey dan pemetaan.

3) Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar, dialokasikan dana Rp.398.800.000,- dan realisasi Rp.209.825.000,- atau 52,61%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program perencanaan tata ruang, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,dan RTBL, dengan hasil/manfaat : diterbitkannya surat rekomendasi Gubernur NTT untuk proses dan ijin substansi terhadap Ranperda RDTR.
   b) Penyusunan detail tata ruang, dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk RDTRK Borong.
   c) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, dengan hasil/manfaat : sinkronisasi dan koordinasi substansi teknis dan evaluasi ranperda tata ruang.
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang tata ruang.
2) Program pemanfaatan ruang, dilaksanakan melalui kegiatan survey dan pemetaan, dengan hasil/manfaat : tersedianya peta fisik dasar dan fisik binaan Kabupaten Manggarai Timur sebagai acuan dalam program/kegiatan pemanfaatan ruang.
3) Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi guna mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

c. SKPD Penyelenggara

Bappeda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 3 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 1 orang
4) Staf : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.012.650.000,- dan realisasi Rp.816.683.200,- atau 80,65%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang pelaksanaan aktivitas perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Dokumen RTRW kabupaten sesuai dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur belum direvisi.
   b) Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Borong Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sesuai Perda RTRW No. 12 Tahun 2006 belum ditetapkan.
   c) Dokumen RDTRK Wae Lengga dan Mano Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sesuai Perda No. 6 Tahun 2012 belum tersusun.
   d) Pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Manggarai Timur belum optimal.
   e) Perda kawasan perkotaan belum ditetapkan.
2) Solusi
   a) Melakukan revisi dokumen RTRW kabupaten sesuai perkembangan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur.
   b) Penetapan Perda RDTRK Kota Borong.
   c) Penyusunan Dokumen RDTRK Wae Lengga dan Mano
   d) Optimalisasi pemanfaatan ruang oleh instansi terkait
   e) Perlu dilakukannya kajian kawasan perkotaan dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda kawasan perkotaan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.040.477.513,- dan realisasi Rp.1.015.525.987,- atau 97,60%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   g) Penyediaan alat tulis kantor
   h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

k) Penyediaan makan – minum

l) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.220.000.000,- dan realisasi Rp.194.850.000,- atau 88,57%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan peralatan gedung kantor

b) Pengadaan meubelair

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.6.850.500,- dan realisasi Rp.6.700.000,- atau 97,80%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD.

4) Program kerjasama pembangunan, dialokasikan dana Rp.200.000.000,- dan realisasi Rp.195.807.011,- atau 97,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Koordinasi pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat

b) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.98.128.800,- dan realisasi Rp.88.850.000,- atau 90,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.

6) Program perencanaan pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.992.233.561,- dan realisasi Rp.924.847.896,- atau 93,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyusunan rancangan RKPD

b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

c) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

e) Pelaksanaan forum SKPD

f) Penyusunan RKPD perubahan

g) Penyusunan RENJA SKPD

h) Penyusunan RENJA SKPD perubahan

i) Penyusunan Dokumen KUA

j) Penetapan RKPD dan RENJA kabupaten perubahan

k) Penetapan RKPD dan RENJA kabupaten

7) Program perencanaan pembangunan ekonomi, dialokasikan dana Rp.476.875.000,- dan realisasi Rp.364.221.993,- atau 76,37%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
   b) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   d) Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan KPDT di Kabupaten Manggarai Timur
   e) Penyusunan data dan informasi pengembangan ekonomi
8) Program perencanaan sosial dan budaya, dialokasikan dana Rp.115.385.100,- dan realisasi Rp.114.809.656,- atau 99,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.235.175.000,- dan realisasi Rp.223.328.074,- atau 94,96%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air (WISMP).

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai sehingga pelaksanaan aktivitas surat menyurat dapat berjalan lancar.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan sarana komunikasi kantor sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service guna mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
   e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor seperti yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk pelaksanaan pelayanan perkantoran.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetak dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sumber daya listrik guna mendukung kegiatan perkantoran.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang – undangan selama satu tahun.

k) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian.

l) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perlengkapan gedung kantor guna menciptakan kondisi kantor yang nyaman dan rapih.

b) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya partisi kantor guna melengkapi kebutuhan kantor.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai.

3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD guna mengukur capaian kinerja.

4) Program kerja sama pembangunan :

a) Koordinasi pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tercapainya kualitas perencanaan sosial budaya di bidang kesehatan sanitasi total berbasis masyarakat.

b) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kerja sama pembangunan antara pemerintah dengan dunia usaha/lembaga melalui pembentukan sekretariat terpadu

kerjasama pembangunan lembaga internasional Kabupaten Manggarai Timur.

5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana guna meningkatkan kualitas hasil perencanaan.

6) Program perencanaan pembangunan daerah :

a) Penyusunan rancangan RKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Manggarai Timur.

b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.

c) Koordinasi penyusunan LAKIP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana DAK dan APBN.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan pembangunan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan DAK dan APBN.

e) Pelaksanaan forum SKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan forum SKPD.

f) Penyusunan RKPD Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja RKPD Perubahan.

g) Penyusunan Renja SKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja SKPD.

h) Penyusunan Renja SKPD Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja SKPD Perubahan tahun 2016 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2016.

i) Penyusunan dokumen KUA - PPAS Induk dan Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen KUA – PPAS induk dan perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan DPA tahun 2016 .

j) Penetapan RKPD dan Renja Kabupaten Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD dan Renja Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.

k) Penetapan RKPD dan Renja Kabupaten, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD dan Renja Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.

7) Program perencanaan pembangunan ekonomi :

a) Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen studi pengembangan kerajinan local guna mengetahui kondisi perekonomian.

b) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi , telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur.

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil evaluasi pembangunan bidang ekonomi daerah sebagai pedoman dalam membuat perencanaan bidang ekonomi.

d) Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal.

e) Penyusunan data dan informasi pengembangan ekonomi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen data dan informasi pembangunan ekonomi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan.

8) Program perencanaan bidang sosial dan budaya :

a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang sosial budaya dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan daerah.

9) Program prasarana wilayah dan sumber daya alam, telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan (WISMP), dengan hasil/manfaat : terciptanya kelembagaan sumber daya air yang kuat dan terbina guna menjaga persediaan sumber daya air bagi masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Bappeda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	5 orang
b) Sarjana (S1)	:	7 orang
c) Sarjana Muda	:	1 orang
d) SLTA	:	2 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV : 2 orang
b) Golongan III : 10 orang
c) Golongan II : 3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : 2 orang
c) Eselon IV : 6 orang

4) Staf : 6 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.817.360.107,- dan realisasi Rp.4.507.584.987,- atau 93,57 %.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
b) Koordinasi antar instansi terkait perencanaan pembangunan belum optimal
c) Kurangnya data base yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan
d) Belum maksimalnya pembentukan POKJA dalam mengawali program dan kegiatan setiap sektor

2) Solusi

a) Penambahan personel yang berkompeten pada bidang perencanaan
b) Peningkatan fungsi koordinasi antar instansi
c) Adanya petugas khusus pengolahan dan updating data pada setiap SKPD
d) Pembentukan POKJA segera dilakukan agar pengendalian terhadap program SKPD terus diikuti.

7. Urusan Perumahan

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan perumahan, dialokasikan dana Rp.149.100.000,- dan realisasi Rp.124.749.500,- atau 83,66%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
2) Program lingkungan sehat perumahan, dialokasikan dana Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp.75.820.000,- atau 50,55%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemilihan dan penetapan lokasi permukiman kumuh.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program pengembangan perumahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan hasil/manfaat : tersedianya perumahan masyarakat yang layak huni guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
2) Program lingkungan sehat perumahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemilihan dan penetapan lokasi permukiman kumuh dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen penetapan lokasi permukiman sebagai pedoman dan dasar dalam membuat kebijakan.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 6 orang
   b) Sarjana Muda : 2 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan III : 6 orang
   b) Golongan II : 2 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perumahan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.299.100.000,- dan realisasi Rp.200.569.500,- atau 67,06%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi :

1) Permasalahan :
   a) Terbatasnya personil
   b) Sarana dan prasarana kurang menunjang
   c) Masalah sosial berupa penolakan program yang akan dilaksanakan
2) Solusi :
   a) Menambah personil
   b) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada

c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dialokasikan dana Rp.62.449.805,- dan realisasi,- Rp.59.128.555,- atau 94,68%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dialokasikan dana Rp.375.619.000,- dan realisasi Rp.255.027.240,- atau 67,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kompetensi olahraga.
3) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dialokasikan dana Rp.368.172.000,- dan realisasi Rp.2.900.000,- atau 0,79%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
   a) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya pemimpin yang memiliki kompetensi guna mendukung pembentukan SDM yang berkualitas.
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan peran serta pemuda dalam berolah raga.
2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan kegiatan penyelenggaraan kompetensi olahraga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan kompetisi olahraga tingkat SD s/d SMA guna meningkatkan minat masyarakat dan anak sekolah.
3) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan survey lokasi pembangunan pusat olahraga guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olah raga.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah raga pada Dinas PPO didukung oleh 5 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2) : 1 orang
b) Sarjana (S1) : 3 orang
b) Sarjana Muda : 1 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV : 2 orang
b) Golongan III : 3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon IV : 3 orang
b) Eselon III : 1 orang

4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.806.240.805,- dan realisasi Rp.317.055.795,- atau 39,33%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan yang ada.
b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan dan pembagian tugas pegawai.
b) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

9. Urusan Penamanan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.419.996.000,- dan realisasi Rp.416.668.252,- atau 99,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
i) Penyediaan makanan dan minuman
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan dalam daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.199.590.000,- dan realisasi Rp.198.385.200,- atau 99,40%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.19.414.000,- dan realisasi Rp.17.994.000,- atau 92,69%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.5.000.000,- dan realisasi Rp.5.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
5) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dialokasikan dana Rp.190.000.000,- dan realisasi Rp.185.642.500,- atau 97,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah
   b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
   c) Penyelenggaraan pameran investasi
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dialokasikan dana Rp.194.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.193.875.000,- atau 99,94%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
   b) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
   c) Optimalisasi / sosialisasi perda penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
7) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dialokasikan dana Rp.367.000.000,- dan realisasi Rp.367.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengembangan pelayanan perizinan
b) Evaluasi pengelolaan pelayanan perizinan
c) Peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan jasa pengiriman surat sehingga pelaksanaan aktivitas surat menyurat dapat berjalan lancar.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya jasa listrik kantor sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service guna mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor seperti laptop, printer komputer PC dan UPS yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan pelayanan perkantoran.
   f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk pelaksanaan pelayanan perkantoran.
   g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetak dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
   h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang – undangan selama satu tahun.
   i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman harian pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian.
   j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

k) Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahaan dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 (satu) unit untuk memperlancar dan menunjang aktifitas kantor.
   b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perlengkapan gedung kantor guna meningkatkan pelayanan.
   c) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua demi peningkatan pelayanan.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan hasil/manfaat : terlaksananya diklat perizinan bagi aparatur BPMDP2T demi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna mengukur capaian kinerja.
5) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dengan kegiatan :
   a) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penilaian kelompok usaha produktif dan potensial dan terlaksanany perjalanan dinas luar darah dalam rangka penyampaian dokumen ke BKPM provinsi.
   b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, telah dilaksanakan dengan hasil : terlaksananya perjalanan dinas ke provinsi dan pusat dalam rangka koordinasi investasi.
   c) Penyelenggaraan pameran investasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pameran investasi.
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil evaluasi promosi dan kerja sama investasi sebagai pedoman dalam membuat kebijakan.
6) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan:
   a) Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya system informasi

penanaman modal di daerah sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen penyederhanaan prosedur perizinan guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

c) Optimalisasi/sosialisasi Perda pelayanan perizinan terpadu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan.

7) Program peningkatan kualitas pelayanan publik :

a) Pengembangan pelayanan perizinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya media penyebaran informasi perizinan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perizinan.

b) Evaluasi pengelolaan pelayanan perizinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

c) Peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data hasil survey di lapangan guna meningkatkan pelayanan perizinan.

c. SKPD Penyelenggara

BPMDP2T Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2 : 1 orang
b) Sarjana (S1) : 15 orang
c) Sarjana Muda : 4 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV : 3 orang
b) Golongan III : 15 orang
c) Golongan II : 2 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon IV : 5 orang
b) Eselon III : 5 orang
c) Eselon II : 1 orang

4) Staf : 9 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Badan Penanaman Modal Daerah, Pelayanan dan Perijinan Terpadu Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.652.561.579,- dan realisasi Rp.2.600.197.081,- atau 98,03%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Kurang menunjang kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi.

1) Permasalahan

a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya dengan mengurus izin.

b) Keterbatasan sumber daya aparatur pada bidang tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan.

c) Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

d) Kurangnya penyebarluasan dan optimalisasi pemanfatan potensi investasi daerah yang berdampak pada kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Manggarai Timur.

e) Kurangnya koordinasi dari SKPD teknis terkait izin-izin yang telah dilimpahkan kepada BPMDP2T dan lemahnya fungsi 107okum107l dan pengawasan dari SKPD teknis dalam menghasilkan produk 107okum daerah dalam upaya meningkatkan PAD.

f) Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat yang menyebabkan terganggunya proses pelayanan perizinan.

g) Terjadinya perubahan status kelembagaan yang mengakibatkan penetapan indikator kinerja mengalami kendala.

2) Solusi

a) Mengadakan sosialisasi melalui radio dan berbagai instrument sosialisasi (liflet, booklet,brosur)

b) Peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan pelayanan melebihi jam kerja, apabila jumlah pemohon banyak.

c) Mengirimkan aparatur BPMDP2T untuk mengikuti diklat.

d) Pengadaan sarana dan prasarana kantor (Kendaraan, peralatan, perlengkapan dan meubelair).

e) Mengadakan rapat koordinasi dengan setiap SKPD teknis dalam rangka penyamaan persepsi dan koordinasi yang berujung pada upaya penyederhanaan proses perizinan dan proaktif untuk terus mendorong SKPD teknis untuk dapat mengusahakan peraturan daerah berkaitan dengan izin yang menjadi kewenangan SKPD.

f) Senantiasa mengupdate regulasi-regulasi pada tingkat pusat

g) Melakukan konsultasi secara intens ke instansi-instansi terkait dengan pedoman pada peraturan yang berlaku.

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.877.624.500,- dan realisasi Rp.844.515.100,- atau 96,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   g) Penyediaan alat tulis kantor
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
   l) Penyediaan makanan dan minuman
   m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   n) Monitoring dan evaluasi
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.377.880.000,- dan realisasi Rp.375.567.000,- atau 99,39%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.6.000.000,- dan realisasi Rp.6.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, dialokasikan dana Rp.195.110.000,- dan realisasi Rp.179.245.500,- atau 91,87%, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur (PLTMH).

5) Program pengembangan kewirausahaan dan kompetitif UKM, dialokasikan dana Rp.147.150.000,- dan realisasi Rp.143.225.000,- atau 97,33%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
   b) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
6) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dialokasikan dana Rp.1.208.114.000,- dan realisasi Rp.1.196.599.500,- atau 99,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
   b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi
   c) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
7) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, dialokasikan dana Rp.50.874.000,- dan realisasi Rp.47.457.300,- atau 93,28%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya prangko, meterai dan benda pos lainnya untuk kelancaran pengiriman surat-menyurat sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya rekening listrik untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai guna mewujudkan pelayanan perkantoran yang optimal.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta terbayarnya tenaga jasa kebersihan untuk kebersihan tempat/ruangan kerja sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**,** telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pencetakan dan penggandaan untuk penyediaan dokumen - dokumen kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan listrik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, guna mendukung aktivitas perkantoran.

k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan selama 12 (duabelas) bulan dan peraturan perundang – undangan, guna menambah wawasan pegawai.

l) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat staf bulanan, rapat evaluasi dana bergulir (2 kali), rapat harian koperasi tingkat Kabupaten, sehingga dapat berjalan lancarnya pelaksanaan rapat harian kantor.

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat untuk koordinasi dan konsultasi program/kegiatan sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

n) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan di tingkat Kabupaten.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat :

a) Tersedianya kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional/dinas.

b) Terpeliharanya gedung kantor guna mendukung lingkungan kerja yang kondusif.

c) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional guna menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dinas/operasional.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan keuangan dan realisasi keuangan SKPD guna mengukur capaian kinerja.

4) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur, dengan hasil/manfaat : tersedianya jaringan infrastruktur UKM dan pembangunan guna mendukung masyarakat dalam berwirausaha.

5) Program pengembangan kewirausahaan dan kompetitif UKM :

a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pengelola usaha untuk meningkatkan ketrampilan dalam berwirausaha.

b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD guna meningkatkan ketrampilan pengelolah koperasi/KUA.

6) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi :

a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman koperasi sehingga terciptanya ketrampilan pengurus dalam mengelola Koperasi.

b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi Koperasi yang berprestasi sehingga kelembagaan koperasi semakin mantap dan dapat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi.

c) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tenaga pendamping koperasi guna meningkatkan pemahaman tentang manajemen koperasi.

7) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pameran produk UKM guna meningkatkan penyebaran informasi bagi masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 19 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	12 orang
b) Sarjana Muda	:	2 orang
c) SLTA	:	5 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	3 orang
b) Golongan III	:	11 orang
c) Golongan II	:	5 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	2 orang
c) Eselon IV	:	6 orang

4) Staf	:	10 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.951.997.250,- dan realisasi Rp.3.843.567.665,- atau 97,26%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah personil dalam mengisi jabatan yang kosong

b) Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus di bidang koperasi

c) Sarana dan prasarana yang kurang mendukung

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan dan pembagian tugas untuk mendukung kelancaran pelayanan perkantoran

b) Melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang koperasi

c) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dengan keterbatasan personil

11. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.313.891.800,- dan realisasi Rp.305.465.179,- atau 97,32%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
   e) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   g) Penyediaan alat tulis kantor
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.147.176.000,- dan realisasi Rp.135.737.987,- atau 92,23%, digunakan untuk mendukung pelakasanaan kegiatan :
   a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.650.000,- dan realisasi Rp.3.650.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program penataan administrasi kependudukan, dialokasikan dana sebesar Rp.1.330.282.200,- dan realisasi Rp.1.273.012.315,- atau 95,69%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
   b) Pelatihan tenaga pengelola SIAK
   c) Sosialisasi kebijakan kependudukan
   d) Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
   e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   f) Pelaksanaan e-KTP
   g) Pengembangan data base kependudukan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko dan meterai serta benda pos lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengiriman surat-surat dinas, sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa listrik dan air bersih selama 1 tahun untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service untuk mewujudkan kebersihan ruangan dan lingkungan kerja sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
   d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya suku cadang dan bahan bakar bagi kendaraan dinas roda empat dan roda dua guna menunjang pelaksanaan mobilitas perkantoran sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal.
   e) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak dianggarkan.
   g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor, sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan cetakan dan dokumen perkantoran sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
   i) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan instalasi listrik untuk penerangan kantor sehingga terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perlengkapan kantor guna mendukung aktivitas kantor.
   b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, tidak dilaksanakan karena tidak ada pemeliharaan rutin gedung kantor.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen capaian kinerja yang akuntabel.
4) Program penataan administrasi kependudukan, melalui kegiatan :
   a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya blanko KTP, KK dan akte-akte catatan sipil untuk kelancaran pelayanan kependudukan dan catatan sipil sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
   b) Pelatihan tenaga pengelola SIAK, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan bagi pengelola SIAK sehingga tersedianya operator SIAK yang terlatih.
   c) Sosialisasi kebijakan kependudukan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan kependudukan.
   d) Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor registran kecamatan desa/kelurahan dan RT sehingga tersedianya laporan informasi database kependudukan yang akurat.
   e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan di lapangan.
   f) Pelaksanaan e-KTP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelayanan perekaman e-KTP ditingkat kecamatan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen administrasi kependudukan.

g) Pengembangan database kependudukan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pencetakan buku database kependudukan yang akan dijadikan dasar dari pelaporan registran atas semua kejadian kependudukan pada tahun berikutnya.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil didukung SDM sebanyak 28 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	2 orang
b) Sarjana (S1)	:	21 orang
c) Sarjana Muda	:	3 orang
d) SLTA	:	2 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	5 orang
b) Golongan III	:	19 orang
c) Golongan II	:	4 orang

3) Jabatan/eselonering

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	4 orang
c) Eselon IV	:	15 orang

4) Staf	:	8 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.398.170.956,- dan realisasi Rp.3.269.227.930,- atau 96,20%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.

a) Topografi Kabupaten Manggarai Timur yang susah dijangkau dan kuranganya sarana dan prasarana pelayanan

b) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mimiliki dokumen kependudukan yang sah

2) Solusi.

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional mobail KTP-el

b) Sosialisasi/pencerahan kepada masyarakat terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah.

12. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dialokasikan dana Rp. 93.363.450,- dan realisasi Rp. 93.184.450,- atau 99,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
2) Program peningkatan kesempatan kerja, dialokasikan dana Rp.553.570.250,- dan realisasi Rp.553.495.250,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja.
3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dialokasikan dana Rp.74.017.475,- dan realisasi Rp.45.212.475,- atau 61,08% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi penyelesaian prosedur, perselisihan perselisihan hubungan industrial
   b) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hokum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan/kursus pertukangan untuk 45 orang dan diberikan bantuan peralatan pertukangan setelah mengikuti kegiatan pelatihan.
2) Program peningkatan kesempatan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honorarium jasa pekerja yang mengerjakan jalan antar kampung di 9 kecamatan.
3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan :
   a) Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terfasilitasinya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial guna menjaga keharmonisan antara pelaku industri.
   b) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengawasan terhadap 50 perusahaan yang menyerap tenaga kerja guna menjaga kesejahteraan pekerja.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 7 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan :
   a) Sarjana (S1) : 6 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
2) Pangkat/Golongan :
   a) Golongan IV : 3 orang
   b) Golongan III : 4 orang
3) Jabatan Struktural :
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 4 orang
4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.720.951.175,- dan realisasi Rp.691.892.175,- atau 95.97%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih maraknya pengiriman TKI ilegal ke luar negeri;
   b) Masih terbatasnya tenaga mediator untuk memfasilitasi kasus-kasus ketenagakerjaan.
2) Solusi
   a) Melakukan pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja;
   b) Melakukan sosialisasi tentang UU Ketenagakerjaan dan prosedur penempatan tenaga kerja di luar wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

13. Urusan Ketahanan Pangan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.488.250.000,- dan realisasi Rp.459.626.365,- atau 94,14%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j) Penyediaan makanan dan minuman
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.772.577.000,- realisasi Rp.772.577.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Pembangunan rumah dinas
   b) Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor
   c) Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan.
4) Program peningkatan kesejahteraan petani, dialokasikan dana Rp. 307.075.000,- dan realisasi Rp.304.618.000,- atau 99,20%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis
   b) Peningkatan kemampuan lembaga tani
5) Program peningkatan ketahanan pangan, dialokasikan dana Rp.674.105.500,- dan realisasi Rp.635.796.171,- atau 94,32%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Analisis pola konsumsi pangan
   b) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
   c) Pemantauan dan analisis akses pangan
   d) Pengembangan cadangan pangan daerah
   e) Pengembangan mutu dan keamanan pangan
   f) Penyuluhan sumber pangan alternative
   g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.608.367.500,- dan realisasi Rp.608.317.500,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
   b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
   c) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
   d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dialokasikan dana Rp.3.452.120.500,- dan realisasi Rp.3.424.385.191,- atau 99,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
   b) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan adminsitrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat kilat dan surat biasa sehingga proses pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan lancar.
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik untuk menunjang aktivitas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa adminstrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya peralatan dan bahan pembersih untuk kantor BP2KP sehingga terciptanya kebersihan dan keindahan kantor.
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil : terpeliharanya laptop dan komputer PC demi menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
   f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.
   g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna memenuhi kebutuhan dokumen kantor.

h) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan pegawai.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum untuk rapat-rapat baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi guna sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pembangunan rumah dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit rumah dinas yakni di BPK Borong.

b) Pemeliharan rutin/ berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua untuk mendukung mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga terukurnya kinerja SKPD.

4) Program peningkatan kesejahteraan petani :

a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pelatihan kelompok wanita tani dan pelatihan budidaya kakao sehingga terwujudnya pemahaman masyarakat tentang teknik budidaya tanaman.

b) Peningkatan kemampuan lembaga Tani (PUAP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : berkembangnya usaha lembaga petani di 9 Kecamatan.

5) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) :

a) Analisis pola konsumsi pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terkumpulnya data pola konsumsi masyarakat sehingga dapat diketahuinya pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

b) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya neraca bahan makanan Kabupaten Manggarai Timur.

c) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data analisis pangan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur sebagai pedoman perencanaan dalam merumuskan kebijakan pangan secara menyeluruh dan Kabupaten Manggarai Timur khususnya.

d) Pengembangan cadangan pangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya keberadaan pangan untuk masyarakat.

e) Pengembangan mutu dan keamanan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya inspeksi mendadak di pasar guna melihat kualitas bahan makanan yang dijual.

f) Penyuluhan sumber pangan alternatif, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya peringatan hari pangan sedunia di Rana Mese guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pangan non beras.

6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan :

a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan seperti komputer PC, laptop, printer, GPS, rak buku dan modem.

b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

c) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pembuatan demonstrasi percontohan (demplot) yang dilakukan oleh PPL sebanyak 44 unit.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan.

7) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan :

a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan diklat bagi penyuluh guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang penyuluhan.

b) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya biaya operasional penyuluh (BOB) PNS sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 87 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	1 orang
b) Sarjana (S1)	:	45 orang
c) Sarjana Muda	:	11 orang
d) SLTA	:	30 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	4 orang
b) Golongan III	:	64 orang
c) Golongan II	:	19 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	5 orang
c) Eselon IV	:	11 orang

4) Jabatan Fungsional	:	59 orang
5) Staf	:	11 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.12.050.900.759,- dan realisasi Rp.11.044.694.197,- atau 92%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Ketidakpastian jumlah dan harga pengiriman dokumen yang dikirim;

b) Ketersediaan alat yang kurang terutama dalam Budidaya Kakao.

c) Sertifikasi kelompok belum sepenuhnya diakui sebagai satu-satunya persyaratan legal formal dalam pembentukan kelompok tani sehingga banyak kelompok dadakan yang muncul ketika ada bantuan program/kegiatan dari pemerintah.

2) Solusi

a) Pemaketan biaya pengiriman dalam DPA BP2KP.

b) Memberdayakan peralatan yang ada dengan memodifikasi alat yang tidak memakan biaya operasional.

c) Melakukan koordinasi lintas SKPD untuk bersama-sama mendampingi dan membina lebih lanjut kelompok-kelompok tani yang bersertifikat.

14. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program dan Kegiatan

1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.857.330.100,- dan realisasi Rp.790.460.000,- atau 92,20%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   g) Penyediaan alat tulis kantor
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   i) Penyediaan makanan dan minuman
   j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.287.517.000,- dan realisasi Rp.287.050.000,- atau 99,84%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.4.000.000,- dan realisasi Rp. 4.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program Keluarga Berencana dialokasikan dana Rp.1.944.032.717,- dan realisasi Rp.1.925.793.000,- atau 99,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
   b) Pelayanan KIE
   c) Promosi pelayanan khiba
   d) Pembinaan keluarga berencana
   e) Temu kerja kemitraan tingkat kabupaten
5) Program pelayanan kontrasepsi, dialokasikan dana Rp.2.567.865.500,- dan realisasi Rp.2.565.954.000,- atau 99,93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelayanan Konseling KB
   b) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
   c) Pengadaan alat kontrasepsi

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, dialokasikan dana Rp.45.589.000,- dan realisasi Rp.44.008.000,- atau 96,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
   b) Rakerda tingkat Kabupaten Manggarai Timur
7) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dialokasikan dana Rp.30.390.000,- dan realisasi Rp.30.390.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman paket kilat dan biasa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa pemasangan meteran air, tersedianya jasa penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa Tenaga Harian Lepas (jasa sopir roda 4), tersedianya jasa service dan pergantian suku cadang, tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas, tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2, tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai untuk pelaksanaan mobilitas perkantoran.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor untuk mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung kelancaran aktivitas kantor.
   g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi

perkantoran sehingga terwujudnya pelayanan admnistrasi perkantoran yang efektik dan efisien.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja penjilidan dan fotokopi guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.

i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum rapat kantor serta harian pegawai guna meningkatkan kinerja aparatur.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi provinsi dan pusat guna mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan pembangunan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 unit pagar Balai Penyuluhan KB Kecamatan guna mendukung pelaksanaan pelayanan kemasyarakatan.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kenerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur capaian kinerja.

4) Program keluarga berencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi, pelayanan KIE, pelayanan promosi khiba dan pembinaan terhadap keluarga berencana guna meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya program keluarga bencana.

5) Program pelayanan kontrasepsi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelayanan konseling KB, pemasangan kontasepsi KB, tersedianya alat kontrasepsi, telaksananya pelayanan Medis KB dan terlaksananya pelayanan konseling KB guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan alat kontrasepsi.

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya fasilitasi pembentukan kelompok peduli KB dan rakerda tingkat Kabupaten Manggarai Timur guna meningkatkan kerja sama dan menyamakan program/kegiatan.

7) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan guna menyiapkan tenaga pendamping.

c. SKPD Penyelenggara

Badan P2KB Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 40 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan :
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 18 orang
   c) Sarjana Muda : 8 orang
   d) SLTA : 13 orang
2. Pangkat/Golongan :
   a) Golongan IV : 4 orang
   b) Golongan III : 26 orang
   c) Golongan II : 10 orang
3. Jabatan Struktural :
   a) Eselon II : 1 orang
   b) Eselon III : 3 orang
   c) Eselon IV : 7 orang
4. Staf : 29 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dana sebesar Rp.8.524.774.469,- dan realisasi Rp.8.300.223.059,- atau 97,36%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :
   a) Masih lemahnya pembinaan peserta KB aktif khususnya peserta KB jangka pendek (pil, suntikan, kondom) yang mengakibatkan tingginya angka putus pakai alkon/drop out sejumlah 3.362 akseptor atau 9,64% dari akseptor KB aktif yang ada sejumlah 34.885 akseptor.
   b) Masih rendahnya kemandirian ber-KB karena masih lemahnya mekanisme pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
   c) Masih rendahnya kesertaan KB pria yakni sejumlah 242 akseptor (0,6%) karena masih tingginya rumor negative tentang KB pria baik MOP maupun kondom serta akses pelayanan MOP yang masih terbatas.
   d) Masih rendahanya pengetahuan dan pemahaman pembantu Pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan sub PPKBD tentang kependudukan dan KB

e) Kegiatan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan belum menjangkau semua desa karena keadaan geografis dan terbatasnya alokasi anggaran.

2) Solusi

a) Meningkatkan pembinaan peserta KB aktif oleh setiap petugas lapangan KB di setiap wilayah kerja melalui kunjungan rumah serta lebih mengintensifkan KIE dan konseling tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) sebagai upaya menurunkan angka putus pakai alat kontrasepsi/drop out.

b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan) serta dokter dan bidan praktek swasta dalam upaya pembenahan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.

c) Meningkatkan KIE dan konseling tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta metode KB pria untuk meminimalisir rumor negative tentang KB pria baik MOP maupun kondom.

d) Meningkatkan akses pelayanan KB sampai ke pelosok pedesaan untuk menjangkau kelompok sasaran yang berada di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (Galcitas).

e) Meningkatkan pelayanan KIE dan konseling KB pada ibu hamil dan ibu nifas sehingga kelompok sasaran tersebut dapat menjadi peserta KB pada masa pasca persalinan dan pasca keguguran sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

f) Perlu bimbingan teknis bagi PPKBD, sub PPKBD dan tenaga penyuluh KB non PNS.

g) Kegiatan TKBK tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan perlu ditingkatkan baik frekuensi kegiatan maupun alokasi anggaran.

15. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dialokasikan dana Rp.197.332.300,- dan realisasi Rp.177.617.300,- atau 90,01%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b) Pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif (Dharma Wanita)

c) Sosialisasi KDRT, KB, SANIMA dan PBHS (Dharma Wanita)

d) Pemberian beasiswa bagi pelajar

2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dialokasikan dana Rp.69.669.600,- dan realisasi Rp.69.495.350 atau 99,75% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
   b) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
   c) Lomba konferensi anak daerah
3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dialokasikan dana Rp.70.827.000,- dan realiasi Rp.58.915.000,- atau 83,18%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialiasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT serta fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

b. Tingkat pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan per program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan sosialiasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif guna meningkatkan pengetahuan masyarakat.
2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya lomba konferensi anak daerah dan terlaksananya KIE tentang kesetaraan gender.
3) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialiasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT serta fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan :
   a) Sarjana (S1) : 3 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
2. Pangkat/Golongan :
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 3 orang

3. Jabatan Struktural :
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 2 orang
4. Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.337.828.900,- dan realisasi Rp.306.027.650,- atau 90,58%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Seperti tergambar pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :
   a) Dalam hal kedudukan atau peran, posisi perempuan di Kabupaten Manggarai Timur masih sangat lemah. Hal ini nampak dalam hal kedudukan di lembaga-lembaga yang ada seperti lembaga pemerintah dan lembaga politik (DPRD, partai politik dan KPUD) dimana jumlah kaum perempuan yang menduduki posisi pada lembaga pemerintah dan lembaga politik sangat sedikit. Pada birokrasi pemerintah, dari 662 pejabat yang menduduki jabatan, 145 orang atau 21,90% pejabatanya adalah perempuan.
   b) Tingkat kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan juga masih rendah terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini nampak dari data : jumlah kematian ibu hamil dan jumlah kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi serta rendahnya angka partisipasi kaum perempuan terhadap pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi.
   c) Lemahnya upaya perlindungan hokum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari data yang ada hamper semua korban KDRT adalah perempuan.
   d) Dari aspek perekonomian, peran kaum perempuan sebagai penopang perekonomian keluarga di Kabupaten Manggarai Timur juga masih rendah karena dari data yang ada sebagian besar pelaku perekonomian didominasi kaum laki–laki.
2) Solusi :
   a) Perlunya penguatan kedudukan kaum perempuan pada lembaga-lembaga yang ada baik pada birokrasi kepemerintahan maupun pada lembaga

politik dengan mendorong perempuan-perempuan potensial yang ada pada setiap tingkat pemerintahan untuk tetap berjuang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga tidak berbeda jauh dengan kaum pria dalam bidang politik supaya turut berpartisipasi aktif dalam kepengurusan partai politik dan terutama keterwakilan kaum perempuan menjadi anggota DPR sehingga dengan demikian dapat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

b) Perlu melaksanakan sosialisasi untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan kematian ibu melahirkan serta mendorong SKPD terkait agar menyediakan fasilitas dan tenaga medis di daerah-daerah yang rawan terjadinya kematian ibu hamil dan anak.

c) Perlunya meningkatkan upaya pemberantasan buta aksara perempuan sampai ke tingkat pedesaan secara terkoordinasi dengan sektor teknis terkait.

d) Perlu peningkatan perlindungan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) /sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada seperti organisasi kemasyarakatan (LSM) pemerhati perempuan, serta penguatan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak guna melayani penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

e) Perlu memfasilitasi akses kelompok-kelompok usaha perempuan pada sumber–sumber permodalan ekonomi (perbankan, koperasi, badan usaha lainnya serta program nasional pemberdayaan masyarakat).

16. Urusan Perhubungan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.591.500.000,- dan realisasi Rp.558.919.660,- atau 94,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

i) Penyediaan makan dan minum

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.282.050.000,- dan realisasi Rp.246.456.600,- atau 87,38%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.60.000.000,- dan realisasi Rp.28.551.200,- atau 47,59%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dialokasikan dana Rp.2.097.950.000,- dan realisasi Rp.2.016.797.324,- atau 96,13%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6) Progam peningkatan pelayanan angkutan, dialokasikan dana Rp.1.778.645.300,- dan realisasi Rp.1.708.360.000,- atau 96,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan raya

b) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

c) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan

7) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dialokasikan dana Rp.323.388.000,- dan realisasi Rp.296.560.000,- atau 91,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan pengiriman surat-surat dinas guna mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa listrik untuk pemenuhan kebutuhan penerangan kantor.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan asri.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perkantoran.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi/penggandaan dan penjilidan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan.

i) Penyediaan makan dan minum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk pelaksanaan rapat dan tugas harian.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda dua guna menambah persediaan fasilitas aparatur.

b) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang siap pakai, guna memperlancar mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan tetapi tidak maksimal karena tidak ada jadwal dari Balai Diklat Perhubungan.

4) Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna terukurnya capaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan.

5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan :
   a) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen awal untuk pembangunan Bandar udara di Kabupaten Manggarai Timur
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya data bidang perhubungan.
6) Program peningkatan pelayanan angkutan :
   a) Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum di jalan raya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum guna meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan keselamatan transportasi.
   b) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban berlalu lintas dan angkutan agar terwujudnya tertib lalu lintas.
   c) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit mobil light truck untuk angkutan pedesaan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan transportasi.
7) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan hasil/manfaat : tersedianya rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan transportasi darat.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 16 orang
   c) Sarjana Muda : 1 orang
   d) SLTA : 2 orang
   e) SLTP : 1 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 4 orang
   b) Golongan III : 14 orang
   c) Golongan II : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 4 orang
   b) Eselon IV : 12 orang
4) Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.530.851.845,- dan realisasi Rp. 6.163.480.278,- atau 94,37%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Belum adanya kantor permanen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur yang representatif.

2) Solusi

Perlu dibangunnya kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur yang aman dan representatif.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.462.272.800,- dan realisasi Rp.429.951.656,- atau 93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   f) Penyediaan alat tulis kantor
   g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   i) Penyediaan makanan dan minuman
   j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.118.000.000,- dan realisasi Rp107.882.883,- atau 91,42%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan meubelair
   b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program peningkatan/pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa, dialokasikan dana Rp.1.113.217.200,- dan realisasi Rp.1.070.048.924,- atau 96,12%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
   b) Pengadaan alat studio dan komunikasi
   c) Pembinaan dan pengembangan media baru
   d) Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi
5) Program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dialokasikan dana Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.24.899.000,- atau 99,59%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
6) Program kerjasama informasi dan mass media, dialokasikan dana Rp.907.710.000,- dan realisasi Rp.794.629.494,- atau 87,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah
   b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
   c) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media massa
   d) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui BAKOHUMAS

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan per program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai, perangko dan paket pengiriman sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa penerangan kantor, jasa air dan vocher pulsa mobil internet guna kelancaraan pelayanan perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga dapat terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor yang siap pakai guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat alat tulis kantor, untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penjilidan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhnya kebutuhan listrik perkantoran.

i) Penyediaan makan dan minum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket makanan dan minuman harian dan rapat sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas harian kantor.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan mebeleur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 buah lemari arsip kantor untuk pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya biaya perawatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat yang siap pakai guna mendukung pelayanan perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian pelaporan kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna mengukur capaian kinerja.

4) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, melalui kegiatan :

a) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.

b) Pengadaan alat studio dan komunikasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan studio dan komunikasi guna menunjang dan mendukung kegiatan SKPD.

c) Pembinaan dan pegembangan media baru, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya website pemerintah daerah.

d) Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya biaya pemeliharaan guna menyediakan alat-alat studio dan komunikasi yang siap pakai.

5) Program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya bimbingan teknis di bidang TIK sehingga terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang komunikasi dan informasi.

6) Program kerjasama informasi dengan mas media :

a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait arah kebijakan pembangunan daerah.

b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa penyiar, peliput berita, penjaga repiter dan operator SSB guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media massa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d) Penyebarluasan informasi peyelenggaraan pemerintah daerah melalui BAKOHUMAS, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pendidikan :

a) Sarjana (S1)	:	17 orang
b) Sarjana Muda	:	3 orang
c) SLTA	:	1 orang

2. Pangkat/Golongan Ruang Gaji :

a) Golongan IV	:	6 orang
b) Golongan III	:	12 orang
c) Golongan II	:	3 orang

3. Jabatan Struktural :

   a) Eselon II : 1 orang
   b) Eselon III : 4 orang
   c) Eselon IV : 11 orang
4. Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.609.144.760,- dan realisasi Rp.3.376.708.666,- atau 93,55%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Jangkauan siaran radio Kabupaten Manggarai Timur belum tersebar keseluruh kecamatan.
   b) Terbatasnya tenaga professional dibidang komunikasi dan informatika.
2) Solusi
   a) Memaksimalkan jangkauan siaran radio sehingga menjangkau sampai keseluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.
   b) Mengirim aparatur untuk mengikuti BIMTEK atau Pelatihan.

18. Urusan Pertanahan

a. Program dan Kegiatan

1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dialokasikan dana Rp.197.340.260,- dan realisasi Rp.193.413.060,- atau 98,01%, digunakan untuk mendukung kegiatan pengsertifikatan tanah pemda.
2) Program penyelesaian konflik pertanahan, dialokasikan dana Rp.85.000.000,- dan realisasi Rp.83.629.000,- atau 98,39%, digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, melalui kegiatan sertifikasi tanah pemda, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan tanah pemda guna menertibkan aset tanah pemda.

2) Program penyelesaian konflik pertanahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 20 masalah, guna menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram di masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 11 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan :
   a) Sarjana (S1) : 8 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
   c) SLTA : 2 orang
2) Pangkat/Golongan :
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 8 orang
   c) Golongan II : 2 orang
3) Jabatan Struktural :
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf ; 7 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.282.340.260,- dan realisasi Rp.277.042.060,- atau 98,12%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Terbatasnya jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantoran
   b) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
2) Solusi
   a) Memaksimalkan pembagian pelaksanaan tugas perkantoran
   b) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.459.967.250,- dan realisasi Rp.458.739.300,- atau 99,73%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
   g) Penyediaan alat tulis kantor
   h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
   i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   j) Penyediaan makanan dan minuman
   k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.113.780.000,- dan realisasi Rp.112.650.000,- atau 99,1%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan meubelair
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.19.436.200,- realisasi Rp.19.436.200,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.5.000.000,- dan realisasi Rp.5.000.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD.
5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dialokasikan dana Rp.114.850.000,- dan realisasi Rp.114.800.000,- atau 99,95%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
   b) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

6) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal, dialokasikan dana Rp.721.666.550,- realisasi Rp.720.479.367,- atau 99,84%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
   b) Pengendalian dan penanganan isu-isu yang aktual di masyarakat
   c) Pemberdayaan lembaga adat
   d) Fasilitasi dan monitoring masalah perbatasan antar Kabupaten
   e) Koordinasi penanganan konflik sosial
7) Program pengembangan wawasan kebangsaan, dialokasikan dana Rp.99.800.000,- dan realisasi Rp.99.800.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama
   b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
8) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dialokasikan dana Rp.90.200.000,- dan realisasi Rp.90.200.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
   b) Pembinaan terhadap LSM dan Ormas
9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dialokasikan dana Rp.99.800.000,- dan realisasi Rp.99.800.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
   b) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
10) Program pendidikan politik masyarakat, dialokasikan dana Rp.155.500.000,- dan realisasi Rp.155.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyuluhan UU di bidang politik dan HAM
   b) Koordinasi forum-forum diskusi politik
   c) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada PARPOL
   d) Bimtek sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan
11) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, dialokasikan dana sebesar Rp.100.000.000, realisasi Rp.99.975.000,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pemantauan penyebarluasan informasi potensi bencana
   b) Pembentukan dan sosialisasi FKDM tingkat kecamatan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan per program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelayanan dan pengiriman surat-surat dinas untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna meningkatkan kinerja perkantoran.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memperlancar mobilitas perkantoran.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan kebersihan guna menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan asri.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya peralatan kantor guna memperlancar mobilitas perkantoran.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor sehingga pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan lancar.

h) Penyediaan barang cetak dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan penggandaan dokumen kantor dan cuci cetak dokumentasi.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perauturan Perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan menambah pengetahuan aparatur serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami dinamika sosial kemasyarakatan.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum harian pegawai guna memperlancar aktivitas perkantoran.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinergitas dan keterpaduan program dan kegiatan.

l) Kordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan di dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan kantor.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/oprasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua.

b) Pengadaan mebeleur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) set sofa, 5 (lima) meja kerja dan 4 (empat) set kursi kerja.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk mendukung kelancaran mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya kemampuan aparatur dalam menunjang kinerja, sehingga terwujudnya SDM yang handal.

4) Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sehingga dapat terukurnya kinerja SKPD guna mengukur capaian kinerja.

5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan :

a) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

6) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal :

a) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat .

b) Pengendalian dan penanganan isu-isu yang aktual di masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengendalian dan penanganan isu-isu yang aktual di masyarakat.

c) Pemberdayaan lembaga adat telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya penguatan kapasitas lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan dalam masyarakat.

d) Fasilitasi, monitoring masalah perbatasan antar kabupaten, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya situasi kantribmas di perbatasan antara kabupaten guna menciptakan kenyamanan hidup masyarakat.

e) Koordinasi penanganan konflik sosial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya keamanan dalam lingkungan sosial masyarakat.

7) Program pengembangan wawasan kebangsaan :

a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Manggarai Timur.

b) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa.

8) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan :

a) Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya kesadaran masyarakat akan nilai – nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

b) Pembinaan terhadap LSM dan Ormas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya hubungan kerja sama yang konstruktif.

9) Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan kegiatan :

a) Penyuluhan pencegahan berkembangbiaknya praktek prostitusi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya penyuluhan pencegahan praktek prostitusi di masayarakat.

b) Penyuluhan pencegahan pratek perjudian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya penyuluhan pencegahan praktek perjudian di masayarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban.

10) Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan :

a) Penyuluhan UU di bidang politik dan HAM kepada masyarakat dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan penyuluhan UU bidang dan HAM politik kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

b) Koordinasi forum-forum politik dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi antara forum-forum politik.

c) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada parpol, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol sehingga terwujudnya verifikasi bantuan partai politik.

d) Bimtek sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya pemahaman parpol dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan parpol.

11) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana dengan kegiatan:

a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyebaran informasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana dan potensinya .

b) Pembentukan dan sosialisasi FKDM tingkat kecamatan telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya FKDM tingkat kecamatan.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1) : 12 orang
b) Sarjana Muda : 2 orang
c) SLTA : 1 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV : 5 orang
b) Golongan III : 9 orang
c) Golongan II : 1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : 4 orang
c) Eselon IV : 9 orang

4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.005.038.507,- dan realisasi Rp.2.972.527.207,- atau 98,91%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Umum

a) Terbatasnya jumlah personil dan SDM dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

b) Terbatasnya SDM yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas.

c) Belum optimalnya koordinasi antara Badan Kesbangpol dan Linmas dengan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan trantibmas dan yang berintelegensi.

Khusus

a) Situasi kantribmas di wilayah perbatasan yang belum kondusif

b) Permasalahan penyakit masyarakat

c) Permasalahan kepemilikan tanah suku dan tanah perseorangan

2) Solusi

- Umum

a) Bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM.

b) Peningkatan pemahaman tentang Tupoksi pejabat struktural.

c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur keamanan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

- Khusus

a) Melakukan langkah – langkah yang tegas dan proaktif dalam menyelesaikan sengketa tapal batas.

b) Melakukan pelatihan-pelatihan kepada unsur-unsur dalam masyarakat guna mencegah dan mengeliminir gangguan keamanan dan ketertiban terkait permasalahan penyakit masyarakat

c) Meningkatkan koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait khususnya dengan Dinas Kehutanan dan Sat Pol PP terkait pengamanan kawasan hutan lindung.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- **Bagian Administrasi Pemerintahan**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.348.250.000,- dan realisasi Rp.323.449.635,- atau 92,88%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   e) Penyediaan alat tulis kantor
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   i) Penyediaan makanan dan minuman
   j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.767.189.740,- realisasi Rp.751.678.840,- atau 97,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembayaran retensi 5% pembangunan kantor Inspketorat, Sosial & Nakertrans dan BPMDP2T, tembok pengaman kantor Camat Poco Ranaka Timur
   b) Pengadaan kendaraan dinas roda dua
   c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   d) Pengadaan PDUB Camat
   e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   f) Pembangunan Aula kantor Lurah Rana Loba
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.110.000.000,- dan realisasi Rp.106.494.550,- atau 96,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
   a) Rapat koordinasi lintas SKPD
   b) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
   c) Rapat kerja Sekdes dan Seklur

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.243.470.000,- dan realisasi Rp.228.985.000,- atau 94,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ Bagian Administrasi Pemerintahan
   b) Penyusunan laporan rutin dan laporan khusus Bupati Manggarai Timur
   c) Penyediaan jasa operator komputer
   d) Penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah serta penyusunan dan publikasi ILPPD Akhir Tahun Anggaran 2015
   e) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5) Program penataan Daerah Otonomi Baru, dialokasikan dana Rp.69.000.000,- dan realisasi Rp.55.443.000,- atau 80,35%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Daerah.
6) Program pengembangan wilayah perbatasan, dialokasikan dana Rp.95.000.000,- dan realisasi Rp.60.044.000,- atau 63,20%, digunakan untuk mendukung/membiayai kegiatan fasilitasi penanganan masalah tapal batas wilayah administrasi antar daerah Kabupaten.
7) Program peningkatan kerjasama antar daerah, dialokasikan dana Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.25.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyediaan iuran wajib APKASI Tahun 2016.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat: tersedianya meterai dan prangko untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor serta terbayarnya honor cleaning service untuk mewujudkan kebersihan kantor terciptanya suasana kerja yang nyaman.
   d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung tugas pelayanan perkantoran.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk memperlancar pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi/penggandaan dan penjilidan dokumen/buku guna mendukung pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya fasilitas perkantoran guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan dan dokumen peraturan perundang – undangan guna menambah wawasan dan pengetahuan pegawai.

i) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan, dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas selama Tahun Anggaran 2016.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna mendukung tugas pelayanan dan sinkronisasi program/kegiatan antara pusat dan daerah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan :

a) Pembayaran retensi pembangunan gedung kantor inspektorat, Sosial & Nakertrans dan BPMDP2T dan Tembok pengaman kantor Camat Poco Ranaka Timur, telah dilaksanakan dan dibayar lunas.

b) Pengadaan kendaraan dinas roda dua, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit kendaraan dinas roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

c) Pengadaan PDUB Camat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) paket PDUB Camat guna memenuhi kebutuhan 2 orang Camat yang dilantik tahun 2016 di Kabupaten Manggarai Timur.

d) Pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

e) Pembangunan Aula kantor Lurah Rana Loba, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya aula kantor Lurah Rana Loba guna memenuhi kebutuhan ruang rapat kelurahan Rana Loba.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Rapat koordinasi lintas SKPD, dengan hasil/manfaat : terwujudnya sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di setiap SKPD.
   b) Rapat koordinasi tingkat kecamatan, dengan hasil/manfaat : terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan
   c) Rapat kerja para sekdes dan seklur, dengan hasil/manfaat : terwujudnya sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa/kelurahan.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui kegiatan :
   a) Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ Bagian Administrasi Pemerintahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ Bagian Administrasi Pemerintahan.
   b) Penyusunan laporan rutin dan laporan khusus Bupati, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan rutin dan laporan khusus Bupati Manggarai Timur Tahun 2016.
   c) Penyediaan jasa operator komputer, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa operator komputer yang siap pakai guna kelancaran tugas kedinasan.
   d) Penyusunan LKPJ dan LPPD Bupati Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2016 serta penyusunan dan publikasi ILPPD kepada masyarakat pada Akhir Tahun Anggaran 2015, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD Bupati Manggarai Timur dan terlaksananya publikasi ILPPD.
   e) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5) Program penataan Daerah Otonomi Baru melalui kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran Kecamatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data pendukung pemekaran 3 Kecamatan (Lamba Leda, Kota Komba dan Sambi Rampas) berupa dokumen usulan dan persyaratan dukungan serta dokumen tanah.
6) Program pengembangan wilayah perbatasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya keamanan dan ketentraman di daerah perbatasan.

7) Program peningkatan kerjasama antar daerah telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya iuran APKASI kepada pengurus APKASI guna meningkatkan kerja sama dan menjalin persaudaraan.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Seperti tergambar pada urusan pertanahan.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2016 Rp.1.657.909.740,- dan realisasi Rp.1.551.095.025,- atau 93,56%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantoran dan terbatasnya jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas harian serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

- **Bagian Administrasi Pembangunan**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.375.864.296,- dan realisasi Rp.253.399.601,- atau 67,42%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j) Penyediaan makan minum kantor

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.86.017.248,- dan realisasi Rp.77.496.910,- atau 90,09%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.31.800.000,- dan realisasi Rp.30.975.000,- atau 97,41%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.538.718.456,- dan realisasi Rp.397.646.000,- atau 73,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

b) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

c) Pembinaan usaha jasa konstruksi

d) Layanan pengadaan secara elektronik

e) Unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko, meterai dan paket pengiriman surat-surat dinas guna memperlancar aktivitas perkantoran.

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelola kegiatan demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan kebersihan kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan sehat.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai untuk memperlancar pelaksanaan tugas perkantoran.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor sehingga dapat meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan listrik kantor.

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit laptop dan 1 unit printer guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen perkantoran yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perkantoran.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan kantor.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianyan makan dan minum untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat sehingga terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga dapat mengukur kinerja dan kondisi keuangan.

4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah :

a) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan APBD selama tahun 2016.

b) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 guna mencegah pengulangan kesalahan yang sama.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	3 orang
b) Sarjana Muda	:	1 orang
c) SLTA	:	1 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	1 orang
b) Golongan III	:	3 orang
c) Golongan II	:	1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III	:	1 orang
b) Eselon IV	:	3 orang

4) Staf	:	1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.032.400.000,- dan realisasi Rp.759.517.511,- atau 73,57%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Keterbatasan staf pelaksana yang mendukung program dan kegiatan pada tiga sub bagian

b) Air bersih kurang memadai di kantor

c) Listrik kurang memadai

d) Fasilitas layanan internet yang belum memadai

2) Solusi

a) Pengalokasian PNS di setiap SKPD diharapkan merata dan tidak menumpuk pada SKPD-SKPD teknis

b) Disediakan air bersih yang memadai

c) Disediakan fasilitas listrik yang memadai

d) Disediakan anggaran yang cukup untuk penambahan fasilitas internet

- **Bagian Hukum**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.306.899.500,- dan realisasi Rp.306.899.500,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   d) Penyediaan alat tulis kantor
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.77.000.000,- realisasi Rp.74.700.900,- atau 97,01%, digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3) Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.5.937.000,- dan realisasi Rp.5.937.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi dan konsultasi pengawasan yang lebih komprehensif.
4) Program penataan peraturan perundang-undangan, dialokasikan dana Rp.656.383.500,- dan realisasi Rp.640.994.500,- atau 97,65%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
   b) Legislasi rancangan peraturan perundangan
   c) Fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
   d) Publikasi peraturan perundang-undangan
   e) Asistensi peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
   f) Pembinaan Desa Sadar Hukum

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran:
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko dan meterai untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran.

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.

d) Penyediaan perbaikan peralatan kerja kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai seperti komputer PC, laptop dan printer sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan perlengkapan kantor guna mendukung kegiatan kantor.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor guna menambah wawasan aparatur.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perjalanan dinas dalam dan keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan kantor.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda dua sebanyak 7 unit dan roda empat sebanyak 1 unit guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

3) Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah, telah dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi pengawasan yang lebih komprehensif, dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan yang komprehensif sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar.

4) Program penataan peraturan perundang-undangan :

a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus yang dihadapi dan melibatkan Pemda pada tahun 2016, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan yang lain.

b) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya asistensi 10 RANPERDA yang ditetapkan tahun 2015 guna mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

c) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya fasilitasi sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan tahun 2016 di 9 kecamatan.

d) Publikasi peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedia dan terdistribusinya 210 buku Himpunan Lembaran Daerah (HLD) ke sejumlah Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur untuk menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

e) Asistensi peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya produk hukum daerah yang efektif dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar.

f) Pembinaan Desa Sadar Hukum, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terfasilitasinya kegiatan pembinaan desa sadar hukum di 9 Kecamatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 6 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a)	Sarjana (S2)	:	2 orang
b)	Sarjana (S1)	:	3 orang
c)	SLTA	:	1 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a)	Golongan IV	:	1 orang
b)	Golongan III	:	4 orang
c)	Golongan II	:	1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III : 1 orang
b) Eselon IV : 3 orang

4) Staf : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Hukum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.046.220.000,- dan realisasi Rp.1.028.531.900,- atau 98,30%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah pegawai
b) Masih kurangnya dana, sehingga mengakibatkan adanya beberapa program/kegiatan di bidang hukum belum diakomodir.
c) Terbatasnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

2) Solusi

a) Penambahan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan kantor.
b) Penambahan sarana dan prasarana kantor.
c) Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan.

➢ **Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.150.377.500,- dan realisasi Rp.149.117.500,- atau 99,16%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa dan surat menyurat
b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalansi listrik
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i) Penyediaan makanan dan minuman
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.49.491.300,- dan realisasi Rp.49.491.300,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.700.000,- dan realisasi Rp.2.700.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dialokasikan dana Rp.54.900.000,- dan realisasi Rp.54.900.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan pemberian bantuan sosial.
5) Program koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dialokasikan dana Rp.39.130.200,- dan realisasi Rp.39.130.200,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pendidikan dan kesehatan.
   b) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
   c) Pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah tenaga kerja dan transmigrasi.
6) Program peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama, dialokasikan dana Rp.53.611.000,- dan realisasi Rp.45.574.378,- atau 85,01%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
   b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama
7) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dialokasikan dana Rp.669.790.000,- dan realisasi Rp.669.129.000,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (pelatihan PASKIBRA tingkat Kabupaten Manggarai Timur).

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengiriman surat-surat dinas guna mendukung pelaksanaan pelayanan perkantoran.

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga dapat terciptanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai seperti computer dan laptop sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna mewujudkan ketersediaan dokemen perkantoran.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan komponen instalasi listrik sehingga dapat mendukung ketersediaan penerangan dan pelayanan kantor.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan-undangan guna menambah wawasan pegawai.

i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum harian pegawai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi khususnya masalah-masalah sosial dan tugas-tugas kedinasan lainnya.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai guna mendukung mobilitas perkantoran dan ketersediaan lemari arsip.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur kinerja SKPD.

4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, melalui kegiatan koordinasi pananganan pemberian bantuan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan program selanjutnya.
5) Program koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya hasil evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan masalah di bidang pendidikan dan kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
6) Program peningkatan kualitas kerukunan antar umat Beragama, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang Agama, dengan hasil/manfaat : terciptanya kerukunan umat beragama guna menjaga ketertiban hidup beragama.
7) Program peningkatan peran serta kepemudaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (pelatihan PASKIBRA tingkat Kabupaten Manggarai Timur), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan PASKIBRA tingkat Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung perayaan 17 Agustus 2016.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 7 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 5 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
   c) SLTA : 1 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 5 orang
   c) Golongan II : 1 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.020.000.000,- dan realisasi Rp.1.010.042.378,- atau 99,02%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan**.**

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan
   a) Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan terkait tindak lanjut surat – surat, baik SKPD terkait maupun instansi lainnya
   b) Masih kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop, printer dan kendaraan bermotor/kendaraan operasional sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2) Solusi
   a) Meningkatkan koordinasi dengan TNI dan POLRI terkait pembinaan PASKIBRA
   b) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan kantor.

➢ **Bagian Umum**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.2.297.395.560,- dan realisasi Rp.2.258.773.371,- atau 98,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat-menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   f) Penyediaan alat tulis kantor
   g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
   j) Penyediaan bahan logistik kantor
   k) Penyediaan makanan dan minuman kantor
   l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.2.118.358.290,- dan realisasi Rp.2.035.888.600,- atau 96,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pengadaaan perlengkapan rumah jabatan
c) Pengadaan peralatan rumah jabatan
d) Pengadaan peralatan gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
f) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
g) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
h) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
i) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
j) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program pengembangan peningkatan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.500.000,- dan realisasi Rp.2.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.2.431.746.150,- dan realisasi Rp.2.332.817.901,- atau 95,93 %, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
   b) Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri
   c) Rapat koordinasi unsur Muspida
   d) Kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   e) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
   f) Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   g) Pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan prangko untuk pelaksanaan kegiatan surat-menyurat guna mendukung kelancaran aktivitas administrasi perkantoran.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung pelayanan perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium pengelola keuangan guna mendukung pelaksanan penataan keuangan yang akuntabel dan transparan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor serta jasa kebersihan kantor untuk kebersihan rumah jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat sehingga terciptanya lingkungan rumah jabatan yang bersih dan asri.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor yang siap pakai guna mendukung pelayanan perkantoran.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi dan penjilidan sehingga tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna mewujudkan ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Bupati, rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Bagian Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur guna mendukung ketersediaan jasa penerangan.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembayaran terhadap Surat Kabar Flores Pos dan Pos Kupang guna menambah wawasan pegawai.

j) Penyediaan bahan logistik kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bakar minyak dan gas untuk rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Bagian Umum sehingga dapat berjalan lancarnya kegiatan pelayanan di rumah jabatan.

k) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum rapat, makanan dan minuman harian pegawai serta makanan dan minuman rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dua unit kendaraan dinas operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.
   b) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sofa, lemari pakaian dan gorden untuk rumah jabatan guna mewujudkan rumah jabatan yang nyaman.
   c) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas serta tersedianya jasa petugas pada rumah jabatan sehingga pelayanan di rumah jabatan dapat berjalan maksimal.
   d) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan gedung kantor untuk kelancaran tugas-tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan kerja kantor yang efektif dan efisien.
   e) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpelihara dan terawatnya rumah jabatan sehingga terciptanyanya kerapian, kebersihan dan keindahan rumah jabatan.
   f) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor sehingga terwujudnya pelayanan kerja yang efektif dan efisien.
   g) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya mobil jabatan yang siap pakai sehingga terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
   h) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk kelancaran pelayanan.
   i) Pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan/dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas untuk kelancaran pelayanan rumah jabatan.
   j) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang siap pakai sehingga pelayanan perkantoran dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3) Program pengembangan peningkatan sistem laporan pencapaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

a) Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya dialog atau audensi dengan masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan guna menjaring aspirasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

b) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman untuk tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah guna memperlancar proses kunjungan kerja.

c) Rapat koordinasi unsur muspida, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman guna mendukung pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi unsur muspida.

d) Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

e) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program/kegiatan.

f) Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya premi asuransi kesehatan guna mendukung dan menjaga kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

g) Pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya premi asuransi Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati selama 12 (dua belas) bulan.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Umum Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	2 orang
b) Sarjana (S1)	:	8 orang
c) Sarjana Muda	:	3 orang
d) SLTA	:	8 orang
e) SMP	:	1 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV : 8 orang
b) Golongan III : 5 orang
c) Golongan II : 9 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II : 7 orang
b) Eselon III : 1 orang
c) Eselon IV : 3 orang

4) Staf : 11 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk urusan pada Bagian Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.159.336.927,- dan realisasi Rp. 11.800.570.353,- atau 97,04%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kanto

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Kurangnya jumlah pegawai sehingga cukup menghambat pelaksanaan tugas perkantoran khususnya staf teknis.

2) Solusi

a) Mengisi jabatan yang kosong dan memaksimalkan pengembanan tugas pada aparatur yang ada

➢ **Bagian Administrasi Perekonomian**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.208.086.600,- dan realisasi Rp. 208.086.557,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat-menyurat
b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h) Penyediaan makanan dan minuman
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.84.368.000,- dan realisasi Rp.84.368.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dialokasikan dana Rp.76.921.200,- dan realisasi Rp.76.921.200,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi pelaksanaan pendapatan Asli Daerah (PAD).
4) Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.5.780.000,- dan realisasi Rp.5.780.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
5) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dialokasikan dana Rp.54.184.800,- dan realisasi Rp.54.184.800 atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penyusunan dan penyajian data sarana ekonomi dan data produksi daerah.
6) Program fasilitasi kebijakan dan program Pemerintah, dialokasikan dana Rp.193.312.000,- dan realisasi Rp.193.287.000,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi Beras Miskin (RASKIN).
7) Program koordinasi dan pembinaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.257.347.400,- dan realisasi Rp.256.691.400,- atau 99,75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Koordinasi pelaksanaan program GEMALA tingkat Kabupaten dan Kecamatan
   b) Koordinasi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya alam
   c) Koordinasi Koperasi/KUD dan UMKM lintas Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur
   d) Koordinasi tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Manggarai Timur

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai untuk kelancaran aktifitas surat menyurat sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honorarium jasa pengelola keuangan untuk guna terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor untuk pelaksanaan kebersihan kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk menambah pengetahuan dan wawasan aparatur.

h) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket makanan dan minuman untuk kelancaran pelaksanaa aktivitas perkantoran.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sehingga terwujudnya kelancaran mobilisasi perkantoran.

3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan pendapatan asli daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pendapatan asli daerah.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur kinerja SKPD.
5) Program pengembangan data/statistik/informasi daerah, melalui kegiatan pengumpulan, penyusunan dan penyajian data, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaaat : tersedianya data sarana ekonomi dan data produksi daerah yang akurat.
6) Program fasilitasi kebijakan pemerintah dengan koordinasi Beras Miskin (RASKIN), telah dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi RASKIN, dengan hasil/manfaat : terkoordinasinya pengelolaan RASKIN guna pemerataan pembagian.
7) Program koordinasi dan pembinaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, melalui kegiatan :
   a) Koordinasi pelaksanaan program GEMALA Tingkat kabupaten dan Kecamatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program GEMALA.
   b) Koordinasi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya alam, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi antara instansi terkait dalam peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya alam.
   c) Koordinasi Koperasi/KUD dan UMKM lintas Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan evaluasi koperasi dan UMKM di Kabupaten Manggarai Timur.
   d) Koordinasi tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Manggarai Timur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Timur.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 3 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III : 1 orang
b) Eselon IV : 3 orang

4) Staf : -

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.880.000.000,- dan realisasi Rp.879.318.957,- atau 99,92%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

a) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana kantor

b) Jumlah pegawai yang belum memadai

2) Solusi :

a) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

b) Menambah jumlah pegawai

➢ **Bagian Organisasi**

a. Program dan Kegiatan

1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.435.730.000,- dan realisasi Rp.395.433.000,- atau 90,75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i) Penyediaan makanan dan minuman kantor

j) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.40.420.000,- dan realisasi Rp 38.059.450,- atau 94,16%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.76.720.000,- dan realisasi Rp.75.760.500,- atau 99,00 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bimtek penyusunan indikator kinerja utama.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.115.080.000,- dan realisasi Rp.89.931.000,- atau 78,15%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
   b) Asistensi LAKIP Oleh BPKP Prov. NTT
5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.59.240.000,- dan realisasi Rp.51.532.000,- atau 87,00 %, digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan koordinasi percepatan pemberantasan korupsi, INPRES Nomor 5 Tahun 2004.
6) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dialokasikan dana Rp.262.520.000,- dan realisasi Rp.231.405.000,- atau 88,15%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Manggarai Timur dan penyusunan buku indikator kinerja utama.
7) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dialokasikan dana Rp.70.290.000,- dan realisasi Rp.41.226.000,- atau 59,00 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Program dan Kegiatan

Pencapaian SPM/Realisasi kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa pengiriman surat kilat atau biasa dalam daerah dan luar daerah sehingga terwujudnya kelancaran aktivitas pelayanan perkantoran.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c) Penyedian jasa kebersihan Kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 pakel alat kebersihan kantor sehingga terciptanya kondisi lingkungan kantor yang bersih dan asri.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor yang siap pakai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 paket alat tulis kantor (ATK) sehingga terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya foto kopi dan penggandaan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik guna kelancarana aktifitas perkantoran.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos, sehingga dapat menambah wawasan dari personil kantor.

i) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum harian pegawai sehingga terwujudnya kelancaran kegiatan kantor.

j) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kantor.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan :

a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dua unit laptop dan dua unit printer guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional guna mendukung kelancaran tugas operasional perkantoran.

3) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA), telah dilaksanakan melalui kegiatan bimtek IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan hasil/manfaat: tersedianya 50 orang tenaga yang siap pakai guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai.

4) Program pengembangan peningkatan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan:
   a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya buku LAKIP Bupati dan LAKIP SETDA sehingga terwujudnya sistem pelaporan yang akuntabel.
   b) Evaluasi LAKIP oleh BPKP Provinsi tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan kebijakan yang hanya diselenggarakan oleh KEMENPAN – RB.
5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati, dengan kegiatan pelaksanaan koordinasi percepatan pemberantasan korupsi INPRES Nomor 5 Tahun 2004, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 27 (dua puluh tujuh) buku laporan (LHKPN) dan terlaksananya rapat koordinasi 2 kali, sehingga terwujudnya kesamaan pemahaman tentang INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 Perda Organisasi Perangkat Daerah yaitu Perda No 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan pembuatan 27 Perbup terkait Organisasi Perangkat Daerah.
7) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan FORKOMPANDA tingkat Kabupaten 1 kali guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 7 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 5 orang
   c) Golongan II : 1 orang
2) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 5 orang
   c) Sarjana Muda : 1 orang

3) Jabatan/eselonering
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.060.000.000,- dan realisasi Rp.923.346.950,- atau 87,10%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Kurangnya jumlah pegawai
2) Solusi
   a) Untuk mengisi atau melaksanakan tugas perkantoran, maka merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian.

➢ **Bagian Humas dan Protokol**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.290.581.000,- dan realisasi Rp.290.476.000,- atau 99,96%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   d) Penyediaan alat tulis kantor
   e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   f) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
   g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   h) Penyediaan makanan dan minuman kantor
   i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.88.020.000,- dan realisasi Rp.87.793.500,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.249.000,- dan realisasi Rp.3.249.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.105.275.000,- dan realisasi Rp.105.275.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasi dana Rp.5.000.000,- dan realisasi Rp.5.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi lintas SKPD.
6) Program kerjasama informasi dengan mass media, dialokasikan dana Rp.205.600.000,- dan realisasi Rp.205.600.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
   b) Penyediaan barang dan jasa iklan pada media cetak/elektronik.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisa**si** pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sbb :

1) Pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan prangko untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor untuk mewujudkan kebersihan kantor sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
   d) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk memperlancar pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi/penggandaan

dan penjilidan guna mendukung pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sehingga tersedianya jasa penerangan kantor dan terwujudnya kelancaran pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pengembangan wawasan aparatur pemerintah.

h) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor guna mendukung kelancaran tugas pelayanan.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang siap pakai sebagai pendukung pelaksanaan mobilitas perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan gedung kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum rapat koordinasi lintas SKPD guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan .

5) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hasil/manfaat : terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah guna mengetahui proses penyelenggaraan pembangunan daerah.

6) Program kerja sama informasi dengan mass media, telah dilaksanakan melalui kegiatan publikasi, brosur, kalender, spanduk, baliho dan advetorial di media massa, dengan hasil : terlaksanakanya penyampaian informasi guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 3 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
   c) SLTA : 1 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 2 orang
   c) Golongan II : 2 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 2 orang
4) Staf : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Bagian Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.697.725.000,- dan realisasi Rp.697.393.500,- atau 99,95%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki spesifikasi/keahlian teknis di bidang kehumasan dan keprotokolan.
2) Solusi
   a) Melibatkan pegawai/staf dalam berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan, bimtek, sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian teknis para pegawai dalam bidang kehumasan dan keprotokolan pemerintah dan membentuk tim kerja (*team work*) dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat.

- **Urusan Skretariat Korpri**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.233.860.000,- dan realisasi Rp.226.260.000,- atau 96,75%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelayanan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan alat tulis kantor
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   h) Penyediaan makan dan minum rapat kantor
   i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.89.241.258,- dan realisasi Rp.85.854.000,- atau 96,00 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan meubelair
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3) Program pembinaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan Korpri, dialokasikan dana Rp.209.960.000,- dan realisasi Rp.209.960.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembinaan olah raga anggota Korpri
   b) Pembinaan mental dan rohani anggota Korpri
   c) Pemutakhiran data anggota Korpri
   d) Peringatan HUT Korpri
   e) Rapat kerja dan rapat evaluasi Korpri

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Pelayanan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko dan meterai untuk memperlancar pengiriman surat dinas dan administrasi perkantoran lainnya.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa listrik dan air sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang maksimal.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan , telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya situasi dan kondisi kantor yang bersih dan asri guna mendukung kenyamanan bekerja aparatur.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor sehingga terwujudnya pelayanan admnistrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi dan penjilidan sehingga tersedianya dokumen kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan wawasan aparatur.

h) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian kantor.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 unit kendaraan dinas operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Pengadaan meubelair, dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 paket meubelair, guna mendukung aktivitas perkantoran.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

d) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan hasil/manfaat : terwujudnya administrasi perkantoran yang efektif dan efesien.

3) Program pembinaan dan penguatan kelembagaan Korpri

a) Pembinaan olah raga anggota Korpri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan porseni Korpri di Kupang.

b) Pembinaan mental dan rohani anggota Korpri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselnggaranya kegiatan pembinaan mental dan rohani anggota Korpri tingkat Kabupaten Manggarai Timur.

c) Pemutakhiran data anggota Korpri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedinya data anggota Korpri yang akurat guna mengetahui kondisi data anggota Korpri.

d) Peringatan HUT Korpri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan dalam rangka memperingati HUT Korpri tingkat Kabupaten Manggarai Timur di Lehong.

e) Rapat kerja dan rapat evaluasi Korpri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum rapat evaluasi Korpri guna memperlancar proses rapat.

c. SKPD Penyelenggara

Kantor Sektretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Manggarai Timur

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 4 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 2 orang
   b) Sarjana Muda : 2 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : -

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Sekretariat Korpri pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.533.061.258,- dan realisasi Rp.522.074.000,- atau 97,94%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

b) Masih rendahnya kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur bidang perpustakaan dan kearsipan.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor.

b) Memaksimalkan pembagian tugas harian pegawai.

- **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

a. Program dan Kegiatan.

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.3.964.297.000,- dan realisasi Rp.3.796.134.821,- atau 95,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

f) Penyediaan jasa perbaikan dan perawatan peralatan kerja

g) Penyediaan alat tulis kantor

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k) Penyediaan makanan dan minuman Kantor

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.357.000.000,- dan realisasi Rp.331.558.000,- atau 92,80%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pengadaan meubelair kantor

c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

d) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

e) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

3) Program peningkatan disiplin aparatur, dialokasikan dana Rp.114.000.000,- dan realisasi Rp.113.748.600,- atau 99,78%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.671.000,- dan realisasi Rp.2.671.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

5) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dialokasikan dana Rp.6.364.150.000,- dan realisasi Rp.6.091.362.410,- atau 95,78%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
b) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
c) Rapat-rapat Paripurna DPRD
d) Reses
e) Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
f) Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah
g) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya prangko dan meterai untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas perkantoran sehingga terwujudnya optimalisasi tugas pelayanan.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai untuk mendukung pelayanan perkantoran.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan suasana kerja yang nyaman.

f) Penyediaan jasa perbaikan dan perawatan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai sehingga terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi dan penjilidan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga terwujudnya sumber daya aparatur yang memiliki wawasan yang luas.

k) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman harian guna mendukung kelancaran kegiatan rapat kantor.

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan meubelair kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meubelair guna mendukung kegiatan perkantoran.

b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya asesoris 3 (tiga) unit kendaraan dinas pimpinan DPRD.

c) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan gedung kantor, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

d) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

e) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya rumah jabatan yang layak.

3) Program penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan disiplin aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan hasil/manfaat : tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan untuk anggota DPRD.

5) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :

a) Pembahasan rancangan peraturan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembahasan Ranperda sehingga tersedianya dokumen Ranperda.

b) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD guna membahas alat kelengkapan DPRD.

c) Rapat-rapat paripurna DPRD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat paripurna DPRD untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan.

d) Reses, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah sehingga terjaringnya informasi dan aspirasi masyarakat.

e) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pembangunan.

f) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan tugas pelayanan.

g) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

c. SKPD Penyelenggara

Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 13 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	12 orang
b) Sarjana Muda	:	1 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	3 orang
b) Golongan III	:	9 orang
c) Golongan II	:	1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	2 orang
c) Eselon IV	:	8 orang

4) Staf	:	2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.16.533.531.136,- dan realisasi Rp.16.050.169.196,- atau 97,07%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang mendukung pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan :

a) Keterbatasan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas harian pegawai.

b) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

- **Inspektorat Daerah**

a. Program dan Kegiatan

1) Pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.582.730.000,- dan realisasi Rp.575.950,- atau 97,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan alat tulis kantor
   f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
   h) Penyediaan makan dan minum
   i) Koordinasi, monitoring dan evaluasi
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.141.340.000,- dan realisasi Rp.129.363.000,- atau 96,85%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan peralatan gedung kantor
   c) Pengadaan meubelair
   d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dialokasikan dana Rp.1.808.272.000,- dan realisasi Rp.1.791.893.981,- atau 99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
   b) Penanganan khusus pengaduan lingkup Pemerintah Daerah
   c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
   d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
   e) Inventarisasi temuan pengawasan
   f) Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
   g) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
   h) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

5) Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dialoksikan dana Rp.214.683.000,- dan realisasi Rp.208.959.200,- atau 97,33%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
b) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan prangko untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya air dan penerangan kantor guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor untuk mewujudkan kebersihan kantor sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk memperlancar pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi/penggandaan dan penjilidan guna mendukung pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang – undangan, guna menambah wawasan aparatur dalam melakukan pengawasan.

h) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya kesepahaman hasil rapat.

i) Koordinasi, monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi demi terwujudnya sinkronisasi tugas pengawasan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 3 (tiga) unit laptop guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

c) Pengadaan meubelair, tidak dilaksanakan karena anggaran terbatas.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang siap pakai sehingga terwujudnya pelaksanaan mobilitas perkantoran.

e) Pemeliharaan komputer dan laptop, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laptop dan komputer yang siap pakai guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah :

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeriksaan internal berkala/rutin dan tersedianya data temuan serta laporan hasil pemeriksaan berkala sehingga menurunnya tingkat penyalahgunaan keuangan negara/daerah.

b) Penanganan khusus pengaduan lingkup pemerintah daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat pada lingkup pemerintah daerah sehingga tersedianya data temuan hasil pemeriksaan khusus.

c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeriksaan berkala pada setiap SKPD sehingga terwujudnya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeriksaan kasus pada wilayah pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.

e) Inventarisasi temuan pengawasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan sehingga tersedianya data/laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

f) Tindaklanjut hasil temuan pengawasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat tindak lanjut hasil temuan pengawas guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

g) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi bidang pengawasan ke luar daerah sehingga terwujudnya sinergitas pelaksanaan pengawasan.

h) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan :

a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan teknis pengawasan sehingga tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional.

b) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga tersedianya aparatur pengawasan yang profesional.

c. SKPD Penyelenggara

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a)	Sarjana (S1)	: 31 orang
b)	SLTA	: 1 orang

2) Pangkat/Golongan

a)	Golongan IV	: 6 orang
b)	Golongan III	: 25 orang
c)	Golongan II	: 1 orang

3) Jabatan Struktural

a)	Eselon II	: 1 orang
b)	Eselon III	: 5 orang
c)	Eselon IV	: 3 orang

4) Staf : 23 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2016 Rp.4.769.935.607,- dan realisasi Rp.4.615.470.294,- atau 96,76%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi khusus di bidang pengawasan sehingga menyebabkan tidak efektifnya pembinaan dan pengawasan inspektorat hal ini terlihat dari tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan.

b) Masih banyak obrik yang belum terjangkau oleh tugas pengawasan dikarenakan banyaknya obrik di Kabupaten Manggarai Timur sesuai Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP) inspektorat 2014 – 2019 sehingga mengakibatkan bayaknya obyek pemeriksaan/auditi/aparatur pemerintah yang belum mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara langsug oleh inspektorat daerah.

c) Terbatasnya alokasi anggaran diklat bagi auditor dan non auditor dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengawasan, sehingga hasil – hasil pengawasan belum dikaji secara maksimal.

d) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari para pengelola keuangan di tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku

e) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran dari obyek pemeriksaan baik di tingkat SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak ketiga (rekanan) dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.

2) Solusi

a) Mengikuti kegiatan Diklat Sertifikasi Auditor untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek-obyek pengawasan di Kabupaten Manggarai Timur

b) Mengikuti Diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sehingga dapat meningkatkan kompetensi tenaga auditor

c) Menyelenggarakan rapat evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dengan SKPD.

d) Membentuk tim penyelesaian kerugian daerah Kabupaten Manggarai Timur.

- **Urusan Administrasi Keuangan Daerah**

a. Program dan kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.2.360.506.500,- dan realisasi Rp.2.210.627.959,- atau 93,65% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i) Penyediaan peralatan rumah tangga
j) Penyediaan makanan dan minuman
k) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.612.850.000,- dan realisasi Rp.582.837.081,- atau 95,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas operasional
   b) Pengadaan meubelair
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
   e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.137.500.000,- dan realisasi Rp.105.432.351,- atau 76,67%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.477.500.000,- dan realisasi Rp.477.080.259,- atau 99,91%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
   b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
   c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
   d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dialokasikan dana Rp.3.146.343.500,- dan realisasi Rp.2.841.487.863,- atau 90,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyusunan standar harga satuan
   b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
   c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2016
   d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015
   e) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
   f) Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   g) Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah
   h) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah
   i) Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data SISMIOP PBB
   j) Percetakan masal SPPT PBB 2016
   k) Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah
   l) Penyusunan rancangan perbup tentang rekonsiliasi piutang PBB
   m) Penatausahaan keuangan dan pelayanan keuangan daerah

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengiriman surat lintas kabupaten, provinsi dan tingkat pusat sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedia jasa listrik dan air guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelola keuangan guna pelayanan administrasi keuangan yang akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa guna pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket instalasi listrik guna mendukung ketersediaan penerangan bangunan kantor.

h) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya printer dan laptop guna mendukung kelancaran kegiatan kantor.

i) Penyediaan peralatan rumah tangga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan rumah tangga untuk kelancaran pelayanan kedinasan.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi sehingga terwujudnya sistem informasi keuangan daerah, sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan akuntansi yang akuntabel.

l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terjalinnya koordinasi dan monitoring penagihan dan retribusi pasar di 9 kecamatan guna meningkatkan pendapatan daerah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas operasional 2 unit sepeda motor.

b) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meja kerja kantor sebanyak 1 paket.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua untuk menunjang kelancaran pelayanan tugas perkantoran.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kantor guna mendukung pelayanan administrasi perkantoran.

e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya 1 unit bangunan kantor.

3) Program peningkatan sumber daya aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan capaian kinerja SKPD guna mengukur kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan RKA semesteran.

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya LKPJ dan laporan fisik keuangan.

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya laporan keuangan akhir tahun seperti LRA, Neraca dan CALK.

5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah :

a) Penyusunan harga satuan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya pedoman harga satuan Kabupaten sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses pengadaan.

b) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD guna menjadi pedoman pelaksanaan APBD.

c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2016, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015.

e) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sistem informasi keuangan.

f) Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaaat : terlaksananya sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah.

g) Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah, telah dilaksanakan guna menertibkan aset/barang milik daerah.

h) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, telah dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan daerah.

i) Pemeliharaan dan pemutakhiran basis data SISMIOP PBB guna menjaga akurat data SISMIOP PBB.

j) Percetakan masal SPPT PBB 2016, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya SPPT PBB yang siap digunakan.

k) Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rancangan peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

l) Penyusunan rancangan perbup tentang rekonsiliasi piutang PBB, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rancangan bupati tentang rekonsiliasi piutang PBB.

m) Penatausahaan keuangan dan pelayanan keuangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya pelayanan keuangan yang efektif dan efisien.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 44 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kualifikasi Pendidikan :

a) Sarjana (S2)	:	2 orang
b) Sarjana (S1)	:	25 orang
c) Sarjana Muda	:	9 orang
d) SLTA	:	8 orang

2) Menurut Pangkat/Golongan :

a) Golongan IV	:	5 orang
b) Golongan III	:	28 orang
c) Golongan II	:	11 orang

3) Jabatan Struktural :

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	6 orang
c) Eselon IV	:	17 orang

4) Staf : 20 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Administrasi Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Rp.11.275.081.610,- dan realisasi Rp.9.699.887.073,- atau 86,02%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

a) Jumlah personil yang terbatas sehingga sebagian jabatan yang ada belum terisi akibatnya volume beban kerja bagi personil yang ada semakin tinggi.

b) Peralatan kerja yang belum mendukung seperti komputer dan tenaga operator yang belum memadai.

c) Ruangan kerja belum memenuhi standar.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas.

b) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

c) Mengatur penggunaan ruangan yang ada.

- **Urusan Kepegawaian dan Persandian**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.282.200.500,- dan realisasi Rp.1.131.156.322,- atau 88,22%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
   h) Penyediaan alat tulis kantor
   i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   j) Penyediaan makanan dan minuman
   k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
   l) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas
   m) Penyediaan kelengkapan administrasi PNS
2) Program peningkatan disiplin aparatur, dialokasikan dana Rp.237.800.000,- dan realisasi Rp.236.456.000,- atau 99,43%,
3) Program fasilitasi pindah/purna tugas, dialokasikan dana Rp.226.960.000,- dan realisasi Rp.194.355.800,- atau 85,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi urusan pensiun/purna tugas.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.3.161.509.800,- realisasi Rp.3.091.331.781,- atau 97,78%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk CPNS Daerah
   b) Pendidikan dan pelatihan pejabat struktural Daerah
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.571.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 98,10%, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
6) Program pendidikan kedinasan, dialokasikan dana Rp.180.755.500,- dan realisasi Rp.171.076.500,- atau 94,64%, digunakan untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis penilaian prestasi kerja PNS.

7) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, dialokasikan dana Rp.1.491.215.250,- dan realisasi Rp.824.232.154,- atau 55,27% digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS Daerah
   b) Seleksi penerimaan CPNSD
   c) Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNS
   d) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
   e) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
   f) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
   g) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat reguler PNS
   h) Proses penanganan kasus pelanggaran disiplin

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan prangko untuk kelancaran pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik guna mendukung aktivitas pegawai.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasonal roda dua dan roda empat yang siap pakai guna mendukung kelancaran mobilitas perkantoran.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor serta honor untuk cleaning service untuk mewujudkan kebersihan kantor sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung tugas pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan guna menambah wawasan pegawai

h) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk memperlancar pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja foto kopi/penggandaan dan penjilidan guna mendukung pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

j) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya kesepahaman hasil rapat.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi guna mendukung tugas pelayanan dan sinkronisasi program/kegiatan.

l) Monitoring dan evaluasi tugas-tugas kepemerintahan dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi demi terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas pelayanan kepemerintahan.

m) Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kelengkapan kebutuhan administrasi PNS.

2) Program peningkatan disiplin aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 84 (delapan puluh empat) unit mesin absensi guna meningkatkan disiplin aparatur.

3) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya 81 (delapan puluh satu) SK pensiun normal/janda/duda PNS dan 81 (delapan puluh satu) TASPEN.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat mengukur kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

5) Program pendidikan kedinasan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya bimbingan teknis untuk 5 (lima) orang Camat di Kabupaten Manggarai Timur.
6) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaatn : terlaksananya diklat prajabatan bagi 449 (empat ratus empat puluh sembilan) orang peserta dan diklat struktural untuk 6 (enam) orang lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
7) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil :
   a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS daerah, dengan hasil/manfaatn : terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural untuk 264 (dua ratus enam puluh empat) orang peserta.
   b) Seleksi penerimaan CPNSD, tidak dilaksanakan karena kebijakan moratorium dari pusat. Anggaran dialihkan untuk kegiatan penetapan NIP CPNSD tenaga eks honorer kategori II sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) orang.
   c) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penataan administrasi kenaikan pangkat otomatis untuk 25 (dua puluh lima) orang.
   d) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya piagam penghargaan satya lencana karya satya untuk 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS yang berprestasi.
   e) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas untuk 1 (satu) orang dan dibiayai oleh pihak ke tiga 3 (tiga) orang sehingga totalnya 4 (empat) orang.
   f) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya seleksi penerimaan Praja IPDN di BKD Provinsi.
   g) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat reguler PNS, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kenaikan pangkat untuk 909 (sembilan ratus sembilan) orang pegawai.
   h) Penanganan kasus pelanggaran disiplin, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen penanganan 17 kasus pelanggaran disiplin.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 28 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	1 orang
b) Sarjana (S1)	:	17 orang
c) Sarjana Muda	:	5 orang
d) SLTA	:	5 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	4 orang
b) Golongan III	:	16 orang
c) Golongan II	:	8 orang

3) Jabatan Sturuktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	4 orang
c) Eselon IV	:	11 orang

4) Staf : 12 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Rp.8.319.631.794,- dan realisasi Rp.7.335.290.781,- atau 88,16%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Terbatasnya jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas harian pegawai

b) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

➢ **Urusan Penanggulangan Bencana Daerah**

a. Program dan Kegiatan

1) Program program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.627.521.600,- dan realisasi Rp.595.117.917,- atau 94,84%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan makanan dan minuman kantor
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penanganan bencana alam

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.290.408.400,- dan realisasi Rp.263.422.300,- atau 90,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   b) Pemeliharaan kendaraan dinas
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana, Rp.2.500.000,- dan Realisasi Rp.2.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengembangan sistem pelaporan kinerja.
4) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana, dialokasikan dana Rp.8.673.492.500,- dan realisasi Rp.8.671.642.500,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana di 9 Kecamatan
   b) Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu peringatan bencana
   c) Pengadaan bahan bantuan bangunan perumahan bagi korban bencana
   d) Penanganan pasca bencana
   e) Pengurangan resiko bencana

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolan keuangan yang akuntabel.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor sehingga terciptanya kondisi tempat kerja yang bersih dan nyaman.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
g) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum guna mendukung kelancaran tugas perkantoran.
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya kegiatan rapat koordinasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
i) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring evaluasi tugas kegiatan dilapangan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan :
a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pekerjaan yang memuaskan.
b) Pemeliharaan kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua guna mendukung mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengembangan sistem pelaporan kinerja dengan hasil/manfaat : terwujudnya laporan yang akuntabel.

4) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana, dengan kegiatan :
a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana di 9 Kecamatan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyebarluasan informasi bencana selama tahun 2016.
b) Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu peringatan bencana dengan hasil/manfaat : tersedianya rambu-rambu peringatan bencana pada titik-titik rawan bencana.
c) Pengadaan bahan bantuan bagi korban bencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tempat tinggal yang layak bagi korban bencana.

d) Penanganan pasca bencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai.

e) Pengurangan resiko bencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: berkurangnya resiko korban yang disebabkan karena bencana.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:14 orang
b) Sarjana Muda	: 4 orang
c) SLTA	: 2 orang

2) Menurut Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	: 1 orang
b) Golongan III	:16 orang
c) Golongan II	: 3 orang

3) Jabatan/Eselonering

a) Eselon III	: 4 orang
b) Eselon IV	: 9 orang

4) Staf : 7 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10.703.350.921,- dan realisasi Rp.10.602.988.910,- atau 99,06%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah pegawai, terbatasnya fasilitas kantor dan terbatasnya ruangan kerja

2) Solusi

a) Menambah pegawai yang memiliki keahlian khusus, mengisi kekosongan seksi dan membangun kantor baru.

- **Urusan Narkotika**

a. Program dan kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.188.767.000,- dan realisasi Rp.161.295.700,- atau 85,45%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   e) Penyediaan alat tulis kantor
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   g) Penyediaan makanan dan minuman
   h) Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   i) Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.154.868.000,- dan realisasi Rp.154.308.200,- atau 99,64%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   b) Pengadaan meubelair
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
   e) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3) Program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, dialokasikan dana Rp344.615.000,- dan realisasi Rp.340.565.000,- atau 98,82%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyuluhan penanggulangan bahaya Narkoba bagi remaja/siswa - siswi
   b) Penyuluhan penanggulangan bahaya Narkoba bagi calon tenaga kerja
   c) Penyuluhan bahaya narkoba bagi para guru Sekolah Dasar
   d) Penyuluhan penanggulangan bahaya narkoba bagi masyarakat
4) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dialokasikan dana Rp.88.250.000,- dan realisasi Rp.88.250.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dialokasikan dana Rp.20.000.000,- dan realisasi Rp.20.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS.

b. Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Tingkat pencapaian SPM/realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko, meterai dan benda pos lainnya sehingga terlaksananya pengiriman surat sampai ke tempat tujuan.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih sehingga dapat terciptanya kondisi lingkungan kerja yang bersih.
   d) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mewujudkan kelancaran administrasi perkantoran.
   e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetak dan penggandaan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.
   f) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya makan dan minum sehingga dapat mendukung kelancaran aktifitas perkantoran.
   g) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi demi terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.
   h) Monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan tugas–tugas pemerintahan dalam daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan tugas–tugas kepemerintahan demi mewujudkan pelayanan kemasyarakatan.
   i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan, surat kabar dan peraturan perundang – undangan guna meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit laptop guna kelancaran aktivitas perkantoran.

b) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 set sofa dan 2 unit lemari guna menciptakan kondisi ruangan yang rapi dan teratur.

c) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat demi mewujudkan peningkatan pelayanan.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

e) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

3) Program penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS :

a) Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi siswa/i SLTP/SLTA, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan penyuluhan di 75 Sekolah atau 3.900 siswa/i guna meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS.

b) Pemberian penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi calon tenaga kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan guna meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi para calon tenaga kerja sebanyak 400 orang.

c) Penyuluhan penanggulangan bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi guru Sekolah Dasar, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyuluhan bagi 50 Guru Sekolah Dasar guna meningkatkan pengetahuan Guru SD tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS.

d) Penyuluhan penanggulangan bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyuluhan di 9 kecamatan atau bagi 250 orang tokoh masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

4) Program peningkatan peran serta kepemudaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di 30 kelompok muda atau 1.500 orang.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan guna mengukur kinerja Instansi Pemerintah dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.
6) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya media penyebaran informasi upaya – upaya penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Narkotika Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 11 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 7 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
   c) SLTA : 3 orang
2) Menurut Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 8 orang
   c) Golongan II : 2 orang
3) Jabatan/eselonering
   a) Eselon IV : 6 orang
   b) Eselon III : 1 orang
4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Badan Narkotika Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.1.503.560.122,- dan realisasi Rp.1.443.910.121,- atau 96,10%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan Pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Kebiasaan masyarakat merokok dan konsumsi minuman keras yang memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba.

b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya membantu para korban HIV/AIDS untuk segera mendapatkan pelayanan pada pusat kesehatan.
c) Keberadaan tempat – tempat hiburan yang terselubung yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d) Kurangnya pendidikan sex dalam keluarga yang mengakibatkan kehilangan kontrol bagi para remaja.

2) Solusi
a) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba.
b) Membentuk kelompok pemuda peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
c) Berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.
d) Bekerja sama dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

- **Urusan Kepamongprajaan**

a. Program dan kegiatan.

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.253.429.000,- dan realisasi Rp.253.429.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h) Penyediaan makanan dan minuman kantor
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
j) Monitoring dan evaluasi

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.76.900.000,- dan realisasi Rp.75.702.900,- atau 98,44%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.500.000,- dan realisasi Rp.2.500.000-, atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dialokasikan dana Rp.1.606.650.000,- dan realisasi Rp.1.606.050.000-, atau 99,70%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5) Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal, dialokasikan dana Rp.86.831.000,- dan realisasi Rp.86.831.000,- atau 100%, digunakan untuk mundukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian pelanggaran ketertiban dan keamanan kota.
6) Program peningkatan pemahaman terhadap Perda dan Perbup, dialokasikan dana Rp.28.690.000,- dan realisasi Rp.23.940.000,- atau 83,44%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan Perda Kabupaten Manggarai Timur.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya kelancaran aktivitas perkantoran.
   b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa/honorarium pengelola keuangan untuk kelancaran administrasi keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa kebersihan kantor, peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.
   d) Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat penting guna pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 1 tahun guna menambah wawasan dan pengetahuan pegawai.

h) Penyediaan makanan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor untuk kebutuhan rapat dan tugas harian pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna mewujudkan sinkronisasi program/kegiatan.

j) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk kelancaran mobilitas kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran efektif dan efisien.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja guna mengukur capaian kinerja.

4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan dan Kabupaten guna membantu pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Manggarai Timur.

5) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya kondisi yang kondusif, aman, tentram dan damai di masyarakat guna menjaga persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat.

6) Program peningkatan pemahaman terhadap Perda dan Perbup, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penegakan Perda sebanyak 15 kali guna menambah wawasan masyarakat untuk menaati Peraturan yang berlaku.

c. SKPD Penyelenggara

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 8 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	1 orang
b) Sarjana (S1)	:	3 orang
c) Sarjana Muda	:	1 orang
d) SLTA	:	3 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	1 orang
b) Golongan III	:	5 orang
c) Golongan II	:	2 orang

3) Jabatan Sturuktural

a) Eselon III	:	1 orang
b) Eselon IV	:	4 orang

4) Staf	:	3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.682.967.094,- dan realisasi Rp.2.640.136.094,- atau 98,63%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

- Umum :

  Ditingkat SKPD, Adanya Keterbatasan Anggaran sehingga menyebabkan tidak dialokasikannya pengadaan pakaian dinas Polisi Pamong Praja, serta tidak dapat dilaksanakannya diklat bagi anggota.

- Khusus :

  a) Pelaksanaan penegakan Perda Tahun 2016 belum terlaksana dengan sistematis dalam rangka pengawasan dan penegakkka yang komprehensif. Hubungan kerja dengan SKPD belum terbina semestinya dalam rangka koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang ada;

  b) Mobil Patwal pengadaan Tahun 2008 sudah kurang baik kondisinya sehingga membutuhkan perbaikan serius dan kalau memungkinkan dari segi anggaran maka sudah saatnya mobil patwal ditambah 1 unit;

c) Sumber daya anggota belum semuanya terlatih dalam pendidikan dasar Polisi Pamong Praja, karena penyelenggaraan diklat telah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dimana akan membutuhkan koordinasi dan anggaran yang cukup besar.

2) Solusi :

a) Untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan akan anggota yang terlatih maka Satuan Polisi Pamong Praja secara mandiri melaksanakan latihan rutin mingguan khusus PBB serta pembinaan disiplin berpakaian melalui swdaya anggota dengan mengadakan sendiri pakaian Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan.

b) Kekurangan anggota PNS Polisi Pamong Praja di 9 Kecamatan diatasi dengan mempertahankan dan atau menambah jumlah tenaga bantu Polisi Pamong Praja Non PNS sebanyak 95 orang ditambah dengan tenaga sopir, operator dan kebersihan kantor menjadi 98 orang.

c) Penanganan Perda terlaksana belum signifikan, karena belum terencana secara baik, namun sebagai data awal tentu berguna di kemudian hari.

- **Kecamatan Borong**

a. Program dan kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.267.042.000,- dan realisasi Rp.262.077.500,- atau 98,14%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan komponen instalasi listrik
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j) Penyediaan makanan dan minuman
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.116.530.000,- dan realisasi Rp.115.403.000,- atau 99,30%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
   c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.000.000,- dan realisasi Rp.2.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.54.025.000,- dan realisasi Rp.54.001.000,- atau 99,96%, digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat.
5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dialokasikan dana Rp.569.707.000,- dan realisasi Rp.569.257.000,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM
   c) Dana untuk kelurahan
6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.35.059.000,- dan realisasi Rp.35.059.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan musrenbang kecamatan.
7) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.15.696.000,- dan realisasi Rp.15.696.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat Desa/Kelurahan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya prangko, meterai dan benda pos lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengiriman surat-surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas perkantoran.
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola administrasi keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya alat dan bahan pembersih ruangan kantor sehingga terciptanya suasana kerja yang bersih dan nyaman.
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang maksimal.
f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan ATK (Alat Tulis Kantor) sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen perkantoran.
h) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor dan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal.
j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat untuk yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah untuk koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kerja sama yang efektif dan efisien serta mengetahui situasi dan kondisi yang ada di masyarakat.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.
   b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas yang layak guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
   c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang layak pakai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor, sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.
   d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal.
3) Program peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan keuangan yang akuntabel untuk mengukur capaian kinerja kerja sehingga terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dengan hasil/manfaat : terfasilitasinya penyelesaian konflik masyarakat di wilayah kecamatan Borong sehingga terwujudnya ketertiban dalam masyarakat dan tersedianya unit khusus pengaduan masyarakat guna menangani pengaduan masyarakat yang bermasalah.
5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pendampingan perempuan guna mendorong partisipasi perempuan dalam membangun desa/kelurahan.
6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan guna menjaring aspirasi masyarakat.

7) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan sehingga terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan.

b) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan STBM, guna meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.

c) Dana untuk Kelurahan, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di kelurahan.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 43 orang (termasuk Desa/Kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	17 orang
b) Sarjana Muda	:	5 orang
c) SLTA	:	21 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	1 orang
b) Golongan III	:	27 orang
c) Golongan II	:	15 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III	:	2 orang
b) Eselon IV	:	20 orang

4) Staf	:	21 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Borong Tahun Anggaran 2016 Rp.3.607.465.084,- dan realisasi Rp.3.322.642.828,- atau 92,10%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan

a) Jumlah aparatur yang belum menyeimbangi volume kerja yang ada

b) Kurangnya sarana dan prasarana transportasi

2) Solusi

a) Bekerja lintas sektor.

b) Memaksimalkan pemanfaatan kendaraan dinas roda empat dan roda dua serta memberdayakan seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok.

- **Kecamatan Kota Komba**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.187.000.000,- dan realisasi Rp.164.576.000,- atau 88,00%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k) Penyediaan makanan dan minuman

l) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.126.000.000,- dan realisasi Rp.124.212.000,- atau 98,58%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

d) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional dan perizinan

3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD, dialokasikan dana Rp.4.000.000,- dan realisasi Rp.4.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.532.000.000,- dan realisasi Rp.531.926.000,- atau 99,98%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat

b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
c) Pembinaan dan pengembangan STBM
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan, didukung dana Rp.30.000.000,- dan realisasi Rp.30.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan.
6) Program peningkatan peran perempuan dalam membangun desa/kelurahan, didukung dana Rp.22.000.000,- dan realisasi Rp.22.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat desa/kelurahan.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.34.000.000,- dan realisasi Rp.34.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan pembinaan perlindungan masyarakat.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengiriman surat-surat dinas sehingga dapat berjalan lancarnya proses pelayanan perkantoran.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium pengelolah keuangan SKPD.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.
   e) Penyediaan jasa perbaikan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas pelayanan.
   f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik untuk ketersediaan penerangan bangunan kantor dan kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna meningkatkan optimalisasi tugas pelayanan.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna peningkatan wawasan sumber daya aparatur.

k) Penyediaan makanan dam minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum harian untuk mendukung tugas pelayanan.

l) Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua.

b) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas/jabatan yang layak guna mendukung pelayanan tugas jabatan .

c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya lingkungan kantor yang aman dan tertib.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai guna mendukung mobilitas perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan ikhtisar realisasi SKPD, dengan hasil : tersedianya dokumen laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Kota Komba guna mengukur kinerja dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat, dengan hasil/manfaat : terlaksananya desiminasi informasi guna meningkatkan wawasan masyarakat.
   b) Pemberdyaan lembaga dan organisasi masyarakat, dengan hasil/manfaat : terwujudnya organisasi masyarakat yang solid dan utuh guna mendukung pembangunan desa/kelurahan.
   c) Pembinaan dan pengembangan STBM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya mental masyarakat yang positif guna menjaga kesehatan masyarakat.
   d) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan dengan hasil : terjaringnya inspirasi dan motivasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan.
6) Program peningkatan partisipasi/peran perempuan dalam membangun desa/kelurahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan PKK, dengan hasil : terwujudnya semangat dan motivasi kaum wanita dalam membangun desa/kelurahan.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, dengan hasil/manfaat : terfasilitasinya penyelesaian konflik masyarakat sehingga terciptanya situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif juga mewujudkan masyarakat yang aman dan terlindungi.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 43 orang, dengan klasifikasi :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 7 orang
   b) Sarjana Muda ` : 2 orang
   c) SLTA : 28 orang
   d) SMP : 6 orang
2) Menurut Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 15 orang
   c) Golongan II : 25 orang

d) Golongan I : 2 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon IV : 12 orang

b) Eselon III : 2 orang

4) Staf : 29 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Kota Komba Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.540.938.610,- dan realisasi Rp.3.417.443.449,- atau 96,51%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Kurangnya sumber daya aparatur dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pelaksanaan tugas dari setiap pegawai.

- **Kecamatan Lamba Leda**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.112.159.500,- dan realisasi Rp. 104.934.200,- atau 93,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.93.081.000,- dan realisasi Rp.91.511.000,- atau 98,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
   c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.662.000,- dan realisasi Rp.3.662.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD.
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dialokasikan dana Rp.339.276.500,- dan realisasi Rp.339.226.500,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat pedesaan
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM
   c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, dialokasikan dana Rp.19.900.000,- dan realisasi Rp.19.900.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan.
6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.11.811.000,- dan realisasi Rp.11.811.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat Desa.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.15.110.000,- dan realisasi Rp.14.860.000,- atau 98,35%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi Kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko, materai dan terlaksannya pengiriman surat-surat dinas sehingga dapat berjalan lancarnya aktivitas perkantoran.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor pengelolah keuangan guna pengelolaan keuangan berjalan lancar dan transparan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kerja guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK guna mendukung pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan guna memenuhi ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik guna memenuhi kebutuhan penerangan bangunan kantor.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tersedianya paket peralatan gedung kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

j) Penyediaan makanan dam minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum rapat guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

k) Rapat–rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi demi terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit kendaraan dinas/operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas yang siap pakai untuk keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas pelayanan.

c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang layak pakai guna mendukung pelayanan kedinasan.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua sehingga terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran.

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang siap pakai untuk tugas pelayanan kemasyarakatan.

3) Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Lamba Leda.

4) Program peningakatn keberdayaan masyarakat pedesaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat, dengan hasil/manfaat : menyebarnya informasi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

b) Pembinaan dan pengembanagn STBM, dengan hasil/manfaat : terwujudnya lingkungan dan pola hidup sehat guna menjaga kesehatan masyarakat.

c) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan.

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, telah dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang Kecamatan dengan hasil/manfaat : terjaringnya inspirasi masyarakat dalam membangun desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pembinaan PKK guna meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam membangun desa.

7) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, dengan hasil/manfaat : terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat sehingga terciptanya kerukunan di tengah lingkungan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 25 orang (termasuk Sekretaris Desa), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 6 orang
   b) Sarjana Muda (DIII) : 1 orang
   c) SLTA : 9 orang
   d) SLTP : 9 orang
2) Menurut Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 8 orang
   c) Golongan II : 8 orang
   d) Golongan I : 8 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 7 orang
4) Staf :17 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Lamba Leda Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.035.924.355,- dan realisasi Rp.1.998.810.583,- atau 98,18%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Keterbatasan sumberdaya aparatur serta sarana dan prasarana perkantoran.
2) Solusi
   a) Memaksimalkan pelaksanaan pembagian tugas serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

➢ **Kecamatan Poco Ranaka**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.302.720.400,- dan realisasi Rp.282.355.300,- atau 93,27%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i) Penyediaan komponen instalasi listrik
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
k) Penyediaan peralatan rumah tangga
l) Penyediaan makan dan minum rapat
m) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.108.140.000,- dan realisasi Rp.104.795.000,- atau 96,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
   c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.277.000.- dan realisasi Rp.3.277.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan.
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dialokasikan dana Rp.466.752.600,- dan realisasi Rp.466.752.600,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan
   b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
   c) Pembinaan dan pengembangan STBM
   d) Koordinasi, monitoring dan evaluasi
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dialokasikan dana Rp.32.940.000,- dan realisasi Rp.32.940.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang.
6) Program peningkatn peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.9.970.000,- dan realisasi Rp.9.970.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK.

7) Program penyelesaian konflik di masyarakat, dialokasikan dana Rp.16.200.000,- dan realisasi Rp.16.200.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat - surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai guna memperlancar pelaksaan tugas pekantoran.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium pengelolah keuangan SKPD.
   e) Penyediaan jasa kebesihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat.
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja seperti komputer PC, laptop, printer dan genset yang siap pakai sehingga dapat mendukung kelancaran aktifitas administrasi perkantoran.
   g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan ATK (Alat Tulis Kantor) sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efesien.
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen perkantoran.
   i) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komponen instalasi listrik sehingga terlaksananya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor berupa hardisk eksternal, flash disk, catridge printer dan kursi plastic tangan guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran.

k) Penyediaan peralatan rumah tangga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.

l) Penyediaan makan dan minum rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum kantor kecamatan sehingga terlaksananya kelancaran rapat – rapat tingkat kecamatan.

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengadaan kendaraan dinas operasional, dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin rumah dinas Camat, dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas Camat yang layak guna mendukung pelayanan kedinasan.

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Poco Ranaka guna mengukur kinerja dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa, dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyelenggaraan informasi bagi masyarakat sehingga terwujudnya keterpaduan dan sinergi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, dengan hasil/manfaat : terwujudnya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat.

c) Pembinaan dan pengembangan STBM, dengan hasil/manfaat : terwujudnya kehidupan masyarakat yang bersih, sehat dan nyaman.

d) Koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan hasil/manfaat : terselenggaranya keberdayaan masyarakat pedesaan.

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam mebangun desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terelenggaranya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan guna menjaring aspirasi dan memotivasi masyarakat.

6) Program peningkatan peran perempuan di pedasaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan PPK, guna mewujudkan peran perempuan dalam membangun desa.

7) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi konflik masyarakat dengan hasil : terwujudnya situasi yang kondusif di masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 54 orang (termasuk Desa/Kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 20 orang
   b) Sarjana Muda : 8 orang
   c) SLTA : 24 orang
   d) SLTP : 2 orang
2) Pangkat/ Golongan / Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 2 orang
   b) Golongan III : 23 orang
   c) Golongan II : 26 orang
   d) Golongan I : 2 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 24 orang
4) Staf ; 28 orang

e. Alokasi dan Realisasi Angggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Poco Ranaka Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.866.755.428,- dan realisasi Rp.3.736.422.027,- atau 96,62%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan.

b) Kondisi infrastruktur di beberapa wilayah Desa yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan.

2) Solusi

a) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.

b) Mengajukan usulan kepada dinas terkait untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di wilayah Kecamatan Poco Ranaka.

- **Kecamatan Elar**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.182.400.000,- dan realisasi Rp.180.576.000,- atau 99,00%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.70.000.000,- dan realisasi Rp.59.062.000,- atau 84,37%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.000.000,- dan realisasi Rp.3.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.345.600.000,- dan realisasi Rp.333.722.000,- atau 96,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM
   c) Dana untuk kelurahan
   d) Monitoring dan evaluasi
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan, dialokasikan dana Rp.30.000.000,- dan realisasi Rp.30.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.
6) Program peningkatan peran perempuan di Pedesaan, dialokasikan dana Rp.12.000.000,- dan realisasi Rp.12.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat Desa/Kelurahan.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.17.000.000,- dan realisasi Rp.13.840.000,- atau 81,41%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya jasa pengiriman surat-surat dinas demi kelancaran tugas pelayanan perkantoran.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik sehingga terwujudnya kelancaran operasional perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya pengelola keuangan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih guna terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor yang siap pakai guna mendukung kelancaran operasional perkantoran.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen listrik sehingga terwujudnya ketersediaan penerangan bangunan kantor dan pelaksanaan tugas pelayanan.

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga dapat membantu optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas harian.

k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua sehingga terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran.

b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kerja kantor demi terwujudnya optimalisasi tugas pelayanan.

c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeliharaan rumah dinas/jabatan guna menyediakan rumah dinas yang layak.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Elar guna mengukur kinerja dan menjaga pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat, dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyebaran informasi guna menambah wawasan masyarakat.
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM, dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan STBM guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat dan bersih.
   c) Dana untuk kelurahan, telah dialokasikan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kelurahan.
   d) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/keluahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan guna menjaring aspirasi masyarakat.
6) Program peningkatan peran perempuan di Perdesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pembinaan PKK guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil : terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat sehingga terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 29 orang (termasuk Desa/Kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 5 orang
   b) Diploma : 1 orang
   c) SLTA : 21 orang
   d) SLTP : 2 orang
2) Menurut Golongan/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 12 orang
   c) Golongan II : 14 orang
   d) Golongan I : 2 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 10 orang
4) Staf : 17 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib pada Kecamatan Elar Tahun Anggaran 2016 Rp.2.297.214.107,- dan realisasi Rp.2.231.596.407,- atau 97,14%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih terbatasnya jumlah personil serta peralatan kerja.
2) Solusi
   a) Memaksimalkan pembagian tugas kepada semua pegawai serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

➢ **Kecamatan Sambi Rampas**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.352.950.000,- dan realisasi Rp.327.734.000,- atau 92,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   d) Penyediaan alat tulis kantor
   e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   f) Penyediaan komponen instalasi listrik
   g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   h) Penyediaan peralatan rumah tangga
   i) Penyediaan makanan dan minuman
   j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   k) Penyediaan jasa administrasi keuangan
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.224.600.000,- dan realisasi Rp.193.286.000,- atau 86,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.2.000.000,- dan realisasi Rp.2.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan : penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.8.000.000,- dan realisasi Rp. 7.925.000,- atau 99,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.
5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.570.250.000,- dan realisasi Rp.537.600.000,- atau 94,27%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM
   c) Monitoring dan evaluasi
6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan (PKK), dialokasikan dana Rp.5.000.000,- dan realisasi Rp.4.825.000,- atau 96,50%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKK di Kecamatan.
7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan, dialokasikan dana Rp.17.200.000,- dan realisasi Rp.17.200.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat - surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa kebesihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat.
   c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja seperti printer dan mesin ketik yang siap pakai sehingga dapat mendukung kelancaran aktifitas administrasi perkantoran.
   d) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan ATK (Alat Tulis Kantor) sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efesien.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen perkantoran.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komponen instalasi listrik sehingga terlaksananya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor berupa laptop guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran.

h) Penyediaan peralatan rumah tangga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga kantor sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum kantor kecamatan sehingga terlaksananya kelancaran rapat – rapat tingkat kecamatan.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

k) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 6 unit kendaraan dinas/operasional guna mendukung pelaksanaan tugas operasional perkantoran di Kelurahan..

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang aman dan nyaman sehingga dapat menjamin kelancaran pelayanan perkantoran.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang siap pakai sehingga terwujudnya mobilitas perkantoran yang efektif dan efisien.

d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas yang siap pakai guna mendukung kelancaran pelayanan kemasyarakatan.

3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya

dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Sambi Rampas guna mengukur capaian kinerja.

4) Program penyelesaian konflik masyarakat, dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat sehingga terwujudnya situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.
5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/kelurahan melalui kegiatan:
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penyebaran infromasi guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pembangunan.
   b) Pembinaan dan pengembangan STBM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pola hidup masyarakat yang sehat dan mandiri guna menjaga kesehatan masyarakat.
   c) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil pelaksanaan program dan kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan (PKK), melalui kegiatan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata.
7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan guna menjaring aspirasi dan informasi dari dan untuk masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 44 orang (termasuk Desa/kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 10 orang
   b) Sarjana Muda : 4 orang
   c) SLTA : 28 orang
   d) SLTP : 1 orang
   e) SD : 1 orang
2) Pangkat/Golongan/Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 22 orang

c) Golongan II : 20 orang
d) Golongan I : 1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 18 orang

4) Staf : 24 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Sambi Rampas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.580.794.770,- dan realisasi Rp.3.436.720.433,- atau 95,97%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Kondisi kantor Kecamatan dan rumah jabatan Camat kurang mendukung kelancaran pelayanan dibandingkan dengan volume dan tingkat pelayanan kepada masyarakat sangat tinggi.

2) Solusi

a) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan perkantoran.

- **Kecamatan Poco Ranaka Timur**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.117.982.000,- dan realisasi Rp.117.982.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa administrasi keuangan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i) Penyediaan makan dan minum rapat
j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.81.168.000,- dan realisasi Rp.76.530.500,- atau 94,28%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
   c) Pemiliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp. 3.000.000,- dan realisasi Rp.3.000.000 atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan laporan realisasi keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Poco Ranaka Timur.
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dialokasikan dana Rp.292.125.000,- dan realisasi Rp.292.125.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa
   b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
   c) Pembinaan dan pengembangan STBM
   d) Monitoring dan evaluasi
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, dialokasikan dana Rp.12.062.500,- dan realisasi Rp.12.062.500,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang Kecamatan Poco Ranaka Timur.
6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.9.350.000,- dan realisasi Rp.9.350.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan PKK.
7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.9.312.500,- dan realisasi Rp.9.312.500,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat - surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c) Penyediaan jasa kebesihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat.

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang siap pakai guna mendukung kelancaran aktivitas pegawai.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efesien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik guna mewujudkan ketersediaan penerangan bangunan kantor dan pelaksanaan tugas perkantoran.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor berupa komputer, laptop dan peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran.

i) Penyediaan makan dan minum rapat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum rapat guna mendukung kelancaran rapat dan pelaksanaan tugas harian.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 1 (satu) unit untuk mendukung mobilitas perkantoran.

b) Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya rumah dinas/jabatan yang layak guna mendukung pelayanan tugas jabatan.

c) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat yang siap pakai guna mendukung kelancaran tugas perkantoran.

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor guna menjaga kenyamanan pelaksanaan tugas di kantor.

3) Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Poco Ranaka Timur sehingga terukurnya capaian kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyelesaian desiminasi informasi bagi masyarakat, dengan hasil/manfaat : menyebarnya informasi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat.

b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi guna memperkuat lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

c) Pembinaan dan pengembangan STBM, dengan hasil/manfaat : terwujudnya situasi dan kondisi yang sehat dan bersih di masyarakat.

d) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, telah dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang guna mendorong masyarakat berperan aktif dalam membangun Desanya.

6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan pembinaan PKK guna meningkatkan peran perempuan dalam membangun Desa.

7) Program penyelesaian konflik masyarakat, melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya mediasi penyelesaian konflik masyarakat sehingga terciptanya situasi yang kondusif ditengah lingkungan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 22 orang (termasuk Sekretaris Desa), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 6 orang
   b) Sarjana Muda : 1 orang
   c) SLTA : 12 orang
   d) SLTP : 3 orang
2) Pangkat/ Golongan / Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 2 orang
   b) Golongan III : 4 orang
   c) Golongan II : 16 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : 17 orang

e. Alokasi dan Realisasi Angggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Poco Ranaka Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.665.615.679,- dan realisasi Rp.1.633.469.036,- atau 96,01%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja seperti : komputer, kendaraan dinas operasional sehingga mengakibatkan terhambatnya proses kegiatan.
   b) Keterbatasan sumberdaya manusia dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan.
2) Solusi
   a) Memaksimalkan pelaksanaa tugas perkantoran oleh aparatur yang ada.
   b) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor.

➢ **Kecamatan Rana Mese**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.265.786.000,- dan realisasi Rp.241.512.500,- atau 90,87%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i) Penyediaan komponen dan instalasi listrik
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.51.500.000,- dan realisasi Rp.51.260.000,- atau 99,63%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   c) Pengadaan peralatan gedung kantor
   d) Pengadaan meubelair
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dialokasikan dana Rp.4.000.000,- dan realisasi Rp.4.000.000,- atau 100 % digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.206.015.000,- dan realisasi Rp.204.696.000,- atau 99,36%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat pedesaan / kelurahan
   b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
   c) Pembinaan dan pengembangan STBM
   d) Monitoring dan evaluasi
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, dialokasikan dana Rp.16.099.000,- dan realisasi Rp.16.099.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang Kecamatan.
6) Program peningkatan peran perempuan di Pedesaan, dialokasikan dana Rp.8.000.000,- dan realisasi Rp.8.000.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK di Desa/Kelurahan.

7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.53.600.000,- dan realisasi Rp.53.100.000,- atau 99,07%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat
   b) Pembinaan dan perlindungan masyarakat

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat - surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktifitas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran tugas-tugas perkantoran.
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
   e) Penyediaan jasa kebesihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor sehingga terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat.
   f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kerja guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perkantoran.
   g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan ATK (Alat Tulis Kantor) sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efesien.
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen perkantoran.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

j) Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaran tingkat kecamatan sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas kepemerintahan tingkat kecamatan.

k) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik sehingga terlaksananya pelayanan perkantoran yang efektif dan efisien.

l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit kendaraan dinas/operasional roda dua untuk mendukung pelaksanaan mobilitas perkantoran.

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kursi sofa guna mendukung pelayanan kedinasan.

c) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan gedung kantor, berupa : laptop 1 (satu) unit dan printer 1 (satu) unit.

d) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengadaan meubelair kantor berupa kursi putar direktur, springbed dan tempat tidur.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Rana Mese sehingga dapat mengukur capaian kinerja dan pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat :

terselenggaranya penyebarluasan informasi bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan masyarakat.

b) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pemberdayaan administrasi desa guna mewujudkan tertib administrasi desa.

c) Pembinaan dan pengembangan STBM, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan STBM guna menjaga kesehatan masyarakat.

d) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya musrenbang tingkat Kecamatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan.

6) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pembinaan PKK tingkat Desa/Kelurahan guna meningkatkan partisipasi / peran perempuan dalam membangun Desa/Kelurahan.

7) Program penyelesaian konflik masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

b) Pembinaan dan perlindungan masyarakat desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 25 orang (termasuk Sekretaris Desa), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	1 orang
b) Sarjana (S1)	:	9 orang
c) SLTA	:	13 orang
d) SLTP	:	2 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	2 orang
b) Golongan III	:	9 orang
c) Golongan II	:	14 orang

3) Jabatan Struktural

a. Eselon III : 2 orang
b. Eselon IV : 6 orang

4) Staf : 17 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pada Kecamatan Rana Mese Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.926.974.320,- dan realisasi Rp.1.855.611.305,- atau 96,30%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana perkantoran.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pembagian tugas harian serta pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

- **Kecamatan Elar Selatan**

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.168.155.000,- dan realisasi Rp.143.854.791,- atau 85,55%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i) Penyediaan makanan dan minuman
j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.93.512.000,- dan realisasi Rp.75.564.909,- atau 80,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.000.000,- dan realisasi Rp.1.993.200,- atau 99,66%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar SKPD.

4) Program penyelesaian konflik masyarakat, dialokasikan dana Rp.44.425.000,- dan realisasi Rp.36.536.000,- atau 49,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, dialokasikan dana Rp.265.328.000,- dan realisasi Rp.263.157.500,- atau 99,18%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat
   b) Pembinaan dan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
   c) Dana untuk operasional kelurahan
   d) Monitoring dan evaluasi

6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan, dialokasikan dana Rp.40.884.000,- dan realisasi Rp.40.884.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tahun 2016.

7) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, dialokasikan dana Rp.15.696.000,- dan realisasi Rp.15.696.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat Desa/Kelurahan.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administasi perkantoran :

   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya jasa pengiriman surat-surat dinas demi kelancaran tugas pelayanan perkantoran.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik sehingga terwujudnya kelancaran operasional perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih guna terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan asri.

e) Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perbaikan dan peralatan kerja kantor guna mendukung pekerjaan kantor.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya paket alat tulis kantor guna mewujudkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya paket komponen listrik sehingga terwujudnya ketersediaan penerangan bangunan kantor dan pelaksanaan tugas pelayanan.

i) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas harian.

j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kantor yang siap dipakai guna mendukung aktivitas perkantoran.

b) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat guna memperlancar tugas pelayanan.

3) Program peningkatan dan pengembangan sistem capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD guna mengukur capaian kinerja dan pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program penyelesaian konflik masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbentuknya tim khusus penanganan pengaduan masyarakat guna menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa/kelurahan tentang penyelenggaraan pembangunan daerah guna meningkatkan wawasan masyarakat.
   b) Penyelenggaraan STBM, dengan hasil/manfaat : terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, rapih dan bersih guna mencegah wabah penyakit.
   c) Dana untuk kelurahan, telah dialokasikan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kelurahan.
   d) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya musrenbang tingkat Kecamatan guna membina dan mendukung pembangunan Desa/Kelurahan.
7) Program peningkatan peran perempuan di Pedesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya PKK tingkat Desa/Kelurahan yang solid dan mendukung pembangunan Desa/kelurahan.

c. SKPD Penyelenggara

Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 19 orang (termasuk Desa/Kelurahan), dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 7 orang
   b) SLTA : 11 orang
   c) SLTP : 1 orang
2) Menurut Golongan/Golongan/Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 9 orang
   c) Golongan II : 8 orang
   d) Golongan I : 1 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 5 orang
4) Staf : 12 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib pada Kecamatan Elar Selatan Tahun Anggaran 2016 Rp.1.636.430.284,- dan realisasi Rp.1.535.527.081,- atau 93,83%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih terbatasnya jumlah personil dan SDM yang memiliki kompetensi
   b) Akses transportasi yang sulit (jalan raya)
2) Solusi
   a) Menambah pegawai yang berkompeten dan mengisi jabatan yang kosong.
   b) Memanfaatkan sarana yang ada untuk mengatasi jalan raya yang rusak.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.492.850.000,- dan realisasi Rp.427.508.286,- atau 86,74%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f) Penyediaan alat tulis kantor
   g) Penyediaan barang cetakan penggandaan
   h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   j) Penyediaan makanan dan minuman
   k) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam daerah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.131.493.000,- dan realisasi Rp.74.253.000,- atau 56,47%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   b) Pengadaan meubelair
   c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja dan pengolahan data
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000 ,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ dan LPPD).
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dialokasikan dana Rp.304.206.500,- dan realisasi Rp.278.434.996,- atau 91,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
   b) Pembinaan administrasi proyek (PAP) PNPM-MP
5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, dialokasikan dana Rp.594.739.000,- dan realisasi Rp.560.051.500,- atau 94,17%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
   b) Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa
   c) Penyediaan dana pendamping pembinaan administrasi ADD/K
   d) Pembinaan dan fasilitasi kegiatan posyandu
6) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, dialokasikan dana Rp.309.011.500,- dan realisasi Rp.298.026.400,- atau 96,45%, digunakan untuk mendukung kegiatan :
   a) Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pembangunan
   b) Fasilitasi penyusunan perda tentang desa
   c) Pelatihan pengadaan barang dan jasa di desa
7) Program peningkatan peran perempuan di Pedesaan, dialokasikan dana Rp.500.000.000 dan realisasi Rp.478.624.800,- atau 95,72%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK.
8) Program peningkatan kesejahteraan perangkat Desa dan Kelurahan, dialokasikan dana Rp.720.250.000,- dan realisasi Rp.720.250.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian jasa kerja harian kepada pengelola administrasi Kelurahan.

9) Program pemekaran wilayah Desa dan Kelurahan, dialokasikan dana Rp.60.000.000,- dan realisasi Rp.39.975.000,- atau 66,63%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemekaran wilayah Desa.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengiriman surat ke tingkat pusat, provinsi dan lintas kabupaten sehingga terwujudnya kelancaran aktivitas perkantoran.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya listrik guna pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan mobilitas perkantoran.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor guna mendukung kelancaran proses administrasi perkantoran.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna pemenuhan ketersediaan dokumen administrasi perkantoran.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terciptanya kondisi kantor yang siap pakai.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya buku dan harian surat kabar guna menambah informasi pengetahuan dan wawasan aparatur.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dam minum rapat kantor guna terwujudnya peningkatan kinerja kerja.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna sinkronisasi program/kegiatan.

l) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring dan evaluasi guna optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan perelngkapan gedung kantor, tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk kegiatan lain.

b) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 3 (tiga) unit lemari arsip guna mendukung kegiatan perkantoran.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua sehingga terlaksananya kelancaran mobilitas perkantoran.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja dan pengolahan data, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja dan pengolahan data yang siap pakai untuk mendukung kelancaran aktifitas perkantoran.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga terukurnya capaian pelaksanaan program/kegiatan.

4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan :

a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tenaga pelaku PNPM.

b) Pembinaan Administrasi Proyek (PAP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium pelaku PNPM.

5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa :

a) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terfasilitasinya kegiatan BBGRM.

b) Pelaksanaan Musrenbangdes, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan Musrenbangdes sehingga menghasilkan program kerja pemerintahan desa.

c) Penyediaan dana pendamping pembinaan administrasi ADD/K, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya proses administrasi ADD/K di Desa/Kelurahan.

d) Pembinaan dan fasilitasi kegiatan posyandu, telah dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan kader, dengan hasil/manfaat : tersedianya 176 orang kader di setiap Desa/Kelurahan.

6) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Pelatihan aparatur pemerintahan desa, dengan hasil/manfaat : tersedianya aparat Desa yang memahami pembangunan kawasan perdesaan.
   b) Fasilitasi penyusunan PERDA tentang Desa, dengan hasil/manfaat : tersedianya fasilitas pendukung penyusunan PERDA.
   c) Pelatihan pengadaan barang dan jasa di Desa, dengan hasil/manfaat : terselenggaranya pelatihan aplikasi sistem informasi dan manajemen keuangan desa guna meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur desa.
7) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan PKK, guna mendorong peran perempuan dalam membangun masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.
8) Program peningkatan kesejahteraan perangkat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan pemberian jasa kerja harian tenaga pengelola administrasi kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya kesejahteraan tenaga kontrak dan tenaga harian lepas sehingga tercapainya peningkatan kinerja pelayanan.
9) Program pemekaran wilayah Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya fasilitasi pemekaran wilayah desa guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S2) : 1 orang
   b) Sarjana (S1) : 18 orang
   c) Sarjana Muda : 2 orang
   d) SLTA : 3 orang
2) Menurut Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 5 orang
   b) Golongan III : 15 orang
   c) Golongan II : 4 orang
3) Menurut Jabatan/eselonering
   a) Eselon II : 1 orang

b) Eselon III : 5 orang
c) Eselon IV : 11 orang

4) Staf : 7 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.665.947.724,- dan realisasi Rp.4.386.876.305.,- atau 94,02%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Sarana dan prasarana perkantoran yang kurang memadai.

2) Solusi

a) Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasaran yang tersedia.

22. Urusan Sosial

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.794.281.989,- dan realisasi Rp.788.198.919,- atau 99,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Penydiaan jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i) Penyediaan komponen instalasi listrik
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k) Penyediaan makanan dan minuman
l) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.124.059.000,- dan realisasi Rp.122.644.000,- atau 98,86%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan :

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b) Pengadaan peralatan gedung kantor

c) Pengadaan meubelair

d) kegiatan pemakaian sewa kantor/gudang logistik

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.3.543.750,- dan realisasi Rp.3.543.750,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunana laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dialokasikan dana Rp.642.650.775,- dana realisasi Rp.646.351.730,- atau 99,43%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya.

b) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.

c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dialokasikan dana Rp.438.915.393,- dan realisasi Rp. 509.768.893,- atau 86,10%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

b) Penanganan masalah-masalah strategis

c) Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

6) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma, dialokasikan dana Rp. 96.069.050,- dan realisasi Rp. 95.167.050,- atau 99,06%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya pelaksanaan pelayanan perkantoran.

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa sumber daya air dan listrik guna mendukung ketersediaan penerangan bangunan kantor dan kebutuhan air.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan operasional roda empat dan roda dua yang siap pakai untuk kelancaran mobilitas perkantoran.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayar honorarium pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan pembersih dan alat pembersih sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri untuk kenyamanan pelayanan tugas kedinasan.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja yang memadai untuk kelancaran pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen listrik guna memenuhi kebutuhan listrik/penerangan kantor.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya koran Pos Kupang dan Flores Pos guna menambah wawasan dan pengetahuan pegawai.

k) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perkantoran.

l) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi guna sinkronisasi program dan kegiatan ditingkat Provinsi dan Pusat.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan:

a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop dan printer guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.

c) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit meja biro guna mendukung kelancaran tugas perkantoran.

d) Sewa kantor/gudang, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 1 (satu) unit gudang dalam kondisi aman.

3) Program peningkatan pengembangan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja SKPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja dan pengelolaan keuangan yang transparan.

4) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui kegiatan :

a) Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemberian bantuan kepada 12.043 KK yang tersebar di 9 Kecamatan.

b) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, telah dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi 12 orang pendamping guna mewujudkan manajemen usaha yang produktif, efektif dan efisien.

c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, telah dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan bahan bangunan untuk 50 KK.

5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial :

a) Penanganan masalah-masalah sosial, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya penanganan masalah bencana alam, bencana sosial dan bencana lainya yang membutuhkan penanganan tanggap darurat.

b) Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemberdayaan bagi anggota TAGANA (30 orang) guna meningkatkan kinerja dalam penanganan masalah bencana.

c) Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi penyandang cacat, telah dilaksanakan melalu pembayaran honor pelaksana konseling dan kampanye sosial penyandang cacat.

6) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma, melalui kegiatan pendataan penyandang cacat dan eks trauma, telah dilaksanakan dengan

hasil/manfaat : tersedianya data penyandang cacat dan kejiwaan yang membutuhkan bantuan.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan Sosial didukung oleh 19 orang pegawai dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	13 orang
b) Sarjana Muda	:	3 orang
c) SLTA	:	3 orang

2) Pangkat /Golongan

a) Golongan IV	:	4 orang
b) Golongan III	:	14 orang
c) Golongan II	:	1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	4 orang
c) Eselon IV	:	11 orang

4) Staf	:	3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.245.998.521,- dan realisasi Rp.4.093.433.231,- atau 96,41%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;

b) Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di bidang sosial;

c) Kurangnya pegawai yang menduduki jabatan struktural.

2) Solusi

a) Mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah bagi keluarga miskin;

b) Membuat prooposal kepada Kementrian Perumahan Rakyat dan Kementrian Sosial;

c) Mengusulkan tenaga yang berlatarbelakang profesi ilmu khusus untuk perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta ilmu akuntansi dan keuangan.

23. Urusan Kebudayaan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.718.838.650,- dan realisasi Rp.716.772.850,- atau 99,71%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   d) Penyediaan jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas/operasional
   e) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   f) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
   h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   i) Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor
   j) Penyediaan makanan dan minuman
   k) Penyediaan alat tulis kantor
   l) Penyediaan bacaan dan peraturan perundang - undangan
   m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2) Program peningkatan saran dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.152.069.750,- dan realisasi Rp.152.050.000,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan kndaraan dinas/operasional
   b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   c) Pengadaan meubelair
   d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.
4) Program pengelolaan kekayaan budaya, dialokasikan dana Rp.154.325.000,- dan realisasi Rp.153.850.000,- atau 99,69%, digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya/lokal.
5) Program pengelolaan keragaman budaya, dialokasikan dana Rp.116.090.750,- dan realisasi Rp.116.090.750,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dan fasilitasi perkembangan keragaman budaya Daerah.

6) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya, dialokasikan dana Rp.193.342.000,- dan realisasi Rp.191.242.000,- atau 98,91%, guna menfasilitasi kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar Daerah.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya aktivitas surat menyurat guna terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor guna mendukung pelaksanaan aktivitas perkantoran.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas perkantoran.

d) Penyediaan jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

e) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya honorarium jasa pengelola keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

f) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan dan alat pembersih kantor sehingga terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.

g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya perbaikan sound system, komputer dan printer guna mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas perkantoran.

h) Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan, telah dilaksanakan guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.

i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pencetakan dan penggandaan untuk pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bahan bacaan selama 1 (satu) tahun dan dokumen peraturan perundang – undangan.

k) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor, guna mendukung aktivitas perkantoran.

l) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum untuk kegiatan rapat rutin berkala SKPD guna memperlancar berjalannya rapat .

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Pengadaan kndaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat : tersedianya 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua, guna mendukung pelaksanaan tugas perkantoran.

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, berupa pemasangan trali jendela guna menjaga keamanan dan ketertiban gedung kantor.

c) Pengadaan meubelair, dengan hasil/manfaat : tersedianya lemari arsip, meja, kursi kerja dan rak buku guna menjaga kerapian ruangan.

d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan hasil/manfaat : tersedianya gedung kantor yang siap pakai.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program pengelolaaan kekayaan Budaya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan Budaya lokal Daerah, guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan Budaya.

5) Program pengelolaan keragaman Budaya, telah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keberagaman budaya dengan mengikuti jambore pariwisata tingkat Provinsi NTT dengan hasil/manfaat : meningkatnya rasa memiliki dan cinta akan budaya lokal.

6) Program kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengiriman sanggaran perwakilan Kabupaten Manggarai Timur untuk mengikuti festival budaya sedaratan Flores-Lembata di Lembata, dengan hasil/manfaat : terjalinnya kemitraan pengelolaan keragaman budaya guna menjaga keharmonisan antar pengelola kekayaan budaya.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 20 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 10 orang
   b) Sarjana Muda : 5 orang
   c) SLTA : 5 orang
2) Pangkat /Golongan
   a) Golongan IV : 6 orang
   b) Golongan III : 6 orang
   c) Golongan II : 8 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon I1 : 1 orang
   b) Eselon III : 3 orang
   c) Eselon IV : 7 orang
4) Staf : 9 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.258.320.091,- dan realisasi Rp.3.196.888.919,- atau 98,11%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Sanggar-sanggar seni yang ada di Manggarai Timur belum menerapkan manajemen sanggar
   b) Terbatasnya pementasan pagelaran seni dan budaya sebagai ajang unjuk kreativitas seni
2) Solusi
   a) Secara bertahap memberikan arahan teknis dan pendampingan kepada pengurus sanggar melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala di setiap sanggar yang tersebar di 9 kecamatan se Kabupaten Manggarai Timur.
   b) Secara bertahap mengikutsertakan anggota sanggar pada diklat penata tari, diklat seni rupa dan diklat musik etnik.
   c) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan pekan budaya Manggarai Timur setiap tahun dan mengirimkan duta seni yang diwakili oleh salah satu sanggar untuk mengikuti even seni dan budaya seperti jambore pariwisata dan seni budaya tingkat Provinsi NTT, pagelaran seni budaya se daratan Flores-Lembata.

24. Urusan Statistik

a. Program dan Kegiatan

1) Program pengembangan data/informasi statistik daerah, dialokasikan dana Rp.224.937.050.- dan realisasi Rp.215.699.920.- atau 95,89%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengembangan potensi unggulan daerah
   b) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan
   c) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
   d) Penyusunan profil daerah
2) Program pengembangan penelitian pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.226.875.000,- dan realisasi Rp.223.034.387,- atau 98,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Koordinasi penyusunan pengembangan penelitian daerah
   b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   c) Kajian evaluasi pola pemberdayaan masyarakat

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pengembangan data dan informasi telah dilaksanakan melalui kegiatan:
   a) Pengembangan potensi unggulan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data potensi unggulan daerah di Kabupaten Manggarai Timur.
   b) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi, dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen pengumpulan, updating dan analisis data informasi.
   c) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, dengan hasil/manfaat : tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
   d) Penyusunan Profil Daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya buku profil daerah Kabupaten Manggarai Timur
2) Program pengembangan penelitian pembangunan daerah, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Koordinasi penyusunan pengembangan penelitian daerah, dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi penelitian dan pengembangan daerah.
   b) Monitoring, evaluasi dana pelaporan dengan hasil/manfaat : tersedianya responden potensial di 9 kecamatan.

c) Kajian evaluasi pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data hasil evaluasi pola pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur.

c. SKPD Penyelenggara

Bappeda Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 3 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan III : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 2 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Statistik pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.451.812.050.- dan realisasi Rp.438.734.307.- atau 97,11%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Seperti tergambar pada urusan penataan tata ruang.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Tidak ada kekostinan data sekunder SKPD
   b) Tidak ada staf khusus pengolah data
   c) Koordinasi lintas sektor untuk mempresentasikan data rendah
2) Solusi
   a) Pembentukan POKJA yang mengurus data SKPD
   b) Menambah personil/staf pengelolah data
   c) Memaksimalkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik

25. Urusan Perpustakaan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.338.426.800,- dan realisasi Rp.334.949.700,- atau 98,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelayanan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   f) Penyediaan alat tulis kantor
   g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   i) Penyediaan makan dan minum kantor
   j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   k) Penyediaan alat kebersihan kantor
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.85.630.000,- dan realisasi Rp.85.604.000,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   b) Penyediaan gedung kantor
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.96.450.000,- dan realisasi Rp.96.450.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : bimtek pengelolaan perpustakaan.
4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.2.500.000,- dan realisasi Rp.2.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD.
5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan kepustakaan, dialokasikan dana Rp.270.454.700,- dan realisasi Rp.270.179.700,- atau 99,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
   b) Pengolahan bahan pustaka
   c) Penyediaan bahan pustaka

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Pelayanan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko dan meterai untuk memperlancar pengiriman surat dinas dan administrasi perkantoran lainnya.

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa listrik dan air sehingga terwujudnya pelayanan perkantoran yang maksimal.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan , telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kantor (printer) yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor.

f) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor sehingga terwujudnya pelayanan admnistrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi dan penjilidan sehingga tersedianya dokumen kantor.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan wawasan aparatur.

i) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian kantor.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

k) Penyediaan alat kebersihan kantor, telah dilaksanakan guna mewujudkan lingkungan kantor yang bersih dan asri.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah dilaksanakan melalui kegiatan penyewaan gedung bacaan perpustakaan dan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional, dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua dan tersedianya gedung bacaan perpustakaan sebanyak 1 unit yang siap pakai untuk mendukung kegiatan kantor sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan lancar.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan bimtek 40 orang peserta guna meningkatkan pemahaman dan ketrampilan pengelolaan perpustakaan.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat terukur dan terevaluasinya pelaksanaan program/kegiatan.
5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan kepustakaan :
   a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan khusus untuk pengadaan buku di desa - desa.
   b) Pengelolaan bahan pustaka, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengelolaan buku di perpustakaan.
   c) Penyediaan bahan pustaka, tidak dilaksanakan karena anggarannya dirasionalisasi.

c. SKPD Penyelenggara

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut diatas didukung SDM sebanyak 9 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 4 orang
   b) Sarjana Muda : 3 orang
   c) SLTA : 2 orang
2) Pangkat/Golongan
   a) Golongan IV : 1 orang
   b) Golongan III : 5 orang
   c) Golongan II : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang
4) Staf : 5 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.420.213.571,- dan realisasi Rp.1.396.660.107,- atau 98,34%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan pendidikan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan masih rendahnya kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur bidang perpustakaan dan kearsipan.
2) Solusi
   a) Memaksimalkan pembagian tugas harian serta pemanfaatan sarana dan prasarana kantor.

26. Urusan Kearsipan

a. Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dialokasikan dana Rp.58.146.000,- dan realisasi Rp.58.146.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan : bimtek pengelolaan dokumen/arsip bagi pengelola dokumen/arsip kecamatan/kelurahan.
2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, dialokasikan dana Rp.36.845.000,- dan realisasi Rp.36.820.000,- atau 99,93%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
   b) Pendataan/penataan dokumen/arsip

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, telah dilaksanakan melalui kegiatan bimtek pengolahan dokumen/arsip tingkat kecamatan/kelurahan dengan hasil/manfaat : tersedianya 30 orang tenaga pengelola dokumen/arsip di Kecamatan/Kelurahan guna menciptakan penataan arsip/dokumen yang rapi dan teratur.
2) Program penyelamatan dokumen/arsip
   a) Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, tidak dilaksanakan karena anggaran dirasionalisasikan.

b) Pendataan/penataan dokumen/arsip, telah dilaksanakan di 2 (dua) SKPD dengan hasil terwujudnya penyimpanan dokumen yang tertata rapi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. SKPD Penyelenggara

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Manggarai Timur

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan kearsipan didukung oleh SDM sebanyak 1 orang, dengan rincian :

1) Kualifikasi Pendidikan :

Sarjana (S1) : 1 orang

2) Pangkat/Golongan/Ruang Gaji :

Golongan III : 1 orang

3) Jabatan Struktural :

Eselon IV : 1 orang

4) Staf : -

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dana sebesar Rp.94.991.000,- dan realisasi Rp.94.966.000,- atau 99,97% .

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti yang digambarkan pada urusan pendidikan

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Seperti yang digambarkan pada urusan perpustakaan

h. Permasalahan dan Solusi

Seperti yang digambarkan pada urusan Perpustakaan

C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.943.135.000,- dan realisasi Rp.943.085.300,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.102.948.000,- dan realisasi Rp.101.260.500,- atau 98,36 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan peralatan gedung kantor
   b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisa kinerja SKPD.
4) Program pengembangan budidaya perikanan dialokasikan dana Rp.137.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.136.830.000,- atau 99,88%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya air payau.
5) Program pengembangan perikanan tangkap, dialokasikan dana Rp.4.267.375.750,- dan realisasi Rp.4.252.986.750,- atau 99,66%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan sarana penangkapan ikan
   b) Pembangunan PPI
   c) Pembangunan Rumpon
6) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dialokasikan dana Rp.2.733.538.250,- dan realisasi Rp.2.600.825.250,- atau 95,15 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan prasarana UPR
   b) Pengembangan budidaya keramba jaring apung
7) Program pengembangan konservasi wilayah pesisir, dialokasikan dana Rp.101.800.000,- dan ralisasi Rp.101.025.000,- atau 99,24%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konservasi mangrove.
8) Program penyediaan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dialokasikan dana Rp.114.800.000,- dan realisasi Rp.109.791.300,- atau 95,64%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan Speed Boat.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai dan terlaksananya pengiriman surat kilat khusus sehingga terwujudnya pelaksanaan kegiatan kantor yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan sumberdaya listrik yang bermanfaat bagi kelancaran aktivitas perkantoran.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium jasa pengelola keuangan guna penyelesaian administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor guna menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor yang bermanfaat bagi kelancaran proses administrasi perkantoran.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pemenuhan kebutuhan dokumen kantor.

g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna sinkronisasi program/kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua sehingga terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran.

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sehingga kelancaran aktivitas perkantoran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja dan megelola keuangan secara transparan .

4) Program pengembangan budidaya perikanan, telah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan budi daya air payau, dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana budidaya air payau yang siap dipakai.

5) Program pengembangan perikanan tangkap, telah dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana penagkapan ikan, jasa pengawas dan pengendali hasil perikanan.

b) Pembangunan PPI, dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen perencanaan PPI yaitu AMDAL.

c) Pembangunan rumpon, dengan hasil/manfaat : tersedianya rumpon yang dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap.

6) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, telah dilaksanakan melalui kegiatan :

a) Pembangunan prasarana UPR (kolam permanen), dengan hasil/manfaat : tersedianya kolam permanen guna meningkatkan jumlah UPR.

b) Pengembangan budidaya keramba jaring apung, dengan hasil/manfaat : tersedianya keramba jaring apung yang dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

7) Program pengembangan konservasi wilayah pesisir, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan konservasi mangrove guna meningkatkan kelestarian ekosistem pesisir.

8) Program penyediaan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dana operasional dan pemeliharaan Speed Boat guna meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 26 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	18 orang
b) Sarjana Muda	:	5 orang
c) SLTA	:	3 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	4 orang
b) Golongan III	:	19 orang
c) Golongan II	:	3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	4 orang
c) Eselon IV	:	10 orang

4) Staf	:	11 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.10.036.516.257,- dan realisasi Rp.9.781.981.254,- atau 97,47%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

1) Setiap tahun SKPD menyusun rencana kebutuhan dalam rencana kerja berdasarkan Renstra SKPD dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang dan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.
2) Selanjutnya SKPD menyusun Renja mengacu kepada RKPD dan Renstra SKPD.
3) Pembahasan dan penetapan KUA dan PPAS.
4) SKPD menyusun RKA mengacu kepada KUA PPAS.
5) Pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran berjalan.
6) Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
7) Berdasarkan APBD dan Penjabarannya, SKPD membuat DPA sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan SKPD.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
   a) Masih terbatasnya personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
   b) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah dan pemasaran ikan
   c) Rendahnya minat masyarakat untuk makan ikan
   d) Rendahnya frekuensi pembinaan kepada kelompok-kelompok nelayan
   e) Ketersediaan benih ikan yang masih terbatas.
2) Solusi
   a) Mengirim personil untuk mengikuti bimtek maupun sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
   b) Pemberian stimulan untuk usaha
   c) Sosialisasi manfaat konsumsi ikan di masyarakat.
   d) Mengagendakan kegiatan pelatihan beserta anggaran kegiatan
   e) Mengagendakan kegiatan pengadaan benih, induk, dan calon induk ikan.

2. Urusan Pertanian dan Peternakan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.529.450.000,- dan realisasi Rp.509.560.998,- atau 96,24%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalasi listrik
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i) Penyediaan makan dan minum kantor
j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.139.610.000,- dan realisasi Rp.112.122.000,- atau 80,31%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
   b) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program peningkatan kesejahteraan petani, dialokasikan dana Rp.443.523.000,- dan realisasi Rp.400.352.000,- atau 90,27%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
   b) Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
   c) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (LOAN WISMP)
5) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan), dialokasikan dana Rp.2.096.349.000,- dan realisasi Rp.1.956.212.900,- atau 93,32 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
   b) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
   c) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
   d) Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
   e) Pengembangan diversifikasi tanaman
   f) Pengembangan pertanian pada lahan kering
   g) Pengembangan perbenihan/pembibitan
   h) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
   i) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah (hortikultura)
   j) Penyusunan data base potensi produk pertanian dan peternakan

6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.129.860.000,- dan realisasi Rp.57.225.000,- atau 44,07%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.9.158.221.446,- dan realisasi Rp.9.114.321.600,- atau 99,52%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan sarana produksi pertanian (damparit jalan usaha tani)
   b) Pengendalian peredaran pupuk dan pestisida di tingkat konsumen
8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dialokasikan dana Rp.127.250.000,- dan realisasi Rp.127.250.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan.
9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dialokasikan dana Rp.727.387.000,- dan realisasi Rp.592.670.350,- atau 81,48%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (pengadaan obat-obatan dan vaksin ternak)
   b) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic (vaksinasi dan eliminasi hewan penular rabies)
   c) Pengawasan perdagangan ternak antar pulau
10) Program peningkatan produksi hasil peternakan, dialokasikan dana Rp.1.630.515.000,- dan realisasi Rp.1.607.941.000,- atau 98,62 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
   b) Pengembangan agribisnis peternakan
   c) Pembangunan sarana dan prasarana peternakan
11) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, dialokasikan dana Rp.88.796.000,- dan realisasi Rp.69.309.600,- atau 78,05 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna.
12) Program pendidikan menengah, dialokasikan dana Rp. 136.200.000,- dan realisasi Rp.123.840.900,- atau 90,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pelaksanaan praktek kerja usaha
   b) Pelaksanaan praktek kerja rutin
   c) Pelaksanaan ujian nasional
   d) Pelaksanaan ujian semester

e) Pengembangan unit produksi

13) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, dialokasikan dana Rp.450.870.000,- dan realisasi Rp.416.914.000,- atau 92,47 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko, meterai dan paket pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa listrik dan air guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorarium pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan bendahara gaji.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket pembersih kantor dan jasa kebersihan kantor sehingga terciptanya kondisi lingkungan tempat kerja yang bersih, asri dan nyaman.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK kantor.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen perkantoran guna mendukung pelayanan perkantoran.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa penerangan listrik sehingga terwujudnya operasional perkantoran.

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya komputer, laptop, flash disk dan printer guna mendukung kelancaran aktivitas administrasi perkantoran.

i) Penyediaan makan dan minum kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan minum harian staf sehingga terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat rutin dan berkala bagi pegawai dinas.

j) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan, sehingga terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan dinas dengan pusat dan provinsi selama tahun 2016.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua guna mendukung kelancaran mobilitas perkantoran.
   b) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terawat dan terpeliharanya perlengkapan Kantor
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga dapat terukurnya kinerja tahunan.
4) Program peningkatan kesejahteraan petani :
   a) Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan bagi petugas lapangan sebanyak 80 (delapan puluh) peserta.
   b) Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis (LOAN WISMP), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan bagi petani kelompok P3A sebanyak 5 kelompok.
   c) Peningkatan kemampuan lembaga tani, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan SLPHT bagi petani dengan jumlah 5 kelas.
5) Program peningkatan ketahanan pangan :
   a) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan rutin dan berkala komoditi tanaman pangan di 9 Kecamatan.
   b) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya luas lahan untuk pengembangan sayuran (10 Ha) dan biofarmaka (2 Ha).
   c) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para petani dalam proses penanganan paska panen dan pengolahan hasil pertanian sehingga terwujudnya upaya mengurangi kehilangan hasil panen dan pasca panen.
   d) Pengembangan intensifikasi tanaman padi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan tanaman padi dengan luas 100 Ha guna meningkatkan produktivitas tanaman padi.
   e) Pengembangan diversifikasi tanaman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan tanaman buah-buahan dengan luasan 45 Ha guna meningkatkan hasil produksi tanaman.

f) Pengembangan pertanian pada lahan kering, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan benih jagung hibrida seluas 200 Ha, jagung komposit 100 Ha, kedelai 26 Ha, dan kacang hijau 25 Ha .

g) Pengembangan perbenihan/pembibitan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan benih padi seluas 50 Ha dan benih jagung 30 Ha guna meningkatkan ketersediaan benih unggul padi dan jagung.

h) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terlaksananya pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura dengan target 450 Ha.

i) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan (hortikultura), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pendataan produksi dan produktivitas tanaman sayuran, buah, dan biokafarma.

j) Penyusunan database potensi produk pertanian/peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya data potensi pengembangan pertanian dan peternakan berupa penelusuran daerah irigasi (80 DI).

6) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya 3 (tiga) unit power threser yang siap pakai.

7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan :

a) Penyedian sarana produksi pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana pertanian dengan target sebanyak 53 paket irigasi dan 1,34 km jalan usaha tani guna memperlancar proses pekerjaan pengembangan usaha padi sawah.

b) Pengendalian peredaran serta pemanfaatan pupuk dan pestisida di tingkat konsumen, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengawasan dan peredaran pupuk dan SK HET pupuk.

8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan hasil/manfaat : meningkatnya SDM tenaga POPT-PHP, PPL, dan staf dinas pertanian dan peternakan sehingga dapat memberikan penyuluhan yang tepat sasaran.

9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak :
   a) Pemeliharaan kesehatan dan penanggulangan penyakit menular ternak, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak sehingga terwujudnya upaya peningkatan kesehatan ternak dan upaya penanggulangan penyakit hewan menular strategis dengan target 30.000 ekor.
   b) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya vaksinasi dan eleminasi HPR di 176 Desa/Kelurahan.
   c) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak antar daerah berupa pemeriksaan kesehatan ternak antar pulau sebanyak 10 kali.
10) Program peningkatan produksi hasil peternakan :
   a) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya penyebaran ternak di 9 kecamatan guna pemerataan jumlah ternak.
   b) Pengembangan agribisnis peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya bakalan ternak untuk penggemukan di UPTD Golo Mongkok berupa sapi jantan 10 ekor dan babi jantan 2 ekor.
   c) Pembangunan sarana dan prasarana peternakan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya poskeswan untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan berupa pembangunan 1 unit poskeswan dan rehap 1 unit poskeswan.
11) Program peningkatan penerapan teknologi perternakan, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna bagi 82 orang peternak dan 2 orang staf dinas dengan hasil/manfaat : meningkatnya pengetahuan petugas dan peternak tentang teknologi peternakan berupa Inseminasi buatan (IB) sehingga dapat meningkatkan produksi ternak.
12) Program pendidikan menengah :
   a) Pelaksanaan praktek kerja usaha, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya praktek kerja usaha sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
   b) Pelaksanaan praktek rutin, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya keterampilan siswa SMK PP Negeri I Poco Ranaka selama 12 bulan.
   c) Pelaksanaan Ujian Nasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya Ujian Nasional pada tahun 2016.

d) Pelaksanaan Ujian Semester, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya Ujian Semester pada tahun 2016.

e) Pengembangan unit produksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengembangan unit produksi tanaman sayuran di SMK PP Negeri I Poco Ranaka sebanyak 2 Ha.

13) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dengan kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidikan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya proses pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 60 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S2)	:	3 orang
b) Sarjana (S1)	:	33 orang
c) Sarjana Muda	:	6 orang
d) SLTA	:	13 orang
e) SLTP	:	1 orang
f) SD	:	4 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	8 orang
b) Golongan III	:	32 orang
c) Golongan II	:	15 orang
d) Golongan I	:	5 orang

3) Jabatan/eselonering

a) Eselon II	:	1 orang
b) Eselon III	:	7 orang
c) Eselon IV	:	21 orang

4) Jabatan Fungsional	:	3 orang
5) Staf	:	28 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pertanian dan Peternakan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.19.252.914.007,- dan realisasi Rp.18.468.896.993,- atau 95,92%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.

a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi baru terutama dalam menghadapi program pemerintah pusat dalam hal mekanisasi pertanian.

b) Pengawasan terhadap kesehatan masyarakat veternier di Kabupaten Manggarai Timur masih sulit dilaksanakan karena dinas baru membangun 1 rumah potong hewan di tahun 2010 sementara sarana pendukung yakni air bersih belum tersedia, sehingga pelayanan di RPH belum dapat dilaksanakan.

c) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan pelayanan di bidang peternakan antara lain sarana transportasi bagi petugas lapangan

d) Pengecer pupuk bersubsidi belum tersedia di 9 Kecamatan dan sering terjadi kelangkaan pupuk pada saat musim tanam.

2) Solusi.

a) Memberikan pelatihan penggunaan alsintan bantuan Kementrian Pertanian RI kepada kelompok penerima bantuan oleh mekanik dari perusahaan penyedia.

b) Melakukan pengawasan aktivitas pemotongan ternak yang akan dijual di pasar di fasilitas pribadi pengusaha pemotongan ternak

c) Mengoptimalkan peran komisi zoonosis tingkat desa dan kecamatan melalui kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan.

d) Melakukan monitoring peredaran pupuk di pengecer, melakukan rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten Manggarai Timur bersama distributor pupuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur serta koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan RDKK serta koordinasi dengan dinas provinsi untuk penambahan kuota pupuk .

3. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.457.318.985,- dan realisasi Rp.456.458.350,- atau 99,81%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h) Penyediaan makanan dan minuman
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.94.977.000,- dan realisasi Rp.94.969.850,- atau 99,99%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   b) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.5.175.000,- dengan realisasi Rp.5.175.000,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
4) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dialokasikan dana Rp.905.070.000,- dan realisasi Rp.904.817.500,- atau 99,97%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengembangan hutan tanaman
   b) Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
   c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
5) Program rehabilitasi hutan dan lahan, dialokasikan dana Rp.1.833.182.265,- dan realisasi Rp.1.795.212.325,- atau 97,92%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
   b) Gerakan Daerah (GERDA) rehabilitasi hutan dan lahan
   c) Perencanaan dan pengawasan Hutan Tanaman Rakyat
   d) Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
6) Program perlindungan hutan dan konservasi alam, dialokasikan dana Rp.757.968.750,- dan realisai Rp.757.727.750,- atau 99,96%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan hutan.
7) Program perencanaan dan pengembangan hutan, dialokasikan dana Rp.322.662.500,- dan realisasi Rp.312.602.500,- atau 96,88%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengembangan hutan masyarakat adat
   b) Review tata batas
   c) Inventarisasi potensi kawasan hutan

d) Fasilitasi implementasi Taman Hutan Raya (TAHURA)

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengiriman surat-surat dinas sampai ke tujuan untuk kelancaran tugas-tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan sumber daya listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya peralatan kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehingga terwujudnya pelayanan kerja yang efektif dan efisien.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga terwujudnya ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bacaan di kantor selama 12 bulan dan dokumen peraturan perundang – undangan.

h) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makan dan minum harian pegawai sehingga dapat berjalan lancarnya pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi ketingkat Pusat dan Provinsi sehingga terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan.

j) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga

terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
   a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya gedung kantor untuk kelancaran tugas dinas sehingga terwujudnya pelayanan tugas perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua serta biaya jasa tenaga sopir 2 orang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan hasil/manfaat : tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja.
4) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan :
   a) Pengembangan hutan tanaman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeliharaan tanaman mahoni seluas 5 Ha, tanaman Gmelina seluas 5 Ha, tanaman Jati Lokal 10 Ha dan pemanenan Jambu Mente, pengadaan gedung kantor UPT Kalang Maghit dan belanja minum pegawai pengamanan aset Kalang Maghit sehingga terwujudnya kelestarian hutan tanaman (Kalang Maghit).
   b) Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya upaya pengendalian peredaran hasil hutan guna menjaga keutuhan ekosistem hutan.
   c) Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan sehingga pemanfaatan hasil hutan dapat diawasi dengan baik.
5) Program rehabilitasi hutan dan lahan :
   a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat).
   b) Gerakan Daerah (GERDA) rehabilitasi hutan dan lahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pendropingan 15.400 anakan tanaman Sengon, 21.000 anakan tanaman mahoni, dan 14.360 anakan tanaman Gmelina untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

c) Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan sehingga terciptanya kestabilan ekosistem hutan, pembangunan 4 (empat) unit embung air.

d) Perencanaan dan pengawasan Hutan Tanaman Rakyat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengelolaan kawasan hutan produksi dan terbentuknya kelompok pengelola di desa Gunung, Kecamatan Kota Komba seluas 238,77 Ha serta sosialisasi HTR dan koordinasi kegiatan HTR.

6) Program perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam melalui kegiatan patroli pengawasan hutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honorer petugas patroli kehutanan guna menjaga ekosistem hutan.

7) Program perencanaan dan pengembangan hutan :

a) Pengembangan hutan masyarakat adat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksanannya survey lokasi hutan adat, sosialisasi dan pengukuran lokasi hutan adat.

b) Review tata batas kawasan hutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pembinaan masyarakat yang berada pada kawasan hutan yang telah dilaksanakan kegiatan review tata batas.

c) Inventarisasi potensi kawasan hutan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya inventarisasi potensi kawasan hutan produksi yang berisikan jenis hasil hutan kayu dan non kayu.

d) Fasilitasi Implementasi Tanaman Hutan Raya telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan survey dan identifikasi calon lokasi pengembangan taman hutan rakyat.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

a) Sarjana (S1)	:	19 orang
b) Sarjana Muda	:	1 orang
c) SLTA	:	9 orang
d) SMP	:	1 orang
e) SD	:	2 orang

2) Pangkat/Golongan

a) Golongan IV	:	2 orang
b) Golongan III	:	23 orang
c) Golongan II	:	4 orang

d) Golongan I : 3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III : 3 orang

b) Eselon IV : 14 orang

4) Staf : 15 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.295.504.439,- dan realisasi Rp.6.168.794.941,- atau 97,98%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Kegiatan review tata batas mengalami kendala tidak adanya rekomendasi dari tim terpadu kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dikarenakan pertimbangan teknis seperti kemiringan lahan, jumlah penduduk, dan alasan konservasi seperti mempertahankan ekosistem hutan.

2) Solusi

a) Segera melakukan koordinasi lanjutan dengan tim terpadu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Dirjen Planologi dan peninjauan kembali mengenai persyaratan pengusulan review tata batas kawasan hutan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.728.055.000,- dan realisasi Rp.673.375.594,- atau 92,49%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan jasa pemeliharan perijinan, kendaraan dinas operasional

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

g) Penyediaan alat tulis kantor

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l) Monitoring dan evaluasi

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.65.200.000,- dan realisasi Rp.57.526.500,- atau 88,23%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.3.500.000,- dan realisasi Rp.3.500.000,- atau 100%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD.

4) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dialokasikan dana sebesar Rp.20.000.000,- dan realisasi Rp.500.000,- atau 2,5%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan usaha bidang pertambangan. Realisasi keuangan sangat kecil, hal ini terjadi karena tidak berjalannya kegiatan pemetaan wilayah pertambangan bukan logam dan batuan.

5) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat berpotensi merusak lingkungan, dialokasikan dana Rp.142.750.000,- realisasi Rp.136.850.000,- atau 95,87% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Pengawasan dan penertiban penambangan mineral non logam dan batuan
   b) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral logam
   c) Pengawasan, pengangkutan hasil tambang mineral logam
   d) Pembinaan dan pengawasan RPL/UPL, penutupan lokasi tambang mineral logam

6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dialokasikan dana Rp.3.101.295.000,- dan realisasi Rp.2.998.371.861,- atau 96,68%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pembangunan dan perluasan jaringan 2 unit PLTMH
   b) Detail desain dan studi kelayakan
   c) Pengelolaan 6 unit pembangkit listrik tenaga mikro hidro
   d) Pendataan potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro
   e) Rehabilitasi PLTMH

7) Program pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi, dialokasi dana Rp.8.000.000,- realisasi Rp. 7.400.000,- atau 92,5%, digunakan untuk kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perangko dan meterai dan terlaksananya pengiriman surat dinas sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tidak dilaksanakan karena belum tersedianya layanan jasa komunikasi, dan air di kantor dan meteran listrik pulsa mengalami kerusakan.

c) Penyediaan jasa pemeliharan dan perijinan, kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kelengkapan administrasi untuk 11 unit kendaraan roda 2 guna mendukung mobilitas perkantoran.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya jasa pengelola keuangan sehingga dapat terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket peralatan dan bahan pembersih sehingga terciptanya kebersihan dan keasrian lingkungan kantor.

f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terawat dan terpeliharanya peralatan kerja kantor guna memaksimalkan pelayanan kedinasan.

g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk kelancaran pelayanan perkantoran.

h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna pemenuhan dokemen kantor.

i) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik sehingga terwujudnya pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor.

j) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas harian.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna sinkronisasi program/kegiatan.

l) Monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananaya monitoring dan evaluasi untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpeliharanya kendaraan dinas operasional guna mendukung pelaksanaan tugas kantor.

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja.

4) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan usaha pertambangan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

5) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat berpotensi merusak lingkungan, telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan monitoring,pengawasan, dan pembinaan di lingkungan tambang sehingga kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan tambang dan sekitarnya

6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan hasil kegiatan :

   a) Adanya pembangunan dan perluasan jaringan PLTMH
   b) Adanya kegiatan desain detail dan study kelayakan
   c) Adanya sistem pengelolaan PLTMH yang baik
   d) Adanya data potensi PLTMH
   e) Adanya rehabilitasi PLTMH

7) Program pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan energi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pengendalian dan pengawasan pendistribusian maupun pembelian BBM guna menjaga kestabilan pendistribusian BBM.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

   a) Sarjana (S2) : 2 orang
   b) Sarjana (S1) : 14 orang

c) Diploma : 1 orang
d) SLTA : 4 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
a) Golongan IV : 4 orang
b) Golongan III : 13 orang
c) Golongan II : 4 orang

3) Jabatan Struktural
a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : 3 orang
c) Eselon IV : 11 orang

4) Staf : 6 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.5.470.492.909,- dan realisasi Rp.5.212.371.205,- atau 95,28%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung aktivitas perkantoran.

2) Solusi

Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran yang ada.

5. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

1) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dialokasikan dana Rp.247.715.000,- dan realisasi Rp.245.370.000,- atau 99,05%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi Pariwisata
b) Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri
c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

2) Program pengembangan destinasi pariwisata, dialokasikan dana Rp.2.480.263.850 ,- dan realisasi Rp.2.180.108.600 atau 87,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata
b) Pengembangan obyek pariwisata unggulan
c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program /Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pengembangan pemasaran pariwisata, melalui kegiatan :
   a) Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terjalinnya kerja sama dengan majalah pariwisata di Bali selama 12 bulan dan pembuatan website pariwisata Kabupaten Manggarai Timur .
   b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam Negeri dan diluar Negeri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terselenggaranya kegiatan Expo di Bali.
   c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan selama tahun 2016 di 9 kecamatan.
2) Program pengembangan destinasi pariwisata, telah dilaksanakan melalui kegiatan :
   a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana pariwisata guna meningkatkan daya tarik wisatawan.
   b) Pengembangan obyek pariwisata unggulan, dengan hasil/manfaat : terlaksananya penetapan 1 (satu) PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong.
   c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan, telah dilaksanakan melalui kegiatan monitoring kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang dilaksanakan selama tahun 2016 di 9 kecamatan

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan urusan pilihan Pariwisata, di dukung oleh 12 (dua belas) pegawai dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 9 orang
   b) Sarjana Muda : 3 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 2 orang
   b) Golongan III : 7 orang
   c) Golongan II : 3 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 2 orang
   b) Eselon IV : 6 orang

4) Staf : 4 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.727.978.850,- dan realisasi Rp.2.417.978.600,- atau 88,63%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Seperti tergambar pada urusan Kebudayaan.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan.
   a) Masih terdapat obyek dan daya tarik wisata yang belum terdata dan dinilai potensinya.
   b) Masih terdapat obyek dan daya tarik wisata yang belum dikenal secara luas baik didalam maupun diluar negeri.
   c) Belum optimalnya penataan obyek wisata andalan Kabupaten Manggarai Timur.
2) Solusi
   a) Kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai upaya untuk mendata dan menilai potensi dan daya tarik wisata yang ada dan tersebar di Kabupaten Manggarai Timur.
   b) Untuk memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kerja sama media yakni dengan majalah Ultimo Paradise yang berbasis di Bali, dan memiliki jaringan luas melalui website www.ultomoparadiso.com. Selain itu dilakukan penerbitan brosur dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan Inggris sebagai media informasi pariwisata Manggarai Timur.
   c) Pada tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melakukan penataan di salah satu obyek wisata yakni Obyek Wisata Pantai Cepi Watu.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan

1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dialokasikan dana Rp.426.675.000,- dan realisasi Rp.425.250.000 atau 99,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
   b) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

c) Registrasi perusahaan perindustrian dan perdagangan

d) Sosialisasi Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan perda

2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri, dialokasikan dana Rp.4.160.784.900,- dan realisasi Rp.4.016.551.700,- atau 96,53%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :

a) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

b) Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan pegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, telah dilakukan dengan hasil/manfaat :

a) Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa di 9 Kecamatan sehingga dapat mencegah peredaran barang ilegal.

b) Meningkatnya Tera Ulang alat UTTP guna menormalisasi kembali sesuai standarisasi.

c) Terlaksananya pendataan dan registrasi tempat penjualan minuman beralkohol sehingga tersedianya data tempat penjualan minuman beralkohol.

d) Terlaksananya sosialisasi Undang – Undang perlindungan konsumen dan perda guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan.

2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat :

a) Terlaksananya pengembangan pasar dan pelataran guna memperlancar distribusi barang/produk.

b) Tersedianya informasi kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya sehingga mudah diketahui oleh seluruh masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 10 orang pegawai dengan klasifikasi :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a) Sarjana (S1) : 8 orang

b) SMA : 2 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV : 3 orang

b) Golongan III : 6 orang

c) Golongan II : 1 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 5 orang

4) Staf : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.587.459.900,- dan realisasi Rp.4.444.801.700,- atau 96,89%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

Seperti tergambar pada urusan koperasi dan UKM.

7. Urusan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, dialokasikan dana Rp.299.000.000,- dan realisasi Rp.298.875.000,- atau 99,95%, digunakan untuk mendukung kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2) Program pengembangan industri kecil menengah, dialokasikan dana Rp.149.640.000,- dan realisasi Rp. 145.642.200,- atau 97,33%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta.
3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, dialokasikan dana Rp.160.370.000,- dan realisasi Rp. 158.345.000,- atau 98,74%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri (pelatihan pembuatan kloset) dan kegiatan pelatihan menjahit.
4) Program penataan struktur industri, dialokasikan dana Rp.1.481.453.000,- dan realisasi Rp.1.471.344.800,- atau 99,32% digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasaran kluster industri.

b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan pegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya kualitas kemampuan industri berbasis teknologi.
2) Program pengembangan industri kecil menengah, telah dilaksanakan dengan hasil.manfaat : meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM dan SDM IKM sehingga dapat mengembangkan industri kecil dan menengah.

3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, telah dilakukan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan pembuatan kloset dan pelatihan menjahit guna meningkatkan ketrampilan pengrajin / pelaku IKM.

4) Program penataan struktur industri, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya penataan struktur industri melalui bantuan peralatan industri bagi kelompok.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan Perindustrian pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 5 orang pegawai dengan klasifikasi :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 5 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan III : 5 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon III : 1 orang
   b) Eselon IV : 3 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.090.463.000, dan realisasi Rp.2.074.207.000,- atau 99,71%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

Seperti tergambar pada urusan koperasi dan UKM.

8. Urusan Perkebunan

a. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.404.071.000,- dan realisasi Rp.392.024.400,- atau 97,02%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
i) Penyediaan makanan dan minuman
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.147.252.500,- dan realisasi Rp.131.862.000,- atau 89,55%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan peralatan gedung kantor
   b) Pengadaan meubeler
   c) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
   d) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
3) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dialokasikan dana Rp.62.910.150,- dan realisasi Rp.29.970.000,- atau 47,64%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp. 3.668.600,- dan realisasi Rp. 3.668.600,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
5) Program peningkatan kesejahteraan petani, dialokasikan dana Rp.235.735.400,- dan realisasi Rp.235.438.000,- atau 99,87%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
6) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), dialokasikan dana Rp.1.553.615.340,- dan realisasi Rp.1.431.624.830,- atau 92,15%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
   a) Penyusunan data statistik perkebunan
   b) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (ekstensifikasi)
   c) Peningkatan kualitas bahan baku (DBHC – Tembakau)
   d) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan
7) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.212.074.740,- dan realisasi Rp.202.635.240,- atau 95,55%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
   b) Promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah
   c) Sertifikasi komoditi perkebunan

8) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.544.368.400,- dan realisasi Rp.522.660.700,- atau 96,01%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
   b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
9) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dialokasikan dana Rp.139.691.870,- dan realisasi Rp.136.371.400,- atau 97,62%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan
   b) Pelatihan dan pendampingan pengendalian hama terpadu
10) Program peningkatan kualitas bahan baku, dialokasikan dana Rp.593.769.016,- dan realisasi Rp.511.144.916,- atau 86,08%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
   a) Penanganan panen dan pasca panen tembakau
   b) Standarisasi kualitas bahan baku
   c) Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan diuraikan per program sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :
   a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : jumlah surat yang terkirim dengan pembiayaan belanja jasa paket/pengiriman untuk kelancaran pengiriman informasi surat menyurat dinas selama tahun 2016 sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kebutuhan sumber daya air dan listrik untuk pemenuhan kebutuhan kantor sehingga terwujudnya kelancaran pelayanan tugas perkantoran.
   c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terbayarnya honor jasa pengelola keuangan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor untuk mewujudkan kebersihan kantor sehingga terciptanya suasana kerja yang nyaman.

e) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket ATK untuk memperlancar pelaksanaan tugas kantor sehingga terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya belanja fotokopi/penggandaan dan penjilidan guna mendukung pemenuhan ketersediaan dokumen kantor.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket komponen instalasi listrik guna mendukung kelancaran pelayanan perkantoran.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen yang dapat menambah wawasan para pegawai.

i) Penyediaan makanan dan minuman kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya makanan dan minuman rapat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya kesepahaman hasil rapat.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya koordinasi,monitoring, dan evaluasi demi terwujudnya sinkronisasi tugas pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun perencanaan program/kegiatan tahun berikutnya.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sehingga terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan kedinasan.

b) Pengadaan Meubeler, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meubeler kantor sehingga terwujudnya pelaksanaan tugas pelayanan kedinasan yang efektif dan efisien

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional dan jasa pengemudi yang siap pakai guna menunjang pelayanan perkantoran.

d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya perlengkapan gedung kantor yang siap pakai guna menunjang pelayanan perkantoran.

3) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tenaga yang kompeten sebanyak 3 (tiga) orang pegawai guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan SKPD.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sehingga dapat mengukur capaian kinerja.
5) Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlatihnya 200 orang yang tergabung dalam 10 kelompok tani yang trampil yang tersebar di 6 Kecamatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
6) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) :
   a) Penyusunan data statistik perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya 15 buku data statistik perkebunan yang menyajikan data produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.
   b) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (ekstensifikasi) telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya luas areal ekstensifikasi tanaman kopi, kakao, cengkeh, dan kelapa yang tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan.
   c) Peningkatan kualitas bahan baku (DBHC-Tembakau), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya luasan panen dan pasca panen tembakau seluas 1 Ha pada 1 Kecamatan.
   d) Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya luasan areal rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan kopi, kakao, cengkeh dan vanili pada 7 (tujuh) Kecamatan.
7) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat :
   a) Fasilitasi kerja sama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer, terlaksananya kerjasama dengan PPKI Jember.
   b) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah sebanyak dua kali.
   c) Sertifikasi komoditi perkebunan yaitu sertifikasi komoditi kopi
8) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan :
   a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna sebanyak 7 jenis guna meningkatkan mutu pengelolaan hasil komoditi perkebunan yang tersebar di 9 kecamatan.

b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pemeliharaan kebun dinas mabahruju seluas 13,48 Ha.

9) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan :

a) Pelatihan dan pendampingan pengendalian hama terpadu, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya pelatihan dan pendampingan hama terpadu di 5 lokasi yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan.

b) Pengendalian hama dan penyakit pada komoditi perkebunan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya pengendalian hama dan penyakit perkebunan guna meningkatkan produksi pertanian/perkebunan.

10)Program peningkatan kualitas bahan baku, melalui kegiatan :

a) Penanganan panen dan pascapanen tembakau, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana produksi tembakau yang ada pada 4 kecamatan guna terwujudnya kegiatan panen dan pasca panen yang efektif dan efisien.

b) Standarisasi kualitas bahan baku, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sarana dan prasarana produksi tembakau pada 3 kecamatan guna terwujudnya budidaya tembakau yang optimal.

c) Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : meningkatnya kualitas SDM petani tembakau melalui diklat pelatihan dan magang guna meningkatkan kualitas anggota kelompok tani.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 23 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   a) Sarjana (S1) : 18 orang
   b) Sarjana Muda : 2 orang
   c) SLTA : 3 orang
2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji
   a) Golongan IV : 5 orang
   b) Golongan III : 17 orang
   c) Golongan II : 1 orang
3) Jabatan Struktural
   a) Eselon II : 1 orang
   b) Eselon III : 4 orang
   c) Eselon IV : 12 orang
4) Staf : 6 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perkebunan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.341.733.809,- dan realisasi Rp. 4.991.770.406,- atau 93,44%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas perkantoran, serta koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal.

2) Solusi

a) Pelatihan dan pendidikan guna menambah pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam menyelesaikan tugas dinas serta penambahan pegawai, optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana serta peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan antar instansi terkait dan lintas sektoral

9. Urusan Transmigrasi

a. Program dan kegiatan

Program yang dilaksanakan pada urusan Transmigrasi yaitu program pengembangan wilayah transmigrasi, dialokasikan dana Rp.46.885.975,- dan realisasi Rp.46.885.975,- atau 100 %, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pengembangan wilayah Transmigrasi telah dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, dengan hasil/manfaat : terlaksananya sosialisasi calon lokasi translok guna menyediakan data base translok yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan.

c. SKPD Penyelenggara

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur.

d. Dukungan SDM

Pelaksanaan urusan Transmigrasi didukung oleh 4 orang pegawai dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a) Sarjana Muda	:	1 orang
b) SMA	:	3 orang

2) Pangkat/Golongan Ruang Gaji

a) Golongan IV	:	1 orang
b) Golongan III	:	3 orang

3) Jabatan Struktural

a) Eselon III	:	1 orang
b) Eselon IV	:	2 orang

4) Staf : 1 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan urusan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dialokasikan dana Rp. 46.885.975,- dan realisasi Rp. 46.885.975,- atau 100 %.

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Seperti tergambar pada urusan kelautan dan perikanan.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kurang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

h. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

a) Belum optimal koordinasi kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

2) Solusi

a) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk penyediaan lahan potensi transmigrasi di Kabupaten Manggarai Timur

D. Indikator Kinerja Kunci

Tataran Pengambil Kebijakan

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

a. Ketertiban Penataan Ruang

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki PERDA dan data jumlah bangunan yang memiliki IMB, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, PERDA Nomor: 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Demikian juga PERDA tentang RT/RW telah dimiliki, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031.

b. Peraturan tentang Kependudukan

Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki PERDA tentang Kependudukan, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis) serta jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP sebanyak 132.340 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP-el sebanyak 209.542 orang atau 79,42%.

c. Ketersediaan Aparat Satpol PP

Jumlah Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2016, sebanyak 17 orang dari perbandingan jumlah penduduk sebanyak 293.031 jiwa atau 0,58 per 10.000 penduduk.

d. Kebijakan Bidang Penanganan PKL, PSK atau PMKS

Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki PERDA yang mengatur kebijakan bidang penanganan PSK, PKL atau PMKS.

e. Kebersihan Kabupaten

Peraturan tentang kebersihan Kabupaten telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

2. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

a. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah

Penyampaian LPPD tahun anggaran 2015 dilaksanakan tepat waktu, dengan bukti pengiriman pada tanggal 29 Maret tahun 2016, sesuai surat pengantar Nomor : Pem.130/62/III/2016.

b. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja

Penyampaian Laporan Keuangan telah dilaksanakan dengan bukti pengiriman laporan keuangan Tahun Anggaran 2015, pada tanggal 29 April 2016 dengan surat pengantar Nomor : BU.900/170/IV/2016 dan Laporan Kinerja tahun 2015 disampaikan pada tanggal 29 Maret 2016 dengan surat pengantar Nomor : ORGAN.060/160/III/2015, tanggal 29 Maret 2016.

c. Implementasi SPM

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan oleh PEMDA Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 9 (sembilan) urusan, yang terdiri dari :

- Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
- Urusan Kesehatan
- Urusan Lingkungan Hidup
- Urusan Perumahan
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Urusan Pendidikan
- Urusan Ketahanan Pangan
- Urusan Penanaman Modal

d. Hubungan Antar Daerah

Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan akhir tahun 2016 telah memiliki 5 (lima) buah MOU, yaitu :

- MOU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: HK/219/Tahun 2016 dan Nomor: 98/KTR/XI-06/PKS/1216;
- Adendum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende Nomor : HK/104/Tahun 2016 dan Nomor: 35/KTR/XI-06/0416 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: HK/46/Tahun 2016 dan Nomor: 06/KTR/XI-06/0216;
- MOU dengan Kementrian Keuangan RI tentang Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas (PKP-SPM Dikdas) Nomor : PPH-076/MK.7/2014 untuk pelaksanaan SPM T.A 2015 s/d 2016.
- MOU dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kupang tentang Kerjasama Penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat Terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : 63/DA-EDP/KPID/06/2014, tanggal 16 Juni 2014.

- MOU antara Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 794.3/DPPMD/VIII/2016 dan Nomor: HK/161/Tahun 2016 tentang Urusan Bersama Untuk Penanggulangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas.

3. **Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah**.

a. Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur sangat sinkron dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini diukur berdasarkan indikator bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan 8 program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung 5 program prioritas pembangunan nasional atau 90,90%.

b. Kewenangan Daerah

Semua urusan wajib yang dilimpahkan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dilaksanakan 100%, dengan jumlah urusan wajib yang dilaksanakan sebanyak 26 Urusan.

c. Keuangan

Penetapan PERDA APBD 2016 dilaksanakan tepat waktu dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2016, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015. Sedangkan keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termuat dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Belanja pelayanan dasar APBD tahun 2016 sebagai berikut :

- Urusan Pendidikan Rp.246.187.021.242,-
- Urusan Kesehatan Rp.84.768.023.014-
- Urusan Lingkungan Hidup Rp.6.332.032.511,-
- Urusan PU Rp. 150.412.334.492,-
- Urusan Sosial Rp.4.093.433.231-
- Urusan Tenaga Kerja Rp.691.892.175,-
- Urusan Koperasi Rp.3.843.567.665-
- Urusan Satpol PP Rp.2.640.136.094,-
- Urusan Kependudukan dan Capil Rp.3.269.227.930,-

Total Belanja Pelayanan Dasar Rp. 502.237.668.354,-

Total Belanja APBD 2016 Rp. 856.593.524.510,-

Dengan demikian capaian kinerja belanja pelayanan dasar sebesar 58,63%.

Belanja untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan APBD tahun 2016:

- Urusan Pendidikan Rp. 50.231.600.334,-
- Urusan Kesehatan Rp. 52.090.928.417,-

Total belanja pendidikan dan kesehatan Rp.102.322.528.751-, dengan capaian kinerja sebesar 11,94%.

d. Pelayanan Publik

Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum ada.

e. Kepegawaian

Jumlah PNS Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016, sebanyak 4.363 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016, sebanyak 293.031 orang atau 1,49 %. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sudah menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKD).

f. Kelembagaan

Jumlah SKPD Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 46 SKPD, dengan rincian : Bagian (Setda) 8 unit, Dinas 15 unit, Badan 10 unit, Kantor 2 unit, Rumah Sakit 0 unit, Lembaga Teknis lainnya 1 unit, Sekretariat DPRD 1 unit, Kecamatan 9 unit.

4. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD

a. Produk Peraturan Perundang-undangan

Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 10 PERDA.

b. Ranperda yang Diajukan Tahun Berjalan

RANPERDA yang diajukan pada tahun 2016 sebanyak 18 buah dan 10 RANPERDA yang disetujui DPRD untuk menjadi PERDA atau 55,55%.

5. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindaklanjut Pelaksanaan Keputusan.

Jumlah keputusan DPRD pada tahun 2016 sebanyak 27 Keputusan dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

6. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah Beserta Tindaklanjut Pelaksanaan Keputusan.

a. Keputusan Bupati

Keputusan Bupati Manggarai Timur tahun 2016 sebanyak 223 keputusan dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

b. Peraturan Bupati

Jumlah Peraturan Bupati Manggarai Timur pada tahun 2016 sebanyak 69 buah dan semuanya ditindaklanjuti atau 100%.

7. **Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan.**

   PERDA yang dikirim kepada Pemerintah pada Tahun 2016 sebanyak 10 PERDA. Tidak Ada PERDA yang dibatalkan.

8. **Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang strategis dan relevan untuk Daerah.**

   Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki PERDA tentang konsultasi pelayanan publik. Dari sisi penyebaran informasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur (RKMT), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur (RKMT).

9. **Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK Dan Bagi Hasil.**

   1) Serapan Dana Perimbangan

      Serapan dana perimbangan Tahun 2016 sebesar Rp.691.737.352.809,- dan dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2016 sebesar Rp.701.769.417.722,- atau 98,57%.

   2) Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

      Realisasi belanja publik APBD tahun 2016 sebesar Rp.478.491.298.083,- dan DAU tahun 2016 sebesar Rp.502.165.245.000,- dengan capaian kinerja 95,29%.

   3) Alokasi Belanja pada APBD

      Total realisasi belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp.396.791.028.959,- dan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp.856.593.524.510,- atau 46,32%.

10. **Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daerah.**

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD (realisasi) tahun 2016 sebesar Rp.43.788.841.960,10,- dan total Pendapatan dalam APBD (realisasi) tahun 2016 sebesar Rp.862.316.367.887,10,- atau 5,08%.

11. **Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan APBD.**

    a. Kewajaran Laporan Keuangan

       Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2014 dengan opini WDP dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2015 dengan opini WDP.

    b. Besaran SILPA

       SILPA tahun 2016 sebesar Rp.62.267.406.824,57,- dan realisasi pendapatan dalam APBD tahun 2016, sebesar Rp.862.316.367.887,10,- atau 7,22%.

c. Realisasi Belanja

Realisasi belanja tahun 2016 Rp.856.593.524.510,- dari total anggaran belanja dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp 913.432.793.116,47.,- atau 93,78 %.

d. Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2016 sebanyak 300 temuan (tidak termasuk temuan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2016) sedangkan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 396 temuan atau 75,76%.

12. Pengelolaan Potensi Daerah

a. Peta Potensi Daerah

Realisasi PAD tahun 2016, sebesar Rp.43.788.841.960,10,- dari Potensi PAD pada RPJMD atau RKPD tahun 2016 APBD Rp.21.000.000.000- atau 208,52%.

b. Peningkatan PAD

Total PAD pada tahun 2016 Rp.43.788.841.960,10,- dan total PAD tahun 2015 sebesar Rp.41.465.748.921,64,- atau 5,60%.

13. Terobosan/Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Penghargaan

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerima penghargaan dan Anugerah KPID NTT 2016 penghargaan khusus untuk jasa penyiaran radio.

b. Pengadaan Barang dan Jasa

Penerapan E-procurement mulai beroperasi pada bulan Januari tahun 2014.

c. Daya Saing Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2016 Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki persetujuan ijin investasi atau 0%.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1) Urusan Pertanian

- Satker Dinas Pertanian dan Peternakan (249082) 018.08 Prasarana dan Sarana Pertanian.

a. Dasar Hukum

1) DIPA Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Nomor SP DIPA 018.08.4.249082/2016 tanggal 27 Februari 2016; DIPA Revisi ke 01 tanggal 10 November 2016.
2) Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/88/Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satker (249082) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08)

c. Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program Kegiatan yang diterima

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

1) Pengembangan embung pertanian mendukung tanaman pangan
2) Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian:

1) Pengembangan embung pertanian mendukung tanaman pangan (10 Unit) :

Jumlah Dana : Rp. 1.000.000.000,- (Belanja Bahan)

Realisasi : Rp. 700.000.000,- (70 %)

Data petani dan lokasi kegiatan pengembangan DIPAS PSP Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Nama Ketua
1.	Kota Komba	Rana Mbeling	Kembang Indah	Hendrikus Raghang
2.	Kota Komba	Mokel Morid	Waeng Wake	Bonifasius Josmon
3.	Kota Komba	Lembur	Sama Rasa	Sulfisius Odu
4.	Sambi Rampas	Golo Ngawan	Kembang Melati	Fransiskus Rusman

5.	Poco Ranaka	Pocong	Puspita	Leonardus Ardi
6.	Poco Ranaka	Bangka Leleng	Mbelar	Romanus Amput
7.	Poco Ranaka Timur	Bangka Arus	Cepung	Romanus G. Harsat
8.	Elar	Haju Ngendong	Wae Ajang	Antonius Sahasin
9.	Elar	Lengko Namut	Wae Rowot	Damianus Gani
10.	Rana Mese	Watu Mori	Ikong Kilo	Aleksander Sempurna

2) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian.

Administrasi pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian :

Jumlah Dana : Rp. 233.700.000,- (Belanja Bahan)

Realisasi : Rp. 233.700.000,- (100 %)

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.335.700.000,-

g. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan : pada saat terjadi rasionalisasi anggaran di tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu yang berhubungan dengan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur sehingga anggaran yang kegiatan fisiknya telah mencapai 100 %, 70 % keuangannya direalisasi sedangkan 30 % keuangan di rasionalisasi, dengan demikian dana 30% yang pekerjaan fisiknya telah selesai 100 % tidak dapat dicairkan.

2) Solusi : Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan koordinasi bersama pihak kementerian, dan pihak kementerian telah berjanji bahwa kekurangan pembayaran dana sebesar 30% akibat rasionalisasi di Tahun Anggaran 2016, pembayarannya akan diluncurkan di Tahun Anggaran 2017, yang dibuktikan dengan surat Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian tanggal 07 Desember 2016, Nomor : 534/RC.230/B.1/XII/2016, perihal : Review Anggaran Tunda Bayar/Luncuran.

➢ Satker Dinas Pertanian dan Peternakan (249135) 018.03 Tanaman Pangan

a. Dasar Hukum

1) DIPA Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : SP DIPA 018.03.4.249135/2016, tanggal 11 November 2016; DIPA Revisi ke 01 tanggal 23 Februari 2016; DIPA Revisi ke 02 tanggal 11 April 2016; DIPA Revisi ke 03 tanggal 22 Juni 2016; DIPA Revisi ke 04 tanggal 26 Juli 2016; dan DIPA Revisi ke 05 tanggal 11 November 2016.

2) Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/64/TAHUN 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satker

(249135) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03)

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program Kegiatan yang diterima

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan :

1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi : Peningkatan Produksi Kedelai.

   Jumlah Dana : Rp. 531.318.750,-

   - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (benih kedelai untuk 50 kelompok tani) sebesar Rp. 408.625.000,-
   - Belanja barang (Operasional kegiatan); Rp. 122.693.750,-

   Realisasi : Rp. 531.280.000,- (99,9 %)

   Selisih : Rp. 38.750,- (diblokir untuk penghematan anggaran di tingkat pusat).

2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia, dengan total pagu anggaran Rp. 4.400.313.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain :

   a) Peningkatan Produksi Padi :

      Jumlah Dana : Rp. 1.565.763.000,- dengan rincian :

      - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (benih padi untuk 220 kelompok tani) sebesar Rp. 1.418.312.500,-
      - Belanja barang (operasional kegiatan) sebesar Rp. 147.450.000,-

      Realisasi : Rp. 1.565.762.500,- (99,99 %)

      Selisih : Rp. 500,- (merupakan sisa pagu kontrak pengadaan benih padi).

   b) Peningkatan Produksi Jagung dan Serelia lainnya :

      Jumlah Dana : Rp. 2.834.550.000,- dengan rincian :

      - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat (benih jagung Hibrida untuk 140 kelompok tani) sebesar Rp. 2.609.250.000,-
      - Belanja barang (Operasional kegiatan) sebesar Rp. 200.050.000,-

      Realisasi : Rp. 2.809.300.000,- (99,10 %)

Selisih : Rp. 25.250.000,- (0,90 %) (merupakan sisa pagu yang diblokir untuk penghematan di tingkat pusat).

Dengan demikian total realisasi anggaran kegiatan Pengolahan Produksi Tanaman Serelia sebesar Rp. 4.375.062.500,- (99,43%).

3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Dokumen manajemen tanaman pangan (berupa belanja operasional kegiatan) :

- Jumlah Dana : Rp. 184.540.000,-
- Realisasi : Rp. 167.540.000,- (90,79 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 17.000.000,- (9,21 %) merupakan sisa pagu yang diblokir untuk penghematan anggaran di tingkat pusat.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN sebesar Rp. 5.656.140.000,-

g. Permasalahan dan solusi

1) Permasalahan : Terjadi revisi anggaran menjelang akhir tahun (Oktober 2016) sebagai dampak terjadinya penghematan anggaran di tingkat Kementerian Pertanian sehingga menyebabkan beberapa komponen anggaran tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke kas Negara.

2) Solusi : Berhubung terjadinya revisi anggaran yang berkaitan dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), maka ada beberapa item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pengelola kegiatan (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur).

2) Urusan perkebunan

a. Dasar hukum

Dasar hukum dan pedoman penyelenggaran tugas pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Instansi pemberi tugas pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan di Kabupaten Manggarai Timur adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP-Provinsi).

c. SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan

Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Program dan kegiatan

Pada tahun anggaran 2016, Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan 6 (enam) kegiatan yang bersumber dari Tugas Pembantuan Provinsi (Tp-Prov) baik APBN maupun APBD I. Jenis program/kegiatan yang diterima antara lain :

1) APBN, meliputi kegiatan :
   a) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT);
   b) Pengembangan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
2) APBD I, meliputi kegiatan :
   a) Perluasan kopi;
   b) Perluasan cengkeh;
   c) Perluasan kelapa;
   d) Pengembangan Tembakau (DBH-CHT).

e. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Manggarai Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1) APBN
   a) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

      Realisasi pelaksanaan fisik dilapangan sebesar 100 % dimana jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah sekolah lapangan pada dua kelas beserta bantuan sarana dan prasarana pengendalian hama. Adapun sebaran alokasi kegiatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kota Komba	Ruan	Pau
2.	Borong	Balus Permai	Lebi

   b) Pengembangan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan

      Indikator kinerjanya adalah terfasilitasinya kebutuhan kelompok tani dalam memperoleh dan memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan secara optimal. Alokasi kegiatan ini dilaksanakan di KSU Japatani Kelurahan Tanah Rata Kecamatan Kota Komba. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100 %, dengan jenis kegiatan berupa penerimaan

paket bantuan peralatan pengolahan hasil komoditi kakao, pembangunan gedung unit pengolahan hasil dan rumah penjemuran.

2) APBD I

a) Perluasan Kopi

Target indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah luasan pengembangan kopi seluas 50 Ha. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100 % dengan rincian jenis kegiatan berupa penerimaan bantuan bibit tanaman kopi. Alokasi kegiatan ini tersebar pada beberapa lokasi sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Rana Mese	Compang Loni	Tunas Jaya	12,5
			Beringin Jaya	12,5
		Golo Loni	Rai Ati	25
TOTAL				50

b) Perluasan Cengkeh

Target indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah luasan pengembangan cengkeh seluas 75 Ha. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100% dengan rincian jenis kegiatan berupa penerimaan bantuan bibit tanaman cengkeh.

Alokasi kegiatan ini tersebar pada beberapa lokasi sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Poco Ranaka	Bea Waek	Tado	7,5
			Carang	7,5
		Satar Tesem	Taki I	7,5
			Moncok III	7,5
2.	Kota Komba	Golo Meni	Cipta Karya	15
		Mokel	Baeng Sama	15
		Rana Mbeling	Betong Ndimal	7,5
			Kembang Indah	7,5
TOTAL				75

c) Perluasan Kelapa

Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 100 % dengan rincian jenis kegiatan berupa penerimaan bantuan bibit tanaman kelapa dengan target 100 Ha.

Alokasi kegiatan ini tersebar pada beberapa lokasi sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Elar	Golo Lijun	Mawar Bawe	7,5
			Padang Indah	7,5
			Rampas Bela	7,5
			Baru Muncul	7,5
2.	Sambi Rampas	Nanga Baras	Rato Komba	20
			Sambi Mese	20
3.	Lamba Leda	Satar Punda Barat	Bea Jemawar	30
TOTAL				100

d) Pengembangan Tembakau (DBH-CHT)

Realisasi kegiatan sebesar 100%, dengan kegiatan berupa penerimaan bantuan sarana dan prasarana budidaya tembakau serta bantuan benih. Alokasi kegiatan tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Kota Komba	Gunung Baru	Karya Abadi	10
2.	Borong	Bangka Kantar	Mau Jaya	10
TOTAL				20

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur bersumber dari APBN dan APBD I. Besaran jumlah anggaran yang dialokasikan di Kabupaten Manggarai Timur dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan.

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2016 antara lain :

a) Pelaksanaan tugas pembantuan yang dikelola oleh provinsi.
b) Koordinasi lintas pusat dan provinsi dalam sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal.

Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pembantuan antara lain :

a) Pengoptimalan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan pengusulan satker mandiri.
b) Peningkatan koordinasi lintas pusat dan provinsi dalam sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.

3) Urusan Kehutanan

a. Dasar Hukum

1) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DK.188.4/15.a/Kpts/V/NTT-2010, tentang Penunjukan/Penetapan Pembina dan Penanggungjawab Lapangan Program/Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Ende, Nagekeo, Lembata dan Manggarai Timur.

2) Rencana Operasional Pengembangan Lebah Madu, Maret 2012.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan, dengan Kegiatan : Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

e. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kegiatan pengembangan budidaya lebah madu ini dilaksanakan di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengadaan bibit lebah beserta stup sebanyak 30 Stup, pengadaan pakan stimulan yaitu gula pasir dan pengadaan perlengkapan seperti topi, masker dan sarung tangan. Sehingga lebah madu sebanyak 30 stup tersebut dapat terpelihara dengan baik.

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana bersumber dari APBD I sebesar Rp.37.875.000,- dan realisasi Rp.37.875.000,- atau 100 %.

g. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Sulitnya menemukan koloni Apis Cerana dalam hutan.

2) Solusi

Perlu dilakukan survey lokasi tempat di mana Koloni Apis Cerana mudah ditemukan.

4) Urusan Koperasi dan UKM

A. Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan

a. Dasar Hukum

Kementerian Perdagangan RI No : 05/PPK/APBN-DKUKMPP/V/2016.

b. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Perdagangan RI

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program dan Kegiatan

Program pengembangan pasar dan distribusi barang produk.

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya pembangunan pasar Kecamatan Borong.

f. Sumber dan jumlah Anggaran

Pagu anggaran Rp. 5.834.710.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada.

B. Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi

a. Dasar Hukum

Kementerian Koperasi RI, No : 05/M.KUKM/II/2016.

b. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Koperasi RI

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program dan Kegiatan

Program pengembangan revitalisasi pasar rakyat.

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya revitalisasi pasar rakyat Pota.

f. Sumber dan jumlah Anggaran

Pagu anggaran Rp.950.000.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Koperasi.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada.

C. Bantuan Sosial Kementerian Koperasi

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum dari Bansos Kementerian Koperasi, berdasarkan SK Penetapan Koperasi pengelolah PLTMH Tahun 2013-2015.

b. Instansi Pemberi Tugas

Kementerian Koperasi RI.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program dan Kegiatan

Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang kondusif, dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Infrastruktur.

e. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbangunnya 2 Unit PLTMH yang dikelola oleh koperasi terkait.

f. Sumber dan jumlah Anggaran

Bersumber dari Kementerian Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.800.000.000,-

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada.

5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dasar Hukum

1) DIPA AWAL Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 07 Desember 2015;
2) DIPA REVISI I Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 25 Juli 2016;
3) DIPA REVISI II Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 11 Agustus 2016;
4) DIPA REVISI III Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Uraian Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan ini dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, yang terdiri dari :

1) Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelengaraan Adminduk Kabupaten/Kota.
2) Kordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan.
3) Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan.
4) Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran.
5) Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan.
6) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7) Pelayanan Dokumen Kependudukan.

8) Penerbitan Dokumen Kependudukan.

9) Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana dalam melaksanakan Tugas Pembantuan bersumber dari APBN 2016 dengan jumlah rincian anggaran sebagai berikut :

NO	DIPA	TANGGAL DIPA	DIGITAL STAMP	JUMLAH
1.	DIPA AWAL Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016	7 Desember 2015	DS:6193-0120-8066-2155	Rp. 851.875.000,-
2.	DIPA REVISI I Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016	25 Juli 2016	DS:0000-0999-9609-3670	Rp. 851.875.000,-
3.	DIPA REVISI II Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016	11 Agustus 2016	DS:8670-0241-0079-7135	Rp. 798.213.000,-
4.	DIPA REVISI III Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016	27 Oktober 2016	DS:3259-8084-2411-4071	Rp. 798.213.000,-

1) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 12 Mei 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 902/5966/DUKCAPIL.SES, tanggal 17 Juni 2016, tentang Penghematan Anggaran Tugas Pembantuan pada APBN Tahun Anggaran 2016 bahwa Kabupaten/Kota melakukan penghematan/pemotongan melalui Self Blocking sebesar 6,274 % atau sebesar Rp. 53.446.637,- DIPA mengalami perubahan dengan diterbitkannya DIPA REVISI II Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 11 Agustus 2016, dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.798.213.000,-

2) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016, tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 910/9311/DUKCAPIL.SES, tanggal 5 September 2016, tentang Penghematan Anggaran Tugas Pembantuan pada APBN Tahun Anggaran 2016 bahwa Kabupaten/Kota melakukan penghematan/pemotongan melalui Self Blocking sebesar minimal Rp.100.000.000,- Menindaklanjuti

ketentuan tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur mengajukan revisi dalam bentuk Self Blocking sebesar Rp.100.013.000,- Revisi III DIPA tidak mengalami perubahan pagu anggaran dengan diterbitkannya DIPA REVISI III, Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 798.213.000,-

3) Pagu anggaran pada REVISI III (terakhir) DIPA REVISI III Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, tanggal 27 Oktober 2016 tidak mengalami perubahan/pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 100.013.000,- namum hanya dilakukan perubahan/penambahan catatan pada halaman IV DIPA REVISI III, sebagai jumlah dana yang tidak dapat dicairkan dengan kategori penghematan/pemotongan.

4) Perubahan DIPA (DIPA AWAL sampai dengan DIPA REVISI III) tidak mengalami perubahan Nomor DIPA melainkan perubahan Nomor DIGITAL STAMP (DS).

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan Tugas Pembantuan ini yakni Perubahan Pagu Anggaran hasil revisi III (terakhir) DIPA REVISI III Nomor : SP DIPA-010.08.4.242014/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 hanya merupakan catatan pada Halaman IV DIPA sebagai anggaran yang tidak dapat dicairkan dengan kategori penghematan/pemotongan sebesar Rp.100.013.000,- namun tidak merubah pagu total anggaran pada DIPA (yang seharusnya Rp.798.213.000,- dikurangi Rp.100.013.000,- sebesar Rp. 698.200.000,-), hal ini menyebabkan perbedaan persentase serapan anggaran.

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2016 telah melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain, khususnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang walaupun secara formal belum memiliki MOU, yaitu :

1. Kebijakan dan Kegiatan

   Mengoptimalkan kerja sama antar daerah, dengan program/Kegiatan : menjalin kerja sama antar daerah Kabupaten seluruh Indonesia melalui wadah APKASI, berupa penyediaan iuran APKASI.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

   Iuran wajib APKASI tahun 2016 sudah disetor kepada Sekretariat APKASI sebesar Rp. 25.000.000.- dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100 %.
3. Permasalahan

   Tidak ada permasalahan.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan : Perlindungan sosial kemasyarakatan

   Program/Kegiatan : Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan : Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah

b. Kebijakan : Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

   Program/Kegiatan : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Media Baru serta Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dengan kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Mass Media.

c. Kebijakan : Mengoptimalkan kerja sama antar daerah

   Program/Kegiatan : Penyediaan iuran APKASI.

d. Kebijakan : Meningkatkan Kinerja Penyuluh

   Program/Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Penyuluh

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kebijakan : Perlindungan sosial kemasyarakatan

Program dan Kegiatan :

Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan MoU-04/500.8/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan pada tahun anggaran 2016, telah dilakukan proses sertifikat tanah pemda.

Hasilnya : telah diproses sertifikat sebanyak 20 bidang tanah pemda, yaitu :

1. Tanah Persiapan Kantor Camat di Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba;
2. Tanah Umum di Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba;
3. Tanah Umum di Bamo, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba;
4. Tanah SMPN 10 di Pong Ruan, Kecamatan Kota Komba;
5. Tanah SMPN SATAP di Mokel, Kecamatan Kota Komba;
6. Tanah SDN Deru di Mokel, Kecamatan Kota Komba;
7. Tanah TRK Woloraka di Bamo, Kecamatan Kota Komba;
8. Tanah SDN Leke di Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba;
9. Tanah SDN Watu Mese di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong;
10. Tanah SDN Ngalas di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong;
11. Tanah SMAN 5 Bo Bapa di Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong;
12. Tanah Umum Sapu Tada di Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong;
13. Tanah SMPN di Lingko Benteng, Desa Wae Nggori, Kecamatan Rana Mese;
14. Tanah SMPN 12 di Lingko Nampar, Desa Compang Kempo, Kecamatan Rana Mese;
15. Tanah TKK Muting di Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba;
16. Tanah SDI Nanga Rawa di Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba;
17. Tanah SMPN 9 di Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba;
18. Tanah SDN Bantuk di Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese;
19. Tanah Kantor Camat di Cembak, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda;
20. Tanah SMKN Lembur di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba.

b. Kebijakan : Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program/Kegiatan : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Media Baru serta Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dengan kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Mass Media.

Hasilnya adalah :

1) Kerjasama (MoU) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan PT.Telkom Indonesia, Nomor : 755K.TEL008/HK.820/R5W-5L100000/2016, untuk biaya langganan bandwitch;
2) Kerjasama (MoU) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan SKH Pos Kupang, Nomor : 35/PK/PP/PKS/I/2016 dan Nomor : 800/46/I/2016 tentang Kerjasama Kemitraan Penyebaran Informasi Dalam Rangka Publikasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Advetorial Harian Pos Kupang untuk 12 kali penerbitan;
3) Kerjasama (MoU) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan SKH Flores Pos, Nomor : 07/PP-FP/PKS/IV/2016 tentang Penerbitan Materi Publikasi Advetorial Kabupaten Manggarai Timur untuk langganan publikasi Advetorial selama 12 edisi;
4) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian KOMINFO RI Nomor : 1703/KOMINFO/DJPPI/HK.03.02/10/2015 dan Nomor : Kominfo.480/273/X/2015, tentang Penyediaan Akses Internet bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Kominfo tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian perangkat internet gratis, namun wajib menyediakan operator, ruangan dan laptop;
5) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai pengawas penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Kabupaten Manggarai Timur. Pada Tahun 2016 LPPL Radio Kabupaten Manggarai Timur telah mendapat izin operasional resmi yakni Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Tetap dari Kementerian KOMINFO RI Nomor : 724 Tahun 2016, pada tanggal 18 April 2016;
6) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Balai Monitor (BALMON) Kelas II A Kupang berkaitan dengan penggunaan frekwensi Radio pada LPPL Radio Kabupaten Manggarai Timur.

c. Kebijakan : Mengoptimalkan kerja sama antar daerah

Program/Kegiatan : Penyediaan iuran APKASI.

d. Kebijakan : Meningkatkan kinerja penyuluh berdasarkan MoU Nomor : HK/144/IX/2015, tanggal 29 September 2015 dan Nomor : 61/IT3/KsM/2015, tanggal 25 Agustus 2015.

Program/Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Sebagai tindaklanjut dari MoU yang disepakati, diadakan kerjasama dalam kegiatan pembuatan Road Map Penyuluh Menuju Ketahanan Pangan Kabupaten

Manggarai Timur dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi anggaran dan fisik 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan

a. Kebijakan :

1) Mengintensifkan komunikasi antara Lembaga Penegak Hukum dengan Pemerintah daerah;
2) Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial;
3) Upaya mencapai sistem pemerintahan yang transparan dan upaya peningkatan PAD;
4) Penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

b. Program/Kegiatan :

1) Membangun koordinasi dengan instansi Vertikal di Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka fasilitasi penanganan/penyelesaian konflik pertanahan masyarakat;
2) Pengendalian dan penanganan isu-isu aktual di masyarakat;
3) Penagihan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan;
4) Penertiban, pengawasan dan pengendalian bersama lalu lintas jalan raya di Kabupaten Manggarai Timur.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan dan program tersebut di atas, maka pada tahun 2016, Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan semua Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Manggarai/Manggarai Timur sesuai bidang tugas dan kewenangannya, khususnya dalam hal :

a. Penanganan Masalah pertanahan dan masalah batas administrasi pemerintahan selalu berkordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Manggarai Timur, Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai maupun dengan Pengadilan Negeri Ruteng dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
b. Pengolahan dan pemutakhiran data serta perencanaan pembangunan selalu berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Manggarai Timur.
c. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam bentuk MoU Nomor : 03/P.3.17/Gph.1/01/2016 tentang Penagihan Tunggakan Pembayaran Pajak Mineral Non Logam Dan Batuan.

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLANTAS, UPTD Perizinan Wilayah III DISHUB Provinsi NTT dan Kantor SAMSAT dalam rangka penertiban lalu lintas.

3. Permasalahan dan Solusi

Masih ada Instansi terkait yang belum ada kantornya di Kabupaten Manggarai Timur sehingga harus berkoordinasi dengan instansi yang masih bergabung dengan Kabupaten Manggarai selaku Kabupaten induk.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Melakukan fasilitasi dan monitoring di perbatasan khususnya di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar (Titik Pilar I), Desa Sangan Kalo dan Desa Wae Rasan Kecamatan Elar yang terkait langsung dengan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada.
2. Solusi yang dilakukan atas sengketa batas wilayah antar Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada.
   a. Terus menerus melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk tidak terpancing terhadap upaya-upaya provokatif dari kelompok tertentu;
   b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan untuk segera ke lapangan apabila terjadi gesekan/benturan antar kelompok di perbatasan;
   c. Mendorong masyarakat agar menerima dengan baik semua kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan;
   d. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih menunggu Keputusan Gubernur NTT terkait dengan batas wilayah administrasi antar Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada yang digugat oleh Kabupaten Ngada.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016 adalah :

a. Bencana kekeringan belum ada penanganannya;
b. Bencana tanah longsor, penanganannya melakukan penggusuran dan pembersihan dengan menggunakan alat berat loder untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
c. Bencana banjir bandang, penanganannya melalui pemberian bantuan berupa sembako dan makanan siap saji;
d. Bencana kebakaran rumah, penanganannya pemberian bantuan berupa sink dan paku;
e. Bencana abrasi, belum ada penanganannya.

2. **Status Bencana**

Status bencana yang terjadi tahun 2016 masih dikategorikan sebagai bencana lokal.

3. **Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah anggaran Rp. 21.728.800.900,-

4. **Antisipasi Daerah Dalam menghadapi Kemungkinan Bencana**

a. Pemberian informasi bencana kepada masyrakat khusus di daerah-daerah rawan bencana;
b. Pemasangan rambu-rambu peringatan bencana;
c. Penempatan THL/Tenaga Lapangan di 9 Kecamatan.

5. **Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi**

a. Tanah longsor;
b. Bencana banjir bandang;
c. Bencana abrasi;
d. Bencana kebakaran;
e. Bencana kekeringan.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Tidak ada kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. **Gangguan Kantrantibmas Yang Terjadi Selama Tahun 2016**

Uraian kasus yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2016 seperti tampak pada tabel berikut :

No	Tanggal	Uraian Kasus	Upaya Penyelesaian
1.	2 Januari 2016	Perselisihan antara Patrianus Garus dkk Warga Desa Bangka Kempo Kecamatan Rana Mese dengan Tobias Hardi dkk warga Desa Compang Teber yang menyebabkan aksi perkelahian dan pelemparan mobil Dum Truck. Perkelahian dan pelemparan mobil dipicu oleh minuman keras yang dikonsumsi sehingga tidak mampu mengontrol diri.	Diproses secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Camat Rana Mese. Masing-masing pihak mengakui kekeliruannya dan menerima sanksi berupa sejumlah benda antara lain tuak botol dan uang sebagai wunis peheng.
2.	4 Januari 2016	Dugaan penyebaran pupuk illegal di Kampung Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas. Kurang lebig 200 sak (10) ton pupuk urea bersubsidi diduga dibawah secara illegal (tanpa dokumen) oleh seorang bernama Lamaludin, 37 Tahun alamat Kampung Randang. Dari Distributor Yohanes Suharman, asal Ruteng. Menurut Lamaludin	Persoalan ini telah dilaporkan kepada Bupati, tembusan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur untuk diproses lebih lanjut.

		bahwa ia telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur.	
3.	5 Januari 2016	Kegiatan masyarakat Gendang Ara, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong disekitar kompleks Kantor Bupati Manggarai Timur. Kegiatan tersebut menimbulkan keresahan karena kelompok masyarakat adat ini melakukan pembagian tanah yang telah dikuasai perseorangan. Masyarakat Gendang Ara mengklaim bahwa tanah diluar kompleks Kantor Bupati merupakan hak ulayat persekutuan adat Gendang Ara.	Pem Daerah Manggarai Timur meminta kegiatan ini dihentikan dan mendorong masyarakat adat atau siapapun untuk menyelesaikan secara budaya dan secara hukum.
4.	12 Januari 2016	Masyarakat Teno Mari orong kurang lebih 70 orang melakukan aksi spontanitas pembakaran gubuk dan pembongkaran pagar yang di bangun oleh Salim Demok dkk diatas lahan kurang lebih 3,5 Ha. Lokasi sengketa Kross Agon, Dusun Nanga Lok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar. Aksi masyarakat Teno Mari Orong dilakukan karena konflik kepemilikan hak atas tanah di Kross Agon. Pihak Masyarakat Teno Mari Orang mengklaim bahwa tanah lokasi Kross Agon merupakan tanah hak ulayat yang belum dibagikan kepada orang perseorangan sedangkan Salim Demok mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dibagikan kepada Salim Demok dkk oleh Pemerintah Desa Tahun 1981 dibawah kepemimpinan Kades Bernadus Basi.	Proses Pidana terhadap tindakan Masyarakat Teno Mari Orong sudah selesai. Masyarakat Teno Mari Orong berjumlah 5 orang dinyatakan bersalah dengan hukuman denda Rp.500.000. sedangkan penyelesain secara perdata belum dilakukan. Upaya pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian dari tingkat Desa sampai Kecamatan belum mendapatkan hasil karena Salim Demok tidak bersedia hadir.
5.	19 Januari 2016	Konflik tanah antara 4 Tu'a Golo yaitu Tua Golo Jengok (Dominikus Janaga), Tua Golo Lodos (Herman Pius), Tua Golo Longko (Bernadus Arung), Tua Golo Mondo (Stefanus Syukur) dengan kelompok Aleksius Nambung dkk asal kampung Mondo dan Kampung Lodos. Lokasi yang dipersoalkan adalah pekuburan umum Ragok, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong dengan luas lokasi kurang lebih 6 Ha, kemudian 2 Ha telah dijual kepada Pemda Manggarai Timur untuk lokasi TPU Kabupaten Manggarai Timur.	Pemda Manggarai Timur bersedia memfasilitasi penyelesaian sebagaimana rekomendasi Rapat Forkopimda tanggal 16 Februari 2016
6.	5 Februari 2016	Masalah klaim kepemilikan tanah antara Fransiskus Sandung dkk (Suku Lowa) dengan Barnabas Katang, lokasi Wolo Kole,	Penyelesian di tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten tidak menemukan hasil. Kedua

		Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba. Frans Sandung dkk menerangkan bahwa tanah sengeketa yang berlokasi di Wolo Kole dan dikerjakan oleh Barnabas Katang merupakan tanah ulayat Suku Lowa, oleh karena itu seharusnya Barnabas Katang memenuhi ketentuan adat Suku Lowa yaitu mendatangi rumah adat Suku Lowa dan meminta secara adat tanah yang digarap, sedangkan ketengan Barnabas Katang, bahwa tanah yang digarap di Wolo Kole Keluarahan Watu Nggene adalah tanah pemberian Bapak Mantu atas nama Aloysius Ndaro (Alm.) tahun 1996. Berdasarkan pengakuan Aloysius Ndaro, bahwa tanah yang digarap bukan tanah ulayat Suku Lowa, melainkan tanah ulayat Suku Roka yang dilimpahkan kepada suku Poso untuk menjaganya.	belah pihak menolak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Pihak Pemerintah mendorong para pihak untuk melakukan gugatan secara perdata dan menghindari bentrokan fisik.
7.	21 Februari 2016	Konflik kepemilikan tanah di Tanjung Bendera, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba antara Suku Motu dengan Suku Suka meningkat. Kelompok Suku Motu berjumlah kurang lebih 50 orang dilengkapi dengan senjata tajam mendatangi lokasi sengketa guna melarang kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh Suku Suka di lokasi. Akhibatnya kedua kelompok berhadapan satu sama lain di lokasi sehingga hampir saja terjadi bentrokan fisik, namun unsur keamanan, Satpol PP dan unsur pemerintahan cepat mengantisipasi hal tersebut dengan segera turun ke lokasi. Hasilnya aktifitas kedua kelompok dibatasi dan tercapai kesepakatan di lokasi untuk menghindari bentrokan fisik.	Upaya penyelesaian oleh Pemerintah Daerah terus dilakukan secara berjenjang.
8.	13 Maret 2016	Pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016 ditemukan mayat atas nama Rasad, umur 60 tahun, alamat kampung Randang, Kecamatan Sambi Ramapas. Korban terseret banjir dari hulu sungai Wae Mbaling pada saat korban sedang mencari kayu.	Sudah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
9.	23 Maret 2016	Ancaman pembunuhan dengan menggunakan parang terhadap Pastor Paroki Romo Bernadus Palus,Pr, Frater Ferdinandus dan karyawan Paroki Mbata oleh Thomas Ndola, alamat Desa Rana	Pelaku kembali ke rumah setelah warga yang menonton pertandingan menyuruh pelaku untuk pulang.

		Mbata. Kejadian tersebut terjadi pada saat turnamen Bola Volly dalam rangka pecan suci Paskah. Pelaku diduga Mabuk karena mengkonsumsi alkohol.	
10.	6 April 2016	Kegiatan perbaikan jembatan Bakit dan pembersihan jalan provinsi oleh masyarakat Wae Rasan, Kecamatan Elar Selatan. Pelaksaan kegiatan tersebut ditolak oleh Minsi Leson, Desa Benteng Tawa I. Mereka meminta agar Gubernur NTT yang melakukan perbaikan jembatan dan pembersihan jalan	Kapolres Manggarai dan Kapolres Ngada sepakat untuk menunda pelaksaan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada Forkopimda di masing-masing Kabupaten.
11.	10 April 2016	Pengaduan Pembatu Pastor Paroki Nanga Lanang terhadap kegiatan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Desa Lidi yang mengambil sebagian tanah Paroki dan merusak pipa distribusi air ke Paroki tanpa melalu rapat dan persetujuan Paroki. Kegiatan ini menjadi alasan Pastor Pembantu Paroki Nanga Lanang menyampaikan pengaduannya kepada Pemerintah Daerah untuk segera dilakukan langkah-langkah koordinatif dengan Pemerintah Desa Lidi	Pemerintah telah memediasi dengan mengundang Kepala Desa, Dewan Paroki dan Unsur masyarakat lainnya. Point Kesepakatannya adalah Pemerintah Desa memperbaiki pipa yang rusak. Sedangkan pembagian sebagian tanah paroki untuk pembangunan jalan telah setujui oleh Pastor Paroki.
12.	14 April 2016	Perselisihan batas tanah antara Yohanes Sali dkk asal Kampung Bawe, Desa Golo Lijun dengan Arifin Res dkk asal Marutauk Desa Sambi Nasi Barat. Persoalan ini menyebabkan terjadinya mobilisasi masyarakat di Desa Sambi Nasi Barat utuk melakukan penyerangan terhadap Yohanes Sali dkk di Kampung Bawe. Namun mampu diredam oleh aparat keamanan dari unsur TNI/POLRI	Aparat keamanan sudah mengantisipasi informasi yang beredar dan membubarkan aksi pengumpulan orang yang berusaha menuju ke Kampung Bawe.
13.	5 Mei 2016	Konflik kepemilikan tanah di Bensur antara Yoakim Pari, dkk asal Kampung Bawe, Desa Golo Lijun dengan Herman Husensi, PNS, asal kampong Bawe, Desa Golo Lijun. Konflik tersebut berkembang menjurus pada perkelahian fisik, sehingga kejadian tersebut diproses secara pidana. Penyelesaian secara adat terus diupayakan oleh Kepala Desa, namun para pihak tidak sepakat.	Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Kepala Desa, namun kedua belah pihak tidak sepakat. Oleh karena itu diminta kepada para pihak untuk membawa persoalan ini ke proses hukum secara perdata dan menghindari bentrokan fisik.

14.	6 Mei 2016	Terjadi kebakaran sebuah ruko pakaian dan sepatu di lokasi Pasar Inpres Borong, Kabupaten Manggarai Timur milik JALIL alamat Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong. Api berhasil dipadamkan melibatkan warga setempat, sehingga tidak meluas. Tidak ada korban juga, namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta	Penyebab kebakaran dalam penyelidikan kepolisian namun diduga kuat akibat lilin yang lupa dimatikan oleh pemilik pada saat listrik padam.
15.	25 Mei 2016	Masalah kegiatan renovasi kubur Almarhum Frans Eka antara Umat Paroki St.Yosef Kisol dengan Kasianus Kaja dan Keluarga di samping bangunan Gereja Paroki St.Yosef Kisol. Umat Paroki Kisol menolak kegiatan renovasi kubur Almarhum Frans Eka dan meminta agar kuburan tersebut segera dipindahkan ke lokasi lain sebagai keputusan bersama dalam rapat Dewan Paroki	Pemerintah bersama Pastor Paroki melakukan konsultasi dengan Bapak Uskup untuk keputusan lebih lanjut. Keputusan Bapak Uskup menjadi keputusan final dan para pihak sepakat untuk tunduk dan taat kepada Keputusan tersebut.
16.	2 Juni 2016	Korban tenggelam atas nama Hasanudin, alamat Kampung Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas. Korban ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian oleh warga. Informasi istri korban bahwa, korban bersama istri berangkat mencari ikan muara, ketika hendak memeriksa pukat di muara, korban tenggelam dan terseret arus yang cukup kuat.	Upaya hukum tidak dilakukan dan pihak keluarga menerima kejadian ini.
17.	12 Juli 2016	Dugaan pembunuhan bayi oleh ibu kandung atas nama Agnes Dase, umur 34 tahun, asal kampung Ndilek, Desa Wejang Mawe, Kecamatan Poco Ranaka Timur. Dugaan pembunuhan dilakukan karena pelaku malu bayi yang dilahirkan merupakan hasil hubungan gelap dengan kakak kadung dari suami pelaku yang bernama Albert. Suami pelaku bernama Stanis Nohar saat ini masih merantau ke kota Makassar.	Perkara ini telah ditangani oleh Polres Manggarai.
18.	27 Agustus 2016	Dugaan perselingkuhan (KDRT) yang melibatkan oknum PNS Dinas Kesehatan Atas Nama Silvia Agustina Rae dengan oknum POLRI atas nama Yohanes Erik Magus. Istri dari Yohanes Erik Magus atas nama Filomena Yulti Frida melaporkan bahwa perselingkuhan tersebut menyebabkan terjadinya KDRT dan kehidupan perkawinan hancur.	Oknum PNS Dinas Kesehatan Atas Nama Silvia Agustina Rae telah di panggil dan dimintai keterangan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk penyelesaian masalah ini.

19.	30 Agustus 2016	Penemuan mayat seorang wanita di muara kali Wae Buntal, Kampung Bawe Desa Golo Lijun atas nama : Tu'a, umur 75 Tahun. Berdasarkan olah TKP dan Visum Et Repertum bahwa tidak ditemukan adanya tindak kekerasan yang mengarah pada kasus pembunuhan atau bunuh diri. Kemungkinan korban tercebur ke sungai sedalam 2 meter, karena korban sudah pikun dalam mengalami gangguan jiwa.	Sudah dilakukan visum et repertum oleh petugas puskesmas Pota dan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik.
20.	14 September 2016	Telah diamankan seorang warga Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur di Terminal Kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Oknum tersebut bernama Mukhlis, umur 22 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa Universitas Islam Malang. Dia diduga mnyebarkan ajaran ISIS karena ditemukan dalam tas majalah Al Furqon dan tulisan tentang ISIS	Dalam penanganan Aparat Keamanan.
21.	19 September 2016	Larangan masyarakat adat Teno Ndoko Nareng (Brahi Ko'o) agar Saudara Dami Saro,dkk tidak melakukan Ritual Adat diatas tanah wilayah ulayat Teno Ndoko Nareng termasuk didalamnya Lengko Elar dan Kelurahan Tiwu Kondo. Larangan tersebut dilakukan karena Dami Saro,dkk berusaha mengklaim tanah hak ulayat dan mengaku sebagai Teno Ndoko.	Pemerintah Daerah secara berjenjang telah melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.
22.	10 Oktober 2016	Bencana longsor di Desa Compang Congkar Kecamatan Sambi Rampas menyebabkan 1(satu) rumah milik Hendrikus Rubat ambruk akibat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun ke lokasi memberikan bantuan pakaian, makanan dan tahab berikutnya akan diberikan bantuan seng untuk atap rumah.
23.	10 Oktober 2016	Kegiatan pembagian (penyerobotan) tanah Pemda lokasi kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar oleh kelompok masyarakat berjumlah 20 orang yang dikoordinir oleh Sabinus Sandur, warga kelurahan Tiwu Kondo. Kelompok ini mengklaim bahwa tanah aset Pemerintah Daerah di Kelurahan Tiwu Kondo merupakan tanah ulayat Gendang Ndoko dan tanah tersebut bukan bagian dari penyerahan kepada Pemerintah	Masih dalam proses penyelesaian.

		Daerah Manggarai untuk pembangunan fasilitas Kecamatan Elar.	
24.	22 dan 24 Oktober 2016	Masyarakat Gendang Kadung dipimpin oleh Tua Teno Nobertus Bon melakukan kegiatan pembersihan di lokasi lingko PELA WATU, Dusun Gongger, Desa Satar Punda Barat. Kegiatan tersebut ditolak oleh warga masyarakat Gongger yang juga mengklaim kepemilikan atas lokasi tersebut. Kedua kelompok ini melakukan kegiatan yaitu menduduki lokasi yang disengketakan. Untuk mengantisipasi konflik fisik, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bersama aparat keamanan melakukan mediasi kepada kedua kelompok dan berhasil untuk sementara meredam konflik.	Pemerintah Kecamatan telah mengeluarkan surat pelarangan aktifitas ditasa tanah sengketa sambil menunggu proses penyelesaian di tingkat Kecamatan.
25.	25 Oktober 2016	Aktivitas Antonius Lantong dkk alamat Kampung Tirus, Desa Rana Gapang Kecamatan Elar yang melakukan pungutan kepada masyarakat atas nama Gendang Tirus dan mendirikan rumah adat/gendang baru tanpa melalui prosesi adat menimbulkan kecemasan di masyarakat adat Gendang Tirus. Kegiatan tersebut juga mengundang reaksi keras dari keturunan Almarhum Gendang Tirus Martinus Limbon.	Persoalan ini ditangani oleh Camat Elar dan Camat Elar telah menerbitkan surat larang kepada Antonius Lantong dkk untuk menghentikan aktivitas apapun yang mengatasnamakan gendang Tirus.

Sumber : Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Manggarai Timur

2. **Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016**

Adapun tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 sebanyak 30 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	
1.	Borong	7	-	13	-	20
2.	Rana Mese	1	-	-	-	1
3.	Poco Ranaka Timur	-	-	1	1	2
4.	Lamba Leda	-	-	1	-	1
5.	Sambi Rampas	-	-	-	-	-
6.	Elar	-	-	-	-	-
7.	Elar Selatan	-	-	-	-	-
8.	Kota Komba	2	-	2	2	6
9.	Poco Ranaka	-	-	-	-	-
Jumlah		10	-	17	3	30

3. **SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Koordinasi antara beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Instansi terkait, yakni : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Manggarai Timur dengan Instansi terkait, yaitu POLRI, TNI dan Badan Narkotika.

4. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

a. **Jumlah Pegawai**

Penanganan Ketentraman dan Ketertiban didukung pegawai sebanyak 78 orang, dengan rincian :

1) Badan Kesbangpol dan Linmas sebanyak : 15 orang ;
2) Satpol PP sebanyak : 8 orang ;
3) Bagian Administrasi Pemerintahan sebanyak : 11 orang ;
4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB : 44 orang ;

b. **Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan**

1) Sarjana : 46 orang
2) Sarjana Muda : 13 orang
3) SLTA : 19 orang

c. **Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan**

1) Golongan IV : 12 orang
2) Golongan III : 51 orang
3) Golongan II : 15 orang

5. **Sumber dan Jumlah Anggaran**

   Anggaran bersumber dari APBD II Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp.3.005.038.507,-

6. **Kendala dan Penanggulangannya**

   a. **Kendala**

      1) Kurangnya personil dan SDM yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan.
      2) Luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang cukup sulit terjangkau.
      3) Sarana dan prasarana dalam mendukung kecepatan dan ketepatan informasi lapangan
      4) Akses informasi terlambat dan telekomunikasi yang terbatas.
      5) Kesadaran masyarakat akan peran dan tanggungjawab dalam menjaga keamanan masih belum maksimal.

   b. **Penanggulangan :**

      1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan unsur keamanan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.
      2) Melakukan pantauan dan monitoring di lapangan guna mengidentifikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan dan potensi bencana.
      3) Melakukan pelatihan-pelatihan kepada unsur-unsur dalam masyarakat guna mencegah dan mengeliminir gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
      4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai forum seperti : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan soliditas, solidaritas dan kepedulian di antara sesama masyarakat.

7. **Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

   1. Tukar menukar informasi mengenai gangguan keamanan dan ketertiban;
   2. Kerja sama dalam penanggulangan bencana dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial;
   3. Kerja sama dalam hal teknik pencegahan kejahatan;
   4. Fasilitasi dan monitoring masalah-masalah perbatasan antar Kabupaten.

BAB VI
P E N U T U P

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Akhir Tahun Anggaran 2016 ini disusun dan disampaikan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan berlaku, dengan harapan kiranya dapat dievaluasi guna mendapatkan masukan positif - konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun anggaran berikutnya.

Borong, 27 Maret 2017

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Drs. YOSEPH TOTE, M.Si

LAMPIRAN I :

Jasa Pelayanan Vaksinasi Antrax dan SE Tahun 2016 .

No	Kecamatan	JENIS VAKSIN											
		ANTHRAX					SE				RABIES		
		JENIS TERNAK					JENIS TERNAK				JENIS TERNAK		
		Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Anjing	Kucing	Kera
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Borong	779	128	-	-	302	779	128	-	178	4544	113	-
2.	Kota Komba	431	47	-	495	57	431	47	-	184	4495	231	-
3.	Poco Ranaka	-	-	-	600				-	300	1500	-	-
4.	Lamba Leda	296	285	-	-	770			-	-	2885	21	-
5.	Elar	16	107	-	-	326	16	107	-	246	2162	50	-
6.	Sambi Rampas	481	148	49	-	487	433	148	-		2729	10	-
7.	Rana Mese	327	158	2	-	819	327	158	-	112	2781	71	-
8.	Poco Raanaka Timur	208	143	23	423	562	208	143	-	212	2595		-
9.	Elar Selatan		61	65	-	99		61	-	37	1257	3	-
JUMLAH		**2538**	**1077**	**139**	**1518**	**3422**	**2194**	**792**	**-**	**1269**	**24948**	**499**	**-**

Sumber: Data Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

LAMPIRAN II :

LUAS TANAM, PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI HORTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN)

1. Komoditi : Bawang Merah

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	-	-	-	-	9,00	6,00	0,67	24,50	-	-	-	-
2	RANA MESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA KOMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ELAR	-	-	-	-	7,00	6,00	0,86	16,50	-	-	-	-
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	153,00	145,00	0,95	87,00	506,00	450,00	0,89	3250,00	92,00	77,00	4,20	324,70
7	POCO RANAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	2,00	2,00	-	6,70	1,00	1,00	0,30	0,30
9	LAMBA LEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	6,50	65,00
J U M L A H		153,00	145,00	0,60	87,00	524,00	464,00	7,11	3297,70	103,00	88,00	4,43	390,00

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

2. Komoditi : Bawang Putih

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RANA MESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA KOMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ELAR	-	-	-	-	7,00	6,00	0,86	35,00	-	-	-	-
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	170,00				-	-	-	-
7	POCO RANAKA	-	-			3,00				-	-	-	-
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	2,00	2,00	1,00	5,60	3,00	1,50	0,53	0,80
9	LAMBA LEDA	-	-	-	-					-	-	-	-
	J U M L A H	-	-	-	-	182,00	8,00	5,08	40,60	3,00	1,50	0,53	0,80

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

3. Komoditi : Kubis

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	-	-	-	-	8,00	3,00	58,33	175,00	-	-	-	-
2	RANA MESE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	5,00	10,00
3	KOTA KOMBA	-	-	-	-	10,00	4,00	4,38	17,50	3,00	3,00	10,00	30,00
4	ELAR	5,00	5,00	3,00	15,00	8,00	4,00	2,98	11,90	3,00	3,00	4,17	12,50
5	ELAR SELATAN	1,00	1,00	0,30	0,30	13,00	5,00	0,82	4,11	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	2,00	1,00	3,00	3,00	1,00	-	-	-	6,00	6,00	6,25	37,50
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	25,00	25,00	3,00	75,00	15,00	10,00	0,02	0,16	4,00	4,00	1,25	5,00
JUMLAH		33,00	32,00	2,92	93,30	55,00	26,00	8,03	208,67	18,00	18,00	5,28	95,00

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

4. Komoditi : Petsai/ Sawi

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	25,00	19,00	1,50	28,50	29,00	16,00	46,25	740,00	22,00	17,00	2,34	39,80
2	RANA MESE	-	-	-	-	8,00	6,00	12,83	77,00	3,00	3,00	8,33	25,00
3	KOTA KOMBA	12,00	1,00	1,50	1,50	11,00	5,00	14,80	74,00	2,00	2,00	5,00	10,00
4	ELAR	5,00	5,00	1,50	7,50	12,00	6,00	0,77	4,60	4,00	3,00	5,00	15,00
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	22,00	8,00	0,94	7,50	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	4,00	-	-	-	1,00	1,00	5,00	5,00
7	POCO RANAKA	5,00	5,00	1,50	7,50	14,00	5,00	0,22	1,10	7,00	5,00	5,00	25,00
8	POCO RANAKA TIMUR	3,00	3,00	1,50	4,50	10,00	5,00	1,28	6,40	4,00	3,00	5,00	15,00
9	LAMBA LEDA	43,00	43,00	1,50	64,50	12,00	7,00	0,05	0,38	6,00	4,00	3,75	15,00
	J U M L A H	93,00	76,00	1,50	114,00	122,00	58,00	15,71	910,98	49,00	38,00	3,94	149,80

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

5. Komoditi : Kacang Merah

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	4,00	4,00	1,00	1,20	40,00	19,00	11,37	216,00	26,00	19,00	2,94	55,80
2	RANA MESE	23,00	22,00	0,96	6,60	4,00	1,00	0,80	0,80	2,00	2,00	6,00	12,00
3	KOTA KOMBA	2,00	2,00	1,00	0,60	11,00	4,00	5,00	20,00	4,00	-	-	-
4	ELAR	-	-	-	-	40,00	3,00	5,43	16,30	-	-	-	-
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	4,00	1,00	0,30	0,30	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	3,00	3,00	1,00	0,90	4,00	1,00	0,30	0,30	3,00	2,00	1,50	3,00
J U M L A H		**32,00**	**31,00**	**0,30**	**9,30**	**103,00**	**29,00**	**8,75**	**253,70**	**35,00**	**23,00**	**3,08**	**70,80**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

6. Komoditi : Kacang Panjang

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	106,00	67,00	0,30	20,10	98,00	38,00	4,55	173,00	29,00	23,00	1,87	43,10
2	RANA MESE	65,00	64,00	0,30	19,20	10,00	6,00	5,67	34,00	5,00	4,00	13,00	52,00
3	KOTA KOMBA	8,00	6,00	0,30	1,80	41,00	8,00	0,85	6,80	35,00	10,00	10,70	107,00
4	ELAR	21,00	22,00	0,30	6,60	29,00	6,00	1,72	10,30	9,00	6,00	1,73	10,40
5	ELAR SELATAN	6,00	2,00	0,30	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	5,00	5,00	0,30	1,50	19,00	4,00	5,00	20,00	5,00	3,00	5,00	15,00
7	POCO RANAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	7,50	15,00
8	POCO RANAKA TIMUR	10,00	5,00	0,30	1,50	25,00	6,00	3,35	20,10	4,00	4,00	3,75	15,00
9	LAMBA LEDA	2,00	2,00	0,30	0,60	3,00	3,00	-	-	10,00	4,00	5,00	20,00
J U M L A H		223,00	173,00	0,30	51,90	225,00	71,00	3,72	264,20	99,00	56,00	4,96	277,50

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

7. Komoditi : Buncis

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	58,00	28,00	1,50	42,00	75,00	25,00	6,84	171,00	135,00	98,00	0,40	39,40
2	RANA MESE	60,00	60,00	1,50	90,00	-	-	-	-	1,00	1,00	1,50	1,50
3	KOTA KOMBA	5,00	3,00	1,50	4,50	13,00	9,00	1,67	15,00	22,00	7,00	2,86	20,00
4	ELAR	10,00	9,00	1,50	13,50	38,00	11,00	0,45	4,98	3,00	2,00	18,00	36,00
5	ELAR SELATAN	3,00	1,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
7	POCO RANAKA	9,00	8,00	1,50	12,00	23,00	11,00	0,31	3,40	5,00	4,00	18,75	75,00
8	POCO RANAKA TIMUR	10,00	9,00	1,50	13,50	29,00	17,00	0,25	4,20	28,00	27,00	2,35	63,40
9	LAMBA LEDA	21,00	16,00	1,50	24,00	1,00	1,00	0,10	0,10	3,00	-	-	-
	J U M L A H	176,00	134,00	1,50	201,00	180,00	74,00	2,68	198,68	198,00	139,00	1,69	235,30

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

8. Komoditi : Tomat

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	4,00	3,00	1,00	3,00	16,00	8,00	5,88	47,00	7,00	5,00	3,20	16,00
2	RANA MESE	14,00	14,00	1,00	14,00	5,00	3,00	2,00	6,00	2,00	1,00	4,00	4,00
3	KOTA KOMBA	8,00	7,00	1,00	7,00	7,00	4,00	4,50	18,00	8,00	6,00	6,00	36,00
4	ELAR	6,00	6,00	1,00	6,00	9,00	5,00	4,14	20,70	5,00	3,00	1,33	4,00
5	ELAR SELATAN	1,00	-	-	-	5,00	3,00	1,40	4,20	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	4,00	4,00	1,00	4,00	9,00	3,00	1,50	4,50	3,00	2,00	17,50	35,00
8	POCO RANAKA TIMUR	2,00	1,00	1,00	1,00	8,00	4,00	1,00	4,00	4,00	3,00	5,00	15,00
9	LAMBA LEDA	38,00	23,00	1,00	23,00	10,00	3,00	1,50	4,50	5,00	4,00	13,25	53,00
J U M L A H		**77,00**	**58,00**	**1,00**	**58,00**	**69,00**	**33,00**	**3,30**	**108,90**	**34,00**	**24,00**	**6,79**	**163,00**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

9. Komoditi : Terung

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	17,00	10,00	1,00	10,00	60,00	20,00	6,90	138,00	23,00	13,00	2,18	28,40
2	RANA MESE	47,00	42,00	1,00	42,00	25,00	9,00	13,56	122,00	13,00	10,00	2,49	24,90
3	KOTA KOMBA	12,00	6,00	1,00	6,00	25,00	11,00	3,18	35,00	22,00	10,00	4,10	41,00
4	ELAR	19,00	17,00	1,00	17,00	60,00	11,00	1,08	11,90	6,00	1,00	2,40	2,40
5	ELAR SELATAN	3,00	2,00	1,00	2,00	4,50	2,00	7,90	15,80	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	48,00	8,00	2,25	18,00	14,00	2,00	2,20	4,40
7	POCO RANAKA	10,00	9,00	1,00	9,00	5,00		-	-	7,00	6,00	7,25	43,50
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3,00	1,33	4,00
9	LAMBA LEDA	39,00	39,00	1,00	39,00	11,00	4,00	3,63	14,50	13,00	13,00	2,68	34,80
	J U M L A H	**147,00**	**125,00**	**1,00**	**125,00**	**238,50**	**65,00**	**5,46**	**355,20**	**102,00**	**58,00**	**3,16**	**183,40**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

10. Komoditi : Labu Siam

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	-	-	-	-	1.000	300,00	1,80	540,00	250,00	100,00	0,16	16,00
2	RANA MESE	69,00	69,00	2,00	138,00	256,00	5,00	38,00	190,00	14,00	12,00	2,00	24,00
3	KOTA KOMBA	4,00	1,00	2,00	2,00	9,00	2,00	2,00	4,00	53,00	26,00	3,85	100,00
4	ELAR	15,00	12,00	3,00	36,00	56,00	11,00	21,02	231,20	14,00	5,00	9,20	46,00
5	ELAR SELATAN	8,00	1,00	2,00	2,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	128,00	5,00	14,40	72,00	14,00	-	-	-
7	POCO RANAKA	8,00	5,00	2,00	10,00	85,00	11,00	30,55	336,00	8,00	6,00	7,92	47,50
8	POCO RANAKA TIMUR	38,00	28,00	2,00	56,00	289,00	28,00	23,04	645,00	56,00	32,00	7,03	224,90
9	LAMBA LEDA	-	-	-	-	2,00	1,00	0,10	0,10	6,00	-	-	-
J U M L A H		**142,00**	**116,00**	**2,10**	**244,00**	**1.829**	**363,00**	**5,56**	**2.018,30**	**415,00**	**181,00**	**2,53**	**458,40**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

11. Komoditi : Kangkung

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	17,00	13,00	1,00	13,00	44,00	8,00	14,63	117,00	16,00	11,00	1,51	16,60
2	RANA MESE	25,00	24,00	1,00	24,00	-	-	-	-	12,00	11,00	1,60	17,60
3	KOTA KOMBA	12,00	11,00	1,00	11,00	12,00	8,00	3,00	24,00	11,00	8,00	2,35	18,80
4	ELAR	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	2,10	2,10
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	8,00	7,00	1,00	7,00	6,00	11,00	0,30	3,30	1,00	1,00	7,50	7,50
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	4,00	4,00	1,00	4,00	3,00	1,00	0,10	0,10	5,00	4,00	5,75	23,00
J U M L A H		**67,00**	**60,00**	**1,00**	**60,00**	**65,00**	**28,00**	**5,16**	**144,40**	**46,00**	**36,00**	**2,38**	**85,60**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

12. Komoditi : Bayam

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	11,00	9,00	0,15	1,35	27,00	8,00	14,75	118,00	22,00	17,00	0,56	9,60
2	RANA MESE	24,00	23,00	0,15	3,45	4,00	4,00	0,25	1,00	5,00	5,00	1,56	7,80
3	KOTA KOMBA	8,00	6,00	0,15	0,90	20,00	12,00	0,42	5,00	11,00	6,00	0,78	4,70
4	ELAR	5,00	3,00	0,15	0,45	9,00	5,00	0,49	2,45	5,00	4,00	1,78	7,10
5	ELAR SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SAMBI RAMPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	POCO RANAKA	9,00	6,00	0,15	0,90	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	2,50	7,50
8	POCO RANAKA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	LAMBA LEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,10	0,10	2,00	1,00	3,00	3,00
J U M L A H		**57,00**	**47,00**	**0,15**	**7,05**	**66,00**	**31,00**	**4,11**	**127,55**	**55,00**	**37,00**	**1,10**	**40,70**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

13. Komoditi : Cabe Rawit

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	6,00	2,00	0,30	0,60	14,00	3,00	3,00	9,00	6,00	3,00	3,70	11,10
2	RANA MESE	14,00	13,00	0,30	3,90	9,00	2,00	3,50	7,00	7,00	6,00	0,78	4,70
3	KOTA KOMBA	5,00	4,00	0,30	1,20	11,00	4,00	0,75	3,00	24,00	8,00	0,69	5,50
4	ELAR	12,00	8,00	0,30	2,40	9,00	1,00	0,41	0,41	8,00	4,00	1,13	4,50
5	ELAR SELATAN	2,00	2,00	0,30	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	4,00	1,00	0,30	0,30	32,00	-	-	-	3,00		-	
7	POCO RANAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	-
9	LAMBA LEDA	10,00	8,00	0,30	2,40	4,00	2,00	0,05	0,10	5,00	3,00	1,00	3,00
J U M L A H		**53,00**	**38,00**	**0,30**	**11,40**	**79,00**	**12,00**	**1,63**	**19,51**	**57,00**	**24,00**	**1,20**	**28,80**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

LAMPIRAN II :

LUAS TANAM, PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KOMODITI HORTIKULTURA (BUAH-BUAHAN)

1. Komoditi : Mangga

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	66,00	49,00	3,00	147,00	66,00	44,00	2,78	122,50	87,00	49,00	0,45	22,00
2	RANA MESE	11,00	49,00	2,80	137,00	10,71	7,21	2,09	15,10	17,50	7,50	14,00	0,78
3	KOTA KOMBA	194,00	-	-	-	161,00	-	-	-	161,00	20,00	25,00	1,25
4	ELAR	68,00	43,00	3,42	147,00	67,85	43,13	11,59	500,00	68,34	40,17	31,20	0,78
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	22,00	22,00	3,18	70,00	22,00	22,00	2,20	48,40	22,00	22,00	15,30	0,70
7	POCO RANAKA	8,00	7,00	2,71	19,00	7,50	6,40	2,13	13,60	6,95	6,00	2,00	0,33
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	1,35	-	-	-	1,42	0,00	0,00	0,00
9	LAMBA LEDA	50,00	-	-	-	50,03	-	-	-	61,00	40,00	40,00	1,00
J U M L A H		**419,00**	**170,00**	**3,06**	**520,00**	**386,44**	**122,74**	**5,70**	**699,60**	**425,21**	**184,67**	**0,15**	**26,84**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

2. Komoditi : Alpukat

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	44,00	20,00	1,03	20,00	44,00	19,50	1,03	20,00	43,00	18,50	0,43	12,00
2	RANA MESE	4,00	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA KOMBA	40,00	25,00	2,00	50,00	39,50	24,50	2,00	49,00	40,50	25,50	9,00	0,35
4	ELAR	174,00	102,00	3,01	307,02	174,00	102,00	3,00	306,60	85,60	43,26	19,00	0,44
5	ELAR SELATAN	;-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	18,00	16,00	1,22	19,52	17,50	15,60	1,20	19,00	17,50	12,00	25,00	2,08
7	POCO RANAKA	5,00	1,00	1,30	1,30	5,45	0,90	1,30	1,17	4,55	1,00	1,20	1,20
8	POCO RANAKA TIMUR	4,00	-	-	-	3,60	-	-	-	1,84	-	-	-
9	LAMBA LEDA	8,00	-	-	-	7,59	-	-	-	28,88	18,00	40,00	2,22
J U M L A H		**297,00**	**164,00**	**2,43**	**397,84**	**295,14**	**162,50**	**2,44**	**395,77**	**221,87**	**118,26**	**0,15**	**18,30**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

3. Komoditi : Rambutan

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	2,30	1,70	4,50	7,65	11,90	10,50	0,86	9,00	11,90	10,50	0,88	9,70
2	RANA MESE	0,05	-	-	-	33,17	1,17	2,00	2,34	53,00	4,50	0,56	2,50
3	KOTA KOMBA	4,20	3,00	4,90	14,70	230,00	110,00	0,86	95,00	210,00	191,00	0,64	122,00
4	ELAR	69,62	9,20	-	-	31,20	1,92	2,00	3,84	35,60	3,15	0,37	1,15
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	4,00	0,50	1,00	0,50	0,43	0,08	1,50	0,12	0,43	0,15	0,60	4,00
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	2,67	-	-	-	-	-	-	-	0,43	0,15	1,00	4,00
J U M L A H		**82,84**	**14,40**	**1,59**	**22,85**	**306,70**	**123,67**	**0,89**	**110,30**	311,36	209,45	0,68	143,35

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

4. Komoditi : Durian

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	2,30	1,70	2,00	3,40	2,30	1,70	2,00	3,40	4,30	1,50	1,33	2,00
2	RANA MESE	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	0,75	0,20	0,50	0,10
3	KOTA KOMBA	4,20	3,00	1,50	4,50	142,50	3,00	1,50	4,50	15,00	5,00	0,70	0,14
4	ELAR	22,31	2,70	2,50	6,75	22,31	2,70	2,50	6,75	0,66	0,16	0,70	4,38
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	4,00	1,04	0,00	1,35	4,60	0,50	2,70	1,35	4,60	0,50	0,40	0,20
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		35,63	8,44	1,90	16,00	171,86	7,90	2,03	16,00	25,31	7,36	0,93	6,82

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

5. Komoditi : Jambu Biji

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	8,33	3,33	4,50	15,00	8,33	3,33	1,82	5,94	8,33	3,33	0,50	0,16
2	RANA MESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KOTA KOMBA	2,13	1,67	3,90	6,50	2,47	2,00	2,50	5,00	3,00	2,25	2,44	5,50
4	ELAR	0,99	0,74	4,20	3,12	0,99	0,74	2,39	1,78	0,35	0,22	31,50	143,18
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	5,00	-	-	-	5,00	5,00	8,00	40,00	0,47	0,17	0,58	0,10
7	POCO RANAKA	0,53	0,23	2,40	0,56	0,02	0,00	0,90	0,00	0,08	0,02	0,10	5,00
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMBA LEDA	1,84	0,22	2,40	0,52	-	-	-	-	13,00	3,33	1,50	5,00
	J U M L A H	18,83	6,19	4,15	25,70	16,81	11,08	4,76	52,72	25,23	9,33	17,04	158,94

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

6. Komoditi : Jeruk Keprok

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	7,48	4,75	14,00	7,43	4,75	4,75	12,00	57,00	7,00	4,75	2,53	12,00
2	RANA MESE	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	1,88	3,20	6,00
3	KOTA KOMBA	60,98	60,23	11,20	60,00	7,75	7,75	16,00	124,00	70,00	52,25	2,30	120,00
4	ELAR	5,72	1,00	12,00	5,72	1,00	1,00	12,09	11,97	0,36	-	-	-
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	POCO RANAKA	0,46	0,03	8,00	0,39	0,01	0,01	10,00	0,13	0,39	-	-	-
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-
9	LAMBA LEDA	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		75,33	66,00	1,11	73,53	13,51	13,51	14,29	193,10	82,44	58,88	2,34	138,00

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

7. Komoditi : Jeruk Nangka/ Cempedak

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	71,40	56,40	3,50	197,40	70,00	50,00	3,50	175,00	60,00	25,00	5,60	140,00
2	RANA MESE	8,97	2,78	4,00	11,12	8,97	2,50	4,00	10,00	9,00	3,00	2,67	8,00
3	KOTA KOMBA	227,40	162,40	3,20	519,68	110,00	10,00	3,20	32,00	110,00	4,00	5,00	20,00
4	ELAR	70,93	47,68	2,80	133,50	70,93	47,68	2,80	133,50	9,20	6,83	3,66	25,00
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	59,78	-	-	-	59,78	59,78	4,00	239,12	59,78	20,00	5,25	105,00
7	POCO RANAKA	3,35	0,35	2,50	0,88	2,35	0,35	2,50	0,88	2,35	0,35	4,29	1,50
8	POCO RANAKA TIMUR	1,50	-	-	-	0,40	-	-	-	0,29	-	-	-
9	LAMBA LEDA	20,39	-	-	-	20,39	-	-	-	65,00	20,00	4,25	85,00
J U M L A H		463,72	269,61	3,20	862,58	342,82	170,31	3,47	590,50	315,62	79,18	4,86	384,50

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

8. Komoditi : Nenas

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	0,50	0,28	37,50	10,50	0,28	0,20	3,00	0,60	0,38	0,28	107,14	30,00
2	RANA MESE	-	-	-	-	0,26	0,16	37,50	6,00	2,50	0,32	62,50	20,00
3	KOTA KOMBA	2,52	0,40	40,00	16,00	0,44	0,04	2,50	0,10	6,00	0,68	37,50	25,50
4	ELAR	0,39	0,23	45,00	10,55	0,28	0,19	3,50	0,67	0,08	0,04	0,21	0,01
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	0,80	0,80	50,00	40,00	0,24	0,24	4,00	0,96	0,11	0,11	50,91	5,60
7	POCO RANAKA	0,03	0,00	45,00	0,18	0,01	0,00	2,00	0,00	0,01	0,00	370,00	0,37
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,01	-	-	-
9	LAMBA LEDA	0,89	0,10	47,50	4,71	0,08	-	-	-	0,11	0,04	0,62	0,02
	J U M L A H	5,12	1,82	45,08	81,94	1,60	0,83	10,02	8,33	9,20	1,46	55,64	81,50

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

9. Komoditi : Pepaya

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	12,47	7,00	37,50	262,50	12,47	6,50	20,00	130,00	9,50	6,00	10,33	62,00
2	RANA MESE	6,44	4,02	37,50	150,86	6,44	3,74	28,11	105,00	9,70	4,00	8,00	32,00
3	KOTA KOMBA	62,91	10,00	40,00	400,00	110,00	65,00	1,31	85,00	53,50	25,00	3,76	94,00
4	ELAR	9,73	5,86	45,00	263,79	9,73	3,79	25,00	94,65	0,93	0,62	4,85	3,00
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	20,00	20,00	50,00	1.000,00	28,00	0,03	20,00	0,50	2,00	0,80	6,50	5,20
7	POCO RANAKA	0,70	0,10	45,00	4,50	0,60	-	-	-	0,23	0,05	70,00	3,50
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-
9	LAMBA LEDA	22,24	2,48	47,50	117,75	32,50	-	-	-	7,81	1,40	25,71	36,00
J U M L A H		**134,49**	**49,46**	**44,46**	**2.199,41**	**199,74**	**79,05**	**5,25**	**415,15**	**84,05**	**37,87**	**6,22**	**235,70**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

10. Komoditi : Pisang

No	KECAMATAN	TAHUN											
		2014				2015				2016			
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTI VITAS (Ton/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	BORONG	1.101,00	100,00	27,00	2.700,00	116,20	80,00	25,00	2.000,00	116,00	80,00	5,25	420,00
2	RANA MESE	10,11	7,68	25,00	192,00	-	-	-	-	103,90	6,00	10,00	60,00
3	KOTA KOMBA	303,40	75,18	15,00	1.127,66	504,50	201,00	30,00	6.030,00	551,50	346,50	1,91	662,50
4	ELAR	46,38	18,89	27,00	510,06	-	-	-	-	9,01	7,45	5,64	42,00
5	ELAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SAMBI RAMPAS	48,47	48,47	20,00	969,44	48,47	48,47	35,00	1.696,52	48,47	15,47	5,89	91,20
7	POCO RANAKA	53,23	46,23	13,00	600,93	51,53	45,53	20,00	910,50	47,28	40,00	0,50	20,00
8	POCO RANAKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	0,12	41,32	5,00
9	LAMBA LEDA	23,20	50,40	13,00	655,20	-	-	-	-	49,96	21,00	10,00	210,00
J U M L A H		**1.585,79**	**346,85**	**19,48**	**6.755,28**	**720,70**	**375,00**	**28,37**	**10.637,02**	**927,68**	**516,54**	**2,92**	**1.510,70**

Sumber: Data Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	yaitu : 1. PERDA Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 2. PERDA Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Ada	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB s.d akhir Tahun 2016, sebanyak 150 unit - Jumlah seluruh rumah s.d akhir Tahun 2016, sebanyak 65.540 unit	2,29 %	
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	yaitu : PERDA Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031.	Ada	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP-el = 132.340 - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP-el = 209.542	79,42 %	
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum : PERDA Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Tidak Dipungut Biaya	
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada akhir tahun 2016 dibagi jumlah penduduk pada akhir	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak = 17 orang - Penduduk pada akhir tahun 2016 berjumlah = 293.031 orang	0,58 per 10.000 penduduk	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
					tahun 2016 x 10.000			
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	yaitu : Perda Persampahan/Kebersihan dan PERDA Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	Ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman LPPD Tahun 2015 : Surat Pengantar Nomor : Pem.130/62/III/2016. Tanggal 29 Maret 2016	Tepat Waktu	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10.a	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal 29 April 2016 sesuai surat pengantar Nomor : BU.900/170/IV/2016	Tidak Tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10.b	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : Laporan Kinerja tahun 2015 disampaikan pada tanggal 29 Maret 2016, sesuai surat pengantar Nomor : Organ.060/160/III/2016, tanggal 29 Maret 2016.	Tepat Waktu	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 9 urusan, yang terdiri dari : 1) Urusan Kependudukan dan Capil 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Perumahan 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 7) Urusan Pendidikan 8) Urusan Ketahanan Pangan 9) Urusan Penanaman Modal	9 Urusan	
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016 yakni : sebanyak 5 MoU, yakni : 1. MOU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor; HK/219/Tahun 2016 dan Nomor: 98/KTR/XI-06/PKS/1216 2. Adendum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ende Nomor: HK/104/Tahun 2010 dan Nomor: 35/KTR/XI-06/0416 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: HK/46/tahun 2016 dan Nomor :	Ada 5 MOU	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
						06/KTR/X-06/0216 3. MOU dengan Kementerian Keuangan RI tentang Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas (PKP-SPM DIKDAS) Nomor : PPH-076/MK.7/2014 untuk pelaksanaan SPM T.A 2015 s/d 2016; 4. MOU dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kupang tentang Kerjasama Penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat Terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : 63/DA-EDP/KPID/06/2014 Tanggal 16 Juni 2014; 5. MOU antara Direktoral Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : 794.3/DPPMD/VIII/2016 dan HK/161/Tahun 2016 tentang Urusan Bersama Untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional X 100%	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program - Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 5 program prioritas	90,90 %	
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 Urusan.	100%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
					100%			
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2016	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016	Dasar Hukumnya : PERDA Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Yang ditetapkan pada Tanggal 29 Desember 2015	Tepat Waktu	
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	PERDA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ditetapkan tanggal 14 Agustus 2010.	Ada	
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 : 1) Urusan Pendidikan Rp.246.187.021.242,- 2) Urusan Kesehatan Rp.84.768.023.014,- 3) Urusan Lingk. Hidup Rp.6.332.032.511,- 4) Urusan PU Rp.150.412.334.492,- 5) Urusan Sosial Rp.4.093.433.231,- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp.691.892.175,- 7) Urusan Koperasi Rp.3.843.567.665,- 8) Urusan Satpol PP Rp.2.640.136.094,- 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.3.269.227.930,- Total Belanja Pelayanan Dasar Rp. 502.237.668.354,- Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp.856.593.524.510,-	58,63%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja APBD X 100 %	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016 : 1) Urusan Pendidikan Rp50.231.600.334.,- 2) Urusan Kesehatan Rp 52.090.928.417,- Total Belanja Pend. & Kes. Rp.102.332.528.751,- Total Belanja APBD 2016, sebesar Rp.856.593.524.510,-	11,94%	
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2016 sebanyak 4.363 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2016 sebanyak 293.031 orang.	1,49 %	
			21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	yakni : Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Ada	
		Kelembagaan	22	Penataan SKPD	. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb : 1) Bagian (Setda) = 8 unit 2) Dinas = 15 unit 3) Badan = 10 unit 4) Kantor = 2 unit 5) Rumah Sakit = 0 unit 6) Lembaga Teknis lainya = 1 unit 7) Sekretariat DPRD = 1 unit 8) Kecamatan/Distrik = 9 unit Jumlah SKPD = 46 unit	46 Unit	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak 10 PERDA	10 PERDA	Daftar PERDA Terlampir
		RANPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016	Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016	- RANPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 18 RANPERDA. - RANPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 10 buah	55,55 %	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2016 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 27 keputusan.	100 %	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2016 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 223 keputusan - Keputusan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 223 keputusan.	100 %	
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2016 x 100%	- Peraturan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 69 Peraturan Bupati - Peraturan Bupati dalam tahun 2016, sebanyak 69 Peraturan Bupati.	100 %	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	- Perda yang dibatalkan, Tidak Ada Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 10 Perda	0 %	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
	ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	yakni : - Lembaga Penyiaran Publik Lokal RKMT, Perda Nomor 2 tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal RKMT	Ada	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp.691.737.352.809.,- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 701.769.417.722,-	98,57%	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja publik tahun 2016, sebesar Rp. 478.491.298.083,- - Realisasi DAU Tahun 2016, sebesar Rp. 502.165.245.000,-	95,29%	
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Realisasi Belanja langsung tahun 2016, sebesar Rp.396.791.028.959 - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp 856.593.524.510.-	46,32%	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. 43.788.841.960,10,- - Realisasi Pendapatan Tahun 2016, sebesar Rp.862.316.367.887,10	5,08%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini : WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini : WDP	Opini Tahun 2014 = WDP Opini Tahun 2015 = WDP	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp 62.267.406.824,57.- - Realisasi Pendapatan Tahun 2016, sebesar Rp. 862.316.367.887,10,-	7,22%	
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp. 856.593.524.510 ,- - Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	93,78%	
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Tahun 2016, sebanyak 300 temuan. (Tidak termasuk temuan BPK RI atas Lap Keu Tahun 2016) - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 396 temuan.	75,76 %	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp 43.788.841.960,- - Potensi PAD pada RPJMD atau RKPD Tahun 2016 APBD Rp.21.000.000.000,-	208,52	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2016 - PAD 2015) : PAD 2015 X 100% *(43.788.841.960,10- 41.465.748.921,64) : 41.465.748.921,64 x 100% = 5,60 %*	- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. 43.788.841.960,10,- - Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. 41.465.748.921,64,-	5,60%	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian KInerja	Keterangan
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTA HAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Anugerah KPID NTT 2016 Penghargaan Khusus Untuk Jasa Penyiaran Radio.	Ada 1 penghargaan	
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement		yakni : Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2014	Ada	
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak 0 ijin	0 ijin	

DAFTAR PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN
DALAM TAHUN 2016

No.	PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM TAHUN 2016
(1)	*(2)*
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 13 Mei 2016, Tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Asal Tumbuhan, Ternak dan Ikan ;
2.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, Tanggal 13 Mei 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa;
3.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Tanggal 13 Mei 2016, Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Keuangan Desa;
4.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 15 Agustus 2016, Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
5.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 10 September 2016, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
6.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Tanggal 13 September 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
7.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Tanggal 13 September 2016, Tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Pantai Watu Pajung dan Rana Tonjong;
8.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 13 September 2016, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 13 September 2016, Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat;
10.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 8 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program.	66,67 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	yakni : 1. SOP ttg Pengambilan Obat di Gudang Farmasi 2. SOP ttg Penyusunan Profil Kesehatan	Ada 2 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 21 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	yakni : 1. Dokter Umum dan Dokter Gigi 2. Penyuluh Kesehatan 3. Perawat dan Perawat Gigi 4. Bidan 5. Farmasi 6. Sanitarian 7. Fisioterapis 8. Radiografer 9. Rekam Medis	Ada 9 Jabatan Fungsional	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 662 personil (termasuk Puskesmas) - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	15,20 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	9,52 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 21.org	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Terdiri dari : 1. RPJMD 2. RENSTRA 3. RKPD 4. RENJA 5. KUA 6. RKA 7. DPA/DPAP	Ada 7 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 20 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 20 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 20 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 20 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 96.808.619.148,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	10,59 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 19.267.993.045,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.84.768.023.014-	22,73 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.602.608.563,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.22.146.840.203,-	2,72 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.602.608.563,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 84.768.023.014,-	0,71%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	yakni : 1. KIB 2. Buku Inventaris Barang 3. Daftar Aset 4. Buku ATK	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.481.145.031,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.84.912.815.973,96,-	0,01%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	yakni : 1. Baliho 2. Poster 3. Stiker	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEHUTANAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [2] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 18 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 jbt	90,00 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 32 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,73 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	78 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 18 orang.	78 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. DPAP	Ada 5 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 6.295.504.439,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,68%	S
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 484.554.730 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.168.794.941,-	7,85 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.85.069.850. - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.921.558.545,-	4,43 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 85.069.850 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.168.794.941,-	1,38 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	yakni : 1. CALK 2. NERACA 3. LRA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	yaitu : 1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB E	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 475.330.890,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 5.036.518.110	9 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [3] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Penyusunan KUA-PPAS 2. SOP ttg Pengelolaan Barang Persediaan 3. SOP ttg Pertanggungjawaban Keuangan 4. SOP ttg Bantuan Pertisida dan Peminjaman Alat Pengendalian OPT	Ada 4 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 30 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 32 jbt	93,75 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	yakni : Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman-Pengendali Hama Pertanian	Ada 1 Jenis	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 60 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	1,37 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 30 org.	10 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 30 orang.	56,67 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 13 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 13 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 13 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.19.252.914.007,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	2,10%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.9.044.735.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.18.468.896.993,-	48,97 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.112.122.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.469.302.348,-	0,03 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 112.122.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 18.468.896.993,-	0,61 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. RFK 2. NERACA 3. CALK 4. LRA	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB A,B,C,D dan E 2. Buku Inventaris 3. Rekapan Buku Inventaris 4. Daftar Mutasi Aset 5. Daftar Barang Rusak Berat (Aset Lainnya)	Ada 5 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 1.948.865.175,02,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.55.896.845.828,02,-	3,49 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERKEBUNAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [4] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0.52 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	41,18 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 17 orang.	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.341.733.809,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,58 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.72.583.500,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.4.991.770.406,-	1,45 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.110.725.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar	5,61 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						- Rp. 3.061.446.589,-		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 110.725.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.991.770.406--	2,21 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB 2. KIR	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 ,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.3.811.766.944,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [5] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 2. SOP tentang Pelayanan Permohonan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.	Ada 2 Jenis	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	33,33 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 15 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	88,24 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,48 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	71,43 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 15 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 15 orang.	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	87,5 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.5.470.492.909,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47-	0,60%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.2.333.671.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.5.212.371.205,-	44,77 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.447.986.800,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.872.882.955,-	44,77 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 447.986.800,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.5.212.371.205-	8,59 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni: 1. KIB 2. KIR 3. Buku Inventaris Barang	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 261.510.940,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 36.327.344.600,-	0,71 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [6] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	50,00 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Penerbitan KTP 2. SOP ttg Penerbitan KK 3. SOP ttg Penerbitan Akte Kelahiran 4. SOP ttg Penerbitan Akte Perkawinan 5. SOP ttg Penerbitan Akte Pengangkatan Anak 6. SOP ttg Penerbitan Akte Kematian 7. SOP ttg Penerbitan Akte Perceraian	Ada 7 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 20 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 22 jbt	95,45 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,64 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang telah memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	30%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 20 orang.	28,57 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.398.170.956,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,37 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.133.337.897,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.269.227.930,-	4,08 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.59.375.668,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.908.127.494,-	6,54 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.59.375.668,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.269.227.930,-	1,87 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. Laporan Keuangan Tahunan 2. Neraca 3. LRA 4. CALK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Buku Inventaris Barang	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.109.770.807,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.600.385.988,-	7,48 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Pengumuman tertulis 2. Pengumuman lewat radio local	Ada 2 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [7] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 15 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	88,23 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada	Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 26 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,60 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	93,33 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 15 orang.	53,33%	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.10.036.516.257,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 930.749.693.116,47,-	1,00 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 99.330.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.9.781.981.254,-	1,02 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.65.060.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.7.332.374.100,-	0,88 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.65.060.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 9.781.981 254,-	0,67 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Mutasi Barang 2. Rekapitulasi Buku Inventaris 3. Daftar Inventaris Aset Tetap	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 230.075.000,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.4.608.831.900,-	5 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PPKAD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [8] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33,33 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 24 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 44 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	1,01 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	50 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 24 org	62,5 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. DPA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 11.275.081.610,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793,116,47,-	1,23%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 147.015.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.9.699.887.073,-	1,51%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.133.073.081 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.106.015.459,-	12,03%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.133.073.081 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.9.699.887.073,-	1,37%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Induk Inventaris 2. SK Penetapan Inventarisasi 3. KIB 4. KIR	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 20.413.923.750,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Struktur Organisasi	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [9] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni: 1. Sop tentang Audit Kinerjaa; 2. SOP ttg Evaluasi jabatan; 3. SOP ttg Monev. Program dan Kegiatan; 4. SOP ttg Pemeriksaan Khusus; 5. SOP ttg Pemeriksaan Kasus,- 6. SOP tentang Penugasan Pengawasan 7. SOP tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 8. SOP tentang Diklat Jabatan Fungsional; 9. SOP tentag Program Kerja	Ada 9 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pengawasan Tahunan (PKPT)		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 9 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Yakni : - Auditor Fungsional	Ada 1 Jabatan	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 31 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,73 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	77,78 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 9 Orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 4.769.935.607,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,52%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.68.380.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.4.615.470.294,-	1,48 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.60.783.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.2.278.886.181,-	2,67%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.60.783.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.615.470.294,-	1,32%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIR 2. KIB 3. Buku Persediaan	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 134.421.176,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 1.018.067.980-	13,20 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KETAHANAN PANGAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [10] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	50 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 17 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	yaitu : Fungsional Penyuluh Pertanian	Ada 1 Jenis	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 87 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	2,00 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	82,35 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 17 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 17 orang.	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	88 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.12.050.900.759,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47-	1,31 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.1.218.657.250,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.11.044.694.197,-	11,03 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.526.561.000,- - Total belanja brg dan jasa SKPD, sebesar Rp.2.944.993.177,-	17,87 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.526.561.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.044.694.197-	4,76%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : Kartu Inventaris Barang	Ada 1 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.139.529.996,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.7.242.882.648,-	1,93 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Ada 2 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [11] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	33,33 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	Ada 1 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 16 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	94,12%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,48 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	81,25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 16 Orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.6.530.851.845,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,71 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.1.953.965.800,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.6.163.480.278,-	31,70 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.158.531.600,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.2.085.728.984,-	7,60 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.158.531.600,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.163.480.278,-	2,57%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada 5 jenis, sbb : 1. LRA 2. NERACA 3. CALK 4. LO (Laporan Operasional) 5. LPE(Laporan Perubahan Ekuitas)	Ada 5 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Inventaris Barang 2. KIB (Kartu Inventaris Barang)	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.19.528.936.294,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [12] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	50,00 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 16 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	41,18 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,48 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	50 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 16 org	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	50 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 3.609.144.760,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,39 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.439.620.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.376.708.666,-	13,02 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.38.373.124,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.149.791.957,	3,34 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 38.373.124,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.376.708.666,-	1,14 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB 2. Buku Inventaris Barang 3. Daftar Aset 4. Buku ATK	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.167.689.998,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 2.381.958.583,-	7.04%	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : LPPL RKMT	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [13] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 24 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,55 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	29,41 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 17 orang	47,06 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.4.665.947.724,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,51 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.33.343.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.4.386.876.305,-	0,76 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.40.910.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.564.030.982-	5,38 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 84.150.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.386.876.306,-	1,91 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : Kartu Inventarisasi Barang	Ada 1 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 244.975.500 ,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 1.063.456.000.-	23,04%	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Pengumuman di Media Elektronik (RSPD Manggarai Timur)	Ada 1 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [14] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : SOP ttg Bantuan Keuangan Partai Politik	Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 14 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 15 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,34 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	42,86 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 14 org	35, 71 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENJA 2. RENSTRA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.005.038.507 ,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,32 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.40.130.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.972.527.207,-	1,39 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.79.342.250,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.488.155.117,-	5,32 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.79.342.250,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.972.527.207,-	2,67 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yaitu : 1. Rekapitulasi Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 3. Daftar Inventaris Tetap	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp1.156.810.000	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [15] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33,34 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Pengadaan CPNSD 2. SOP ttg Mutasi antar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi 3. SOP ttg Kenaikan Pangkat Gol IV 4. SOP ttg Kenaikan Pangkat Gol.III kebawah 5. SOP ttg Pensiun Normal, Janda dan Duda PNS 6. SOP ttg Karpeg, Karis dan Karsu	Ada 19 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						7. SOP ttg Diklat Prajabatan Gol.I dan II 8. SOP ttg Prajabatan Gol.III 9. SOP ttg Ujian Dinas TK.I 10. SOP ttg Ujian Dinas TK.II 11. SOP ttg Diklat PIM II 12. SOP ttg Diklat PIM III 13. SOP ttg Diklat PIM IV 14. SOP ttg Tugas Belajar 15. SOP ttg Izin Belajar 16. SOP ttg Disiplin PNS 17. SOP ttg Kartu Taspen 18. SOP ttg Konversi NIP 19. SOP ttg Satya Lencana Karya Satya		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 16 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17 jbt	94,11%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,64 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	66,66 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 16 orang.	52,94 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.319.631.794- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,91%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.238.456.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.7.335.290.781,-	3,25 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.54.537.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.780.423.307,-	1,14 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.54.537.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.335.290.781,-	0,74 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB (B,E) 2. Buku Inventaris 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.184.181.605,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.974.859.700	9,32 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Radio 3. Website BKD	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENANAMAN MODAL

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [16] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg IPL 2. SOP ttg SKITU 3. SOP ttg SIUP 4. SOP ttg TDI 5. SOP ttg SIUI 6. SOP ttg TDP 7. SOP ttg IZIN PENELITIAN 8. SOP ttg IMB 9. SOP ttg SIUJK 10. SOP ttg IZIN PRAKTEK DOKTER 11. SOP ttg IZIN PRAKTEK BIDAN 12. SOP ttg IZIN APOTEK 13. SOP ttg TOKO OBAT 14. SOP ttg IZIN ANGKUTAN 15. SOP ttg IZIN TRAYEK	Ada 95 SOP	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						16. SOP ttg IZIN INSIDENTIL 17. SOP ttg IZIN USAHA PERIKANAN 18. SOP ttg IZIN PENANGKAPAN IKAN 19. SOP ttg KTP NELAYAN ANDON 20. SOP ttg IZIN KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN GERGAJI RANTAI 21. SOP ttg PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU/HASIL HUTAN BUKAN KAYU 22. SOP ttg PENAMPUNGAN HASIL HUTAN KAYU/NON KAYU 23. SOP ttg SURAT KETERANGAN SAHNYA PENGELUARAN HASIL 24. SOP ttg IZIN PENDIRIAN RUMAH/KLINIK BERSALIN 25. SOP ttg IZIN PENDIRIAN BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK 26. SOP ttg IZIN PENDIRIAN BALAI PENGOBATAN 27. SOP ttg IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS 28. SOP ttg IZIN PENDIRIAN OPTIK 29. SOP ttg IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL 30. SOP ttg IZIN LABORATORIUM KESEHATAN SWASTA 31. SOP ttg IZIN PRAKTEK		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						ASISTEN APOTEKER 32. SOP ttg IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 33. SOP ttg IZIN PRAKTEK PERAWAT 34. SOP ttg IZIN PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN 35. SOP ttg IZIN PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK 36. SOP ttg TANDA DAFTAR GUDANG 37. SOP ttg IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 38. SOP ttg IZIN OPERASIONAL DEPOT AIR MINUM ISI ULANG 39. SOP ttg IZIN OPERASIONAL BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR (KAROSERI), USAHA TAMBAL BAN DAN CUCI MOTOR 40. SOP ttg IZIN OPERASIONAL BENGKEL KAYU 41. SOP ttg SUIP AGEN PERJALANAN WISATA 42. SOP ttg SIUP PRAMUWISATA 43. SOP ttg SIUP JASA KONVENSI INSENTIF DAN PAMERAN 44. SOP ttg SIUP JASA IMPRESARIAT 45. SOP ttg SIUP JASA		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						KONSULTAN PARIWISATA 46. SOP ttg SIUP JASA INFORMASI PARIWISATA 47. SOP ttg SIUP HOTEL BINTANG 48. SOP ttg SIUP HOTEL NON BINTANG 49. SOP ttg SIUP PEMONDOKAN BANGUNAN PERMANEN 50. SOP ttg SIUP PEMONDOKAN BANGUNAN SEMI PERMANEN 51. SOP ttg SIUP PONDOK WISATA 52. SOP ttg SIUP RUMAH MAKAN DAN RESTORAN 53. SOP ttg SIUP KAWASAN TAMAN REKREASI 54. SOP ttg SIUP OBYEK WISATA 55. SOP ttg SIUP FASILITAS TIRTA DAN REKREASI AIR 56. SOP ttg SIUP SARANA DAN FASILITAS OLAH RAGA 57. SOP ttg SIUP ANGKUTAN WISATA 58. SOP ttg SIUP REKREASI DAN HIBURAN UMUM 59. SOP ttg SIUP TATA RIAS 60. SOP ttg REKOMENDASI PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN 61. SOP ttg IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD 62. SOP ttg IZIN OPERASIONAL		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						PKBM DAN TBM 63. SOP ttg IZIN KURSUS 64. SOP ttg IZIN PENGGUNAAN TANAH LAPANG 65. SOP ttg IZIN USAHA PETERNAKAN (PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK) 66. SOP ttg IZIN OPERASIONAL PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENGOSONGAN BERAS 67. SOP ttg IZIN SAPRODI PERTANIAN, PERIKANAN DAN SAPRONAK PETERNAKAN 68. SOP ttg IZIN PEMBIBITAN TANAMAN 69. SOP ttg IJIN PRODUKSI PRODUK OLAHAN TERNAK 70. SOP ttg IZIN DISTRIBUTOR PRODUK OLAHAN TERNAK 71. SOP ttg IZIN USAHA DISTRIBUTOR/PENGECER PENGADAAN DAN PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI 72. SOP ttg IZIN GANGGUAN 73. SOP ttg IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 74. SOP ttg IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 75. SOP ttg IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						KEPENTINGAN BERSAMA 76. SOP ttg IZIN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH 77. SOP ttg IZIN PENDIRIAN KERAMBA APUNG 78. SOP ttg IZIN USAHA PERBENIHAN RAKYAT DAN BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR 79. SOP ttg IZIN USAHA MENAMBAK 80. SOP ttg IZIN USAHA RUMPUT LAUT 81. SOP ttg IZIN MENDIRIKAN TOWER (MENARA ANTENA) 82. SOP ttg IZIN MENDIRIKAN GUDANG DI DERMAGA 83. SOP ttg IZIN DERMAGA RAKYAT 84. SOP ttg IZIN PARKIR 85. SOP ttg IZIN USAHA TEMPAT PARKIR 86. SOP ttg IZIN USAHA WARNET DAN WARTEL 87. SOP ttg IZIN USAHA PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN 88. SOP ttg IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 89. SOP ttg IZIN USAHA 90. SOP ttg IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						MODAL 91. SOP ttg IZIN USAHA PERLUASAN 92. SOP ttg IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 93. SOP ttg IZIN USAHA PERUBAHAN 94. SOP ttg IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL 95. SOP ttg IZIN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN.		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 11 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 11 jbt	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,46 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	45,45 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 11 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD,	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					SKPD x 100%	sebanyak 7 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.652.561.579,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 913.432.793.116,47.,-	0,29%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 218.907.200- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.600.197.081,-	8,41 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 69.878.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 857.307.752,-	8,1 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 69.878.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.600.197.081-	2,69 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Jenis	Ada 7 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Belanja 5. Register Penutupan Kas 6. Register SP2D 7. RFK		
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruangan 3. Rekapitula si Buku Inventaris 4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 5. Daftar Inventarisasi Tetap 6. Berita Acara Barang Persediaan	Ada 6 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 96.025.000,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.022.404.105,-,-	9,39 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Leaflet 2. Banner 3. Ruang Pengaduan dan Informasi 4. Buku Profil	Ada 4 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Yakni : Survey Kepuasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan	Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN NARKOTIKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [17] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Penyuluhan Tingkat Pemuda 2. SOP ttg Penyuluhan Tingkat Remaja Siswa/i 3. SOP ttg Pembekalan Calon TKI/TKW	Ada 3 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7 jabatan	57,15 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 11 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,30 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 1 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 6 org.	16,,,7 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD, RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.503.560.122,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,16%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 60.368.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.443.910.121,-	4,18 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.94.500.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.540.221.200,	17,5 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.94.500.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.443.910.121,-	6,55 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. CALK 2. Neraca 3. LRA 4. Register SP2D 5. Register Penutup Kas	Ada 5 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Rekapitulasi Buku Inventaris; 2. RekapitulasiDaftar Mutasi Barang 3. Rekapitulasi Belanja; 4. Daftar Inventaris Tetap; 5. Berita Acara Barang Persediaan	Ada 5 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.68.666.500,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.686.587.000,-	10 %	.
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Baliho 2. Stiker 3. Siaran Radio	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAN HIDUP

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [18] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Pelayanan Izin Lingkungan 2. SOP ttg Pemantauan Kualitas Lingkungan 3. SOP ttg Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Ada 3 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	50,00 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 13 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 jbt	93,86 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363personil	0,45 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	38,54 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 13 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 14 orang	92,86 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.6.390.666.774,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47-	0,75 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 901.499.200,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.6.332.032.511-	14,24 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.175.902.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.805.680.000,-	6,27 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.175.902.500 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.6.332.032.511 ,-	2,78 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja 5. RFK 6. Laporan Data Aset	Ada 6 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Barang 3. Rekap Mutasi Barang	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.1.079.633.663,33,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.4.096.154.113,00,-	26,36%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					SKPD x 100 %			
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [19] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 13 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 jbt	92,85 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Yakni : 1. Kepala Pelaksana BPBD 2. Sekretaris Pelaksana BPBD	Ada 2 Jabatan	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,45 %	.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	23,07 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 13 orang	46,15 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.10.703.350.921- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	1,17 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 30.000.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.10.443.954.417,-	0,28 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar 282.908.400,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.8.530.012.717,-	3,31 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.282.908.400,-,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.443.954.417,-,-	2,70 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Laporan Mutasi Barang 2. Laporan KIB B 3. Laporan KIB D 4. Laporan Rekapitulasi Buku Inventaris 5. Laporan Rekapitulasi Barang 6. Laporan Persediaan Barang 7. Laporan Barang Pengguna Semester I dan II 8. Laporan Barang Pengguna Tahunan	Ada 8 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 5.744.337.500,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Struktur Organisasi 2. Peta Kab. Manggarai Timur	Ada 2 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [20] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33,33 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 3	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 11 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13 jbt	38,47 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 13 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,29 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	23,07 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 13 orang.	23,07 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. KUA - PPAS 2. RKA 3. DPA 4. RENJA 5. RKT 6. RENSTRA .	Ada 6 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.16.533.531.136,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	1,81 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 331.558.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.16.050.169.196,-	2, 06%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.201.088.500 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.9.206.958.831,-	2,18 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 201.088.500 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 16.050.169.196-	1,25 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB (Kartu Inventaris Barang) 2. Laporan Mutasi Barang 3. Laporan Penggunaan Barang semesteran 4. Laporan Penggunaan Barang Tahunan	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 6.186.005.967,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Bank Data DPRD	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [21] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : SOP ttg Satuan Polisi Pamong Praja	Ada 1 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 5 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,18 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	20 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 5 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.2.682.967.094,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,29 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 7.500.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.2.640.136.094,-	0,28%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.76.702.900,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.462.602.900,	16,58 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.76.702.900,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.640.136.094,-	2,90 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. Daftar Mutasi Barang 3. Buku Rekapitulasi Barang	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 188.268.132,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni: Pengumuman Keliling tentang Penertiban Ternak	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [22] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	33,33 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Manggarai Timur 2. SOP tentang Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kab. Manggarai Timur	Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 11 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,25 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	75 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 Orang	75 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 1.940.250.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,21%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 686.659.740,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.828.137.085,-	37,56 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.51.319.100,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.935.099.520,-	5,48 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 51.319.100,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.828.137.085,-	2,80 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. RFK 2. LRA 3. CALK 4. NERACA	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. KIB A, B, C dan E 3. LBS 4. LBPT	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.138.201.010,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.55.118.046.441.,-	0,25 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Pengumuman di Mass Media	Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [23] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Tindak Lanjut Surat Masuk Kategori Koordinasi; 2. SOP ttg Paskibraka.	Ada 2 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,16 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang.	50 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKT 4. PK 5. RKA 6. DPA	Ada 6 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.020.000.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,11 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 5.800..000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.010.042.378,-	0,57 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.53.491.300,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.902.542.378,-	5,93 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 53.491.300,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.010.042.378,-	5,30%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB A-F; 2. Buku Inventaris; 3. Rekapitulasi Buku Inventaris; 4. Daftar Inventaris Aset Tetap; 5. Daftar Pengadaan Barang Inventaris (Belanja Modal); 6. LBPS II; 7. LBPT; 8. Laporan Mutasi Barang; 9. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang; 10. Berita Acara Pemeriksaan	Ada 11 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Fisik Atas Barang Persediaan; 11. Berita Acara Serah Terima Barang 2015.		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.21.054.508,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.271.869.608,-	0,08 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [24] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : SOP ttg Pengesahan Keputusan Bupati	Ada 1 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	50 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 6 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,13 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKT 4. Pengukuran Kinerja 5. Penetapan Kinerja	Ada 5 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.046.220.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,11 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.43.372.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.028.531.900,-	4,21 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.77.000.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.828.059.900,-,	9,29 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.23.425.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 719.052.000,-	3,25 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA 4. Rekap. Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. KIB (Peralatan dan Mesin) 3. KIB B (Aset Tetap Lainnya) 4. Kartu Inventaris Barang 5. Rekapitulasi Buku Inventaris 6. Laporan Mutasi Barang 7. Daftar Persediaan Barang	Ada 7 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 61.461.500-,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.352.445.000,-	17,43 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [25] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,11 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	50,00 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - PeJabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENJA 2. RENSTRA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.032.400.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,11 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 10.600.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.759.517.511,-	1,39 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.77.496.910,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.538.852.511,-	14,38 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.77.496.910,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 759.517.511,-	10,20 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : KIB	Ada 1 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 79.735.521,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.2.246.732.500,-	3,54 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [26] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yaitu : SOP tentang RASKIN	Ada 1 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,09 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	25 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.880.000.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,09 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 12.500.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 879.318.957,-	1,42 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.84.368.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.617.168.957	13,67 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 84.368.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 879.318.957,-	9,59 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Kartu Inventaris Barang 2. Kartu Inventaris Ruangan 3. Buku Inventaris	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 24.366.400,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.590.417.200,-	4,12 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak ada	Tidak ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [27] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	66,66 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,16 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	0,63 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	50,00 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program	58,33 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.060.000.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,11 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 22.000.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.923.346.950,-	2,38 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.14.709.450,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.721.746.950,-	2,04 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.14.709.450,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 923.346.950,--	1,59 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. LRA 2. CALK 3. NERACA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB B 2. Buku Inventaris Barang 3. Rekapitulasi Barang 4. Laporan Mutasi Barang 5. KIR 6. LBPS 7. LBPT	Ada 7 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.53.858.150,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.238.443.350,-	22,58 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [28] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Program Nasional dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg kunjungan kerja Kepala/Wakil Kepala Daerah 2. SOP ttg penyediaan jasa iklan/ucapan selamat, undangan pada media cetak/elektronik	Ada 2 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 3 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3 jbt	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,11 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 3 org	66,6%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.697.725.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47	0,07%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.697.393.500,-	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 87.793.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.511.243.500	0,17 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 87.793.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 697.393.500,-	3,25 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Barang 2. KIB (peralatan dan mesin 3. KIB B 4. Kartu Inventaris Barang 5. Rekapitulasi Buku Inventaris 6. Laporan Mutasi Barang 7. Daftar Persediaan Barang	Ada 7	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0,-	%	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.857.307.600,-		
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Informasi 2. Pengumuman pada Media Massa 3. Buletin Warta Maritim	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BAGIAN UMUM-SETDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [29] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : SOP ttg Prosedur Pendistribusian Surat-surat Disposisi Bupati/Wakil Bupati	Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yg diisi sebanyak 11 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 11 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 15 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0.34 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	81,80 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 11 orang	81,80 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 12.159.336.927,00,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	1,33 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp 370.866.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.11.800.570.353,-	3,14 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.1.590.165.600 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.5.158.253.872,-	30,82 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.1.590.165.600,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.800.570.353,-	13,47%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yaitu : 1. Buku Inventaris 2. KIB	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 1.519.285.258,67 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.14.016.008.851,-	10,83%	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada/tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masy. terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN BORONG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [30] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 22 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25 jbt	75,00 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 43 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,98 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat Pim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.	0,32 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 22 orang.	0,64 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	83,33 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.607.465.084 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,39%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.200.710.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.322..642.828,-	6,04 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.99.783.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.505.014.500,-	19,75 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.99.783.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.322.642.828,-	3%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. RFK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB 2. Buku Inventaris 3. Laporan Mutasi Aset 4. Laporan Aset Hasil Penilaian/Koreksi 5. Rekapitulasi Mutasi Barang	Ada 5 jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.365.951.998,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.4.423.742.099,-	0,08 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Data	Ada 2 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN POCO RANAKA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [31] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 25 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25 jbt	100 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 54 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363personil	1,23 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	36 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 25 orang	36 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. DPA 2. RKA 3. RENSTRA 4. RENJA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.866.755.428,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,42 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.112.402.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.736.422.027,-	2,92 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 33.140.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.612.842.900	5,40 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.33.140.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.736.422.027,-	0,86 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Inventaris Aset Tetap 2. Daftar Mutasi Barang 3. Daftar Perolehan 2016	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.657.920.957,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Ada 2 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA KOMBA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [32] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 14 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25 jbt	56 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 43 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,98 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	92,85 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - PeJabat SKPD yang ada, sebanyak 14 orang	75 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RKA 2. RENJA 3. RENSTRA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.540.938.610,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47-	0,38 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.131.700.000- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.417.443.449,-	3,85 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.29.212.000- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.551.034.000	5,30 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.29.212.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.417.443.449,-	0,85%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. BIB 2. KIB 3. KIR	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.142.905.000,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 3.414.659.500,-	4,18 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarak	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN LAMBA LEDA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [33] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 8 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 jbt	80,00 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD, sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,57 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	50 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 10 orang.	80,00 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.2.035.924.355,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,22 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.20.570.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.998.810.583,-	1,02 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.57.031.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.356.004.700	16,01 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.57.031.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.998.810.583,-	2,85 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB A, B dan C 2. Buku Inventaris Barang	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.402.185.509,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Jumlah 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN ELAR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [34] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 8 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 15 jbt	53,33 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD sebanyak 29 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,66%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	25 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 8 orang	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. LKPJ	Ada 5 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.2.297.214.107,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,25 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.76.000.000- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 2.231.596.407,-	3,40 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.59.062.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.399.800.000,	14,77 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.062.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.231.596.407,-	2,64 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Rekapitulasi Mutasi Barang 2. Buku Inventaris Barang	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. 2.912.022.507,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Pengumuman Lisan 2. Pengumuman Tertulis	Ada 2 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN SAMBI RAMPAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [35] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 20 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 40 jbt	50 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 44 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 Personil	1,01 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	10 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 40 orang	0,39 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada 5 jenis, yg terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. RKT	Ada 5 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.580.794.770,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47-	0,39 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 256.570.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 3.436.720.433,-	7,46 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.966.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.610.400.000,-	9,82 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.966.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 3.436.720.433,-	174 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	yakni: 1. CALK 2. Neraca 3. LRA	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yaitu: 1. KIB 2. Daftar Mutasi Barang	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 35.300.000,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.795.717.190,-	1,96 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN RANA MESE
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [36] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 8 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 jbt	88 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,57 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	20 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 10 orang.	80 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.926.974.320,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,21 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.51.260.000- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.601.140.004,-	3.20 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.57.600.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.363.607.500	0 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.57.600.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.601.140.004,-	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Laporan Aset 2. Kartu Inventaris Barang	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.724.435.000,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [37] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Tata Naskah Dinas (proses surat masuk/keluar)	Ada 1 Jenis	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 5 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9 jbt	55 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,50%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	60 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 5 orang.	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.665.615.679 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47	0,18 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.51.820.000- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.633.469.036-	3.17 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.38.910.500- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.298.092.500	13,05 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.38.910.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp1.633.469.036,-	2,38 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. RFK	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Inventaris Aset Tetap 2. Daftar Mutasi Barang 3. Daftar Perolehan 2016	Ada 3 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.077.243.000,-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KECAMATAN ELAR SELATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERANGKAT DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [38] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang diisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang diisi sebanyak 7 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 15 jbt	46 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,43 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.	14,28 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 15 orang.	46 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENJA 2. RKA 3. DPA 4. RENSTRA	Ada 4 Jenis	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.636.430.284,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 913.432.793.116,47,-	0,17 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 70.070.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.535.527.081-	4,56 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 45.564.909- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. Rp.331.366.400-	13,75 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 17.671.500.- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.535.527.081,-	2,96 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Pengadaan Barang 2. Daftar Persediaan Barang 3. Laporan Barang Pengguna tahunan 4. Laporan Barang Pengguna Semester II	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.1.006.582.100-	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi di SKPD.	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Nama Kantor	Ada 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Koperasi dan UKM**
2. **Urusan Industri**
3. **Urusan Perdagangan**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.	80 %	100 %	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Penerbitan Badan Hukum Koperasi 2. SOP ttg Pelatihan Kewirausahaan 3. SOP tentang Bantuan Peralatan Industri 4. SOP tentang	Tidak Ada	Yakni : SOP ttg Sosialisasi Perlindungan konsumen dan PERDA	Ada 5 SOP	Tidak Ada	Ada 1	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman beralkohol 5. SOP ttg Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen						
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4	0 %	100 %	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 12 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 7 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt	100 %	100 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD sebanyak 19 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD sebanyak 5 personil	- PNS yang menangani urusan (3) SKPD sebanyak 10 personil	0,44%	0,11 %	0,,23	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		terkait				- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil				
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada sebanyak 4 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada sebanyak 7 org.	46,15 %	50 %	57,14 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 12 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 0 org. - Pejabata SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 7 orang	33,33 %	0 %	28,57 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	100 %	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar RP.4.802.817.365, - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793 .116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.2.090.463.000, - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793 116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.4.587.459.900 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793 116,47,-	0,52 %	0,22 %	0,50 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.336.975.500 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.843.567.665	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.192.259.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.2.074.207.000,	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.3.603.014.800, - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.444.801.700,-	8,76 %	57,48 %	81,10 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.135,274.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.767.548.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.859.300.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.704.185.000,-	4,74 %	0 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 135.274.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.792.192.400,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 2.074.207.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.442.801.700,-	4,48 %	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Yakni : 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yaitu : 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang Semesteran 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 4. Kartu Inventaris Barang	Yaitu : 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang Semesteran 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 4. Kartu Inventaris Barang	Yaitu : 1. Laporan Barang Tahunan 2. Laporan Barang Semesteran 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 4. Kartu Inventaris Barang	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 58.616.204-- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp23.423.559.580.-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	2,50%	0%	0%	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	yakni : Papan Pengumuman	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	Urusan (1) Koperasi dan UKM	Urusan (2) Industri	Urusan (3) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidakl Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : **MANGGARAI TIMUR**
NAMA SKPD : **DINAS SOSIAL NAKERTRANS**
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Sosial**
2. **Urusan Ketenagakerjaan**
3. **Urusan Transmigrasi**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	40 %	66,66 %	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Pengangkutan Beras 2. SOP ttg Pengeluaran Beras Cadangan Rawan Pangan	Yakni : 1. SOP ttg Kartu Pencari Kerja 2. SOP ttg Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial 3. SOP ttg Pelayanan Calon TKI 4. SOP ttg Pelayanan Lembaga Pelaksanaan TKI	Tidak Ada	Ada 2 SOP	Ada 4 SOP	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang ada, sebanyak 17	- Jabatan yang terisi sebanyak 6 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 3	94 %	75 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (3) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,43 %	0,16%	0.09 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 16 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	68,75 %	50 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 16 org	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 6 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 6 org.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 3 org	100 %	100 %	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD,sebanyak 3 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD,sebanyak 6 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 1 - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	50 %	100 %	50 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 program.	50 %	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.4.245.998.521,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793. 116,47	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.720.951.175,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793. .116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.46.885.975,- - Total Belanja APBD,sebesar Rp.913.432.793. 116,47	0,46 %	0,08 %	0,05 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.87.644.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.4.093.433.231,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.691.892.175,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.46.885.975-	2,14 %	0 %	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.48.875.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.1.535.298.437-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0.,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.682.642.175-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.46.885.975,-	3,14 %	0 %	0%	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 48.875.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.4.093.433.231,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.691.892.175,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.46.885.975,-	1,19 %	0 %	0 %`	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. CALK 2. NERACA 3. LRA 4. Laporan Fungsional 5. RFK	Yakni: 1.CALK 2.NERACA 3.LRA 4.Laporan Fungsional 5.RFK	Yakni: 1. CALK 2. NERACA 3. LRA 4. Laporan Fungsional 5. RFK	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	Urusan (1) Sosial	Urusan (2) Ketenagakerjaan	Urusan (3) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : Buku Inventaris	Yakni : Buku Inventaris	Yakni : Buku Inventaris	Ada 1 Jenis	Ada 1 jenis	Ada 1 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.68.941.600,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.2.068.436.200,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.388.340.000,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.327.450.000,-	3,33 %	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informas	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : Papan Pengumuman	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Kebudayaan**
2. **Urusan Pariwisata**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.	- Jumlah program Nasional (RKP), yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 program - Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 3 program	75,00 %	66,67 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Pagelaran Budaya 2. SOP ttg Surat Masuk 3. SOP ttg Surat Keluar 4. SOP ttg Rapat Staf	yakni : 1. SOP ttg Surat Izin Usaha Pariwisata 2. SOP ttg Penanganan Karcis/Tiket MAsuk Obyek Wisata	Ada 4 SOP	Ada 2 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	0 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 12 - Jabatan yang ada, sebanyak 12	- Jabatan yang terisi sebanyak 7 - Jabatan yang ada, sebanyak 7	100 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,5 %	0,3 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 7 org.	25,00 %	0 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 12 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 7 orang	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	75 %	66,66%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.3.258.320.091,-,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.727.978.850,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 913.432.793.116,47,-	0,35 %	0,07 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.191.600.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.3.196.888.919,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.1.442.414.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.2.330.503.600,-,-	5,99 %	61,89 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.68.740.500,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.976.105.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.452.709.600,-	7,04 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 68.740.500,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.3.196.888.919,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp.2.330.503.600,-	2,15 %	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Yakni: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	Urusan (1) Kebudayaan	Urusan (2) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni: Inventaris Barang SKPD	Yakniakni : Inventaris Barang SKPD	Ada 1 Jenis	Ada 1 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.46.506.600,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.8.057.420.049,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.147.292.026,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.8.057.420.049,-	0,01 %	0,02 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Buku Data Base Kebudayaan 2. Papan Pengumuman 3. Buku Tata Upacara Adat	Yakni : 1. Buku Pesona Pariwisata Manggarai Timur 2. Website Pariwisata 3. Majalah Paradiso	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Pekerjaan Umum**
2. **Urusan Perumahan**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program	50,00 %	33,33 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni: SOP ttg Pekerjaan Fisik	Yakni : SOP ttg Pekerjaan Fisik	Ada 1 SOP	Ada 1 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	0 %	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 15 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	88,24%	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Pekerjaan Umum , sebanyak 44 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan Perumahan , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	1,01 %	0,18 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 15 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	0 %	0 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 15 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang.	46,67 %	50 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. DPAP	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. DPAP	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 15 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 15 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,sebanyak 15 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 15 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.154.116.320,158,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.299.100.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	16,87 %	0,03 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.139.775.627.550,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.150.412.334.492,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.200.569.500,-	93 %	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.495.864.600,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.226.509.867,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.200.569.500,-	1,731 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.495.864.600,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.150.412.334.492,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 200.569.500-	0,32 %	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Yakni: 1. NERACA 2. CALK 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Perumahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB A, B,C dan D 2. Buku Inventaris Jalan 3. Buku Inventaris Bangunan Air 4. Buku Inventaris Bangunan dan Gedung 5. Buku Inventaris Instalasi Jaringan	Yakni : 1. KIB A, B,C dan D 2. Buku Inventaris Jalan 3. Buku Inventaris Bangunan Air 4. Buku Inventaris Bangunan dan Gedung 5. Buku Inventaris Instalasi Jaringan	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.204.206.294,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.648.935.736.263,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	0,03 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media	Ada 2 jenis	Ada 2 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : **MANGGARAI TIMUR**
NAMA SKPD : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Pendidikan**
2. **Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.	100 %	50,00 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni : 1. SOP ttg Pengendalian Konflik Internal Sekolah; 2. SOP ttg usulan kenaikan pangkat Gol. II dan IV 3. SOP Perekrutan dan Pengangkatan Guru Komite sebagai penerima dana Insentif/Bosda tahun Anggaran 2016 4. SOP Pelayanan Bos SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015 5. SOP Pembayaran Dana Insentif/ Bosda Guru	Tidak Ada	Ada 8 SOP	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Komite T>A> 2013 Kab. Manggarai Timur 6. SOP Pendataan Peserta UN SD?MI,SMP/MTs dan SMA /SMK/MA 7. SOP Membuat Surat Tugas dan SPPD dalam Daerah 8. SOP Sertifikasi Guru				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	80,95 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada 1, yakni : Pengawas Sekolah	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 2.538 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	58 %	0,09 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		terkait	7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	0 %	0 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 21 orang	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 4 orang	80,95 %	75.00 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. RKT 5. TAPKIN	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. RKT 5. TAPKIN	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 10 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4	100 %	75,00 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 Prog. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.273.876.839.309,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.806.240.805,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	29,98 %	0,08 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.13.803.240.352,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.246.187.021.242,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.1.760.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.317.055.795,-	5,61%	0,56 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.84.849.895,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.854.085.409,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.283.845.795,-	1,74 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 84.849.895,-- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.246.187.021.242-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 317.055.795,-	0,03 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	Urusan (1) Pendidikan	Urusan (2) Kepemudaan dan Olahraga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. RFK 2. LRA 3. CALK 4. Neraca 5. LKPD	Yakni: 1. RFK 2. LRA 3. CALK 4. Neraca 5. LKPD	Ada 5 Jenis	Ada 5 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Buku Inventaris Hasil Sensus Aset dan Pengadaan T.A 2015	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.192.805.708,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.216.122.709.343,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.216.122.709.343,-	0,08 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media (Radiogram) 3. Leaflet	Jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media (Radiogram) 3. Leaflet	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
2. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.	100 %	75,00 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni: 1. SOP ttg Adm.Perkantoran 2. SOP ttg Administrasi Kepegawaian 3. SOP ttg Pemasangan Implan 4. SOP tentang Pencabutan Implan 5. SOP tentang Pemasangan IUD 6. SOP tentang Suntik KB 7. SOP ttg Pemutaran Film KB/KDRT	Yakni: 1. SOP ttg Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan 2. SOP ttg Penanganan Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Ada 7 SOP	Ada 2 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya,sebanyak 0	0 %	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 11	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 3	100%	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Yakni : Penyuluh KB	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 40 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,89 %	0,09 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	36,36 %	33,33 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 11 orang.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat SKPD yang ada, sebanyak 3 orang	100 %	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni : 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 7 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	58,33 %	75 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 7 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 7 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.8.524.774.469,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.337.828.900,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,93%	0,03 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.644.186.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.8.300.223.059	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.306.027.650-	7,76 %	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.253.144.025,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.2.123.129.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 0- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.283.427.650,-	11,92 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 253.144.025,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.300.223.059	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.306.027.650-	3,04 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Urusan (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Urusan (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Yakni: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. KIB B 2. KIB C	Yakni : 1. KIB B 2. KIB C	Ada 2 Jenis	Ada 2 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.6.646.703.730,-	- Nilai asset yang tidak digunakan,sebanyak Rp.0,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.13.661.800-	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Siaran Radio 2. Kalender 3. Baliho 4. Pemutaran Film 5. Mobil Keliling	Jenisnya : 1. Siaran Radio 2. Kalender 3. Baliho 4. Pemutaran Film	Ada 5 Jenis	Ada 4 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Tata Ruang**
2. **Urusan Perencanaan Pembangunan**
3. **Urusan Statistik**
4. **Urusan Perumahan**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. -	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.	100 %	0 %	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 2	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 0	100 %	100 %	0 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 10 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt	0,66 %	0,90 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.355 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 14 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (3) SKPD , sebanyak 4 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,91 %	0,32 %	0,69 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, 2 Orang - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org.	100 %	00 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org	100 %	100 %	100 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. KUA 6. RPJMD 7. RKPD	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. KUA 6. RPJMD 7. RKPD	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. KUA 6. RPJMD 7. RKPD	Ada 7 Jenis	Ada 7 Jenis	Ada 7 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	100 %	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 9 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 1.012.650.000- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793. 116,47,-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.4.817.360.107,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793. 116,47	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.451.812.050, - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432. 793.116,47	0,11 %	0,52 %	0,04 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.816.683.200,	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 79.400.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.507.584.987	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 438.734.307,-	0 %	0,17 %	0 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.0,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.726.583.200-,	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 115.000.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.295.215.617-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 425.934.307,-	0 %	0,50 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 816.683.200,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 115.000.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.507.584.987-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 438.734.307,-	0 %	0,02 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. LRA 2. CALK 3. NERACA	Yakni: 1. LRA 2. CALK 3. NERACA	Yakni : 1. LRA 2. CALK 3. NERACA	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	Ada 3 jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Jenisnya : 1. Daftar Inventaris Aset Tetap 2. Rekapitulasi Daftar Mutasi Aset 3. Rekapitulasi Buku Inventaris 4. Berita acara Pemerksaan Fisik Barang Persediaan akhir Tahun 5. Laporan Barang Semesteran 6. SK. Pengguna Kendaraan 7. KIB 8. Buku Inventaris Barang 9. Rekapitulasi Buku Inventaris	Jenisnya : 1. Daftar Inventaris Aset Tetap 2. Rekapitulasi Daftar Mutasi Aset 3. Rekapitulasi Buku Inventaris 4. Berita acara Pemerksaan Fisik Barang Persediaan akhir Tahun 5. Laporan Barang Semesteran 6. SK. Pengguna Kendaraan 7. KIB 8. Buku Inventaris Barang 9. Rekapitulasi Buku Inventaris	Jenisnya : 1. Daftar Inventaris Aset Tetap 2. Rekapitulasi Daftar Mutasi Aset 3. Rekapitulasi Buku Inventaris 4. Berita acara Pemerksaan Fisik Barang Persediaan akhir Tahun 5. Laporan Barang Semesteran 6. SK. Pengguna Kendaraan 7. KIB 8. Buku Inventaris Barang 9. Rekapitulasi Buku Inventaris	Ada 9 Jenis	Ada 9 Jenis	Ada 9 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET.
						Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	Urusan (1) Tata Ruang	Urusan (2) Perencanaan Pembangunan	Urusan (3) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.0,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 242.481.880,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.1.570.371.100,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	0 %	0,16 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Struktur Organisasi 3. Kotak saran	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Struktur Organisasi 3. Kotak saran	Yakni : 1. Papan Pengumuman 2. Papan Struktur Organisasi 3. Kotak saran	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR
NAMA SKPD : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Perpustakaan**
2. **Urusan Kearsipan**

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program.	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.	50,00 %	0 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Yakni: 1. SOP ttg Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan 2. SOP ttg Penyusunan KUA-PPAS 3. SOP ttg Uang Persediaan	yakni : 1. SOP ttg KUA PPAS 2. SOP ttg Uang Persediaan	Ada 3 SOP	Ada 2 SOP	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 jbt - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt	100 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 1 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.363 personil	0,20 %	0,02 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	100 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 jbt.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Yakni: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2	100 %	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	- Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.1.420.213.571,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47-	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.94.991.000,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.913.432.793.116,47,-	0,15 %	0,01 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.1.396.660.107,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 94.966.000,-	0 %	0%	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.64.645.200,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.321.558.400,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.82.366.000-	20,10 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.64.645.200,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.1.396.660.107,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 94.966.000,-	3,22 %	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Yakni : 1. CALK 2. Neraca 3. LRA	Yakni: 1. CALK 2. Neraca 3. LRA	Ada 3 Jenis	Ada 3 Jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Yakni : 1. Daftar Pengadaan 2. Inventaris Aset Tetap 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 4. Rekapitulasi Buku Inventaris 5. KIB B, C dan E 6. LBPS dan LBPT 7. Daftar Persediaan	Yakni : 1. Daftar Pengadaan 2. Inventaris Aset Tetap 3. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang 4. Rekapitulasi Buku Inventaris 5. KIB B, C dan E 6. LBPS dan LBPT 7. Daftar Persediaan	Ada 7 Jenis	Ada 7 Jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 %	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.26.542.708,- - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.1.288.628.899,-	- Nilai asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Nilai asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	2,05 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Yakni : 1. Mobil Keliling	Tidak Ada	Ada 1 Jenis	Tidak Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : MANGGARAI TIMUR

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
URUSAN WAJIB						
1	**Pendidikan**	**1**	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = 7.119 ---------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun = 13.962	7.119 ——— x 100 = 50,98 % 13.962	
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis = 211.317 ---------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 th ke atas = 212.734	211.317 ——— x 100 = 99,33 % 212.734	
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A = 44.180 ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn = 45.500	44.180 ——— x 100 = 97,10 % 45.500	
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B = 17.658 ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn = 21.200	17.658 ——— x 100 = 83,29% 21.200	
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C=11.572 ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn = 19.984	11.572 ——— x 100 = 57,90 % 19.984	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI = 115 ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya = 45.466	115 ——— x 100 = 0,25 % 45.466	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs = 51 ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs = 20.256	51 ——— x 100 = 0,25 % 20.256	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA = 55 ---------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya = 12.494	55 ——— x 100 = 0,44 % 12.494	
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI = 7.581 ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya = 7.581	7.581 ——— x 100 = 100 % 7.581	
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs = 6.320 ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya = 6.320	6.320 ——— x 100 = 100% 6.320	
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA = 2.944 ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya =3.250	2.944 ——— x 100 = 90,58 % 3.250	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs = 6.878 ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya = 7.528	6.878 ——— x 100 = 91,49 % 7.528	
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA = 5.570 ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs thn ajaran sebelumnya = 5.579	5.570 ——— x 100 = 99,84 % 5.579	
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV = 4.233 ---------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA = 5.755	4.233 ——— x 100 = 71,50 % 5.920	
2	**Kesehatan**	**15**	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu = 399 ---------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama = 743	399 ——— x 100 = 53.70 % 743	
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu = 4.714 ---------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama = 5.442	4.714 ——— x 100 = 86,62 % 5.442	
		17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI = 128 ---------- x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan = 176	128 ——— x 100 = 72 % 176	
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu = 80 ---------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama = 80	80 ——— x 100 = 100 % 80	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn = 90 ---------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama = 605	90 —— x 100 = 14,87 % 605	
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn = 26 ---------- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama = 26	26 — x 100 = 100 % 26	
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 = 454 ---------- x 100 % Jumlah seluruh miskin di Kab/Kota = 161.878	454 ——— x 100 = 0,26 % 161.878	
		22	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu = 22.103 ---------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama = 28.531	22.103 ——— x 100 = 77,47 % 28.531	
3	**Lingkungan Hidup**	**23**	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3) = 1.741.050 m3 ---------- x 100 % Volume produksi sampah (m3) = 1.741.050. m3	1.741.050 m3 ——— x100 =100 % 1.741.050 m3	
		24	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik = 16 ---------- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional = 21	16 — x 100 = 76,19 % 21	
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) = 3.098 m3 ---------- x 100% Jumlah penduduk = 293.031 jiwa	3.098 m3 ——— x 100 = 1,05 % 293.031 jiwa	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		26	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda = 0 ---------- x100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada = 0	0 — x 100 = 0 % 0	
4	**Pekerjaan Umum**	**27**	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik = 871.84 ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut = 1.281,29	871.84 ——— x 100 = 68,04 % 1.281,29	
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik = 10.920,59 ---------- x 100 % Luas irigasi kabupaten = 15.715	10.920,95 ——— x 100 = 69,49 % 15.715	
		29	Rumah Tangga Per Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi = 45.985 ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga = 56.247	45.985 ——— x 100 = 81,76 % 56.247	
		30	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh = 0 ---------- x 100 % Luas Wilayah = 2.642,93	0 ——— x 100 = 0 % 2.642,93	Belum Ada Perda
5	**Tata Ruang**	**31**	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau = 353 (Ha) ---------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB = 819 (Ha)	353 (Ha) —— x 100 = 43,10 % 819 (Ha)	
6	**Perencanaan Pembangunan**	**32 Ss**	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kab. Manggarai Timur Tahun 2009 – 2029

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada /Tidak Ada	Ada	PERDA Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019.
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Perbup Nomor: 9 Tahun 2015 tentang RKPD Tahun 2016
		35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan = 202 ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan = 202	202 —— x 100 = 100 % 202	
7	**Perumahan**	**36**	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih = 32.024 ---------- --------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga = 56.247	32.024 ——— x 100 = 56,75 % 56.247	
		37	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh = 0 ---------- x 100 % Luas wilayah = 2.642,93	0 ——— x 100 = 0 % 2.642,93	Belum ada Perda
		38	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni = 41.698 Unit ---------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs = 56.247 unit	41.698 Unit ——— x 100 = 74,12% 56.247 Unit	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	**Kepemudaan & Olahraga**	**39**	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten = 0 ---------- x 100% Jumlah penduduk = 293.031 jiwa	0 ——— x 100 = 0 % 293.031 jiwa	
		40	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten = 615 Lap. ---------- x 100 Jumlah penduduk = 293.031 Jiwa Lapangan olah raga adalah : 1. Lap sepakbola = 71 lap 2. Lap basket = 9 lap 3. Lap volley = 506 lap 4. Lap. bulu tangkis = 28 lap 5. Lap. Futsal = 1 lap 6. Kolam Renang = 0 lap Jumlah = 615 lap.	615 Lap. ——— x 100 = 0,21 % 293.031 Jiwa	
9	**Penanaman Modal**	**41**	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2016 – Realisasi PMDN 2015 = 43.649.545.345 – 32.766.545.345 ---------- x 100 % Realisasi PMDN 2015 = 32.766.545.345	43.649.545.345 ——— x 100 = 33,21 % 32.766.545.345	
10	**Koperasi & UKM**	**42**	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif = 231 ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi = 349	231 —— x 100 = 66,19% 349	
		43	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil = 1.467 ---------- x 100 % Jumlah seluruh UKM = 1.404	1.467 —— x 100 = 104% 1.404	
11	**Kependudukan & Catatan Sipil**	**44**	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP = 129.151 ---------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) = 162.618	129.151 ——— x 100 = 79,42 % 162.618	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran = 82.388 ----------x 100% Jumah penduduk = 293.031	82.388 ——— x 100 = 27,45% 293.031	
		46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Penerapan Sejak Tahun 2011
12	**Ketenagakerjaan**	**47**	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif=750 ---------- x 100% Jumlah pekerja/buruh = 750	750 —— x 100 = 100 % 750	
		48	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 646 ---------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar = 719	646 ——— x 100 = 90 % 719	
13	**Ketahanan Pangan**	**49**	Regulasi ketahanan pangan	Ada`/Tidak Ada	Ada	Perda No.1 thn 2016 ttg pengawasan keamanan pangan segar dan olahan asal tumbuhan, ternak dan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
						ikan. tanggal 13 Mei 2016
		50	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) = 433.390 ---------- x 100% Jumlah penduduk = 288.289	433.390 KG ———— x 100 = 150% 288.289 JIWA	
14	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**51**	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah = 2.728 ---------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan = 53.262	2.728 ——— x 100 = 5,12% 53.262	
		52	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf = 78.354 ---------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun = 87.167	78.354 ——— x 100 = 89,88% 87.167	
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan = 53.997 ---------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan = 87.167	53.997 ——— x 100 = 61,95 % 87.167	
15	**KB & KS**	**54**	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif = 34.885 ---------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur = 43.204	34.885 ——— x 100 = 80.74 % 43.204	
		55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	PLKB/PKB = 162 ---------- x 100 % Jumlah desa/kelurahan = 176	162 ——— x 100 = 92,04% 176	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
16	**Perhubungan**	**56**	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat = 346 ---------- x 100 % Jumlah penumpang angkutan darat = 22.735	346 ——— x 100 = 1,52 % 22.735	
17	**Komunikasi & Informatika**	**57**	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	www.manggaraitimurkab.go.id
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	1 Kali	
18	**Pertanahan**	**59**	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah = 1.336.832 M^2 ---------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah = 19.077.641 M^2	1.336.832M^2 ——— x 100 = 4,80 % 19.077.641 M^2	
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan = 7 ---------- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar = 8	7 — x 100 = 87,5 % 8	
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi =506 ---------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi = 506	506 —— x 100 = 100 % 506	
19	**Kesbang & Politik**	**62**	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Kegiatan	
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Kegiatan	
20	**Otonomi Daerah**	**64**	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	1 buah	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Tidak Ada	
21	**Pemberdayaan Masyarakat & Desa**	**66**	PKK aktif	Jumlah PKK aktif = 186 ---------- x 100 % Jumlah PKK = 186	186 ——— x 100 = 100 % 186	
		67	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif = 559 ---------- x 100 % Total Posyandu = 559	559 ——— x 100 = 100 % 559	
22	**Sosial**	**68**	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah 0 buah	0 buah	
		69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun = 290 ---------- x100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun = 3.047	290 ——— x 100 = 32,14% 3.047	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 173.252 ---------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan = 258.623	173.252 ——— x 100 = 67 % 258.623	
23	**Budaya**	**71**	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	Festival Budaya Se-daratan Flores dan Lembata (FLORATA)
		72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 Unit	Panggung Atraksi Pantai Cepi Watu
		73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg Dilestarikan = 2 ---------- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah = 101	2 —— x 100 = 2% 101	
24	**Statistik**	**74**	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak dianggarkan lagi karena menjadi tupoksi BPS
		75	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak dianggarkan lagi karena menjadi tupoksi BPS

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
25	**Kearsipan**	**76**	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku = 0 ---------- x 100 % Jumlah SKPD = 46	0 —— x 100 = 0 % 46	
		77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 Kegiatan	
26	**Perpustakaan**	**78**	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah=5.244 ---------- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah = 10.251 Eksemplar	5.244 ——— x 100 = 51,15 % 10.251	
		79	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun = 20.055 ---------- x 100 % Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani = 214.763	20.055 ———— x 100 = 9,34 % 214.763	
URUSAN PILIHAN.						
1	**Kelautan dan Perikanan**	**1**	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan : 4.250,05 Ton ---------- x 100% Target Daerah (Ton) : 3.010,40 Ton	4.250,05 ———— x 100 = 141,18 % 3.010,40	
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan : 18,34 Kg ----------x 100% Target Daerah : 13 Kg	18,34 Kg ——— x 100 = 141,08 % 13 kg	
2	**Pertanian**	**3**	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainy 83.745 (ton) ---------- x 100% Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya 22.096 (ha)	81.905 ton Padi = ———— x 100 % = 379 % Sawah 20.701 ha Padi	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
					Lahan Kering 1.840 ton / 1.395 ha ----------x100%=131,89% Jagung = 10.112,16 / 3.442 ha x100 % = 293,79% U.Kayu = 6.577,53 ton / 1.277 ha x100 % = 515,07 % U. Jalar = 2.757, 30 ton / 557 ha x 100 % = 495,02 % K. Tanah = 10,80 ton / 12 ha x100% = 90 % K. Hijau= 127,10 ton / 158 ha x100 % = 80,44 % K. Kedelai = 43,80 ton / 73 ha x100 % =60 %	
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian = 1.033.327,3 ---------- x 100%	1.033.327,3 ———— x 100 = 48,41 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
				Jumlah total PDRB = 2.134.618,7	2.134.618,7	
3	**Kehutanan**	**5**	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi = 381,92 Ha ---------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis = 20.500,27 Ha	381,92 Ha ———————— x 100 = 1,86 % 20.500,27 Ha	
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan = 237,10 Ha ---------- x 100% Luas Kawasan Hutan = 90.020,19 Ha	237,10 Ha ———————— x 100 = 0,26 % 90.020,19 Ha	
4	**Energi dan SDM**	**7**	Pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan : 8 Ha ---------- x 100% Luas area penambangan yang liar : 30 Ha	8 Ha ——— x 100 = 26,67 % 30 Ha	
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan = 91.268,9 ---------- x 100% Jumlah total PDRB = 1.665.469,7	91.268,9 ———————— x 100 = 5,48 % 1.665.469,7	
5	**Pariwisata**	**9**	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	12.839 orang	
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata = 1.694 ---------- x 100% Jumlah total PDRB = 1.665.469	1.694 ———————— x 100 = 0,1 % 1.665.469	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	**Industri**	**11**	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri = 200.000.000 juta ---------- x 100% Jumlah total PDRB = 1.445.893.830 juta	200.000.000,- ———————— x 100 =13,83% 1.445.893.830 juta	
		12	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2016-Jumlah Industri tahun 2015=(206-77=129) ---------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2012 = 780	129 ——— x 100 = 16,54% 780	
7	**Perdagangan**	**13**	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan = 18.252.368,20 ---------- x 100% Jumlah total PDRB = 1.143.784,73 Juta	18.252.368,20 ———————— x 100 = 1,59% 1.143.784,73	
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor=197.219,44,- 278.284,13,-	US$	
8	**Transmigrasi**	**15**	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa = 100 ---------- x 100% Jumlah transmigran = 100	100 ——— x 100 = 100 % 100	